

TEORI HUKUM PROGRESIF 4.0



Hukum dan Teknologi Digital Zaman Now

DR. AWALUDIN MARWAN



Heylaw

“Apresiasi atas terbitnya buku yang dapat memberikan pencerahan bagi pembaca terutama generasi pemikir hukum untuk peradaban negara hukum Indonesia menuju masa depan. Menurut Saudara Awaludin, buku ini terinspirasi dari buku saya tentang *Green and Blue Constitution*. Ia menulis hukum dan teknologi, sebagai aspek teknikal dan penjabaran teknis dari pemikiran saya. Saya rasa, ia cukup berhasil dalam buku ini yang dirakitnya dari pemikiran hukum progresif. SELAMAT membaca,”

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.

(Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008)

“Berbagai macam teknologi digital pada masa pandemic semakin tumbuh kembang. Kemajuan inovasi dan teknologi seperti kecerdasan artifisial, *metaverse*, *blockchain*, *Internet of Things*, *quantum computing* dan masih banyak lagi perlu dipersiapkan kebijakan dan pedoman etika yang memadai. Buku ini bisa menjadi alternatif berkontemplasi soal masa depan pengaturan di bidang teknologi digital ini,”

Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D.

(Menteri Keuangan (2014-2016), Kepala Bappenas (2016-2019), dan Menteri Ristek (2019-2021))

“Inovasi tiada henti. Peranti hukum yang memadai dibutuhkan untuk melengkapi ekosistem inovasi, teknologi dan bisnis. Sebab kebijakan yang terlalu ketat akan menumpulkan inovasi, sebaliknya terlalu longgar juga ada problem perlindungan konsumen dan masyarakat yang perlu diperhatikan. Memoderasi kepentingan inovasi dan bisnis di satu sisi lain serta menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen tidaklah mudah. Buku ini menyajikan cakrawala yang menarik berkaitan dengan hal ini,”

Dr. Ir. Hammam Riza, M.Sc, IPU.

(Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (2019-2021)/ Ketua Umum Korika)

“Digitalisasi merupakan suatu hal yang *inevitable*. Maka, sebagai praktisi hukum yang handal, kita wajib untuk memahami kemajuan teknologi serta permasalahan hukum yang teridentifikasi dalam penggunaan teknologi. Buku Teori Hukum Progresif 4.0 dapat menjadi jembatan bagi praktisi hukum yang

tertarik untuk mulai memahami permasalahan-permasalahan tersebut dan nantinya turut berpartisipasi dalam diskursus hukum teknologi,”

Ardhanti Nurwidya, S.H.LL.M (Adv)

(Praktisi Hukum dan Vice President Public Policy and Government Relations, GoTo Group)

“Buku yang sangat bermanfaat karena memberikan wawasan dan tambahan referensi tentang landasan teori pada era industri 4.0 yang dirasakan sangat kurang di Indonesia. Pendekatan hukum progresif menjadi salah satu alternatif teoritis dalam menjawab tantangan hukum pada era digitalisasi,”

Dr. Sinta Dewi Rosadi, SH, MH

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)

“Hukum progresif mampu menghadapi kemajuan teknologi. Hukum juga terus berproses tiada henti. Era 4.0 menjadi penting dibahas karena digitalisasi masuk seluruh ranah kehidupan dan membutuhkan kreativitas hukum di sana. Tulisan ini, Saudara Awaludin sudah mengantisipasi permasalahan yang akan terjadi. Melalui kajian pada hukum progresif yang berjalan sesuai nilai kemanusiaan dan Ketuhanan, teknologi bisa berkembang secara arif untuk kemaslahatan,”

Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S.

(Guru Besar Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

“Semua ranah kehidupan sedang melakukan bersinggungan dengan transformasi digital. Utamanya pada saat pandemi berlangsung seperti saat ini. Kajian hukum tata negara, misalnya, bergulat pula dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-government*), pemilu elektronik (*e-voting*), kajian konstitusi di dunia kedua metaverse dan masih banyak lagi. Buku ini menjadi salah satu referensi menarik untuk memahami seluk beluk dan dinamika hukum di era teknologi,”

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (2011-2014) dan Senior Partner INTEGRITY Law Firm.

“Sebuah tafsir transgresif tentang DNA hukum progresif, yaitu interpretasi yang melampaui makna asal. Pembaca diajak masuk kepada dunia digital, dengan otak dan mesin analisisnya adalah hukum progresif. Melalui gaya bahasa kekinian namun tetap tidak menghilangkan aspek ilmiahnya, Awaludin Marwan berhasil menampilkan the Matrix dari Hukum Progresif. Selamat membaca,”

Dr. Anthon F. Susanto

(Dekan Fakultas Hukum UNPAS)

“Siklus kehidupan mengukuhkan keabadian perubahan dan ketika “*metaverse* sosial” terdisrupsi akibat konvergensi perilaku dan otomasi algoritma maka transformasi hukum menjadi kemutlakan agar tercapai ketertiban dan hanya hukum bernarasi progresif yang bisa menjadi referensi itu sebabnya karya Awaludin Marwan ini menjadi penting untuk memandu kita dalam proses transformasi agar manusia tetap menjadi aktor dalam keabadian,”

Prof. Dr. Judhariksawan, SH, MH.

(Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)

“Teori Hukum Progresif yang diperkenalkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo bukanlah hal yang baru dalam diskursus hukum di berbagai yurisdiksi. Prof. Upendra Baxi, Guru Besar Hukum di *University of Warwick* dan *University of California* yang merupakan sahabat Hans Kelsen misalnya, sejak dini sudah memperkenalkan teori *Law in Development* dan bukan *Law and Development*. Hukum ditempatkan sebagai “*place of discussion*” dan “*place of disagreement*” yang futuristik dan fleksibel. Teori Hukum Progresif Prof Tjip agak samar-samar meredup padahal sangat penting! Sebab itu hadirnya buku Teori Progresif 4.0. karya Mas Luluk sangat menarik dan wajib dibaca oleh siapapun karena membangkitkan gairah intelektual para pendamba keadilan. Mas Luluk yang dengan konsisten terus berkarya, niscaya akan semakin diperhitungkan sebagai seorang intelektual yang aktif dan kritis,”

TM. Luthfi Yazid

(Advokat, Peneliti dan *Visiting Professor* di University of Gakushuin, Tokyo, 2010-2011, & VP Kongres Advokat Indonesia)

“Teknologi Digital: Sebuah Keniscayaan atas Perubahan, demikian salah satu sub judul dalam buku yang ditulis sahabatku Luluk (panggilan akrab penulis buku ini). Saya setuju itu. Dampak dari perkembangan teknologi informasi, memang tak bisa dielakkan. Digitalisasi pun menjadi sebuah kebutuhan untuk mendorong kemajuan tapi sekaligus bisa menjadi pintu masuk kejahatan terutama kejahatan daring. Maka, pendekatan hukum progresif menjadi penting dalam mengantisipasi berbagai perubahan seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi digital di kalangan masyarakat,”

Sonya Hellen Sinombor, SH.
(Jurnalis Harian Kompas)

“Buku ini menjelaskan secara lengkap pemikiran Prof. Tjip tentang hukum progresif. Slogan hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum selalu relevan untuk merespons masalah sosial seiring perubahan peradaban bangsa. Hukum acapkali tertinggal oleh dinamika kehidupan masyarakatnya, oleh karena itu hukum harus dimaknai secara luas dari sekedar mencocokkan teks peraturan perundang-undangan. Hukum sebagai institusi sosial semestinya digunakan sebagai sarana untuk memecah kebuntuan “*rule breaking*”, sehingga berfungsi efektif melayani masyarakat. Penulis dalam narasinya berhasil mempengaruhi pembaca mengubah cara pandang positivistik menjadi progresif. Selamat Luk, terima kasih provokasinya sangat manfaat dan semoga tambah berkah,”

Dr. Ida Budhiati, SH, MH.
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)

Teori Hukum **Progresif 4.0**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Teori Hukum **Progresif 4.0**

DR. AWALUDIN MARWAN

TEORI HUKUM PROGRESIF 4.0

Penulis:

Dr. Awaludin Marwan

ISBN: 978-6025-589-59-1

Cetakan Pertama, Februari 2021

xii + 229 hlm.

Editor:

Abdurrahman Mughni Labib

Desain Sampul dan Tata letak:

Tim Kreatif

Penerbit:



Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
dilarang memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis
dari Penerbit.

Kata Pengantar

TANGGAL 9 Januari 2010 adalah hari duka bagi dunia hukum Indonesia. Ditinggal salah satu begawan hukumnya, Prof (alm) Satjipto Rahardjo, yang akrab dipanggil Prof Tjip. Sejak saat itu, hukum progresif pun tak punya otoritas shohih lagi. Kata seorang sahabat yang kuatir akan nasib keberlangsungan hukum progresif, apakah mungkin seorang koruptor berdalih ia sedang mempraktikkan hukum progresif?

Hukum progresif kan identik dengan penerobosan hukum. Toh, koruptor juga melakukan hal sama. Melanggar hukum. Meskipun tujuannya bukan pencairan keadilan, melainkan memperkaya diri sendiri.

Dulu Prof Tjip sering bereaksi dan memberikan ulasan-ulasan terhadap kasus hukum yang sedang hangat diperbincangkan di Indonesia. Namun saat ini beliau sudah berpulang. Gagasannya, hukum progresif, pun menjadi milik publik. Siapa pun berhak untuk menafsirkannya.

Tak hanya soal tafsir dan penggunaannya menghadapi tantangan, para peminat studi hukum progresif juga kebingungan di hadapan persoalan kekinian. Umpamanya soal perkembangan teknologi digital.

Apalagi prof Tjip pernah berpesan supaya hukum selalu berada di puncak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹ Hukum sudah seharusnya adalah penyokong utama dan prasasti sosial dari perkembangan sains dan teknologi, bukan malah acuh tak acuh. Hukum tak boleh alergi dengan perkembangan zaman.

Sebelum almarhum wafat, beliau sempat meriwayatkan hukum yang perlu tegur sapa dengan ‘jejaring kehidupan’-nya Fritjof Capra. Saat ditelusuri, Capra yang menulis buku ‘the Web of Life’² ini banyak dirujuk oleh sosiolog yang fokus pada studi masyarakat di era digital, Manuel Castells.³

¹ Satjipto Rahardjo. *Berpikir tentang Hukum*. (Bacaan mata kuliah ilmu hukum dan teori hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro No. 32). Ditulis pada 3 Januari 2009 dan tidak dipublikasikan. Lihat juga, Satjipto Rahardjo. *Berpikir non-Linier dalam Hukum*. (Bacaan mata kuliah ilmu hukum dan teori hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro No. 35). Ditulis pada 8 September 2009 dan tidak dipublikasikan. Satjipto Rahardjo. *Berpikir dalam Hukum*. (Bacaan mata kuliah ilmu hukum dan teori hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro No. 32). Ditulis pada 8 April 2008 dan tidak dipublikasikan

² Fritjof Capra. *The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems*. New York: Anchor Books, 1996.

³ Begini cara Castells mengutip Capra. Mula-mula ia menyadur langsung kalimat Capra yang mengatakan bahwa ‘sebuah jejaring adalah sebuah pola yang cukup lazim di semua kehidupan.’ Yang kemudian ia terjemahkan sebagai pola komunikasi dan interaksi sosial masyarakat hari ini yang bersandarkan teknologi digital, membuat semua orang terkoneksi dan membuat dinamika tersendiri. Dinamika inilah yang menarik dijadikan objek dari sebuah analisis sosial. Manuel Castells. *Informationalism, Networks, and the Network Society: A Theoretical Blueprint*. Dalam, Manuel Castells. *The Network Society. A Cross-cultural perspective*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited, 2004., p. 4

Dari kutipan Prof Tjip terhadap Capra dan kaidah sosiologi digital Castells, sebenarnya kita bisa merakit studi hukum dan masyarakat sebagai sebuah kerangka teori. Ya, optik teoretis yang bisa digunakan untuk menyusun perkakas analitis mengamati perkembangan hukum dan masyarakat di era digital.

Dengan kemajuan teknologi, berbagai isu diperbincangkan. Mulai dari Big Data, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *cryptocurrency*, *e-commerce*, *teknologi finansial*, *online dispute resolution*, *internet of things*, *forensik digital*, *cyber security*, *virtual reality*, *cognitive technology*, *automation*, *drones & autonomous vehicles*, *3D Printing*, *voice assistants*, *smart cities*, *neorolink*, *metaverse* dan masih banyak lagi.

Perkembangan teknologi ini perlu disokong oleh mazhab hukum progresif. Sebuah aliran hukum yang fleksibel dan sensitif terhadap perkembangan sains dan teknologi. Dan, memastikan bahwa hukum dan perkembangan teknologi tersebut memperhatikan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Urgensi

Pada Mei 2007 lalu, serangan siber melumpuhkan sistem elektronik pemerintah, parlemen, kementerian, perbankan, dan berbagai media telekomunikasi di Estonia. Serangan yang masif dilakukan selama 3 (tiga) minggu itu melumpuhkan negara kawasan Baltik itu.⁴ Setahun berikutnya, di Georgia, kerusakan parah berlangsung pada *website* resmi Presiden Mikheil Saakashvii. Banyak radio dan televisi dibajak oleh kelompok peretas. Banyak pula server yang bera-

⁴ Ian Traynor. *Russia accused of unleashing cyberwar to disable Estonia*, lihat pada: <https://www.theguardian.com/world/2007/may/17/topstories3.russia>, diakses pada 8 Juli 2019.

lih kendalinya dari luar Georgia.⁵

Dua cerita di atas adalah kisah perang siber. Bukan isapan jempol saja. Transformasi perang berlangsung. Dari Perang Dunia 1 dan 2 yang berakhir pada tahun 1945. Negara-negara beralih perhatiannya ke Perang Dagang mendominasi percaturan geopolitik. Namun hari ini, perang siber yang makin membayang-bayangi sampai sendi paling kecil kehidupan.

Mulai dari penyadapan, spionase, sabotase, perusakan sistem elektronik, pelumpuhan jaringan listrik dan energi, kehancuran ekonomi, penyusupan ke reaktor nuklir, pengkloningan data rahasia dan persandian negara, mesin penghancur massal dan masih banyak lagi.⁶

Sementara Indonesia masih menyiapkan draf keamanan siber yang baru dimasukkan ke parlemen Juni yang lalu tahun ini. Persiapan kita untuk membuat pertahanan digital masih jauh panggang dari api.

Para ahli hukum pun turut bertanggung jawab atas dilema ini. Peminat hukum progresif juga perlu memproduksi analisa dan konsep hukum 4.0 untuk menghadapi perang siber yang sudah di depan mata ini.

Matinya Keahlian

Buku yang ditulis oleh Thomas M Nichols pada tahun 2017, yang berjudul 'the Death of Expertise' bisa dibayangkan. Saat universitas dan asosiasi profesi legitimasinya sudah mulai runtuh. Nichols juga menyebutkan anarki digital, saat kecerdasan buatan dan algoritme lebih menentukan ke-

⁵ John Markoff. *Before the Gunfire, Cyberattacks*, lihat pada: <https://www.nytimes.com/2008/08/13/technology/13cyber.html>, diakses pada 8 Juli 2019

⁶ Lihat lebih lanjut pada (Karnouskos, 2014; Matrosov et al, 2010 dan AFCEA, 2008)

putusan dalam kehidupan.⁷

Pun ahli hukum pun punya nasib yang sama. Semua orang bisa mengunduh KUHP dan KUHPerdata melalui internet. Dan, menafsirkannya sesuka hatinya. Mereka pun bisa berselancar di dunia maya pandangan orang terkait salah satu pasal dengan mudah dan detail.

Sederhananya, orang lebih menyukai berkonsultasi ke ‘Mr. Google,’ ketimbang sarjana hukum yang mungkin cukup mahal tarifnya.

Prof. dr. Henk Kummeling, ahli hukum yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Utrecht, Belanda. Dalam sebuah buletin kampus, Illuster 2019, ia bergumam. ‘Kita mencari kebenaran, tapi tidak mempunyai monopoli atas (kebenaran) itu.’⁸

Ahli dan akademisi posisinya sudah tergeser mendominasi ‘kebenaran.’ Para pakar pun sudah seharusnya berbenah dan berdialektika dengan teknologi. Jika tidak, maka nasibnya akan sama dengan karyawan penjaga pintu tol yang sudah digeser dengan pintu otomatis.

Hari ini, dunia hukum sudah dibanjiri dengan ‘firma teknologi hukum.’ Seperti luminance, yang berisikan 100-an firma hukum, yang membuat kontrak secara detail dan efisien. Ravel, sebuah aplikasi juga yang menyediakan jasa analisis topik, mosi, penalaran hakim dan visualisasi per-

⁷ Hal ini ditambah dengan maraknya anonim akun yang tersebar di sosial media, bebas berargumentasi dan penuh kebebasan berekspresi. Baik di dalam sebuah grup dan berbagai latar belakang yang bervariasi dan juga tingkat pendidikan. Internet membuat dunia maya punya implikasi dan dampak di kehidupan nyata. Internet membuat seseorang bekerja secara sporadis, random dan punya nasisme intelektual yang tinggi. Thomas M. Nichols. *The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters*. Oxford: Oxford University Press, 2017., 129-130,

⁸ Illuster, Utrecht University Fund, March, 2019.

kara. Sama seperti Lexoo, sebuah perusahaan aplikasi teknologi hukum yang sudah mempunyai klien lebih dari 500.000. Perusahaan ini menyediakan jasa konsultasi hukum perburuhan, properti, kontrak komersial, pelayanan negosiasi, dan seterusnya.

Di Indonesia juga mulai dikenalkan pengadilan secara elektronik atau *e-court*. Melalui Perma No. 3 Tahun 2018 menyuguhkan pendaftaran perkara *online*, pembayaran panjar biaya *online* (e-SKUM), pengunggahan dokumen persidangan seperti replik dan duplik serta surat-surat yang berkaitan, sampai pemanggilan elektronik (*e-Summons*).

Dengan sistem elektronik ini, cukup disayangkan jika pada faktanya partisipasi masyarakat tak begitu banyak. Dengan kata lain, sistem ini sepi peminatnya. Padahal di luar sana juga sudah banyak berkembang penyelesaian sengketa digital (*online dispute resolution*). Dan, robot yang menggantikan peran mediator, hakim, dan advokat para pihak.

Hukum progresif pun dituntut kehadirannya untuk menjawab persoalan-persoalan ini.

Lebih dari semua itu, buku ini lahir berkat dorongan banyak kolega, Bro Arie, Bang Affan, kawan-kawan di HeyLaw, startup legaltech saya, sohib saya Mas Andi, Mas Agung, Mbak Tata, Mas Zakiy, Kak Hani, Kak Flo, Kak Nandi, Kak Hilda, Kak Muftie dan sobat HeyLaw yang tidak bisa saya sebut satu per-satu. Sohib saya seperjuangan Gus Said, Indra, Bowo, Unu, Rasyid, Wildan, dan masih banyak lagi.

Khususnya Pak Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang selalu mendorong dosen-dosennya berkarya Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM. Dan, tiada lain, tiada bukan istri tersayang, Tiana, yang selalu menemani di saat suka maupun duka.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	xi
Pendekatan Hukum Palu Gada	1
Asal Usul Hukum Progresif	7
Studi Hukum dan Masyarakat	12
Tentang Budaya Hukum	18
Tantangan	25
Paras hukum siber kita	28
Sisi Lain Dunia Siber	31
Hukum Progresif: Teori atau Cuman Wacana?	34
Ruang Lingkup Hukum Progresif	37
Biarkan Hukum Mengalir	43
Manusia yang Baik	48
Lapisan-Lapisan Studi Hukum	54
Catatan Warisan	59
Berhukum dengan Nurani	61
Kenakalan Anak dan Kisah Para Peretas	70
Teknologi Digital: Sebuah Keniscayaan atas Perubahan	73
Data versus Goliath?	77
Urgensi Data	80
Hukum Perlindungan Data Pribadi	84

GDPR: Perlindungan Data di Eropa	90
Kasus Facebook Fan Pages di Jerman	93
Kasus Google di Prancis	96
Kisah-Kisah Menyeramkan Soal Data	99
Menelisik Kejahatan Siber	105
Pencemaran Nama Baik	108
SARA dan Rasisme di Ruang Siber	118
Pornografi	127
Akses Ilegal	136
Kajian Hukum Keamanan dan Ketahanan Siber	142
Peran Kelembagaan soal Penguatan Keamanan Siber	142
Sertifikasi, Perizinan dan Pengawasan Keamanan Siber	151
Mengukur Persyaratan	155
Merekonstruksi Standardisasi	157
Prosedur	159
Landasan Yuridis	160
Membicarakan E-Commerce	169
Hukum yang Kebingungan	170
Hukum Mengejar?	175
UMKM dan E-Commerce	177
Sepakat Tanpa Membaca	181
Progresivitas Hukum, Ekonomi dan Pasar Digital	184
Geliat Teknologi Finansial	187
Memudahkan dan Memanjakan	191
Tak Bisa Diprediksi, Didata Saja Dulu	195
Fintech Ilegal	198
Saat Hukum Progresif Melihat <i>Fintech</i>	202
Parade Hantu	204
Suri	205
Industri Kreatif dan HAKI	208
DAFTAR PUSTAKA	210

Pendekatan Hukum Palu Gada

HUKUM progresif dicetuskan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH (untuk kemudahan bacaan dan penulisan selanjutnya dipakai nama panggilan beliau, yakni Prof Tjip). Gagasan ini bisa digunakan untuk membedah berbagai isu hukum.

Mulai dari isu soal penyusunan peraturan perundang-undangan, pendidikan tinggi hukum, Mahkamah Konstitusi, kepolisian, Kejaksaan, kehakiman, pemberantasan Korupsi, sektor kepemiluan, hak asasi manusia, peradilan, pidana anak, hukum dan perempuan, hukum adat, hukum kontrak, dan lain sebagai macamnya. Gagasan ini juga dikonsumsi untuk menganalisis perkembangan hukum siber juga.

Lebih lanjut, gagasan ini juga merontokkan sekat antara Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan rejim hukum lainnya. Bagi Prof Tjip, semua persoalan hukum, bisa didekati dengan pandangan filsafat hukum dan sosiologi hukum. Prof Tjip memang membahas banyak hal.

Untuk itulah, saya menjuluki hukum progresif tak ubahnya seperti pendekatan hukum ‘Palu Gada.’ Singkatan dari ‘apa lu mau gua ada!’, ini relatif bisa menggambarkan paras fungsional hukum progresif.

Dalam disertasinya, Prof Tjip mengulas tentang politik hukum penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 1979, ia sudah menekankan akan arti pentingnya regulasi dan kodifikasi hukum berbagai sektor. Mulai dari KUHP, KUHP, KUHP, *Het Inlandsch Reglement* (HIR), dan seterusnya.⁹ Hingga hari ini hanya KUHP, yang lahir dari rahim para ahli hukum Indonesia.

Hingga hari ini pula, para insan hukum Indonesia masih hidup di bawah puing-puing hukum peninggalan zaman kolonial Belanda. Bahkan di Belanda, sejak tahun 1994, sudah mempunyai kodifikasi hukum administrasi (*Almene wet bestuursrecht*).¹⁰ Di Indonesia, hukum administrasinya bertebaran antara UU Administrasi Pemerintahan, UU PTUN, UU Ombudsman, UU Pelayanan Publik dan sejenisnya, masih dipenuhi disharmoni dan saling tabrak.

⁹ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perubahan Sosial. Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Bandung, Alumni, 1979.

¹⁰ Awaludin. *Good Governance and Ethnic Minorities in Indonesia. An Administrative Law Study of the Chinese and Turkish communities with a comparison to the Netherlands*. Utrecht, Utrecht University, 2018., Halaman. 234-235. Kodifikasi Hukum Administrasi di Belanda membahas tentang norma hukum administrasi dan cara mengevaluasi sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas administrasi. Awalnya, peraturan ini dimulai dari peraturan peninjauan keputusan administrasi pada tahun 1963, (*Wet beroep administratieve beschikkingen*), yang kemudian diperbaharui dengan peraturan upaya banding keputusan administrasi pada tahun 1976 (*Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen*). Setelah amandemen Konstitusi Belanda pada tahun 1983, kodifikasi hukum administrasi dikukuhkan untuk menelurkan sebuah sistem yang berbasis negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*).

Dan, hari ini, pemangku kebijakan di sektor perumusan perundang-undangan, seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Kemenhumham) dan Kementerian/ Lembaga terkait masih terniang-niang ratusan peraturan peninggalan kolonial yang masih berlaku di tanah air ini.

Jujur. Kita agak sulit *move on*, dengan beban sejarah yang tak kunjung tuntas ini. Prof Tjip sudah meninggalkan memori pada kita untuk ‘merdeka’ 100 % kehidupan hukum kita.¹¹ Gagasan prof Tjip tentang penyusunan perundang-undangan selain menitik beratkan pada kedaulatan hukum, juga beliau menganjurkan menengok hukum adat dan mengimani hak-hak asasi manusia.¹²

Selain penyusunan peraturan perundang-undangan, minat prof Tjip membahas banyak isu hukum yang lain, seperti pendidikan hukum. Pada tanggal 5 Maret 1975, Prof Tjip menulis di *Kompas*, dengan judul ‘Mencari Model Sarjana Hukum Pembangunan.’¹³ Artikel ini bermula dari sebuah reportase harian *Kompas*, pada Juli 1972, yang bertajuk ‘Fakultas Hukum UNDIP mencari Jawab.’

¹¹ Satjipto Rahardjo. *Hukum Indonesia 1945 dan 1991*. Kompas, 4 September 1991.

¹² Prof Tjip pernah menulis sebuah artikel di *Kompas*, yang berjudul ‘*Mengukur Sendiri Hak Asasi Manusia*,’ pada 9 Desember 1991. Artikel ini mengulas tentang bagaimana susah payahnya merintis hak asasi manusia, namun pada 12 November 1991, terjadi peristiwa berdarah di Dili. Sementara Pemerintah Indonesia mulai menutup-nutupi peristiwa tersebut, dan mengumpat pada dunia internasional untuk tidak mengurus persoalan Indonesia. Hal ini dikritik oleh Prof Tjip dengan metafora ‘sekarang ini, jarum yang jatuh di tengah hutan Kalimantan pun terdengar di Amsterdam dan Washington. Dengan demikian, politik yang memainkan peranan terbesar pada penegakan hukum perlu diarahkan untuk memuliakan humanisme.

¹³ Satjipto Rahardjo. *Mencari Model Sarjana Hukum Pembangunan*. Kompas, 5 Maret 1975

Awalnya, Fakultas Hukum UNDIP menyusun sebuah tim untuk melacak beberapa lembaga tinggi negara. Seberapa jauhkah sesungguhnya model sarjana hukum yang dibutuhkan. Singkatnya, sarjana yang dibutuhkan di dunia industri dan kepentingan pembangunanlah yang diprioritaskan waktu itu.

Pada tahun 1970-1980an, nampaknya pro Tjip menitikberatkan pada mencetak sarjana hukum yang dibutuhkan dunia industri dan pembangunan ini. Di era kepemimpinannya sebagai Dekan Fakultas Hukum UNDIP, ia membuka pendidikan notariat pada tanggal 23 Juni 1981.¹⁴ Profesi yang paling dibutuhkan untuk legalisasi badan hukum, pendaftaran tanah dan penyusunan kontrak, dst.

Namun, pada tahun 200-an, pandangan beliau agak bergeser. Sebuah makalah ditulisnya dalam sebuah jurnal berjudul 'Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia.'¹⁵ Prof Tjip menekankan pengetahuan dan keterampilan seorang sarjana adalah nomor sekian. Utamanya adalah sensitivitas pada keadilan, empati, kecerdasan emosional, dan seterusnya.

Rasa-rasanya, pandangan pendidikan hukum Prof Tjip pada masa akhir itu, cukup kontemplatif. Jika kita tengok bagaimana Indonesian Legal Resource Center (ILRC), merumuskan format pendidikan tinggi yang memompa adrenalin mahasiswa memberikan bantuan hukum.¹⁶

¹⁴ *UNDIP Buka Pendidikan Notariat*. Kompas, 23 Juni 1981.

¹⁵ Satjipto Rahardjo. *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*. *Journal Law Reform*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2015. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

¹⁶ Uli Parulian Sihombing, et al. *Pendidikan Hukum Klinis (Clinical Legal Education) Dalam Implementasi UU Bantuan Hukum*. Indonesian Legal Resource Center (ILRC) dan Open Society Justice Initiative (OSJI), 2014.

Pun demikian, dengan upaya Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, merumuskan pendidikan anti-korupsi. Biro ini menyusun ‘Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi.’¹⁷ Mata kuliah pendidikan anti-korupsi pun menjamur di berbagai kampus seantero Nusantara.

Tidak hanya level universitas, pendidikan korupsi juga ditebarkan di tingkat PAUD dan Taman Kanak-Kanak. Buku-buku berwarna penuh kartun pun dicetak untuk usia dini. Buku-buku seperti: ‘Suatu Hari di Museum Seni,’ ‘Modo Tak Mau Menari,’ ‘Mari Bermain Bersama Kumbi,’ dan seterusnya.

Yang jelas, pendidikan untuk mencetak pribadi yang jujur, idealis, tahan banting, berintegritas perlu ditanamkan lagi dan lagi. Prof Tjip di akhir hidupnya memang tak ubahnya seperti motivator dalam menyoal pendidikan hukum. Namun ada juga yang kesal, seorang kawan peminat studi hukum progresif mengeluh.

‘Kenapa ya, akhir-akhir ini Prof Tjip malah seperti ulama, pastor, atau agamawan, yang menyerukan aspek moral.’ Ketusnya. Karena semua hal jelas akan selesai dengan berbuat baik dan bersikap baik. Sebab tak mungkin semua orang dituntut baik.

Seorang Yudistira saja dalam opus Mahabharata, seorang yang teguh dan selalu patut. Sempat terjebak bermain dadu atas desakan Duryudana. Dan mengorbankan istrinya sendiri, Dropadi Dewika.

¹⁷ Nanang T. Puspito dan Marcella Elwina S. *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016.

Kendatipun demikian, buku terakhir Prof Tjip bersikeras mempertahankan tesisnya itu. Bahkan buku terakhirnya bertajuk ‘Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik.’

Pandangan tentang kebaikan dan moralitas itu, disematkan ke berbagai isu hukum oleh Prof Tjip. Pendeknya, Prof Tjip adalah seorang generalis dan bertolak pada hukum alam yang bertahan pada kesadaran etis dan kemanusiaan.

Mulai dari membahas pidana anak pada kasus Raju yang ditahan lantaran berkelahi dengan teman sejawatnya. Prof Tjip menyarankan diversi yang menghindarkan anak dari proses formal peradilan pidana yang terkesan menyeramkan.¹⁸

Tidak hanya kenakalan anak, Prof Tjip juga pernah membahas soal hukum bisnis. Mengutip Stewart Macaulay yang melakukan penelitian hukum kontrak di Amerika, menguraikan bahwa setelah teken kontrak bisnis, dokumen tersebut lalu hanya dimasukkan ke dalam laci. Jika ada pertikaian, para pebisnis Amerika lebih suka menyelesaikan masalahnya melalui ‘jalan bisnis’ dan memegang teguh prinsip efisiensi.¹⁹

Selanjutnya, Prof Tjip selain pernah ada jejak pemikiran tentang hukum bisnis atau perdata, beliau juga percaya sekat antara rejim hukum telah tercerabut. Di berbagai Fakultas Hukum, pada umumnya memisahkan setajam-tajamnya antara tata negara, pidana, perdata, internasional, dan segala turunannya. Prof Tjip penganut mazhab multidisipliner dan saling terhubung.

¹⁸ Satjipto Rahardjo. *Meratapi Raju di Balik Jeruji*, Kompas, 25 Februari 2006.

¹⁹ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Kompas. Jakarta: Kompas, 2009., halaman 22

Umpamanya, pada Seminar Kriminologi ke-VI di UNDIP pada tanggal 16-18 September 1991. Prof Tjip mengulas bahwa pengetahuan umum tentang kejahatan berasal dari maraknya maladministrasi yang terjadi. Dari titik inilah, masalah pidana lekat kaitannya dengan tata negara dan sektor perekonomian.

Beliau juga bercerita untuk mengungkap sebuah kejahatan, diperlukan suatu pendekatan yang sistemik. Al Capone, tokoh penjahat pada tahun 1930an, ia tak hanya punya armada peneror dan pembunuh saja, tetapi juga mempunyai ahli pembukuan, akuntan, dan ahli hukum.²⁰

Sehingga pendekatan yang sistematis, dalam dunia hukum sangat diperlukan. Hukum progresif selalu ingin menari lincah di antara sekat-sekat keilmuan. Selanjutnya, hukum progresif juga punya dimensi diskursus yang sangat luas. Seperti yang diulas di atas. Gagasan prof Tjip membahas apa saja. Mulai dari sistem regulasi, pendidikan hukum, pidana anak, hukum bisnis, dan masih banyak lagi.

Oleh karenanya, hukum progresif itu sistem pemikiran yang terbuka, bisa digunakan siapa saja, kapan saja dan untuk apa saja.

Asal Usul Hukum Progresif

Pada tahun 2006, adalah tahun yang sakral bagi peminat studi hukum progresif. Sebab tahun itu, buku dengan

²⁰ Satjipto Rahardjo. Sisi Lain Kejahatan. 19 September 1991. Dalam sebuah seminar pada tanggal 4-5 Maret 1991 di Gedung Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial UI. Yang dihadiri tidak hanya Prof. Tjip saja, tetapi juga pakar komunikasi Prof. Dr. Astrid S. Susanto, Kepala Dinas Mabes Polri Brighen (Pol) Ny Jeanne Mandagi, SH, ali forensik dokter Abdul Mun'im Idries, kriminolog UI Dra Purnianti sampai Karni Ilyas yang saat itu masih menjadi wartawan di Tempo. Berita Kriminal, Urutan Kedua Disukai Setelah Politik. Kompas, 09 Maret 1991. Berita Kriminal di Pers Bantu Ungkap Kejahatan, 5 Maret 1991.

tajuk ‘Membedah Hukum Progresif’ digelontorkan oleh murid-murid almarhum Prof. Tjip. I Gede A.B. Wiranata, Joni Emirzon, dan Firman Muntaqo adalah murid-murid beliau sewaktu menempuh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.²¹

Prof Tjip sendiri memberikan memberikan kata pengantar dalam buku itu. Buku yang terdiri dari artikel beliau di harian *Kompas* dan tiga makalah murid-muridnya itu adalah awal cerita gagasan hukum progresif. Awalnya kata ‘hukum progresif’ jarang dipakai oleh Prof Tjip.

Sempat Prof Tjip kurang berkenan atas buku diedit oleh murid-muridnya itu. Beliau ragu, apakah gagasan yang ditulisnya selama ini layak disebut dengan satu diksi ‘progresif.’ Bahkan I Gede, sang editor, sempat meyakinkan berulang-ulang bahwa gagasan beliau ini sudah bisa disebut teori.

Prof Tjip sempat menjuluki tiga murid editornya ini sebagai ‘tiga anak Sumatera yang gila.’²² Tapi kelak Prof Tjip sendiri patut angkat topi dan berterima kasih pada tiga muridnya ini. Dari buku yang berjudul ‘Membedah Hukum Progresif’ inilah, khalayak hukum sorak-sorai menyambutnya.

Entah karena waktu, meluncurnya buku ini bersamaan dengan kesembuhan Prof Tjip dari stroke berat. Pada tahun 2002, beliau sempat mengalami stroke berat, dan mendapat kesehatannya satu dua tahun kemudian. Pulihnya Prof Tjip dari sembuh ini seperti ‘kelahiran kembali.’ Ia pun melanjutkan aktivitasnya, menulis dan mengajar.

Bahkan banyak orang mengira, ia jauh lebih produktif setelah sembuh. Ia mengunyah segala macam isu hukum

²¹ Buku ‘*Membedah Hukum Progresif*’

²² Wawancara dengan I Gede Wiranata pada tanggal 28 Juli 2019.

yang berkelindan di media massa. Dan, memberikan opininya dengan ulasan sederhana, mengajak dialog, komunikatif dan mengajak orang berpikir.

Diksi-diksi pilihan kata Prof Tjip saat menulis juga terbilang ‘agak genit.’ Umpamanya pada Rabu, 5 Maret 1975, beliau menulis di Kompas dengan judul ‘Mencari Model Sarjana Hukum Pembangunan.’²³ Jelang beberapa bulan, ia pun menulis lagi dengan diksi tajuk seperti ini, ‘Yang tidak tahu dan Yang tidak punya dalam Hukum,’ pada Jumat 6 Juni 1975.²⁴

Dua artikel di atas adalah contoh artikel awal yang dituliskannya untuk Kompas di awal karier penulisannya di media massa.

Tulisan Prof Tjip memang menggelitik, kalau tidak ingin disebut ‘genit’ tadi. Namun sepanjang awal karier penulisannya itu, Prof Tjip tidak menamakan pemikirannya itu sebagai ‘hukum progresif.’

Meskipun tak bisa dipungkiri, popularitas dan penetrasi gagasan hukum progresif ini tak lepas dari tulisan beliau kontinyu di harian Kompas dan media massa lain. Tak banyak ahli hukum yang punya bakat jurnalisme dan sastra. Prof Tjip ini punya talenta itu.

Kolega beliau, prof Arief Sidharta seorang guru besar filsafat hukum Universitas Parahyangan, juga mengakui efektivitas Prof Tjip dalam menyampaikan gagasannya. Dalam sebuah kunjungan Prof Arief Sidharta di rumahnya Prof Tjip di kawasan Erlangga Peleburan Semarang, beliau beberapa kali berujar. ‘Prof Tjip itu kok bisa ya merumuskan pemikirannya dalam satu artikel pendek.’

²³ Satjipto Rarahardjo. *Mencari Model Sarjana Hukum Pembangunan*. Kompas, 05 Maret 1975.

²⁴ Satjipto Rarahardjo. *Yang tidak tahu dan Yang tidak punya dalam Hukum*. Kompas, 06 Juni 1975.

Bagi Prof Arief Sidharta, menulis sebuah gagasan hukum perlu dirumuskan berhalaman-halaman. Paling tidak dalam bentuk jurnal. Syukur-syukur adalah dalam bentuk buku.

Pertemuan di rumah Prof Tjip itu menjadi ajang saling memuji. Karena prof Arief Sidharta itu buku yang dituliskannya cukup banyak. Apalagi beberapa terjemahan dari Bahasa Belanda juga terbilang cukup banyak pula dikerjakan oleh Prof Arief Sidharta.²⁵ Dan, prof Tjip pun berdalih ‘Kalau tidak ada Prof Arief, mana mungkin kita bisa menikmati kemewahan membaca buku-buku teori hukum berbahasa Belanda dalam terjemahannya ke Bahasa Indonesia.’

Meskipun Prof Tjip sendiri masih tekun membaca buku-buku bahasa Belanda. Beliau juga lebih menyukai membaca buku-buku hasil terjemahan Prof Arief.

Selain gagasannya, Prof Tjip juga dikenal sebagai sosok yang disegani di dunia hukum Indonesia. Kesederhanaannya, komitmennya, dan konsistensinya dalam berkarya banyak diakui oleh berbagai kalangan. Orang menerima gagasannya Prof Tjip, juga lantaran orang sungkan pada kepribadiannya dan ‘kesalehan akademiknya.’²⁶

Singkatnya, gagasan hukum progresif sebenarnya adalah lahir dari sebuah perjalanan intelektual yang panjang. Gagasan yang dikerjakan dengan tulisan menggelitik di media mulai pada tahun 1975, hingga penghormatan para muridnya pada Prof Tjip. Kalau tidak ada keberanian tiga muridnya yang mengumpulkan dan mengedit makalahnya itu, maka kosakata ‘progresif’ mungkin tak pernah muncul dalam permukaan.

²⁵ Buku-buku terjemahan prof Arief Sidharta cukup banyak

²⁶ Buku biografi Satjipto Rahardjo.

Meskipun Prof Tjip sendiri pernah menulis sebuah artikel, yang berjudul ‘Indonesia Tidak Ingin Ambruk.’ Artikel ini rencananya dikirim ke Kompas. Namun entah tulisan ini dimuat atau tidak. Pada 11 Agustus 2003, artikel ini menyebut kata ‘gagasan penegakan hukum progresif.’

Gagasan penegakan hukum progresif adalah penegakan hukum yang dijalankan oleh orang-orang yang tidak ingin melihat Indonesia ambruk dan terpuruk. Itulah semangat, komitmen dan dedikasinya.²⁷

Jauh sebelum buku membedah hukum progresif, yang diedit oleh tiga muridnya itu, Prof Tjip sudah menggunakan kosakata ‘hukum progresif,’ dalam tulisannya. Selanjutnya, tulisan beliau yang diterbitkan oleh *Kompas*, bukanlah buku ‘Membedah Hukum Progresif’ yang mengawali.

Sebelumnya sudah ada dua buku sebelumnya yang lahir dari rahim *Kompas*. Kumpulan tulisan yang diedit oleh juniornya saat mengelola Pusat Studi Kepolisian (PSK) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Buku yang berjudul ‘Membangun Polisi Sipil,’ diedit oleh Hasyim Asy’ari dan terbit pertama pada Maret 2002.²⁸

Setelah Hasyim, yang juga adalah Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini, buku berikutnya baru disunting oleh muridnya Prof Tjip.

²⁷ Tulisan ini terdapat dalam sebuah file kumpulan tulisan dan draft yang pernah ditulis oleh Almarhum Satjipto Rahardjo, dengan judul ‘Indonesia Tidak Ingin Ambruk,’ yang ditulis pada 11 Agustus 2003 itu ditujukan kepada Desk Artikel Kompas. Namun setelah saya cek di Kompas, artikel tersebut tidak ada dalam daftar publikasi opini Kompas. Besar kemungkinan Prof Tjip sudah mengirimkan artikel ini dan ditolak oleh Kompas. Prof Tjip juga mengaku tidak semua tulisannya itu langsung dimuat oleh Kompas. Beliau juga sering mengirimbkannya dan tidak dimuat.

²⁸ Satjipto Rahardjo. *Membangun Polisi Sipil*. Jakarta: Kompas, 2002.

Adalah Karolus Kopong Medan dan Frans J. Rengka, murid-muridnya Prof Tjip di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang menyusun kumpulan tulisan menjadi buku. Buku Prof Tjip yang berjudul ‘Sisi-sisi lain dari Hukum Indonesia’ pun terbit pada Desember 2003.²⁹

Dua buku ini punya satu ciri khas yang pokok. Yakni melihat institusi peradilan, polisi, dan cara bekerjanya hukum melalui kacamata sosiologi hukum. Mengajak para pembaca untuk mencerna dengan pemahaman sederhana terhadap kasus-kasus hukum yang sedang marak. Serta mengajak dialog para pembaca untuk memikirkan ulang cara ber hukum kita.

Pendeknya, asal usul hukum progresif adalah jargon yang digunakan oleh Prof Tjip, yang dikuatkan dengan hadirnya buku ‘Membedah Hukum Progresif.’ Hingga akhirnya lahir kelompok-kelompok studi hukum progresif di berbagai profesi dan daerah.

Studi Hukum dan Masyarakat

Pada tahun 1972, setahun setelah ia diangkat sebagai Dekan Fakultas Hukum UNDIP, Prof Tjip mengikuti kursus *law and society* di University of California, Berkeley. Pendekatan hukum dan masyarakat cukup mewarnai gagasan Prof Tjip kemudian hari.

Studi hukum dan masyarakat Prof Tjip ini seperti kata pepatah lama. ‘Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya.’ Peribahasa ini sudah diketahui banyak orang. Suatu daerah punya aturan dan kebiasaannya sendiri. Pun demikian dengan Indonesia. Tak bisa dipaksakan sebenarnya mengikuti hukum modern barat.

²⁹ Satjipto Rahardjo. *Sisi-sisi Lain dari Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.

Oleh karenanya, seumur hidup prof Tjip dihibahkan dirinya untuk menginvestigasi dan berusaha mengenali rupa-rupa tabiat orang bangsanya sendiri. Sebab dalam memahami masyarakatnya, seorang ahli hukum mampu menyalin sanubari dan cita rasa keadilan yang valid.

Hal ini terlihat pada ulasan prof Tjip di tahun 1994, ia menulis di sebuah jurnal *Law & Society Review*, dengan judul '*Between Two Worlds: Modern State and Traditional Society*'.³⁰ Dituliskan ini, Prof Tjip menggali pemahaman siapa dan bagaimana itu manusia Indonesia, melalui konsep 'Aku' yang pernah dipikirkan oleh Soepomo.

'Saat Indonesia dikonsepsikan sebagai sebuah negara pada awal 1945, masalahnya adalah prinsip-prinsip fundamental yang dirumuskan telah menjadi perdebatan sepanjang waktu. Soepomo, seorang profesor hukum adat, yang juga seorang pembela negara yang melacak genealogi manusia Indonesia di antara konsep individual dan masyarakat. Jauh sebelum perdebatan pada Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebuah panitia yang terbentuk secara independen untuk mempelajari dan menyusun rekomendasi terhadap sebuah konstitusi, Soepomo adalah salah satu orang yang mengawali menguatkan prinsip-prinsip dasar itu, yang mana hal itu (prinsip-prinsip dasar tersebut) menjadi hal yang penting dalam sebuah republik baru. [...] Dalam sebuah pidato di Yogyakarta pada tahun 1937, Soepomo menekankan tentang beberapa pendefinisian individu yang berlaku bagi seorang Indonesia dan manusia barat. Ia berkata bahwa konsep 'aku' dalam bahasa Indonesia menggambarkan seluruh komunitas yang terformulasi dalam sebuah bentuk, sementara manusia Barat hanya mewakili sebuah individu. Dalam kerangka pemahaman orang Indonesia,

³⁰ Satjipto Rahardjo. *Between Two Worlds: Modern State and Traditional Society in Indonesia*.

terdapat sebuah konflik dengan keterasingan, karena tidak ada perbedaan antara diri dan kelompok dalam hal kepemilikan, hingga pada suatu titik mendalam pada perasaan sebuah identitas. Hubungan antara individual dan masyarakat, hubungan antara individual dan negara, merupakan sebuah konsep yang berbeda dengan konsep manusia Barat, yang acapkali menitik beratkan perlindungan individual dari negara. Dalam konsep Barat, sistem hukum dirumuskan dalam pandangan dikotomi.³¹

Prof Tjip, sampai pada kesimpulan kalau manusia Indonesia itu adalah orang yang tak bisa hidup sendirian. Hidup sendirian adalah hal yang paling pilu dalam masyarakat ketimuran. Bahkan masyarakat Indonesia akan berasa berduka jika ia ‘diusir secara adat.’ Hukuman adat pengusiran itu bagi orang Indonesia jauh lebih pedih ketimbang hukuman mati sekalipun.

Barangkali prof Tjip melupakan sesuatu. Di kota-kota besar, orang lebih suka hidup menyendiri. Di gedung apartemen bertingkat yang tak mengenal tetangga. Atau pun di perumahan-perumahan yang menyandarkan pada kerja satpam ketimbang ronda.

Barangkali semangat komunal masih dimiliki oleh warga pedesaan. Sementara warga perkotaan sudah menyandarkan diri pada profesionalisme dan asuransi. Dulu orang, jika terjadi apa-apa, tetangga-tetangganya serta keluarganya, yang ambil alih. Kini, hal itu mulai pudar sudah.

Meskipun sebenarnya, pandangan Prof Tjip yang mengacu pada Soepomo ini juga bisa jadi sebuah kritik. Wajah asli jiwa bangsa masyarakat Indonesia adalah kekeluargaan. Lah, lantas kenapa semangat ini mulai menyusut?

³¹ Satjipto Rahardjo. *Between Two Worlds: Modern State and Traditional Society in Indonesia*. Law&Society Review, Vol. 28, No. 3 (1994)., pp. 493-502

Dalam studi hukum dan masyarakat, Prof Tjip mengamati antara idealisme, kenyataan dan cara ber hukum. Tidak seperti sosiolog pada umumnya yang kerjanya seperti ‘wartawan’. Menyalin sebuah fakta. Prof Tjip menekankan aspek moralitas. Meskipun ia juga tetap menyandarkan argumentasinya, kebanyakan, pada sosiolog besar zamannya.

Sebut saja Talcott Parsons, adalah seorang sosiolog Amerika (1902-1979) yang banyak ia kutip dalam disertasinya. Buku Pasons, ‘*The Social System*’³² adalah buku wajib yang perlu dikhatamkan oleh murid-murid beliau di Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.

Hampir setiap buku-bukunya yang ditulisnya, nama Parsons mewarnai saban sudutnya. Penggunaan Parsons sering kali digunakan oleh Prof Tjip menjustifikasi bahwa hukum itu terhubung dengan sektor ekonomi, sosial, dan politik. Dengan demikian, orang hukum, tak bisa berdiri sendirian mengatasi persoalan.

Sepandai-pandainya orang hukum, ia bagai Detektif Conan. Shinichi Kudo (Conan), seorang detektif handal yang diracun menjadi anak kecil, lantas memanfaatkan Kogoro Mori untuk mengungkap semua kasus sulit. Sesukar apa pun kasusnya, Shinichi Kudo ini bisa menyelesaikannya dengan cukup valid, detail, dan membongkar semua alibi.

Kendatipun demikian, sehebat-hebatnya Conan, ia hanya bisa menyelesaikan kasus satu-per-satu. Ia tidak bisa menyelesaikan secara sistematis dan menyeluruh persoalan hukum. Sebab problem hukum, sungguh, sebenarnya berasal dari luar hukum.

Apa jadinya jika di jalanan kesenjangan sosial makin melebar. Anak-anak muda pada nongkrong di pinggir

³² Talcott Parsons. *The Social System*. Routledge, 1951.

jembatan. Tanpa pekerjaan dan aktivitas produktif mereka menghabiskan waktunya hanya duduk-duduk dan melihat siapa yang lewat.

Apa jadinya juga saat melihat anak-anak putus sekolah. Mereka menyambangi orang-orang yang duduk menyantap makanan lesehan untuk meminta sedekah. Sementara seharusnya mereka ini sedang belajar membaca dan berhitung di bangku persekolahan.

Dengan kondisi semacam ini, maka kejahatan pun semakin merajalela.

Hukum, dalam pandangan Prof Tjip, perlu didekati dari berbagai sudut pandang. Paling tidak, titik berat pada analisis sosial, diperlukan. Oleh karenanya, studi hukum dan masyarakat yang ditekuni oleh Prof Tjip terdapat dua ciri. Pertama, penggunaan teori sosial, ia banyak mengutip dari para sosiolog-sosiolog. Kedua, ia meneruskan dari para pemikir hukum dan masyarakat

Para sosiolog yang sering ia kutip mulai dari era klasik, seperti Karl Marx, Emile Durkheim dan Max Weber. Ia tak banyak menyinggung Marx. Kecuali saat menjelaskan gerakan hukum kritis. Itu pun sangat jarang.

Durkheim dan Weber banyak dikutip oleh Prof Tjip, untuk menjelaskan fenomena hukum dan kasus-kasus di Indonesia. Dalam tradisi studi hukum, pendekatan Weber dan Durkheim ini sangat berguna untuk menjelaskan struktur masyarakat dan struktur kelembagaan. Kajian ini bisa digunakan juga untuk menjelaskan pola pembagian kewenangan dan budaya hukum para penegak hukum.

Selain Marx, Weber dan Durkheim, Prof Tjip juga sering mengutip para sosiolog besar lain, seperti Talcott Parsons, Niklas Luhmann, Anthony Giddens, Habermas, dan masih banyak pemikir sosial yang lain.

Selanjutnya, di samping mengutip dan menggunakan pisau analisa sosiologi, Prof Tjip juga acapkali memakai pendekatan yang diracik oleh para pemikir hukum dan masyarakat sendiri. Seperti, Lawrence M Friedman, Philippe Nonet dan Philip Selnick, Marc Galanter, Sally Falk Moore, Peter Fitzpatrick, Roger Cotterrell, Gunther Teubner, Boaventura de Sausa Santos, Sally Engle Marry, Masaji Chiba dan masih banyak lagi.

Prof Tjip adalah pembaca yang cukup ulung. Sempat ada yang bertanya kepada beliau, sehari berapa jam membaca. Beliau menjawab, 'ya sudah tak terhitung lagi ya.' Daya baca dan kekuatan menulis beliau cukup besar. Hampir setiap perkuliahan beliau memberikan makalah kepada para mahasiswanya.

Meskipun saat membaca makalah-makalah kuliahnya ada kesan terburu-buru. Beberapa di antaranya terdapat kutipan langsung dan parafrase yang belum tuntas direnungkannya.

Namun produktivitas beliau memang layak diakui kehebatannya. Tulisan-tulisannya itu, mengayakan referensi studi hukum dan masyarakat. Hampir sebagian literatur soal hukum dan masyarakat berbahasa Inggris. Prof Tjip adalah sang pemula, orang yang mengawali kajian hukum dan masyarakat di Indonesia.

Membangun sebuah konstruksi hukum nasional, perlu kajian masyarakat yang mendalam. Itulah kira-kira keyakinan Prof Tjip. Utamanya, artikel yang ditulis oleh Prof Tjip tadi, dengan judul *'Between Two Worlds: Modern State and Traditional Society.'* Penyeragaman dan sentralisasi itu adalah prinsip yang penting dalam entitas politik negara hukum Indonesia.

Indonesia pun sudah mulai membuat sistem budaya yang menyatu, dengan hadirnya Bahasa Indonesia. Dengan

bahasa ini, Prof Tjip yakin, sistem hukum nasional bisa dibentuk dengan kontribusi berbagai aspek etnis, suku, adat, dan agama. Sayangnya untuk menyatukan apa yang disebut Indonesia ini, sering saja banyak percik-percik dan noda perselisihan.

Jakarta menjadi ibukota yang super dan mega-kota. Komunitas lokal yang tinggal jauh darinya terasa tertinggal. Satu kota ini mengontrol, mengatur, dan menyedot seluruh energi Nusantara ini. Tak terkecuali Aceh yang memberontak karena kediktatoran Jakarta. Prof Tjip menekankan, untuk menyusun sebuah produk hukum yang umum, diperlukan sumbangsih daerah untuk menyempurnakannya.

Saat terjadi sebuah konflik, pembicaraan dilakukan di atas prinsip perdamaian dan anti-kekerasan.³³ Masyarakat yang damai dan mampu memecahkan konfliknya secara beradab itulah yang dipelajari oleh Prof Tjip dalam studi hukum dan masyarakat.

Ditahap-tahap awal, Prof Tjip menulis studi hukum dan masyarakat, berorientasi pada kepercayaan pada hukum modern. Namun dalam pembentukan hukum modern ini, diperlukan perhatian besar pada kehidupan masyarakat. Utamanya masyarakat adat dan kelompok rentan yang perlu didengar suaranya.

Tentang Budaya Hukum

Bagan sistem hukum Lawrence M. Friedman soal substansi, struktur dan kultur hukum itu begitu melegenda. Hampir setiap tulisan menggunakan format sistem hukum ini. Desain Pembangunan Hukum Nasional (DBHN) yang

³³ Satjipto Rahardjo. *Between Two Worlds: Modern State and Traditional Society in Indonesia*. Law&Society Review, Vol. 28, No. 3 (1994)., pp. 493-502

diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pun bertahun-tahun memakai pendekatan ini.

Tapi apakah budaya hukum itu? Prof Tjip banyak menengulas tentang budaya hukum. Pada Kongres Kebudayaan 1991 pada tanggal 1 November 1991, Prof Tjip sendiri hadir sebagai pembicara. Ikut serta sebagai narasumber, seperti: Arief Budiman, Jenderal (Purnawirawan) Sumitro, Prof. Tilaar, Hotman M. Siahaan, Prof Mubyarto, Harry Tjan Silalahi dan beberapa tokoh yang lain.

Dalam kongres itu, Prof Tjip menyampaikan bahwa konstitusi adalah tuangan wawasan budaya bangsa. Ia menyebutnya sebagai 'orde asli' dari masyarakat Indonesia yang bersemangat kekeluargaan.

Berbeda dengan Prof Tjip, Arief Budiman waktu itu menyinggung budaya telah digerogeti oleh arus kapitalisme dan globalisasi. Tak terkecuali manusia Indonesia yang kian materialistis dan konsumtif.³⁴ Berbeda dengan Arief Budiman yang terkesan oposisi dengan arus politik kekuasaan. Prof Tjip ini kadang mengkritik dan sesekali membela.

Soal budaya hukum, Prof Tjip juga berbicara pada sebuah Seminar yang bertajuk 'Konsepsi Strategi Pembangunan Jangka Panjang Tahap II Aspek Sosial Budaya,' pada 7 Maret 1991 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian/ PTIK). Dalam seminar ini, hadir juga Marjono Reksodiputro, Kwik Kian Gie dan Melly G Tan.³⁵

Prof Tjip mengatakan bahwa membicarakan budaya masa lalu, nampaknya sebuah hal yang konservatif dan seolah-olah mendukung feodalisme. Namun kebudayaan bangsa Indonesia seperti *tepo seliro*, *alon-alon waton kelakon*,

³⁴ Kongres Kebudayaan 1991. *Kebudayaan Sulit Di Bicarakan Tanpa Menyinggung Kapitalisme*. Kompas, 1 November 1991.

³⁵ *Disiplin Nasional Rendah Karena Budaya Feodalisme dan 'Tepo Seliro'*. Kompas, 8 Maret 1991

budaya malu, dan sejenisnya itu perlu digali nilai-nilainya. Apakah kebiasaan ini malah justru mendukung sistem hukum atau sebaliknya.

Dari dua seminar ini, nampaknya Prof Tjip lebih tertambat hatinya untuk mengulas Kongres Kebudayaan 1991. Beliau mengatakan bahwa kongres tersebut adalah bagian dari sejarah. Membicarakan banyak aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi dan teknologi. Namun aspek hukum hanyalah sudut kecil dari perbincangan. Cukup mengejutkan jika ia (hukum) disambut hangat dalam pemberitaan.

KONGRES Kebudayaan 1991 telah berakhir. Bagaimanapun pandangan orang mengenai diadakannya kongres tersebut, peristiwa ini sudah terjadi dan sekarang menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Apabila di dalam kongres tersebut sekalian bidang kehidupan, seperti sosial, politik ekonomi maupun teknologi dibicarakan, maka itu hanya salah satu pertanda saja, bahwa kita cukup mengerti apa itu kebudayaan. Kebudayaan adalah perilaku substantif dan tampil dalam sekalian sektor kehidupan. Hukum tampil dengan sedikit unik dalam kongres tersebut. Sekalipun boleh dikatakan, bahwa ia hanya menempati sudut kecil saja dari lautan bahan yang dibicarakan, tetapi ternyata ia bisa mencuri tempat dalam rumusan hasil kongres dan menurut berita surat kabar bahkan sempat menimbulkan persoalan (Kompas, 3 November 1991).³⁶

Hukum adalah ‘sudut kecil saja dari lautan bahan yang dibicarakan,’ ternyata pembicaraan tentang hukum, yang beliau sendiri adalah narasumbernya, telah ‘mencuri tempat’ dalam rumusan hasil kongres dan berita surat kabar.

³⁶ Satjipto Rahardjo. *Hukum dalam Kongres Kebudayaan*. Kompas 12 November 1991.

Dalam tulisannya itu, Prof Tjip merenungkan antara relasi antara hukum dan budaya. Beliau mengatakan bahwa hukum itu adalah mesin dan teknologi. Ia cenderung kaku, birokratis, teknis dan keras. Sementara budaya itu lembut dan persuasif. Jika ada benturan antara hukum dan budaya, maka pada akhirnya budayalah yang merangsek kalah.

Apakah memang tidak ada sama sekali kemungkinan bagi budaya untuk mencampuri proses hukum? Kalau toh orang akan mengatakan, bahwa budaya itu mencampuri penegakan hukum, sebaiknya kita terlebih dahulu melihatnya dari suatu perspektif imbalan kekuatan antara hukum dan budaya. Hukum dan kebudayaan sama-sama melakukan kontrol terhadap kehidupan bermasyarakat, kendati kekuatannya berbeda. Hukum modern itu memiliki kualitas yang kuat untuk disebut sebagai “teknologi dan mesin”. Berbeda dengan kualitas tersebut, kebudayaan adalah jauh lebih lembut, karena ia bekerja dengan persuasi atau dalam istilah yang umum, melalui sosialisasi. Maka kita pun bisa mengerti, bahwa apabila terjadi benturan antara keduanya, budayalah yang akan banyak mengalami ‘kekalahan’.³⁷

Bagi Prof Tjip, menyelenggarakan hukum tidak sesimpel menggunakan buku telepon. Tetapi sebuah pergulatan budaya yang selalu memeras tenaga dan pikiran. Terlebih ‘wilayah samar-samar’ menentukan batas penafsiran setiap pasal.

Singkatnya prof Tjip ingin mengatakan bahwa budaya hukum adalah sebuah kajian antara pendekatan budaya dan hukum. Hukum yang karakternya kaku dan paripurna ini, perlu menari-nari dengan tafsirnya untuk bisa menyesuaikan dengan konteks budayanya. Kalau ini adalah konsep budaya

³⁷ Satjipto Rahardjo. *Hukum dalam Kongres Kebudayaan*. Kompas 12 November 1991.

hukum Prof Tjip, lalu bagaimana dengan budaya hukum yang banyak diperbincangkan pakar-pakar lain?

Marc Galanter menulis sebuah buku tentang lelucon advokat dan budaya hukum. Ia mengatakan bahwa budaya hukum itu terdiri dari berbagai sisi dan konflik visi hukum. Budaya hukum juga adalah ruang berbagi, saling terbenturnya, dan hubungan antara keyakinan, harapan dan aspirasi dari para pekerja hukum. Budaya hukum juga terlihat dalam referensi hukum dan menu makanan (kuliner) yang disantap oleh para pekerja hukum ini. Budaya hukum juga bisa termasuk dalam opini publik dalam sebuah survei, perdebatan hukum yang berhubungan dengan politik, media dan elite bisnis.³⁸

Galanter melihat budaya hukum adalah sebuah aktivitas rutin keseharian para penegak hukum dan pihak-pihak yang sering berinteraksi dengannya. Konon jika sebuah aktivitas dilakukan rutin, ia akan jadi kebiasaan. Kebiasaan dilakukan terus-menerus, itu akan menjadi karakter. Kalau sudah menjelma sebagai karakter, ia sudah mendarah daging.

Berbeda dengan Galanter, Profesor dari Universitas Leeds, Inggris, John Bell berpandangan bahwa kebudayaan sebagai ideologi. Budaya hukum dimulai dari representasi intelektual (*l'imaginaire*) dan proyeksi organisasi dalam sebuah rejim pemerintahan. Bell yakin bahwa budaya hukum adalah totalitas cara pandang yang terpahat pada norma dan nilai yang mengonstitusikan identitas politik.³⁹

Padangan John Bell ini terasa agak berat dan susah dicerna dengan sekali baca saja. Ideologi adalah hal yang

³⁸ Marc Galanter. *Lowering The Bar Lawyer Jokes&Legal Culture*. Wisconsin: the University of Wisconsin Press, 2005., halaman. 5

³⁹ John Bell. *French Legal Culture*. London: Butterworths, 2001., Halaman. 3

fundamental sekaligus abstrak untuk diperbincangkan. Pemikir hukum lain yang dikenal membicarakan budaya hukum adalah David Nelken. David Nelken adalah profesor hukum di Cambridge, Edinburg dan terakhir berlabuh di King's College London.

Ia juga pernah menjabat sebagai Profesor Istimewa (Distinguished Professor) dalam bidang institusi hukum dan perubahan sosial di Universitas Macerata. Ia menulis artikel berjudul 'Memikirkan Kembali Budaya Hukum'.⁴⁰

Kira-kira Nelken berpikir seperti ini. Budaya hukum itu adalah kerangka normatif legalitas yang terlihat dalam budaya keseharian kehidupan sosial dan politik, yang memandu perilaku sebuah populasi masyarakat dari sebuah negara hukum. Ada tiga kata kunci di sini, yakni: kerangka normatif legalitas dan negara hukum, budaya keseharian kehidupan sosial dan politik, dan perilaku masyarakat.

Studi terhadap budaya hukum bisa dilakukan untuk memahami bagaimana aktor di dunia hukum mengambil perannya. Tentang, bagaimana para pengambil kebijakan merumuskan sebuah keputusan dan aturan. Bagaimana penegak hukum profesional menjalankan prosedur dan seterusnya.

Jika kita kembali ke Prof Tjip, apa yang dikatakan oleh pemikir-pemikir di atas sebenarnya tidak jauh berbeda dengannya. Sedikit perbedaannya, Prof Tjip lebih menerjemahkan ke konteks budaya Indonesia.

Dalam sebuah kuliah di Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, beliau menulis sebuah makalah bertajuk 'Hukum dan Budaya Hukum.' Artikel yang ditulis pada 29 April 2003 ini, membicarakan tentang bagaimana hukum tidak

⁴⁰ David Nelken. *Rethinking Legal Culture*. Dalam Michael Freeman. *Law and sociology*. Vol. 8. Oxford: Oxford University Press, 2006., Halaman. 3

bisa bekerja sendiri. Tapi hukum perlu ditopang oleh matriks sosio-kultural, baru bisa jalan dan efektif.⁴¹

Di kesempatan yang lain, Prof Tjip juga pernah menulis sebuah artikel yang berjudul ‘Budaya Hukum sebagai Kekuatan Alternatif.’ Tulisan ini dibuatnya pada tanggal 22 Mei 2007, yang kira-kira meyakini bahwa kekuatan terbesar itu adalah budaya. Budaya itu lembut, tapi menggerakkan dengan suka cita.

Sebagai kekuatan terbesar, budaya perlu digali sebagai kapital bagi roda hukum. Jika sudah menjumpai jati diri kebudayaan bangsa ini, perlulah dirakit dalam sebuah sistem hukum.

Dalam suasana di mana hukum yang diharapkan menjadi penjaga ketertiban dan keteraturan kehidupan bangsa ternyata tampil dengan sangat mengecewakan, maka sebaiknya kita menengok kepada sumber daya alternatif. Dari perspektif holistik, hukum bukan satu-satunya penjamin dan penjaga ketertiban. Ketertiban pun bisa dibangun tanpa hukum (*order without law*). Kalau dunia memiliki Jepang untuk dijadikan acuan, maka Indonesia memiliki Bali. Ketertiban dan kedamaian di Bali banyak ditopang oleh budaya hukumnya. Sayang sekali beberapa waktu lalu ketertiban dan kedamaian yang ada dirusak oleh tangan-tangan dari ‘luar-Bali.’ Marilah mulai saat ini kita belajar dari kekuatan-kekuatan alternatif yang ada dalam diri bangsa sendiri, baik itu dari Bali maupun wilayah lain negeri ini, oleh karena kita tak dapat menggantungkan terciptanya ketertiban hanya pada institusi hukum negara.⁴²

⁴¹ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Budaya Hukum*. Tanggal 29 April 2003

⁴² Satjipto Rahardjo. *Budaya Hukum Sebagai Kekuatan Alternatif*. Tanggal 22 Mei 2007

Bali adalah simbol yang unik dalam menilik budaya hukum. Saat pranata adatnya mendukung sistem hukum dan keamanan di daerahnya. Betapa adat hidup dalam sanubari masyarakat berdampingan dengan hukum nasional.

Tantangan

Nikmatnya berselancar di dunia internet, tak selalu berujung cerita indah. Seperti kata Edmon, yang kini adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beberapa penulis dan peneliti lain juga meriwayatkan hal yang sama.

Bruce Scheier, peneliti yang berbasis teknologi dan keamanan, menulis ‘Data and Goliath.’ Ia mengutip fatwa mantan direktur NSA dan CIA Michael Hayden, yang mengatakan ‘Kita membunuh orang-orang berdasarkan metadata.’⁴³ Ungkapan ini cukup bengis. Untuk memberangus umat manusia, data-data yang distok ke pusat analisis intelijen, ternyata adalah senjata pemusnah massal itu sendiri.

Lama-lama, memang kita jadi *parno*. Saat telepon pintar kita berjibun aplikasi yang melukiskan persepsi lebih valid, merekam perilaku kita dan menerjemahkannya, ketimbang apa yang kita pikirkan sendiri. Dari sinilah, pandangan Shoshana Zuboff, yang berjudul ‘*the Age of Surveillance Capitalism*,’ yang menyakini ‘kedaulatan psikologi’ kita sudah hancur lebur.

Pandangan kita tentang keluarga, agama, seksualitas, gender, moralitas, pernikahan, komunitas, cinta, alam, pertemanan, karier, makanan, partisipasi politik, sudah direkonstruksi sedemikian rupa oleh perangkat digital.⁴⁴

⁴³ Bruce Schneier. *Data and Goliath. The Hidden Battles to Collect and Control Your World.*, p. 21

⁴⁴ Shoshana Zuboff. *The Age of Surveillance Capitalism.*, p. 40

Bahkan novel yang banyak dirujuk dalam studi teknologi digital, William Gibson, berjudul 'Neuromancer' (1984). Henry Dorsett Case, seorang peretas komputer bertalenta, sampai-sampai dikontrak khusus oleh mantan pejabat militer Amerika, Armitage untuk mendukung menjalankan misi rahasianya. Utamanya mengumpulkan data dan informasi operasi militer Uni Soviet waktu itu.⁴⁵

Di era digital, data adalah aset dan data adalah senjata itu sendiri.

Sehingga perlindungan terhadap data, sama halnya melindungi ruh dan jiwa, hari ini. Dan, perilaku digital kita adalah data yang mewah. Mulai dari *konek* dengan internet, merekam *website* yang dikunjungi, berapa huruf yang kita ketik, jaringan apa yang kita gunakan, perangkat lunak apa yang kita pakai dan install, semuanya adalah sebuah data, tulis Schneier.⁴⁶

Masih mengutip Schneier, yang melirik buku terbitan pimpinan Google, Eric Schmidt 'the New Digital Age,' (2013), menyampaikan

'Jika Anda menginginkan kami memiliki data Anda. Kami akan mempersembahkan iklan yang Anda ingin lihat, dan kita akan melayangkannya melalui web search, email, dan berbagai layanan. Ini sangat menyenangkan. Lalu, kenapa kita mengizinkan pemerintah mengakses data Anda, yang kami miliki? Karena kita takut dengan terorisme, takut dengan orang asing yang akan melecehkan anak-anak kita, kita juga takut pada bandar narkoba, dan takut pada orang jahat.'⁴⁷

⁴⁵ William Gibson. *Neuromancer (Remembering Tomorrow)*. 1984

⁴⁶ Bruce Schneier. *Data and Goliath.*, p. 5

⁴⁷ Bruce Schneier. *Data and Goliath.*, p. 9

Tak ada yang bisa mengalahkan pasokan data dari para raksasa yang bertengger di Silicon Valley. Mulai dari Yahoo, Paypal, Palo Alto, Facebook, Netflix, Intel, Cisco sampai Google dan dan hampir semua raksasa teknologi digital dunia berkumpul disana.

Dan percayalah, data yang mereka himpun, mereka simpan, dan mereka gunakan, dapat dipastikan, paling tidak, digunakan untuk mengimprovisasi produk dan layanan yang mereka punya. Meskipun banyak dalih yang diutarakan, seperti ‘kami ingin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,’ ‘kami ingin membuat manusia lebih bahagia,’ dan berbagai alasan yang lain.

Namun para raksasa teknologi digital ini, seperti yang diungkapkan oleh Zuboff, sudah menyiapkan ‘intelijen mesin’ yang mampu memprediksi apa yang kamu akan lakukan sekarang, secepatnya dan nanti. Lebih ngerinya, ialah yang nanti akan menentukan bagaimana cara kamu berpikir dan bertindak laku.⁴⁸

Tantangan terbesar dalam dunia teknologi digital adalah ketiadaan opsi. Nihilnya pilihan ialah hal tersulit di era semuanya perlu terkoneksi dengan internet. Absennya industri manufaktur di bidang teknologi digital nusantara, yang mampu kita pantau dan jangkau, tak kunjung muncul.

Kita berharap banyak dari raksasa perusahaan rintisan digital (*startup*) dalam negeri. Lebih melihat manusia Indonesia sebagai warga, ketimbang *customer*. Kepatuhan pada yurisdiksi Indonesia juga cukup diharapkan.

Kita pun berbangga mempunyai beberapa perusahaan rintisan digital seperti ojek *online*, *travel*, *market-place*, dst. Meskipun kepemilikan modal mereka sekarang pun bukan kepunyaan para pemrakarsa lagi.

⁴⁸ Shoshana Zuboff. *The Age of Surveillance Capitalism.*, p. 14

Warga (demos) dihipit oleh dua sisi. Sisi pertama adalah hukum dan pejabatnya yang korup menjemput dunia digital ini. Dan sisi lain, adalah keserakahan kapitalisme digital memupuk trafik, data, dst.

Paras hukum siber kita

Teknologi digital adalah dunia yang unik. Bahasa pengembangan perangkat lunak, punya pola dan modelnya masing-masing. Sampai pakar hukum siber terkenal, Lawrence Lessig menanyakan sinis, ‘apa mungkin dan apakah Anda berpikir, pemerintah bisa meregulasi kode perangkat lunak?’⁴⁹

Dulu orang membuat website dengan modal bahasa kode ‘html’ untuk tampilan depan (*frontend*) dan PHP buat sistem belakang (*backend*), sudah cukup. Namun hari ini, mulai dari pilihan *frontend web*, orang sudah banyak mempelajari bahasa program JavaScript, Elm, TypeScript, dst.

Begitu dengan opsi backend web, orang sudah banyak mengembangkan bahasa pemrograman yang cukup banyak. Mulai dari scala, python, go, ruby dan lebih banyak pilihan-pilihan yang lain.

Jelas, sistem dan bahasa pemrograman antara platform yang satu dengan yang lain akan sangat berbeda. Bahkan di dunia industri teknologi digital, saling menyembunyikan kerangka dan sistem operasi platform mereka. Apalagi untuk keamanan data mereka. Baik, website, aplikasi android, iOS sampai jaringan yang mereka punyai, akan disimpan rapat-rapat skema kerjanya.

Kejahatan siber adalah tantangan terbesar di era revolusi 4.0. Peretasan, penipuan *online*, pencurian data, pe-

⁴⁹ Lawrence Lessig. *Code, And Other Laws of Cyberspace*. 2006. Basic Books.

rusakan sistem dan seterusnya membayangi ekonomi digital hari ini.⁵⁰

Seperti yang tergambar di beberapa situs peta serangan siber, jumlah serangan tiap harinya di seluruh dunia mencapai ratusan ribu. Serangan ini bisa DDoS, virus, *spam*, *phishing*, dst. Pada tahun lalu, serangan siber yang ditujukan ke Indonesia mencapai 23.753.783 insiden siber.⁵¹

Bisa di bayangkan betapa intensitas, frekuensi dan kerentanan yang dimiliki oleh Indonesia sebagai sebuah komunitas negara-bangsa. Tak punya teknologi, minus sumber daya manusia, dan seterusnya.

Belum lagi masalah hukum yang berkenaan dengan pembajakan hak cipta di ruang siber, *worm*, virus, yurisdiksi, tanda tangan kontak, perdagangan elektronik, bukti elektronik, perlindungan data pribadi, penghinaan melalui media sosial, akses ilegal, dan masih banyak lagi.⁵²

Kejahatan siber semakin lama semakin kompleks, berkembang dengan teknologi mutakhir dan menyesuaikan konteksnya. Misalnya saat hari kita diwarnai dengan perbincangan tentang Corona. Ulah seorang peretas menyusun *malware* dengan nama ‘Coronavirus’, yang disebar-kan melalui situs-situs yang banyak menginformasikan soal perkembangan Corona.

Dengan mengelabui orang-orang yang sedang mencari informasi seputar wabah Corona, peretas menaruh tombol *double click* untuk *download* malware tersebut. Tanda-tanda

⁵⁰ James Boyle. *Shamans, Software, and Spleens. How the World is Under Attack from a New Form of Crime*, 2005., p. 16

⁵¹ <https://honeynet.bssn.go.id/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2020

⁵² Jonathan Rosenoer. *Cyberlaw. The Law of the internet*. 1997. Buku yang cukup padat berisi, menceritakan ruang lingkup dan studi kasus hukum siber tahun 1990-an.

PC yang sudah terinfeksi virus ini terdapat file program bernama Corona-virus-Map.com.exe, Corona-virus-Map.com.exe, Corona.exe, Bin.exe, Build.exe, dan Windows.Globalization.Fontgroups.exe files.⁵³ Selain *double* klik untuk men-*download*, berbagai variasi malware juga disusupkan melalui *phishing* link URL.

Dunia sedang mengalami duka, peretas topi hitam (*black hat hacker*) pun terus melakukan penetrasi secara keji. Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) juga mewartakan dalam peringatan keamanan. Tersebar APK Android yang tertanam fungsi malicious,⁵⁴ Worm Corona,⁵⁵ illegal akses pada *e-commerce*, *fintech*, situs *payment*,⁵⁶ serta *ransomware* yang tersebar melalui situs *wisecleaner*[.]*best*.⁵⁷

Sedemikian banyak ancaman siber, termasuk virus yang menyebar, namun sayangnya sistem hukum kita, utamanya UU ITE dan UU Telematika, tidak ada larangan secara eksplisit atau tekstual terhadap pidana penyebaran virus ini. Paling mentok, mereka akan dikenai ilegal akses dan perusakan data elektronik. Tapi pengaturan tentang larangan penciptaan virus dan penyebarannya tidak ada aturannya.

Perangkat hukum kita, berikut SDM-nya memang masih jauh panggang dari api. Entahlah.

⁵³<https://thehackernews.com/2020/03/coronavirus-maps-covid-19.html?m=1>, diakses pada tanggal 27 Maret 2020

⁵⁴<https://bssn.go.id/analisis-apk-android-coronavirus-apps-apk/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2020

⁵⁵<https://bssn.go.id/sms-worm-corona-safety-mask-apk-aplikasi-malicious-yang-memanfaatkan-momentum-kelangkaan-masker-sebagai-alat-pelindung-diri-terhadap-covid-19/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2020

⁵⁶<https://bssn.go.id/imbauan-keamanan-data-dan-sistem-elektronik-pendukung-penanganan-covid-19-bagi-penyelenggara-sistem-elektronik/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2020

⁵⁷<https://bssn.go.id/coronavirus-ransomware/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2020

Sisi Lain Dunia Siber

‘MARI mas’ pamit ojek *online* itu. Setelah menghantar sampai kos-kosan, bapak-bapak ojek *online* pergi pelan. Jaket hijaunya, yang warnanya sudah memudar itu, pun mulai menjauh. Sayup-sayup suara kendaraannya menghilang. Saya beri tanda bintang paripurna, lima. Tanpa teringat nama supir ojek *online*, dalam hati saya selalu ucapkan terima kasih.

Semua orang tahu. Profesi ojek *online* ini adalah satu dari pekerjaan baru di era industri 4.0 hari ini. Banyak lain pekerjaan yang dilahirkan dari dunia digital ini. Teman saya, seorang peretas topi putih (*ethical hacker*) mengaku menikmati pekerjaannya, karena ia bisa mengenakan kolor sewaktu bekerja. Ya, ia menghabiskan waktu kerjanya di atas kerancang tidurnya.

Ia mendapat pesanan dari *online* dan diberesin secara *online*. Ia tinggal rajin-rajin buka rekening tabungannya, apakah kerjaannya yang beres itu sudah ditransfer honoranya atau belum.

Kerjaan jarak jauh (*remote*) gaya anak muda zaman *now*, bisa disebut dengan pembebasan. Dulu saat kita mempelajari teori sosiologi, ada sebutan buruh yang teralienasi dengan pekerjaannya, kini perlu ditinjau ulang.

Dulu orang harus pakai seragam dulu, berangkat pagi, berjibaku dengan macet dimarahin majikan, dan setelah gajian habis untuk membayar cicilan. Sisa umur manusia, seolah-olah dihabiskan untuk melepaskan diri dari jerat-jerat tunggakan rumah, hutang, pendidikan, anak, dan dapur.

Tapi masa itu sudah sedikitnya bergeser. Supir ojek *online* dan peretas ini pun, nampaknya sudah bisa menabung atau ikut arisan. Yah, paling tidak, tiba waktunya untuk liburan, mereka pun bisa menikmatinya juga. Masak yang liburan hanya orang yang berduit saja.

Konon, revolusi industri 4.0 ini melahirkan emansipasi. Orang lebih menghormati profesi, teknologi dan integritas. Zaman feodalisme di dunia kerja telah berakhir. Diganti dengan rejim kerja-sama (*partnership*).

Sementara warga sebagai konsumen, dimanjakan sedemikian rupa. Tak perlu keluar rumah, jika malas masak di siang hari yang terik. Cukup pegang tombol di aplikasi. Dan, selamat menikmati makanan favorit Anda!

Kendatipun demikian, semua orang tahu, kalau era industri 4.0 ini melahirkan monopoli yang akut. Scott Galloway menulis buku 'The Four: The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook and Google.' Selain mengkritik empat serambi elektronik ini, Galloway tak henti-hentinya mengagung-agungkan dan mengkultuskan keempatnya.

Galloway melukiskan. Amazon menyediakan kesenangan dan kemudahan berbelanja. Tak perlu berkeringat mencari barang kesukaanmu, cukup menekan tombol. Layar telepon pintar Anda akan menayangkan barang idaman Anda, persis di depan jempol Anda yang tak kuasa menahan.

Amazon, menurut Galloway, pada 25 April 2017, pasar yang disediakan olehnya, setara dengan pasar Amerika yang sedianya dibagi ke Walmart, Target, Macy's, Kroger, Nordstrom, Tiffany&Co, Coach Williams-Sonoma, Tesco, Ikea, Carrefour, dan The Gap.

Sementara Apple, logonya saja sudah merepresentasikan kemakmuran, tingkat pendidikan dan nilai-nilai Barat. Sementara Facebook adalah cerita paling sukses dalam sejarah umat manusia. Sebanyak 7,5 milyar penggunaanya, sementara 1.2 milyar mempunyai hubungan keseharian dengan platform ini.

Terakhir, Google, masih menurut Galloway, 'dewa modern' yang menyediakan sumber pengetahuan.⁵⁸

Galloway mungkin lupa akan kiprah Huawei dan Alibaba di negeri yang saat ini telah melewati musibah virus Corona, Tiongkok.

Dan rasa-rasanya, platform selain dari enam raksasa di atas, hanyalah catatan kakinya saja. Konon, platform-platform lain tumbuh di bawah bayang-bayang dan infrastruktur yang disediakan oleh enam raksasa tersebut.

Edmon Makarim, seorang dedengkot hukum siber menekankan adanya imperialisme digital (*digital imperialism*).⁵⁹ Saat email yang kita pakai bukan milik kita. Saat chat yang kita gunakan bukan milik kita. Dan, media sosial yang kita pakai, pusat datanya nun jauh disana.

⁵⁸ Scott Galloway. *The Four. The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook, and Google*. New York: Penguin, 2017., p. 7-9

⁵⁹ Disampaikan dalam sebuah seminar pembaharuan hukum siber pada 12 April 2019.

Hukum Progresif: Teori atau Cuman Wacana?

SEPERTI yang diuraikan di bab sebelumnya. Saat dilirisnya buku ‘Membedah Hukum Progresif,’ Prof Tjip sendiri kurang yakin bahwa gagasannya itu adalah sebuah teori. Namun pada buku spesialnya, ‘Hukum dan Perilaku,’ beliau sudah menyatakan dengan tanpa keraguan, hukum progresif adalah sebuah teori.

Namun pada saat yang sama, setelah kepergian beliau, publik kembali mempertanyakan. Apakah hukum progresif itu teori, atau hanya sebuah wacana?

Memperbincangkan hal ini, jelas sangat membosankan dan berat. Menyelidiki apakah hukum progresif adalah teori atau bukan, perlu investigasi intelektual. Namun hal ini sangat penting untuk menerawang secara objektif. Kalau dibandingkan dengan teori kuantum dalam ilmu fisika, hukum progresif bukanlah apa-apa.

Kuantum dibahas oleh sekian banyak fisikawan dan para ilmuwan. Ia memiliki standar model prinsip-prinsip

mekanika kuantum yang pakem.⁶⁰ Mulai dari William Rowan Hamilton, Gustav Kirschhoff, Max Planck, Hans Bethe dan masih banyak lagi tokoh menentukan formula hukum energi ini.

Teori kuantum juga sudah diajarkan cukup lama. Sedari hipotesis Planck tentang kecepatan cahaya tahun 1900.⁶¹ Singkatnya, teori dalam ilmu fisika adalah sebuah bagan teoretis yang sudah diuji dalam laboratorium berulang-ulang dan hasilnya sama. Teori adalah sebuah siklus keteraturan dan pembuktian.⁶²

Jika dibandingkan dengan tradisi fisika ini. Gagasan hukum progresif tidak ada apa-apanya. Gagasan ini tidak diuji dalam sebuah laboratorium selama bertahun-tahun. Ia juga tidak mempunyai rumusan formulasi yang baku. Malah sebaliknya, gagasan hukum progresif kelihatan cair.

Objek kajiannya berupa cara bekerjanya hukum dan perilaku masyarakat juga makin cair. Bahkan jika di-riwayatkan, hukum progresif adalah sebuah 'penemuan yang tak disengaja.' Padahal tokoh kenamaan sains, Thomas Kuhn menekankan bahwa penemuan yang tak diharapkan dalam sebuah sains, penemuan yang tak diprediksikan tak bisa disebut sebagai fakta dan teori sains.⁶³

⁶⁰ Paul Busch & Pekka J. Lathi. *The Standard Model of Quantum Measurement Theory: History and Applications*, Foundations of Physics, Vol. 26, No. 7, 1996.

⁶¹ Helge Krach. *A Sense of History: History of Science and the Teaching of Introductory Quantum Theory*. Science&Education 1, 349-363, 1992. Kluwer Academic Publishers.

⁶² D. Bohm. *Quantum Theory as an Indication of a New Order in Physics. Part A. The Development of New Orders as Shown Through the History of Physics*. Foundations of Physics, Vol. 1, No. 4, 1971.

⁶³ Thomas S Kuhn. *The Structure of Scientific Revolution*. The University of Chicago Press, 1996., Halaman, p. 7

Kalau melihat pakem sains, secara tegas sebenarnya hukum progresif bukanlah sebuah teori. Sebab, penemuan hukum progresif yang tidak diprediksikan sebelumnya. Ukuran formulasi matematikanya juga tidak baku. Jika diterapkan hukum progresif ini, malah tidak terjadi keseragaman malah sebaliknya. Setiap orang bisa menafsirkan apa dan seperti apa hukum progresif ini.

Dengan kata lain, hukum progresif hanyalah sebuah wacana saja sebenarnya.

Kendatipun demikian, tradisi sains dan intelektual bukanlah kenyataan yang homogen. Dalam tradisi sosiologi, kita kenal sebutan teori yang berbasis temuan di lapangan (*grounded theory*). Teori ini dirumuskan dari materi-materi yang dikumpulkan dari penelitian di daratan. Bisa dikatakan bahwa teori ini disusun dari narasi yang menempel dari pola realitas sosial.⁶⁴

Teori yang berbasis temuan di lapangan (*grounded theory*) ini, juga sering dipahami sebagai hasil dari pendekatan sangat dekat dengan data. Yang data ini berlaku dalam situasi keseharian. Sementara data ini juga hasil dari perenungan seorang peneliti (sosiolog) yang mengembangkan teorinya, yang berasal dari gagasan idealnya, nilai-nilainya, dan pendekatannya pada kelas sosial.⁶⁵

Kalaupun teori yang berbasis temuan di lapangan (*grounded theory*) ini, adalah disebut teori juga. Maka hukum progresif yang sudah dibenturkan secara terus menerus oleh

⁶⁴ Adele E. Clarke. *Situational Analysis. Grunded Theory After the Postmodern Turn*. London, Sage Publications, 2005., Halaman, p. 7. Konstruksionisme material adalah kata yang dibahas dalam paragraf ini. Dalam interaksi sosial akan dihasilkan hukum-hukum. Hukum inilah yang bisa menggambarkan rutinitas dari kegiatan masyarakat. Dan, hukum ini juga sudah bagian yang tak terpisahkan dari interpretasi dan analisis.

⁶⁵ ., Halaman, p. 237-8

sang empunya dengan kasus-kasus hukum populer waktu itu, maka ia sudah selayaknya menjadi teori.

Sebelumnya, dalam buku saya, ‘Satjipto Rahardjo: Sebuah Biografi Intelektual.’ Hukum progresif saya tempatkan sebagai paradigma dan filsafat. Hukum progresif itu punya dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis tersendiri.

Untuk bisa mempermudah penggunaan hukum progresif dalam aspek praktis, dalam buku ini disusunlah sebuah diksi ‘teori hukum progresif.’

Ruang Lingkup Hukum Progresif

Jika disederhanakan, hukum progresif itu mencakup tiga hal. Yakni cara berhukum yang bernurani, slogan hukum untuk manusia, dan terakhir adalah soal aktor dan aksi progresif. Memang akan sangat kompleks jika kita mendefinisikan hukum progresif. Ada ribuan artikel Prof Tjip dari tahun 1970-an sampai 2010. Maka akan sangat rumit mengamati detailnya.

Pertama, cara berhukum yang bernurani ini adalah berkenaan dengan pandangan Prof Tjip, bahwa menyelenggarakan hukum itu tidak hanya fokus para pasal. Tetapi juga berkaitan dengan sistem yang lebih luas. Prof Tjip sendiri mengartikan cara berhukum itu sebagai satuan dari:

‘...misi hukum, paradigma, pengetahuan hukum, perundang-undangan, penggunaan teori dan perilaku tekad dan kepedulian (*commitment*), keberanian (*dare*), determinasi, empati serta rasa-perasaan (*compassion*).’⁶⁶

Dari uraian kata-kata yang disusun oleh Prof Tjip, terlihat bahwa, beliau memang keluar dari pakem. Orang

⁶⁶ Satjipto Rahardjo. *Arsenal Hukum Progresif*, 2007

hukum fokus mereka adalah Pasal. Matematika hukum. Dalam pidana para ahli akan memperdebatkan unsur-unsur dalam formulasi pasal. Apakah seseorang itu sudah cakap hukum? Apakah tindakan seseorang itu memenuhi kualifikasi sebagai delik? Apakah seseorang pelaku utama atau terlibat dalam penyertaan?

Pun dalam hukum perdata, apakah pihak tersebut melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi? Dalam hukum tata negara, yang diperdebatkan apakah keputusan ataukah peraturan? Prof Tjip nampaknya tidak banyak mencampuri urusan itu.

Yang sering menjadi urusan dari Prof Tjip adalah kesatuan hukum itu tidak hanya pasal. Melainkan juga pengetahuan hukum, penggunaan teori, dan paradigma. Kalau sarjana hukum itu hanya tahunya teori itu-itulah saja. Kalau sarjana hukum itu pengetahuannya minim. Dan kalau sarjana hukum itu tak paham paradigma. Ya mending ke laut saja. Tak berguna.

Cara berhukum yang bernurani itu mensyaratkan tingkat intelektualitas yang mumpuni seorang sarjana hukum. Jika kadar intelektualitas sarjana hukum itu rendah, maka ia akan mudah ditipu. Ia pun akan mudah diombang-ambingkan oleh tren. Dan, ia pun mudah gegar budaya.

Namun pintar saja tidaklah cukup. Terpenting adalah empati dan simpati seorang sarjana hukum. Prof Tjip melihat bahwa cara berhukum yang bernurani itu adalah kesatuan penyelenggaraan antara peraturan-perundang-undangan, pengetahuan dan empati.

Kedua, slogan hukum untuk manusia. Ini adalah slogan yang paling terkenal dimiliki oleh Prof Tjip. Dan hampir semuanya Tjipian (para peminat hukum progresif) menggunakan jargon ini. Hukum untuk manusia. Prof Tjip sendiri sering menggunakan jargon ini di hampir setiap kesempatan.

Kata beliau, ‘hukum untuk manusia,’ laksana kata biasa. Namun jika kita tarik dari aspek filsafat sampai ke lapangan praktik penegakan hukum, hal ini sungguh besar perbedaannya. Utamanya perbedaannya ‘hukum untuk hukum.’

Hukum untuk hukum itu terbujur kaku bagaikan mayat. Tanda kematian. Sementara, hukum untuk manusia itu lentur dan lembut bagaikan kulit bayi. Tanda kehidupan.

Hukum untuk manusia itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Ia tidak terjebak pada prosedur dan aturan teknis saja. Yang ia lihat adalah rasa keadilan masyarakatnya.

Pandangan hukum untuk manusia ini pun terlihat dalam banyak isu yang diulas oleh Prof Tjip. Umpamanya soal konstitusi dan negara hukum. Bagi Prof Tjip, tugas sejarah dari konstitusi dan negara hukum, sesungguhnya, tidak hanya menciptakan keteraturan saja. Akan tetapi tugas sejarah mereka adalah membahagiakan rakyatnya.

‘...membebaskan diri dari logika teks yang linier demi mencapai tujuan kemanusiaan lebih tinggi, menjadikan negara hukum sebagai rumah yang membahagiakan bagi seluruh rakyat.’⁶⁷

Maka untuk mencapai itu, sungguh, hukum tidak boleh terjebak dalam sebuah norma. Kreativitas sangat dibutuhkan oleh penegak hukum progresif. Dan, yang lebih penting adalah orientasi pada kemanusiaan.

Oleh karenanya, prof Tjip sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Seperti yang banyak diketahui, bahwa beliau sendiri menjabat sebagai komisioner Komnas HAM generasi pertama, periode 1993-1998. Pada tanggal 7 Juni 1993, berdasarkan Surat Keputusan Presiden

⁶⁷ Satjipto Rahardjo. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.

No. 50 Tahun 1993, mengangkat Prof Tjip sebagai komisioner.

Ia diangkat bersama sahabatnya Soetandyo, menduduki jabatan sebagai divisi kajian dan analisis hukum internasional.⁶⁸ Tak heran, jika kajian hak asasi manusia adalah sebuah keharusan dalam ruang pemikirannya.

Hukum untuk manusia, sederhananya juga boleh dikatakan hukum yang berbasis hak asasi manusia. Memang beberapa hak asasi manusia bisa ditangguhkan (*derogable rights*), namun hak hidup, hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak diperbudak itu mendapat tempat istimewa yang terlindungi dari pemikiran Prof Tjip.⁶⁹

Ketiga, aktor dan aksi progresif cukup dibutuhkan dalam merumuskan hukum progresif. Prof Tjip percaya bahwa

⁶⁸ Awaludin Marwan. *Satjipto Rahardjo: Sebuah Biografi Intelektual*.

⁶⁹ Prof Tjip sendiri tidak begitu tegas menolak atau menyetujui hukuman mati. Satu sisi, beliau mengatakan bahwa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, hukuman mati masih diatur, maka dari itu hukuman mati sah dan legal. Namun dikesempatan yang lain, beliau ingin mengatakan jawaban secara sosiologis juga diperlukan. Bahwa dari statistik, hukuman mati tidak sesuai dengan tujuan membuat efek jera dan menekan angka kriminalitas. Seperti yang beliau tulis seperti dibawah ini:

‘Statistik pidana mati di Amerika Serikat memberi tahu kepada kita, bahwa penggunaan pidana mati itu tidak berjalan secara linier dan matematis, melainkan penuh dengan intervensi ideologis. Penelitian sosiolog hukum Donald Black ingin mengatakan kepada kita, bahwa penegakan hukum di Amerika Serikat didasari oleh ideologi keunggulan ras putih. Apabila terjadi pembunuhan oleh warga kulit putih terhadap kulit hitam, maka risiko dijatuhkannya pidana mati mendekati nol. Di Ohio, selama kurun waktu 5 tahun tertentu, 47 orang kulit putih yang membunuh kulit hitam, tidak ada yang dijatuhi pidana mati; di Georga hanya dua dari 71; di Florida dari 80 tidak ada yang dijatuhi hukuman mati dan di Texas tidak ada seorangpun dari 142 orang kulit putih yang membunuh kulit hitam dijatuhi hukuman mati.’ Satjipto Rahardjo. *Sosiologi Hukuman Mati. Jurnal Legislasi*

sebaik-baik apa pun sebuah sistem hukum, kalau penegak hukumnya buruk, maka hasilnya pun akan tetap buruk.

Sebaliknya, jika hukumnya buruk sekalipun, kalau aparatnya baik, maka hasilnya pun akan tetap baik. Dengan kata lain, aktor dan berikut tindakannya itulah yang menjadi kunci. Dalam sebuah tulisan prof Tjip menekankan bahwa aktor progresif adalah: ‘aktor yang punya keberanian, energi, imajinasi dan kreativitas. Para penegak hukum berani menyelam lebih dalam. Menemukan keadilan.’⁷⁰

Karena titik tolaknya adalah manusianya, seperti yang sering kita baca dalam tulisan-tulisan Prof Tjip, beliau menyebutkan beberapa tokoh. Hakim progresif, adalah yang paling sering disebut oleh Prof Tjip. Seperti Bismar Siregar, Adi Andjojo Soetjipto dan Benjamin Mangkudilaga adalah sederetan nama yang sering disebut-sebut oleh Prof Tjip.

Kalau Hakim Agung Bismar Siregar lebih memilih keadilan daripada undang-undang, maka sesungguhnya ia telah melakukan pengujian terhadap batas kemampuan hukum. Keadilan yang tertimbun oleh teks harus dimunculkan kembali. Begitu juga dengan Hakim Agung Adi Andjojo Soetjipto yang berani mengambil risiko untuk menguji batas kemampuan undang-undang pada waktu mendakwa sejawatnya melakukan kolusi. Hakim Tinggi (waktu itu) Benyamin Mangkudilaga menambah panjang barisan hakim-hakim yang tidak sekedar menerapkan undang-undang secara harafiah, melainkan berani menguji batas kemampuan hukum pada saat mengalahkan pemerintah dalam Kasus Tempo.⁷¹

⁷⁰ Satjipto Rahardjo. *Menguji Batas Kemampuan Hukum*. Artikel yang dikirim oleh Prof Tjip ke *Kompas*, apakah diterima atau tidaknya, setelah dicek pada mesin pencari Google, belum ditemukan kata kunci yang sesuai judul yang dirumuskan. Besar kemungkinan artikel ini tidak terpublikasi di *Kompas*.

⁷¹ Satjipto Rahardjo. *Menguji Batas Kemampuan Hukum*.

Bismar Siregar lebih memilih keadilan ketimbang undang-undang, menurut Prof Tjip. Saat beliau menggunakan Pasal 378 KUHP untuk menghukum MR Sidabutar. Ia dihukum oleh Bismar karena terdakwa menimu seorang gadis yang dijanjikan akan dinikahi. Putusan No. 144/ Pid/ 1983/ PT-Medan, ini dipuja dan dihujat. Prof Tjip adalah pihak yang mengacungkan jempol putusan Bismar ini.

Bismar menjatuhkan pidana 3 tahun penjara, yakni sepuluh kali lipat dari hakim tingkat pertama. Terdakwa dihukum oleh Bismar dengan menggunakan Pasal 293 pencabulan anak, Pasal 378 penipuan, dan Pasal 335 KUHP perbuatan yang bermuatan ancaman kekerasan. Namun putusan ini kandas di level kasasi Mahkamah Agung.

Sekali lagi, Prof Tjip sangat mengagumi Bismar. Beliau mengukhtuskan keberaniannya, ketokohnya, dan putusan-putusan yang beliau nilai ‘progresif.’ Meskipun sebenarnya pada kasus MR Sidabutar ini, Bismar dan Adi Andojo terlibat dalam pertikaian ideologis. Adi sebagai Ketua Muda Pidana menolak keras sikap Bismar ini.⁷²

Prof Tjip memang menitik beratkan pada aktor. Sekali lagi, buku terakhir beliau, yang berjudul tentang ‘Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik,’ adalah kristalisasi kontemplasi beliau atas langkanya aktor progresif ini. Bab ini akan dibahas pada sub tema berikutnya dalam buku ini.

Meskipun menitik beratkan pada aktor. Prof Tjip juga mengangkat persoalan keadilan substansial. Jadi kebanyakan yang dikejar oleh para ahli hukum dan penegak hukum adalah bagaimana memproduksi keadilan prosedural. Sebagaimana yang beliau tulis dalam sebagai epilog dalam

⁷² Lihat reportase terlengkap soal Putusan ‘Bonda’ Bismar. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559fba87c3065/putusan-ibonda-i-yang-mengayun-bismar/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2019.

buku ‘Membedah Hukum Progresif.’ Epilognya sendiri cukup ambisius, dengan ditulis sebuah jargon besar ‘Indonesia Butuh Keadilan yang Progresif.’

‘...Hakim kehilangan kendali dan tidak bertanggung jawab terhadap hasil (*outcome*) dari pengadilan. Model serta proses pengadilan seperti itulah yang cenderung menghasilkan ‘pengadilan tanpa keadilan. mempraktikkan keadilan yang sarat dengan muatan prosedur seperti di AS menjadi terlalu mahal bagi Indonesia, baik dalam bilangan materi maupun kegagalan memberikan keadilan. Kita menginginkan keadilan substantif menjadi dasar Negara Hukum kita, karena itu prospek yang sangat baik untuk membahagiakan bangsa kita. Negara Hukum Indonesia hendaknya menjadi Negara yang membahagiakan rakyatnya dan untuk itu di sini dipilih konsep keadilan yang progresif, yang tidak lain adalah keadilan substantif tersebut.’⁷³

Dalam tulisan di atas bisa diterka, apa yang dibayangkan oleh Prof Tjip saat memikirkan apa dan bagaimana hukum progresif. Tak lain dan tak bukan, hukum progresif adalah pendekatan hukum yang bertujuan keadilan yang progresif, yakni keadilan yang substantif.

Biarkan Hukum Mengalir

Biarkan Hukum mengalir adalah sebuah buku yang ditulis oleh Prof Tjip pada tahun 2007. Tak seperti buku-buku sebelumnya, buku ini memang dikhususkan ditulis dalam sebuah paket utuh. Buku-buku sebelumnya kebanyakan adalah kumpulan artikelnya Prof Tjip. Seperti Membedah Hukum Progresif, Sisi Lain Hukum, dan Membangun Polisi Sipil.

⁷³ Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006

Tulisan-tulisan dalam buku ini adalah orisinal, dalam arti ditulis secara khusus untuk buku ini. Kendatipun ditulis dalam bentuk topikal, tetapi sekalian bab dalam buku ini diikat oleh suatu perspektif atau optik tertentu dalam memandang dan memahami hukum, yaitu tidak dalam batas-batas hukum itu sendiri (*niet uitsluitend aan de hand van binnen het recht beschikbare rechts-bronnen*). Diamati dalam konteks yang demikian itu, hukum itu tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Sesungguhnya, hukum adalah untuk manusia.⁷⁴

Di paragraf paling awal, pada kata pengantar buku ini sudah ditasbihkan bahwasanya, buku ini sifatnya spesial dan jargon hukum untuk manusia, diulas sedari awal. Tesis dasar dari buku ini adalah hukum itu terus bergerak. Sebab manusia yang menjalankan dan memproduksi hukum juga terus bergerak. Artinya hukum mengalir.

Dengan kata lain tidak ada jalan buntu, mentok, atau *deadlock* dalam berhukum. Seolah-olah saat terjadi kekosongan hukum, terasa sudah tidak ada peluang lagi, gelap-gulita. Yakinlah, cahaya itu selalu ada dalam kreativitas dan empati terdalam kemanusiaan. Dan, hukum adalah narasi atas kisah-kasih antar manusia.

Oleh Prof Tjip sendiri, buku ini disebut sebagai *the Tao of Law*, sebagai kepanjangan teoretis atas buku Fritjof Capra tentang *the Tao of Physics*. Filsafat Tao itu bisa dilihat dalam seni Tai Chi. Dalam konsep tradisional Cina, orang yang mendalaminya, dapat meningkatkan aliran Chi (Qi), dari sebuah energi fisik yang tak terlihat, berikut kekuatan jiwa. Keselarasan dengan alam, embusan angin, gemericik suara air, dentingan bunyi kecapi, menyeimbangkan jiwa.

⁷⁴ Satjipto Rahardjo. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta, Kompas, 2007., Halaman, vii

Pada titik inilah hukum, menurut Prof Tjip hendaknya mengikuti panggilan suara alam. Kodrat hukum adalah melayani manusia. Mempermudah kehidupan sosial manusia. Mengonstruksi jagat ketertiban. Bukan mengerang dan membikin nestapa. Bahkan pada orang yang khilaf berbuat jahat. Konsep rehabilitasi terasa lebih lembut ketimbang pembedanaan.

Oleh karenanya, Prof Tjip mengulas dengan jeli, dan mendeklarasikan bahwa ‘hukum itu manusia, bukan mesin.’ Pada titik ini, sebenarnya kita akan dihadapkan di masa yang akan datang penyelesaian sengketa digital (*online dispute resolution*). Dengan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), yang berbasis pada otomatisasi, robot, dan komputerisasi, sengketa hukum yang berjibun jumlahnya bisa dipecahkan dengan algoritme.

Namun Prof Tjip berpesan, meskipun kecerdasan buatan ini mampu memecahkan banyak persoalan secara otomatis. Namun cita-rasa kemanusiaan dan sentuhannya tak bisa ditinggalkan begitu saja. Mungkin pandangan Prof Tjip ini di masa depan malah justru menjadi pendekatan yang konservatif. Terlalu mengandalkan kekuatan manusia.

Padahal kecerdasan buatan itu bisa memecahkan sengketa hukum dengan skala besar dan efisien. Pada titik ini, lumayan terasa, ketegangan antar kemanusiaan dan hukum yang mengalir tadi. Gagasan buku ini adalah hukum yang terus berjalan dan mengikuti kemutakhiran sains. Dan, bukannya kecerdasan buatan adalah sains.

Memang kita dihadapkan dengan opsi yang sulit. Gagasan hukum yang terus mengalir adalah ide kunci, wasiat Prof Tjip dalam buku ini. Saking fokus pada ide ini, Prof Tjip menyisihkan standar akademik dalam penulisannya.

‘Buku ini sengaja tidak ditulis menurut standar akademis yang ketat, misalnya mengharuskan untuk

mencantumkan sumber buku, artikel yang dikutip. Pada hemat saya, pencantuman sumber-sumber tidak akan mengakrabkan pembaca dengan isi buku ini, karena akan berbau akademis. Perdebatan akademis yang mengiringi hal-hal yang ditulis dalam buku ini, juga diusahakan untuk ditekan serendah-rendahnya. Semuanya diusahakan untuk ditulis sebagai sebuah cerita yang mengalir saja, supaya pembaca merasa lebih nyaman.⁷⁵

Usaha keras Prof Tjip untuk menyampaikan gagasannya membuahkan hasil. Beliau banyak dikutip oleh murid-muridnya. Namun pada aspek yang lain, kritik yang dihujankan padanya juga teramat banyak.

Beberapa pakar hukum menolak penggunaan hukum progresif dalam penegakan hukum. Sebab sebagai gagasan yang terbuka, hukum progresif pun bisa ditafsirkan oleh para koruptor, pejabat yang menyalah-gunakan wewenangnya untuk kolusi maupun nepotisme, dan kelompok rasial yang mengumbar sentimen minoritas.

Untuk itulah Prof Tjip dalam buku ini sebenarnya mempertanyakan kembali kepastian hukum. Jika nilai hukum hanya berpedoman pada kepastian, maka hukum tidak bisa diperkerjakan secara maksimal.

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Gustav Radbruch itulah yang memperkenalkan tiga nilai hukum yang dihafal semua ahli hukum. Adalah kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Radburch sendiri adalah seorang filsuf Jerman (21 November 1878-23 November 1949), yang sempat menjabat sebagai Menteri Kehakiman Jerman. Bagi Radburch yang dikenal sebagai sosok filsuf yang berbasis pada aliran hukum

⁷⁵ Satjipto Rahardjo. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta, Kompas, 2007., Halaman, ix

kodrat, ia bertanya ‘apa status dari sebuah hukum yang tidak adil?’

Hukum yang tidak adil adalah hukum yang gagal mempersembahkan kemanfaatan pada masyarakat. Dan, ia sebut hukum ini sebagai hukum palsu (*false law*). Bagi Radbruch, hukum positif yang berlaku saja tidak bisa secara otomatis bermakna melayani keadilan.⁷⁶

Radbruch meyakini bahwa hukum itu adalah bercampur aduknya antara nilai dan realitas. Apa gunanya nilai tanpa kenyataan yang menopangnya. Ia bisa jadi hukum yang tertidur. Pun demikian, apa gunanya kenyataan tanpa maksim nilai-nilai yang diagungkannya. Lebih lanjut, hukum itu bisa dilihat dari nilai-nilai yang buta (*value-blind*).

Artinya, hukum itu terdiri dari norma-norma yang tersusun seperti hukum matematika atau fisika. Sama seperti ilmu alam pada umumnya. Sementara pada saat yang bersamaan, hukum adalah ‘alat evaluasi sikap.’⁷⁷ Tindakan mana yang boleh, dan mana yang dilarang. Sesederhana itu sebenarnya.

Pada titik pemujaan pada keadilan dan kemanfaatan inilah Prof Tjip bersetuju dengan Radbruch. Karena pendekatan sosiologisnya, Prof Tjip lebih cenderung memilih kemanfaatan, ketimbang keadilan. Meskipun beliau sendiri memformulasikan keadilan progresif. Namun, cukup masuk akal sekali, apabila seorang sosiolog (Prof Tjip) memandang keadilan adalah konsep abstrak dan utopis.

⁷⁶ Stanley L. Paulson. Lon L. Fuller, *Gustav Radbruch, and The ‘Positivist’ Theses*. Law and Philosophy 13: 313-359, 1994. Kluwer Academic Publishers.

⁷⁷ Tobern Spaak. *Meta-Ethics and Legal Theory: The case of Gustav Radbruch*. Law and Philosophy (2009) 28:261-290.

Hukum yang mengalir itu, hendaknya adalah hukum yang terus menerus memberikan kemanfaatan bagi umat manusia.

Manusia yang Baik

Hidup baik adalah dasar hukum yang baik. Itu adalah sub judul dalam sebuah buku spesial terakhir yang ditulis oleh Prof Tjip. Sama seperti buku biarkan hukum mengalir. Buku ini adalah karya yang lumayan paling komprehensif melihat gagasan hukum progresif. Bahkan pada buku ini, Prof Tjip sudah berani terang-terangan menyatakan sedang berteori.

‘Buku ini berbicara tentang hukum, tetapi pembahasannya tidak bersifat konvensional seperti umumnya buku-buku hukum, melainkan lebih banyak berbicara tentang manusia dan perilakunya. Dengan demikian secara diam-diam, penulis mengajukan sebuah teori tentang hukum. Dalam membicarakan hukum, penulis berangkat dari konsep tertentu mengenai hukum dan konsep itulah yang selanjutnya mewarnai pemahaman mengenai hukum dan berhukum. Buku ini berteori tentang hukum dan cara berhukum manusia.’⁷⁸

Kata kuncinya dalam paragraf di atas adalah teori tentang hukum. Saat ‘Membedah Hukum Progresif’ ditasbihkan ke ruang publik, Prof Tjip sendiri yang risau, apakah layak gagasannya tersebut dinamakan sebuah ‘hukum progresif.’ Bahkan I Gede Wiranata hendak menyematkan label sebuah teori pada rangkaian tulisan-tulisan Prof Tjip.

Sementara Prof Tjip sendiri sebenarnya agak kurang berkenan malahan dengan penamaan itu. Apalagi sampai

⁷⁸ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perilaku: Hukum Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta, Kompas, 2009. Halaman., p. vii

menyebutkan gagasannya sebagai teori. Jauh panggang dari api.

Namun tak disangka, kelak kemudian hari. Utamanya dalam buku terakhir yang ditulisnya, beliau menyebutkan hal ini, sebagai teori. Akhirnya, lengkap sudah, Prof Tjip sendiri menyebut secara tidak langsung: teori hukum progresif.

Teori hukum progresif Prof Tjip ini konsep kebaikan. Jika disandingkan, apa yang ditulis oleh Prof Tjip di masa akhir hidupnya ini, seperti apa yang ditulis oleh Dworkin sebelum wafat. Dworkin sebelum menutup usianya, menulis '*Justice for Hedgehogs*.'

Salah tesisnya, Dworkin berkeyakinan bahwa hukum itu berlandaskan pada moralitas dan motif para penggunanya. Lebih lanjut, Dworkin menekankan pentingnya apa yang ia sebut sebagai 'kebaikan objektif.' Kebaikan objektif tidak hanya seseorang butuhkan, tetapi juga bagaimana setiap orang berhasrat dan membangun sebuah hukum di atasnya.⁷⁹

Urusan hukum, semuanya mudah selesai, jika para pihak punya itikad baik. Jika hal ini ditafsirkan dalam praktik hukum. Dalam sebuah perjanjian, itikad baik atau biasa disebut dalam bahasa Belanda *de goede trouw* atau bahasa Inggris *good faith*, adalah esensial.

Bahkan jika ada perselisihan, para pihak tak lekas menganalisis perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) pihak lain atau wanprestasi lawannya, melainkan mencari jalan menyelesaikan masalah dengan baik. Melalui musyawarah mufakat, tak sampai ke arbitrase apalagi sampai ke pengadilan.

⁷⁹ Ronald Dworkin. *Justice for Hedgehogs*. Harvard: Harvard University Press, 2011., Halaman, p. 48

Selain itu, paras sistem hukum juga punya andil melahirnya bopengnya kehidupan hukum kita. Hukum modern konon memajukan jagat ketertiban manusia. Namun setelah dirasa-rasa, hukum modern membuat hukum menjadi otonom dan mandiri, terpisah dengan kehidupan masyarakatnya. Kata Prof Tjip seperti ini.

‘Hukum (tiba-tiba) menjadi mandiri, pertama, karena merupakan tatanan yang dibuat dengan sengaja. Dimulai dari kaidahnya, maka hukum modern didominasi oleh peraturan yang dibuat dengan sengaja oleh lembaga yang diberi wewenang untuk itu. Kaidah-kaidah lahir sebagai peraturan yang hanya boleh dibuat oleh badan legislatif tersebut. Hukum lahir dari badan yang khusus diberi wewenang untuk membuat hukum. Dari situ kemudian mengalir yang lain-lain, seperti logika dan prosedur hukum, personel-personel dan administrasi yang khusus.

Sistem hukum menjadi sesuatu yang mandiri yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu sebagai sesuatu institut baru yang unik yang dibuat secara sengaja dan rasional. Kemandirian tersebut sekaligus juga menjadikan hukum itu sebagai wilayah yang esoteris, terasing dari masyarakat awam.’⁸⁰

Fase ini disebut prof Tjip sebagai tahap alienasi. Di mana manusia terpisah dari hukum yang dibuatnya. Hukum malah menjadi mesin pengisap dan penindas kemanusiaan para penciptanya. Hukum menjadi mesin yang terjebak pada badan-badan super kaku, yang sulit diakses oleh masyarakatnya.

Dari titik inilah diperlukan pendekatan yang lebih humanistik. Sebuah pendekatan masyarakat diperlukan, ketimbang studi hukum itu sendiri. Maka di akhir cerita,

⁸⁰ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perilaku: Hukum Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta, Kompas, 2009. Halaman, p. 3

Prof Tjip hendak mengatakan bahwa studi terhadap perilaku masyarakat itu lebih fundamental berkontribusi pada pembangunan hukum.

Saat berbicara tentang konsep hukum dan masyarakat, Prof Tjip seperti seseorang yang bermazhab romantisisme.

Adalah Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf kelahiran Jenewa 28 Juni 1712, yang mengimpikan asal-usul sebuah masyarakat. Yaitu kontrak sosial. Masyarakat terdiri dari individu-individu yang mengikatkan diri pada sebuah perjanjian.

Selaras dengan ini Prof Tjip juga mengatakan bahwa kapital perdana dalam hidup bersama adalah saling percaya. Setelah lahirnya sebuah hukum, peningkatan kualitas sikap dan perbuatan mutlak perlu dilakukan untuk menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi derajatnya.

‘Modal pertama untuk membangun suatu kehidupan bersama adalah saling percaya antara para anggotanya. Tanpa modal tersebut yang ada hanyalah kumpulan dari sejumlah manusia yang tinggal pada satu wilayah geografi tertentu. Kelompok paling kental yang muncul dari kehidupan bersama itu adalah komunitas (*Gemeinschaft*) [...] tidak jahat kepada orang lain adalah beberapa contoh dari berperikemanusiaan yang baik itu. Semakin tinggi kualitas sikap dan perbuatan tersebut, semakin tinggi pula kualitas masyarakat di situ.’⁸¹

Saling pertama adalah kunci. Kesopan-santunan dan keberadaban sebuah masyarakat yang ditunjukkan dalam sikap, perilaku dan tindak-tanduknya adalah jalan menuju ‘naik kelas.’ Nalar baik adalah dasar seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Dworkin percaya bahwa

⁸¹ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perilaku: Hukum Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta, Kompas, 2009. Halaman, p. 8

putusan hakim itu tidak hanya berlaku secara yuridis, melainkan merasuk ke domain moralitas. Maka seorang hakim adalah seorang negarawan yang punya tingkat kedalaman penalaran dan moralitas yang tinggi.

Maka dari itu konsep hakim a la Prof Tjip, adalah manusia setengah dewa. Mereka orang punya integritas luas biasa (*outstanding*). Mereka yang bisa berbisik dengan alam gaib keadilan. Yang jelas mereka ini punya indra keenam, yakni indra penciuman untuk memilah mana yang hak dan mana yang batil.

Sehingga kategori orang seperti ini sudah tidak lagi memikirkan ‘bumi.’ Maka cukup heran jika ada kasus hakim kena operasi tangkap tangan. Apalagi setingkat hakim konstitusi, seperti kasus Akil Mochtar. Pada tanggal 2 Oktober 2013, sekitar 22.00 WIB, ia ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena diduga menerima uang suap dari Chairun Nisa anggota Fraksi Partai Golkar dan pengusaha Palangkaraya Cornelis Nalau.

Mereka dijarah dengan bukti uang sekitar Rp. 3 miliar yang terdiri dari 284.050 dolar Singapura dan 22.000 dolar Amerika. Terbukti bersalah menerima suap atas kasus pemilihan kepala daerah Lebak, Banten, Akil Mochtar dijatuhi hukuman seumur hidup.

Betapa besarnya kewenangan hakim konstitusi. Di tangannya setiap pasal dipertaruhkan dan kepala daerah ditentukan. Kalau perkara diperjual-belikan oleh hakim yang minus integritas seperti ini, maka keadilan tidak hanya tergores. Dunia hukum diselimuti kegelapan dan kemuraman.

Dalam sebuah makalah yang dipresentasikan di sebuah ruang kelas mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Prof Tjip menekankan bahwa hakim tidak hanya integritasnya yang luar biasa. Tetapi juga kematangan psikologinya pun harusnya sudah terbangun.

‘Hakim yang memutus adalah manusia, bukan robot atau mesin, oleh karena putusannya tak dapat dilepaskan dari subyektivitasnya sebagai manusia. Dalam kapasitasnya sebagai entitas bio-psikis demikian itu, maka pembuatan putusan turut ditentukan oleh kondisi fisiologis dan psikisnya. Seorang hakim, misalnya, perlu memiliki kesehatan psikis, sehingga putusannya benar-benar dibuat oleh manusia yang sehat rohaninya. Oleh sebab itu, studi-studi tentang seorang hakim sebagai pribadi layak dilakukan, seperti tesis magister Antonius Sudirman yang membicarakan perilaku hakim Bismar Siregar (Sudirman, 1999).

Crombag, Wijkerslooth dan Cohen (Crombag et al, 1977) berbicara tentang psikologi putusan sang hakim. Oleh mereka, pembuatan putusan oleh hakim, dicoba dijelaskan dari suatu proses psikologis yang disebut sebagai penalaran regresif. Di sini hakim tidak mulai penalarannya dari nol, seperti seorang peneliti melakukan tugasnya, melainkan berangkat dari suatu konseptualisasi secara tiba-tiba tentang bagaimana persoalan diselesaikan (*onmiddelijk gecompieerde eind-of tussenoplossingen*). Hakim tidak melakukan langkahnya secara setapak demi setapak, melainkan secara lebih intuitif menggapai konsep tersebut. Di sini hakim menengok ke belakang, kepada apa yang di waktu lalu telah dikerjakan, berupa beberapa konseptualisasi penyelesaian persoalan. Potret inilah yang muncul secara tiba-tiba dan intuitif dan digunakan oleh hakim sebagai titik-tolak.¹⁸²

Hakim, bagi prof Tjip, tidak hanya seorang yang cerdas. Meskipun ia mengimpikan hakim murid-muridnya adalah para pembaca dan penulis ulung. Kematangan dan kedewasaan bersikap seorang hakim mutlak dibutuhkan. Dalam

⁸² Satjipto Rahardjo. *Sekitar Hakim yang Memutuskan*. Bahan Bacaan untuk Mahasiswa Program Doktor dalam Mata Kuliah Ilmu dan Teori Hukum No. 19. Naskah ditulis oleh Prof Tjip pada tanggal 10 Juni 2007.

filsafat ketimuran, menjadi arif dan bijak adalah yang fundamental dimiliki oleh hakim, sang wakil Tuhan di dunia ini.

Jelas tidak hanya hakim, meskipun Prof Tjip mempunyai fokus pada profesi ini. Di tangan godam palu sang hakim inilah nasib seseorang dipertaruhkan. Ia juga banyak memberikan pengamatan pada polisi. Dalam hukum dan perilaku, bukunya terakhir ini. Pesan-pesan spiritual terhadap reformasi kepolisian dihembuskan juga.

Beberapa kali ia menyebut peran jaksa dan posisi akademisi serta aktivis di bidang gerakan reformasi hukum juga mendapatkan hati di ruang pemikiran Prof Tjip.

Lapisan-Lapisan Studi Hukum

Prof Tjip di akhir hidupnya ternyata cukup ambisius dalam soal keilmuan. Bagi Prof Tjip, studi hukum itu pada akhirnya harus berinteraksi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi.

Prof Tjip menganggap studi perundang-undangan adalah awal dari sebuah studi hukum. Setelah itu, seorang ahli hukum perlu mempelajari aspek sosial dari hukum tersebut. Terakhir, setelah mengetahui konteks sebuah norma hukum, bagaimana posisi norma dan institusi hukum tersebut dalam kancah percaturan sains dan teknologi.

Hal yang sering kali dikutip oleh Tjipian (kelompok peminat studi hukum progresif, yang berasal dari kata panggilan Prof. Satjipto Rahardjo, dan tradisi pengikut mazhab pemikiran, seperti Hegelian, Kantian, Marxian, dan seterusnya, mereka menamakannya Tjipian), adalah pidato akhir jabatannya di UNDIP tahun 2000.

‘Sebagai orang tua sudah waktunya turun. Saya hanya menitipkan agar di Undip ini—juga di uni-

versitas lain—ilmu pengetahuan, termasuk hukum, diusahakan dengan progresif, dengan terus berusaha untuk berada pada puncak perkembangan atau kemutakhiran ilmu. Dengan demikian kita berharap dapat mempersembahkan yang terbaik pada bangsa dan negara.⁸³

Pada masa ini, Prof Tjip sangat intim dengan kutipan karya ilmuwan seperti Fritjof Capra, Edward O Wilson, Alvin Toffler, Ilya Prigogine, Isabelle Stengers, dan banyak lainnya. Prof Tjip di usia tuanya, tidak hanya mempelajari ilmu hukum. Tapi membaca karya fisika, biologi, psikologi, dan seterusnya.

Singkatnya, lapisan studi hukum Prof Tjip terdiri dari tiga jenjang. Pertama, studi hukum murni. Kedua, studi hukum dan masyarakat. Ketiga, studi yang beliau sebut sebagai *deep ecology* atau ekologi mendalam. Pada aspek ketiga ini, seorang ahli hukum hendaknya mempunyai pendekatan multidisipliner, holistik dan mengidentifikasi kosmologi (cara pandang) sebuah bangsa.

Kalau seorang hanya berhenti pada studi jenjang pertama ini. Prof Tjip malah agak sewot dan menjalankan propaganda cukup keras. Dengan menyebutnya para penstudi (jenjang pertama) ini terjebak dalam ‘kebodohan.’

‘Ilmu-ilmu alam yang perkembangannya sangat cepat itu harus didorong masuk ke ranah ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Di sisi lain, ilmu-ilmu sosial dan humaniora harus diakarkan kepada ilmu-ilmu alam.

Dengan informasi sains yang demikian itu, saya melihat kehadiran suatu lapisan studi yang paling dasar yang nantinya akan menjadi basis dari studi terhadap hukum sebagai suatu institut dalam masyarakat yang

⁸³ Satjipto Rahardjo. *Mengajar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan*. Pada tanggal 15 Desember 2000.

berdiri sendiri. Pada hemat saya, kita menjadi sangat bodoh apabila tidak mampu melihat informasi tersebut sebagai suatu masukan yang penting bagi studi hukum.⁸⁴

‘Kita menjadi sangat bodoh apabila tidak mampu melihat informasi tersebut (perkembangan sains).’ Kata-kata ini cukup tajam dan keras dilontarkan seorang begawan yang konon dikenal kesantunan dan kehalusan tuturnya.

Artikel yang ditulis oleh Prof Tjip ini, pada tahun 2009 dikumpulkan oleh murid beliau. Rahmat Syafaat, menggunakan artikel ini sebagai judul buku. Bersama-sama dengan artikel kuliah prof Tjip yang lain, buku ini diterbitkan dengan standar akademik yang cukup lumayan.⁸⁵

Artikel-artikel Prof Tjip yang digunakan sebagai bahan kuliah relatif cukup berat. Dibandingkan dengan artikelnya yang ditulis untuk *Kompas* atau media yang lain. Kutipan langsung dan parafrase dibubuhkan dimana-mana. Termasuk tulisan lapisan-lapisan dalam studi hukum ini.

Dalam catatan akhir bab ini, akan disertakan kutipan langsung pada artikel Prof Tjip, di mana beliau menari-nari di atas teks Capra dan Wilson.⁸⁶ Pada intinya Capra dan

⁸⁴ Satjipto Rahardjo. *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*. Bahan Bacaan Mahasiswa Program Doktor Hukum, UNDIP, untuk mata kuliah ilmu dan teori hukum No. 31. Ditulis pada tanggal 28 Mei 2008.

⁸⁵ Satjipto Rahardjo. *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*. Malang, Bayu Media, 2009.

⁸⁶ ‘Pemahaman baru sebagaimana dikemukakan oleh Capra, tidak sekedar menunjukkan, bahwa entitas-entitas di dunia, baik organisme maupun sistem sosial, ini saling bergantung (*interdependent*), tetapi lebih daripada itu. Ditunjukkan dengan jelas apa yang disebut sebagai keadaan saling bergantung itu dan bagaimana persisnya ia terjadi. Capra, misalnya berbicara tentang fenomena “*multiple feedback*”. Inilah yang secara serius menohok pemahaman kita tentang jagat kehidupan (*the universe*).

Sebagai pembelajar hukum yang selalu melihat “*the state of the*

Wilson menyatakan bahwa entitas kehidupan itu saling bergantung satu sama lain. Membaca sebuah sains, perlu setarik nafas dengan perkembangan sains yang lain. Astronomi, fisika, biologi, teknologi informasi, apalagi hukum sudah sedemikian meleburnya hari ini.

art in science" (baca: Risalah no. 3), yang tidak ingin melihat dan memahami hukum secara *isolated, secluded*, maka pikiran Capra tersebut sudah menjadi keharusan untuk direnungkan dan dilihat kaitannya dengan hukum dan ilmu hukum. Dalam bahasa Capra, maka sekalian entitas, baik biologis, fisika (*physics*) maupun sosial, itu memiliki kemampuan untuk mengorganiser dirinya sendiri (*self-organizing*). Dalam bahasa yang demikian itu, maka institut hukum adalah sebuah institut yang mampu melakukan pengorganisasian-diri secara otonom. Hukum itu ada di masyarakat sebagai suatu bentuk institut yang mampu mengorganiser dirinya sendiri. Pada saat itu pula hukum juga menjadi bergantung kepada asupan-asupan (*feedback*) dari entitas kehidupan lain. Jadi masing-masing entitas dalam jagat kehidupan itu saling menghidupi. Kalau diikuti saran Capra, maka sekarang ada agenda baru bagi para ilmuwan, yaitu untuk seorang yang meleak-ekologi (*eco-literacy*) [...]

Apa yang barusan kita diskusikan di atas adalah lapisan yang paling dasar dari studi dan ilmu hukum. Ia merupakan basis yang selalu harus dilihat dan diingat oleh hukum.

Dengan bahasa lain, Edward O. Wilson, sebagai seorang ahli biologi, sampai pada kesimpulan yang sama dengan Capra (Wilson, 1998). "*The greatest enterprise of the mind has always been and always will be the attempted linkage of the sciences and humanities.*" Wilson menolak cara kerja sains Cartesian yang menyacah-cacah obyeknya menjadi kepingan fragmentasi dan dengan demikian mengatakan telah menemukan kebenaran yang dicari. Itu bukan kebenaran, melainkan hanya bangunan artifisial yang dibuat oleh para ilmuwan "*The ongoing fragmentation of knowledge and resulting chaos in philosophy are not the reflections of the real world but artifacts of scholarship.*" Wilson berbicara men genbai 4 ranah, yaitu (1) 'environmental policy'; (2) 'ethics'; (3) 'social science' dan (4) 'biology'. Pada tingkat sains sekarang, "Yet undeniably each stands apart in the contemporary academic mind. Each has its own practitioners, language, modes of analysis, and standards of validation." Lihat, Satjipto Rahardjo. *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*. Bahan Bacaan Mahasiswa Program Doktor Hukum, UNDIP, untuk mata kuliah ilmu dan teori hukum No. 31. Ditulis pada tanggal 28 Mei 2008.

Sudah saatnya hukum juga bagian dari pergeseran yang drastis secara paradigmatis. Prof Tjip sudah memberikan kompas untuk itu. Bahwa sains sudah berkelindan dengan cepat. Pendekatan sistematis, holistik, dan multidisipliner.

Catatan Warisan

REVOLUSI 3.0 acapkali disematkan kepada sejarah penemuan internet. Revolusi ini juga sering dibayangkan masa awal pengembangan ilmu komputer jaringan. Setelah perang dunia kedua usai, perang dingin nampaknya menyisakan cerita penting.

Sputnik 1, seperti yang diketahui dalam buku sejarah sekolah adalah satelit pertama yang diluncurkan oleh Uni Soviet. Konon, Sputnik 1 yang diluncurkan pada 4 Oktober 1957 inilah yang menjadi awal cikal bakal dari sejarah internet di bumi ini. Sputnik 1 ini sempat mengelilingi bumi selama tiga minggu sebelum baterainya habis.

Satelit Sputnik ini dilengkapi dengan empat antena dan radio eksternal yang dapat menyiarkan sinyal. Dari satelit inilah, komunikasi dengan server di bumi jarak jauh dimungkinkan.

Tak mau ketinggalan dengan Uni Soviet, Amerika pun meliris the Advance Research Project (ARPA), yang diben-

tuk oleh Presiden D. Eisenhower pada Februari 1958. Dari proyek inilah disusun jaringan komputer pada tahun 1969, bernama ARPANET.⁸⁷

Departemen Pertahanan Amerika mencoba membikin komputer saling tersambung antara Pentagon dan kota-kota lain seperti Texas, California, Illinois sampai Hawaii.

Permulaan internet adalah proyek militer dan pertahanan dua raksasa Amerika dan Uni Soviet. Setelah itu, proyek ini mulai dikembangkan di kampus-kampus. Seperti University of California, Stanford Research Institute (SRI), University of Utah, sampai di Prancis pun l'universite de Toulouse Prancis ikut mengembangkan proyek pengembangan internet ini.

Setelah internet digunakan dan dikembangkan secara terbatas oleh militer dan kampus, awal tahun 1980-an, internet sudah mulai terprivatisasi lantaran dua perusahaan besar teknologi komputer, yakni Apple dan Microsoft.

Perbankan, pemerintah, pasar modal, perusahaan swasta dan semua elemen kehidupan sudah menggunakan internet. Namun kejahatan di dunia internet pada tahun 1990-an belum begitu banyak diperhatikan.

Hingga pada akhir dunia menyepakati peretasan, penipuan di dunia internet, pornografi anak, pembajakan hak cipta di dunia digital dan tindakan kejahatan siber lain, sebagai sebuah tindak pidana melalui *the Convention on Cybercrime* di Budapest pada 23 November 2001.

Soal Konvensi soal Kejahatan Siber dan data serta analisis kasus kejahatan siber akan di bahas dalam sebuah bab tersendiri.

⁸⁷ Manuel Castells. *The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business, and Society*. New York. Oxford University Press, 2001, p. 10-15.

Sementara di Indonesia, internet baru masuk pada tahun 90-an. Kendatipun demikian, divisi siber di Polri sudah didirikan sejak tahun 2001-an. Meski baru tahun 2008, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diterbitkan.

Pada titik ini, cukup menarik menggali inspirasi awal hukum siber yang pernah dituliskan oleh Prof Tjip, yang bisa dirakit dalam tiga pokok bahasan. Pertama, berhukum yang berhati nurani di era digital. Kedua, menyoal kenakalan anak dan kisah para peretas. Ketiga, kita akan membahas bagaimana awal era sosial media, digunakan untuk penguatan gerakan sosial.

Prof Tjip menulis tiga pokok bahasan ini yang bisa kita kembangkan dalam rangka merakit kerangka teori hukum progresif 3.0.

Berhukum dengan Nurani

Awalnya, UU ITE digedok pada tahun 2008. Prita adalah salah satu kasus yang mengawali berlakunya UU ini. Saat Prita diproses dalam sebuah persidangan. Prof Tjip pun menulis sebuah artikel dalam harian Kompas berjudul ‘Berhukum dengan Nurani.’ Beliau menulis demikian di bagian awal.

Prita Mulyasari adalah perempuan biasa, ibu rumah tangga, ibu dari dua anak balita yang berusia tiga tahun dan satu tahun tiga bulan.

Prita bukan koruptor, pembunuh, penipu, atau penjahat. Namun, hanya karena tersandung e-mail, ia harus berurusan dengan polisi, jaksa, bahkan masuk tahanan.

Perempuan itu hanya ingin curhat kepada teman-temannya mengenai layanan rumah sakit terhadap dirinya melalui e-mail.

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dikatakan, UU ITE itu dibuat antara lain untuk memberikan semacam hak untuk mengumumkan informasi. Justru Prita tersandung saat ingin berbagi informasi dengan teman-temannya.

Penulis tidak ingin terlibat debat dan proses hukum, hanya ingin menyentuh masalah lebih dalam dari kasus Prita. Masalah itu berkisar pada konsep hukum, apa guna hukum dan cara berhukum. Dengan membahas hal-hal itu, diharapkan akan mengurangi, syukur meniadakan, timbulnya kejadian seperti kasus Prita pada kemudian hari.

Akhir tahun lalu saya menulis "Berhukum dengan Akal Sehat" (Kompas, 19/12/2008). Intinya adalah adanya hubungan erat antara hukum dan manusia yang menjalankan. Hukum bukan teks semata, tetapi terkait alam pikiran dan nurani manusia yang menjalankan. Jadi, sudah saatnya kita mengubah konsep tentang hukum sebagai teks semata dan menambahkan hukum sebagai perilaku. Kasus Prita adalah contoh bagus tentang kaitan hukum dan perilaku manusia yang menjalankan.⁸⁸

Dari pandangan di atas, terlihat, Prof Tjip tidak ingin terjebak dalam diskusi berkenaan dengan unsur delik Pasal 27 ayat 3. Pandangan Prof Tjip justru adalah bahasa 'orang awam', yang menggugah rasa iba publik. Bahwa Prita adalah seorang ibu rumah tangga, dengan dua anak balita.

Prof Tjip juga menyampaikan bahwa UU ITE ini, sungguh disusun untuk melindungi hak kebebasan informasi pada warga. Malah di awal kiprahnya, UU ITE ini digunakan untuk membungkam kritik. Kata-kata Prita ini adalah sebuah keluhan pada institusi swasta. Namun keluh-

⁸⁸ Satjipto Rahardjo. *Berhukum dengan Nurani*. Kompas. Senin, 8 Juni 2009.

an ini tak disikapi dengan respons yang hangat, melainkan pemolisian.

Pada titik inilah, Prof Tjip mengajak kita berpikir ulang. Dengan sabda, mari kita berhati nurani. Seorang ibu rumah tangga beranak balita, diseret ke meja hijau dan terbayang-bayang penjara yang gelap dan kelam. Ia tak punya niat jahat. Bukan koruptor, pencuri, atau berandal. Tapi kenapa ia musti diperlakukan seperti kriminal?

Simpati dan empati pun bermunculan mendukung Prita di sosial media. Saat itulah, gerakan aktivisme menggelar tabirnya. Merlyna Lim, seorang akademisi Indonesia yang menjadi kepala riset di bidang media digital dan masyarakat jejaring global di Universitas Carleton, Kanada, menulis cukup intens kasus Prita ini.

Prita Mulyasari, tulis Merlyna, adalah seorang perempuan berumur 32 tahun yang bertarung mengakses keadilan. Prita komplain terhadap pelayanan salah satu rumah sakit swasta melalui email yang ditujukan pada teman-temannya. Sebanyak lebih dari sepuluh ribu orang mendukung dan menggalang dana untuk Prita di Facebook dan Twitter untuk membayar pidana dendanya.

Menurut Merlyna, Prita sudah dirancang sebagai orang yang dikorbankan. Muncullah sosok pahlawan melawan penjahat. Seorang pahlawan muncul sebab tokoh utama terus disakiti, membuat moral publik dan ideologi massa tersentuh, sama seperti kisah dalam budaya populer Disney.⁸⁹

Kasus Prita adalah titik di mana apa yang disebut sebagai ‘aktivisme *click*,’ ‘aktivisme keyboard,’ dan lain sebagai-macamnya itu berkumandang. Kesan yang tak pernah hilang adalah gerakan ‘koin untuk Prita.’ Kampanye dukungan

⁸⁹ Merlyna Lim. *The Internet, Social Network, and Reform in Indonesia*. 2003., p. 273-88.

terhadap Prita pun mengalir dengan deras. Poster-poster dikreasikan dan disebar melalui jejaring media sosial.

Beberapa video di Youtube juga menampilkan balada sentimental yang menggugah empati publik terhadap Prita.

Gerakan kopi darat juga dilakukan oleh para simpatisan di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Yogyakarta. Mengumpulkan koin untuk Prita dan menuntutnya supaya bisa bebas. Hingga Desember 2009, Merlyna mencatat sudah mencapai \$ 90.000.⁹⁰ Myrlina saat menceritakan kisah Prita ini pada artikelnya di tahun 2017, menyebutkan Prita yang pernah dipermasalahkan dengan 'hukum siber yang keras (*the draconian Cyber Law*).⁹¹

Uniknya Merlyna menyatakan bahwa Prita adalah perempuan rumah tangga kebanyakan kelas menengah. Publik menuntut pembebasan atasnya. Hanya dengan tujuh hari, ratusan juta rupiah terkumpulkan untuk membantu Prita. Singkat kata, Prita sudah menjadi sebuah simbol keadilan yang mencahayai gerakan.⁹²

Prof Tjip begitu terpesona dengan gerakan sosial digital terhadap kasus Prita. Ia merekomendasikan bahwa tinggal cara berhukum aparat ini yang menyambung gayung yang sudah ditawarkan oleh publik ini. Publik telah menyampaikan nuraninya. Mengatakan bahwa Prita perlu keadilan. Dan, prof Tjip menyarankan supaya penggunaan sikap batin dan empati dalam berhukum.

⁹⁰ Merylyna Lim. *Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia*. Journal of Contemporary Asia Vol. 34, pp. 636-657, 2013.

⁹¹ Merlyna Lim. *Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia*. *Critical Asian Studies*, pp. 411-427.

⁹² Merlyna Lim. "Facebook Nation: The Politics and Culture of Social Media in Indonesia." Usindo Brief A Publication of The United States-Indonesia.

Kini kita memasuki ranah cara ber hukum. Cara ber hukum tidak hanya satu. Dalam kasus Prita dan debat yang menyertainya, cara ber hukum masih dipahami sebagai ber hukum dengan undang-undang. Jaksa dan polisi juga memperdebatkan prosedur.

Secara sosiologis, akhirnya hukum adalah aneka putusan manusia yang menjalankan sehingga amat rentan terhadap pikiran dan sikap batin manusia yang menjalankan. Polisi, jaksa, dan hakim dapat berbeda dalam putusan tentang apa yang harus dilakukan. Rentang perbedaan putusan itu mulai dari menahan dan memproses sampai ke membebaskan (*acquittal, discharge*) pelaku. Faktor yang melatarbelakangi perbedaan adalah sikap batin, seperti empati. Dalam sosiologi hukum, faktor disposisi nurani terkait erat dengan tindakan seorang penegak hukum.

Seorang polisi atau jaksa yang bekerja dengan nurani (*with conscience*) akan menghasilkan putusan berbeda dibandingkan yang bekerja hanya berdasarkan *book-rule* atau "mengeja teks". Hipotesis atas kasus Prita adalah jika perkara itu jatuh di tangan penegak hukum dengan hati nurani, putusannya bisa lain.⁹³

Aparat penegak hukum yang menggunakan hati nurani-nya adalah kunci. Mari kita membaca kasus ini secara detail. Kisahnya mulai dari sini. Pada tanggal 7 Agustus 2008, Prita menderita demam yang teramat tinggi dan pusing kepala. Ia datang ke Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang. Setelah diperiksa oleh dr. Indah, trombosit mencapai 27.000.

Hingga akhirnya, Prita ditangani oleh dr Hengky dokter spesialis. Hasil trombosit diperbaiki, ternyata bukan 27.000, melainkan 180.000. Tiga hari dirawat, ia makin merasakan sakit kepala yang hebat, nyeri seluruh tubuh, mual, muntah

⁹³ Satjipto Rahardjo. *Berhukum dengan Nurani*. Kompas. Senin, 8 Juni 2009.

dan kesulitan makan. Tangan kirinya membengkak, ia pun meminta dihentikan infus dan suntikan.

Ia menyampaikan beberapa pertanyaan dan permintaan, namun tak merasa direspons dengan baik. Akhirnya ia pindah ke BSI Bintaro Tangerang. Kesal dengan pelayanan rumah sakit Omni Internasional, Prita pun mengirim sebuah email berisikan curhatan. Dari emailnya *pritamulyasari@yahoo.com*, mengirimkan pesan ke beberapa kawannya, dengan judul ‘Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang.’ Ia pun menulis begini.

‘Saya informasikan juga dr. Hengky praktik di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini. Tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggung-jawab masalah *complaint* saya ini tidak profesional sama sekali. Tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan *customer*.’⁹⁴

Memang kata-kata yang ditulis oleh Prita cukup ‘keras.’ Ia menulis penipuan oleh Omni dan menyebut beberapa dokter secara personal. Aspek berikutnya dalam pembuktian dalam tindak pidana ITE. Yakni aspek linguistik. Apakah berdasarkan diksi yang dipilih oleh Prita, dalam sudut bahasa, apakah kalimat tersebut mengandung penghinaan?

Prita pun dituntut oleh Jaksa dengan pidana dalam Pasal 27 ayat 3 Jo. Pasal 45 ayat 1 UU ITE. Prita dituntut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.⁹⁵ Setelah ramai di ruang publik, persidangan Prita pun mendapatkan sorotan yang besar dari media massa. Pengadilan Negeri Tangerang cukup progresif, dengan memutuskan Prita ‘tidak terbukti

⁹⁴ Putusan Nomor 882 K/ Pid.Sus/ 2010. Mahkamah Agung.

⁹⁵ Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-432/TNG/05/2009, pada tanggal 20 Mei 2009.

secara sah dan meyakinkan bersalah.⁹⁶ Namun sayangnya Jaksa banding, dan drama hukum pun makin dramatis setelahnya.

Orang mengira, Pasal 27 Ayat 3 UU ITE inilah yang bermasalah. Di Mahkamah Konstitusi, setidaknya dua perkara pengujian dilakukan. Menuntut supaya Pasal ini dihapuskan dari muka bumi ini.

Pertama, gugatan pengujian pasal oleh jurnalis senior Narliswandi Piliang alias Iwan Piliang. Pada tanggal 28 Desember 2008, ia menguasai ke beberapa pengacara memasukkan berkas ke kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Iwan Piliang, menulis sebuah artikel berjudul 'Hoyak Tabuik Adaro dan Soekanto,' pada tanggal 18 Juni 2008.

Karena tulisan itulah, Iwan dilaporkan oleh Alvin Lie kepada Polda Metro Jaya. Singkatnya, artikel Iwan berkaitan dengan rapat Panitia Khusus (Pansus) Komisi VII DPR, yang membahas soal rencana internal Public Offering (IPO) PT Adaro. Iwan mendapatkan kabar, pembahasan ini diwarnai pemerasan oleh para politisi. Memberi suap atau IPO dibatalkan. Secara khusus, ia mengulas para politisi Partai Amanat Nasional (PAN). Ia menulis dalam pledoinya seperti ini.

[...] Atas keterangan sumber ini saya mendapatkan kabar bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) melalui fraksinya meminta sejumlah dana ke Adaro untuk memuluskan IPO. Sisi lain, Alvin Lie sebagai anggota Fraksi PAN di DPR, juga meminta dana pribadi sebesar Rp. 6 miliar. Jumlah permintaan dana ini kemudian menyusut Rp. 1 miliar. Demikian info yang dapat saya himpun. Pada tanggal 17 Juni, saya menyelesaikan tulisan. Petang hari saya mencoba kontak Soetrisno Bachir, Ketua Umum PAN, juga Alvin Lie, melalui

⁹⁶ Keputusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 1269/ PID.B/ 2009/PN.TNG.

handphone mereka. Keduanya tidak dapat dikontak. Saya mengirim pesan SMS, untuk konfirmasi. Keesokan hari, Soetrisno Bachir, mengkonfirmasi, menolak. Kalimatnya saya masukkan ke bagian utama (lead) tulisan. Bahkan ia pun menyebut nama Alvin Lie setelah saya tanyakan soal hasil keterangan sumber saya itu. Hingga petang hari Alvin Lie tetap tidak merespons, saya menaikkan tulisan tersebut karena pertimbangan; pertama, sudah dikonfirmasi Ketua Umum PAN, dan pertimbangan kedua, kepada elemen ke-9 jurnalisme, wartawan diperbolehkan mendengarkan hati nurani personalnya. Maka demi kepentingan publik, tulisan saya naikkan, *up load ke presstalk info*. Kendati di situs sudah tersedia ruang dengan memberi ikon comment, sebagai sarana hak jawab, diskusi, kritik dan saran, tetapi baik PAN maupun Alvin lie, tidak pernah menggunakannya. Tulisan tersebut juga beredar dari/ ke berbagai milis.⁹⁷

Sayangnya, hakim konstitusi berpandangan sama seperti pemerintah. Bahwa terkandung norma yang sama antara Pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan Pasal 310 dan 311 KUHP yaitu untuk memberi perlindungan hukum terhadap kehormatan serta nama baik seseorang. Secara bulat, hakim menyatakan menolak permohonan Iwan untuk seluruhnya.⁹⁸

Tidak hanya Iwan yang menguji pasal ini melalui MK. Tokoh pers dan beberapa lembaga masyarakat sipil pun beberapa di antaranya juga mengajukan pengujian ini. Tertanggal 29 Januari 2009, para pemohon seperti Edy Cahyono, Nenda Inasa Fadhillah, Amrie Hakim,

⁹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/ PUU-VII/ 2008.

⁹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/ PUU-VI/ 2008. Lebih lanjut, hakim konstitusi juga berpandangan bahwa Pasal 27 ayat 3 tidak bertentangan dengan Pasal-Pasal yang berkenaan dengan HAM, utamanya Pasal 28. Pasal 27 ayat 3 ini, sudah sesuai dengan Konstitusi Dasar, mulai dari Pasal 28F, Pasal 28 ayat 1 dan 2, Pasal 28J ayat 1 dan 2 UUD 1945.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PHBI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers).

Mereka berkeyakinan bahwa UU ITE ini bertentangan dengan diktum HAM dalam konstitusi dasar kita. Lebih lanjut, mereka menguraikannya dalam permohonan bahwa Pasal ini telah melanggar prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, melanggar asas *lex certa* dan kepastian hukum, Pasal ini juga sangat potensi disalahgunakan, melanggar kebebasan berekspresi, berpendapat dan menyebarkan informasi, dan mempunyai efek jangka panjang yang menakutkan.

Dari pengujian UU ini, Prof Soetandyo Wignjosoebroto memberikan ulasanya, sebagai saksi ahli. Prof Soetandyo adalah sosok yang sangat karismatik dari kalangan akademisi. Ia juga peraih penghargaan hak asasi manusia Yap Thiam Hien Award pada tahun 2012. Ahli sejarah hukum dan penulis buku bertajuk ‘Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional’ ini berfatwa.

Bahwa Pasal 27 ayat 3 ini punya ketidak-jelasan tentang siapa yang disebut pelaku, apakah mereka yang membuat atau mereka yang menyebarkan. Sementara perbuatan pidana ini lebih kental nuansa subjektifnya ketimbang unsur objektifnya. Sebab penghinaan itu adalah soal perasaan. Lagi pula ancaman hukumannya terlampau berat.

Perkara ini juga melibatkan ahli dari Belanda, Singapura dan Australia. Di Belanda, Prof Willem Frederik Korthals Altes, menyatakan Wetboek van Strafrecht mempunyai klasifikasi penghinaan, mulai dari penghinaan ringan (*belediging*), pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik seseorang (*smaadschrift*), dan hasutan yang menimbulkan sakit hati karena ras, agama, orientasi seks, dan cacat fisik/ mental seseorang (*aazetten tot haat*).

Sementara dari Singapura, George Bonaventura Hwang Choor Chee menyatakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut secara pidana maupun perdata. Sama halnya seperti di Singapura, selanjutnya di Australia, James William Nolan mengilustrasikan pencemaran baik juga bisa dituntut secara perdata. Penghinaan juga dimaknai pernyataan publikasi yang merugikan korban. Kerugian material adalah kunci dalam pelaporan pencemaran nama baik di Australia.⁹⁹

Sayangnya, hakim konstitusi juga tidak mengabulkan permohonan koalisi ini. Tak ada yang berubah dari Pasal 27 ayat 3 ini. Meskipun korbannya satu demi satu telah berjatuhan.

Kenakalan Anak dan Kisah Para Peretas

Pada Sabtu, 25 Februari 2006, Prof Tjip menulis sebuah artikel pada kolom opini nasional. Judulnya seperti ini ‘Meratapi Raju di Balik Jeruji.’ Seperti biasa, tulisannya rasa-rasanya mengajak kita berdialog. Seperti ini.

Benar-benar amat mengharukan. Amat mengharukan. Bagaimana mungkin, seorang anak ingusan sudah harus berurusan dengan polisi, tahanan, dan pengadilan. Saya bukan seorang psikolog anak, tetapi apa yang dikisahkan dalam harian *Kompas* (22/2/2006) adalah benar.

Dalam imajinasi bocah delapan tahun, alangkah mengerikan sosok polisi, hakim, tahanan, dan lain-lain. Pengalaman traumatis ini akan tertanam amat dalam pada dirinya dan (mudah-mudahan tidak) menghantui hidup Raju selanjutnya.

Lebih mengenyakkan lagi, hari Sabtu (18/2) di Universitas Diponegoro, Semarang, berlangsung pengukuhan Prof Dr Paulus Hadisoepipto SH sebagai

⁹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/ PUU-VII/ 2009.

guru besar kriminologi. Pidato yang dikemukakan adalah Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang.

Dalam pidatonya, Prof Dr Paulus Hadisoepipto menggugat sistem peradilan anak karena menurut pengamatannya, pendekatan yudisial konvensional cenderung merugikan masa depan anak dan menimbulkan stigmatisasi terhadap anak.¹⁰⁰

Anak bisa dibilang seperti selembar kain putih yang belum tergoreskan tinta. Jika tinta-tinta yang dilukiskan berisikan kata-kata kebencian dan kejahatan, maka jadilah kain yang penuh dengan keburukan. Begitu juga sebaliknya, apabila ditorehkan kata-kata indah, ia akan jadi sesuatu yang menyenangkan.

Kebanyakan komunitas peretas berisikan anak-anak dan remaja yang memasuki usia dewasa. Saat mereka sudah mencapai tingkat kematangan dalam belajar teknik peretasan, kadang jalur yang mereka tempuh untuk pembuktian kurang tepat. Hal yang paling sering dilakukan anak-anak ini adalah pengubahan tampilan (*deface*) pada situs-situs pemerintah maupun swasta.

Di sebuah halaman grup di Facebook, ada salah satu kelompok dengan nama 'Indonesian Defacer Newbie.' Grup ini mempunyai anggota sebanyak 4.385 orang yang tergabung. Memang cukup disayangkan kalau perubahan tampilan ini seringkali dilakukan oleh anak-anak komunitas peretas dengan berbagai motif.

¹⁰⁰ Satjipto Rahardjo, *Meratapi Raju di Balik Jeruji*. Kompas. Sabtu, 25 Februari 2006. Kasus Raju, seorang anak yang dipidana selayaknya pidana orang dewasa, banyak diceritakan oleh Prof Tjip, dalam ruang perkuliahan dan berbagai ceramah. Di sudut tulisan beliau, di berbagai media juga dituliskan kisah ini. Jauh sebelum teretusnya Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diamanahkan oleh UU No. 11 Tahun 2012, Prof Tjip sudah mewacanakan ini secara intens.

Motif pertama, biasanya mereka akan lakukan sebagai pembuktian dan kredensial bahwa ia sudah mencapai tingkat tertinggi dunia peretasan. Seorang anak, yang aktif melakukan perubahan tampilan ini, bisa mengunggah catatan pengubahan tampilan di github dengan nama panggilan dia (*nickname*) di dunia peretas, sampai ratusan hingga ribuan kali.

Kedua, motifnya berupa kritik sosial dan politik. Ada beberapa anak yang sudah jengah dengan keadaan politik, lalu mereka melancarkan kritik pada website yang mereka retas. Ketiga, kadang ada usaha untuk melaporkan sebuah celah di salah satu situs. Tak ada tanggapan, membuat ia jengkel dan ‘mengerjain’ sang pemilik sistem elektronik tersebut.

Nah, sayang sekali kalau mereka ini, yang sedang dalam masa ‘puber’ dan ‘labil,’ ini kemudian ‘dihajar’ dengan menggunakan ‘perkakas pidana.’ Sebut saja kasus Mr. Cakil, seorang pemuda yang melakukan peretasan pada situs Bawaslu pada tahun 2018. Tebatnya kasusnya seperti ini. Pada Rabu, tanggal 27 Juni 2018, DS alias Mr. Cakil melakukan perubahan tampilan/ deface pada <http://inforapat.bawaslu.go.id/index.html>, dengan kata-kata seperti ini.

‘Zaman dulu korupsi adalah hal yang memalukan, tetapi sekarang menjadi kesempatan yang dicita-citakan. Hacked by Mr. Cakil_Exploit The World 99 Syndicate is Back.’

Sayangnya, pemuda yang saat itu persis berusia 18 tahun, langsung ditahan dan diputuskan vonis oleh Pengadilan Jakarta Timur dengan penjara selama 2 (dua) tahun. DS harus menjalani hukuman di LP Cipinang selama itu.¹⁰¹

Usut punya usut, DS ternyata pernah menyampaikan laporan celah di Bawaslu. Tak mendapatkan respons, ia pun

¹⁰¹ Putusan Nomor. 1022/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Jkt. Tim. Pengadilan Jakarta Timur.

mengubah tampilan di *website* Lembaga pengawas pemilu tersebut. DS adalah gabungan antara motif kecewa karena laporannya tidak ditanggapi dan kritik sosial-politik.

DS adalah salah satu pemuda dengan kemampuan khusus. Ia tak punya pendidikan formal di bidang keamanan siber atau ilmu komputer. Saat melakukan pengubahan tampilan, ia pun hanya berbekal telepon genggam bermerek dari negeri Tiongkok.

Jika sejalan dengan gagasan Prof Tjip tentang Raju, anak-anak dengan ‘tindakan menyimpang,’ perlu mendapatkan rehabilitasi, bukan penjara yang dibaurkan dengan para penjahat dan kriminal lain. Ya, apa jadinya jika pemuda yang berkemampuan khusus ini, dikumpulkan dengan mereka kriminal judi online, sindikat narkoba, pencucian uang, penipuan online, dst. Maka kemampuannya ini lebih berisiko besar bagi masyarakat, jika tidak difasilitasi dengan rehabilitasi khusus.

Teknologi Digital: Sebuah Keniscayaan atas Perubahan

Perkembangan teknologi sains yang meluncur dengan deras, tak bisa dibendung lagi. Prof Tjip sendiri sudah berulang kali menyebut-sebut hal tersebut dalam berbagai kesempatan. Khususnya teknologi digital. Namun yang mengingatkan oleh Prof Tjip, cara kerja teknologi boleh mekanis, namun pemikiran hukum tetap perlu kesadaran dan sensitivitas. Apalagi saat bertemu dengan keadaan-keadaan yang tidak biasa.

Penggunaan mesin, komputer, internet dalam hukum sekarang sudah bukan rahasia lagi, seperti pada internet banking dan transaksi melalui internet. Tetapi yang sedang kita bicarakan, sebetulnya adalah masalah yang berbeda, yaitu cara berpikir mesin yang mekanikal. Inilah yang merupakan persoalan, bahkan

hambatan pada saat bangsa ini dihadapkan kepada situasi luar biasa.¹⁰²

Pada titik ini, bahkan di dunia mesin sendiri, utamanya di bidang keamanan siber, Kevin Mitnick, seorang tokoh peretas di Amerika. Ia mengemukakan bahwa peretasan adalah sebuah keterampilan. Dalam pandangan personalnya peretasan (*hacking*) adalah sebuah seni kreasi.¹⁰³

Sehingga pada awalnya perkembangan teknologi digital itu berawal dari sebuah inovasi yang mengganggu proses mapan (*disruption*). Dalam mekanika mesin yang pada esensinya adalah membantu dan mempermudah kebutuhan manusia.

Pendidikan. Paling tidak memberikan sumbangan yang cukup signifikan. Meskipun pada eranya, praktik lapangan juga dan riset juga menjadi kunci. Namun Prof Tjip masih percaya bahwa lingkungan akademik, dunia Pendidikan membentuk karakter seseorang. Kemajuan teknologi digital, dan juga khususnya dunia hukum tak bisa dilepaskan dari kepustakaan.

[...] bahwa sejak abad ke-dua puluh ilmu hukum memang mulai berubah, yang diperkuat oleh tesis Capra, bahwa kita berada di tengah-tengah pancaroba atau "*turning point*". Pendidikan hukum tidak dapat menutup mata terhadap perkembangan yang demikian itu. Untuk itu maka diperlukan pemutakhiran dari kepustakaan yang disediakan kepada para mahasiswa. Kehadiran internet memang sangat membantu, tetapi tetap para mahasiswa membutuhkan panduan dari para dosen pada saat menghadapi hutan kepustakaan yang makin lebat itu.¹⁰⁴

¹⁰² Satjipto Ricardo. *Biarkan Hukum Mengalir*. Kompas. 2007

¹⁰³ Kevin Mitnick & William Simon. *The Art of Intrusion: the real stories behind the exploits of hacker.*, p. 71

¹⁰⁴ Satjipto Rahardjo. *Pendidikan Hukum Indonesia di Tengah-Tengah Pancaroba*.

Teknologi digital ditandai dengan terjadinya surplus informasi. Kepustakaan tersebar di mana mana. E-book bisa diunduh dan dibeli dengan cukup praktis. Pada titik inilah, dibutuhkan komunitas. Kampus menyediakan komunitas tersebut.

Meskipun saat ini, kampus juga bisa disebut menara gading dan penyemai tradisi feodalisme. Apalagi lengkap dengan birokrasi dan politik kampus. Ide-ide brilian cukup sulit disemai di dalam kampus. Kendatipun demikian, dialektika dan tradisi kepastakaan serta penulisan masih bisa diharapkan.

Yang diperlukan dalam menghadapi perkembangan dunia teknologi digital adalah kerendahan-hati dan keterbukaan untuk terus belajar. Ada satu kesamaan antara fatwa yang sering disampaikan oleh Prof Tjip, dengan pesan yang dilayangkan oleh Mitnick, yakni norma kesantunan.

Mitnick menyatakan akan arti pentingnya norma kesantunan (*politeness norm*), dalam menyusun mitigasi serangan siber. Dalam dunia keamanan digital, seseorang tidak boleh sesumbar dan bersombong ria, bahkan jaringan, website atau aplikasinya sudah aman dan tidak bisa dibobol.

Saat menyatakan bahwa sistem elektroniknya sudah aman 100 % dan tak mungkin bisa dibobol, maka hal tersebut mengundang banyak peretas tertantang. Justru menyebabkan kerentanan pada serangan siber yang membludak nantinya pada sistem tersebut. Dan, lagi-lagi, Mitnick menyarankan untuk melakukan pelatihan yang memadai pada para admin atau pegawai sistem tersebut untuk bersikap waspada, disiplin dan selalu belajar.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Kevin Mitnick& William Simon. *The Art of Intrusion: the real stories behind the exploits of hacker.*, p. 137

Minat belajar yang tinggi dibutuhkan. Belajar tiada pernah berhenti adalah semboyan yang berlaku di semua bidang. Utamanya di bidang hukum dan teknologi, keharusan menangkap tanda-tanda perubahan pun harus dikejar. Karena perubahan adalah sebuah keniscayaan di era teknologi digital ini. Prof Tjip menulisnya dalam sebuah buku yang berjudul 'Ilmu Hukum dalam Lanskap Ilmu Pengetahuan', seperti ini.

Perkembangan mutakhir dengan globalisasi, komputer, internet, *cyber space*, *virtual reality* dan lain-lain, menjadikan ilmu hukum juga makin disibukkan oleh penggarapan masalah-masalah baru. Bagaimana dengan konsep dan teori dalam perdagangan, kontrak, kejahatan, yang selama ini telah mapan, baik dalam teori maupun praksis? Ternyata banyak hal-hal baru yang perlu dilakukan. Euforia yang mengatakan, bahwa ilmu hukum sudah berhenti pada abad ke-sembilan belas, ternyata tidak benar. Pada saat masyarakat terus berubah, maka akan terus berubah pula ilmu pengetahuan.¹⁰⁶

Teknologi digital yang terus berkembang, memecahkan mitos tentang doktrin hukum dan asas-asasnya. Tentang yurisdiksi, pembuktian, pertanggung-jawaban hukum, dan masih banyak lagi. Mendorong kita untuk belajar lagi dan lagi.

¹⁰⁶ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Pengetahuan dalam Lanskap Ilmu Pengetahuan. Sebuah Risalah tentang Interaksi Antara Ilmu Hukum dengan Disiplin-Disiplin di Luarnya dan Ilmu Pengetahuan pada Umumnya*. 2006.

Data versus Goliath?

DATA adalah minyak baru (*data is the new oil*). Sempat terucap dari pemuda UI/UX designer cermerlang. Frase ini santer berdendang di telinga kita pada satu dekade ini. Kalimat yang konon digelontorkan pertama oleh ahli matematika Inggris Clive Humby pada tahun 2006. Humby dikenal seorang pakar data yang bekerja di Starcount dan pendiri Dunnhumby.

Ungkapan ini makin bergemuruh, saat the Economist, pada tanggal 6 Mei 2019, membuat laporan berjudul ‘*The World’s Most Valuable Resource is No Longer Oil, but Data.*’ Sumber terpenting di dunia ini sudah tidak lagi minyak, melainkan data.¹⁰⁷

Semua orang sekarang mengejar data. Baik swasta, pemerintah dan semua individu. Meglena Kuneva, Komisioner

¹⁰⁷<https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data>, diakses pada tanggal 10 Mei 2020

di Bidang Perlindungan Konsumen Uni Eropa, di Brusel tanggal 13 Maret 2009 mengatakan hal yang sama. Dalam sebuah diskusi tentang pengumpulan data digital, penargetan dan profiling, ia mengatakan bahwa data personal adalah minyak baru internet dan nilai tukar baru di dunia digital.

*‘Personal data is the new oil of the internet and the new currency of the digital world.’*¹⁰⁸ Dengan mengetahui sebuah profil konsumen, orang bisa memprediksikan perilakunya dan iklan apa yang cocok untuknya.

Pada kesempatan lain, CEO IBM perusahaan teknologi terkemuka, Virginia Rometty, juga mengatakan hal yang sama. Ia membuka pidatonya di sebuah Dewan Hubungan Luar Negeri pada tahun 2013, dan mengatakan bahwa ‘Saya ingin kamu berpikir tentang data sebagai sumber daya alam selanjutnya/ *I want you to think about data as the next natural resource.*’¹⁰⁹

Selanjutnya, Arun Rao dan Piero Scaruffi menulis sebuah buku berjudul *A History of Silicon Valey. The Greatest Creation of Wealth in the History of the Planet.*¹¹⁰ Hari ini, minyak sudah tiada lagi berharga, di bandingkan data. Perbedaan antara minyak dan data adalah minyak tidak bisa menghasilkan minyak baru.

Berbeda dengan minyak, data bisa memproduksi lebih banyak data. Tidak ada keputusan penting hari ini yang diambil, yang tidak didasarkan pada data. Data adalah ‘de-wa-dewa’ baru di dunia digital saat ini.

¹⁰⁸https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_09_156, diakses pada tanggal 10 Mei 2020

¹⁰⁹ <https://energybit.co/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2020

¹¹⁰ Arun Rao & Piero Scaruffi. *A History of Silicon Valley: The Greatest Creation of Wealth in the History of the Planet.* Redwood. Omniware: 2011.

Cara kerja semua bisnis digital adalah dengan menggunakan dasar penggabungan antara matematika dan kode, diterjemahkan ke permasalahan bisnis yang kompleks. Dari permasalahan ini, mulailah dikuantifikasikan solusi-solusinya dengan gubahan peralatan-peralatan (*tools*) dan teknik kuantitatif, untuk menyelesaikan problem.

Tanpa data, semua model tidak mungkin bisa dibangun. Tanpa data sebuah pilihan-pilihan tidak bisa dihitung risiko finansialnya. Dengan data, manajemen dan produksi bisa dioptimalisasikan targetnya.

Apakah kebetulan atau tidak, nama-nama yang banyak beredar di Kawasan Eropa, banyak yang hanya menampilkan nama huruf depan plus nama keluarga. Cukup jarang mereka menggunakan nama lengkapnya dalam pengurusan pelayanan publik, tampilan portal pendidikan atau pekerjaan.

Bahkan di dunia keamanan digital, akun-akun yang terdaftar di platform Hackerone maupun Bugcrowd, rata-rata menggunakan nama *pseudo-name* atau anonim. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk membangun merek dagang dan keahlian di nama samaran tersebut. Bagi mereka, memunculkan nama asli bukanlah sebuah kelaziman.

Sikap terhadap data pribadi ini paling tidak terbagi menjadi tiga jenis. Phobia, sadar proporsional dan acuh. Saya menjumpai beberapa kawan, yang tidak mau memperlihatkan nama aslinya. Di media sosialnya, juga tertulis nama samaran. Ia tak pernah sekalipun foto yang terunggah di internet. Sepanjang ada CCTV, ia berusaha menutupi wajahnya. Lalu, bagaimana orang ini harus membuka rekening bank, mencatat KTP atau SIM-nya, dst.

Sadar proporsional, adalah mereka yang tahu urgensi data pribadinya dan memberikan perlindungan sewajarnya. Dan, terakhir ini yang agak sulit, adalah orang yang sama

sekali tidak peduli akan data pribadinya. Tipe yang ketiga inilah yang agak rawan menjadi target operasi sindikat penipuan online, peretasan, profiling, dan penyalah-gunaan data pribadi.

Bagian buku ini terinspirasi dari sebuah buku yang dikarang oleh Bruce Schneier, seorang pakar bidang keamanan siber. Ia menulis buku bertajuk ‘Data and Goliath.’ Ia mengutip klaim CEO Sun Microsystems, Scott McNealy di tahun 1999, ‘kalian punya nol privasi, buang jauh-jauh pikiran kalau kalian itu punya privasi.’¹¹¹

Buku ini cukup menarik cara pengulasannya. Kadang agak sinis melihat realitas pengumpulan data, namun bahasa yang digunakan cukup ringan untuk istilah-istilah yang berat di bidang keamanan siber.

Urgensi Data

Ingin melihat karakter orang yang ingin kau dalam. Buka saja media sosialnya. Dalam sebuah lamaran pekerjaan, saat ini selain menulis biodata diri. Sang pelamar juga wajib memberikan halaman media sosial mereka.

Dengan kata lain, bisa di bilang sang pelamar sudah tidak lagi mempunyai privasi. Karena kehidupan pribadinya, keluarganya, kesehariannya yang ditampilkan di sosial media jadi dimata-matai oleh perusahaan. Atau, sebaliknya. Karena sosial medianya dibangun dengan kesadaran ‘pencitraan’ profesional, maka ia dengan mudah mendapatkan pekerjaan.

Banyak orang menggunakan sosial media. Pada tahun 2007, saat Facebook baru saja dirilis, penelitian dari the National School Boards Association menyebutkan 96 %

¹¹¹ Bruce Schneier. *Data and Goliath. The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World.* New York&London. Norton&Company, 2014., p. 9

dengan akses internet mengunjungi sosial media ini. Hingga pada akhirnya, masalah soal privasi pun muncul belakangan.

Lihatlah kasus Cambridge Analytica. Sebelumnya, pada tahun 2009, sebuah kasus *the Courtright v. Madigan* No. 09-CV-208-JPG, 2009 WL 3713654, menyebutkan dasar gugatan pemohon. Yakni setelah pemohon tanpa pernah berharap terbongkar privasinya dalam akun MySpace.com, padahal ia sudah mengatur opsi privasi di platform tersebut. Setahun berikutnya, seorang tersangka yang mengajukan gugatan dalam kasus *the United States v. Perrine*, 518 F.3d 1196, 1199, 1204 (10th Cir. 2008), yang menyayangkan penyidik mempunyai nama, rekaman layar dan alamat IP komputernya dari Yahoo. Atas nama amandemen Konstitusi Amerika keempat, penghormatan terhadap privasi, warga ini menggugat ke pengadilan.¹¹²

Dalam sosial media itu, jelas orang bisa dilihat perilakunya, hobbinya, preferensi politiknya, orientasi keagamaan, bahkan apabila mempergunjingkan atasannya bisa siap-siap kena Surat Peringatan (SP). Yang jelas, dengan mengunggah foto wajah, para pemilik akun di sosial media sudah siap menjadi objek biometrik, paling sedikitnya untuk data *face recognition*!.

¹¹² Pada tahun 2011, sekawanan bapak dari para remaja menggugat Facebook, karena tidak memberi tahu dan mendapatkan izin dari mereka, untuk anak-anak remajanya membuka akun di media sosialnya di Brooklyn. Hal yang sama pada kasus yang terjadi di California yang menggugat Facebook. Para orang tua tersebut menuntut platform ini telah melakukan invasi privasi pada kehidupan keluarga mereka. Hingga pada akhirnya di tahun yang sama Senator John Kerry dan John McCain mengenalkan the Commercial Privacy Bill of Rights Act of 2011 (S. 799, 12th Congress), yang didukung penuh oleh Kabinet Obama dan menjadi pedoman bagi perusahaan teknologi digital untuk mengoleksi data dan pedomannya., Brian Craig. *Cyberlaw. The Law of the Internet and Information Technology*. Boston, New York, etc: Pearson, 2013. p. 201-203

Di Tiongkok, sebuah mesin kecerdasan buatan disematkan di setiap kamera di sudut-sudut kota. Untuk mengamati wajah para pejalan kaki yang terekam dan dianalisis secara otomatis dengan face recognition, yang membedakan mana orang yang punya intensi berbuat jahat atau orang yang sebelumnya pernah mempunyai catatan kejahatan. Teknologi pengenalan wajah adalah sarana kontrol negara yang paling efektif di Tiongkok.¹¹³

Hari ini pun, di ruang siber, tradisi penyadapan pun sudah mulai sangat lazim. Atas nama memerangi kejahatan siber dan terorisme, yang juga berisiko pada keamanan masyarakat, aparat pun di berbagai belahan dunia melakukan penyadapan besar-besaran pada jaringan komunikasi.

Kadang bahkan negara menjadi ‘aktor tengah’ yang ikut mencuri-curi dengan percakapan di ruang siber di antara warganya. Apalagi di berbagai negara, bersamaan dengan pengembangan pusat data dan server besar, sudah menjalankan sistem retensi data, yang mengumpulkan sejumlah data semua hasil komunikasi digital. Pada tahun 2002, Departemen Pertahanan Amerika membuat sebuah proyek yang dikenal dengan *the Total Information Awareness* (TIA). Proyek ini berisi tentang pusat data penyimpanan informasi personal termasuk data komunikasi yang teranalisis di bawah model deteksi pola dan profil aktivitas terorisme.¹¹⁴

Memang sangat dilematis, satu sisi keamanan siber di satu sisi lain terdapat nilai-nilai privasi dan hak asasi manusia warga. Jika terlalu berat mengambil kebijakan penguatan

¹¹³ <https://www.economist.com/science-and-technology/2019/08/15/as-face-recognition-technology-spreads-so-do-ideas-for-subverting-it>, diakses pada tanggal 11 Mei 2020.

¹¹⁴ Bart Custers. *Tapping and Data Retention in Ultrafast Communication Networks*. In, Sylvia Mercado Kierkegaard. *Cyberlaw, Security, and Privacy*. Ankara: International Association of IT Lawyers. 2007.,

keamanan siber, nilai-nilai privasi dan hak asasi manusia warga menjadi dikorbankan, bahkan cenderung terlanggar. Sementara, jika penghormatan terhadap nilai-nilai privasi diberikan ruang sebesar-besarnya, akan menghasilkan celah yang bisa dimanfaatkan sindikat kejahatan dan terorisme.

Prinsip keseimbangan nampaknya adalah hal yang paling ideal dalam titik ini. Meskipun pada ukuran mana keseimbangan itu terjadi, akan cukup sulit diperhitungkan dan dirasakan. Barangkali pertama, prosedur penyadapan juga perlu aturan main. Begitu juga dengan pengumpulan data. Lagi-lagi persetujuan dari sang pemilik data, yakni warga adalah hal yang paling fundamental.

Sementara itu, hak privasi adalah sebuah rezim hak asasi manusia, yang juga cukup mendasar. Artikel tentang hak privasi ini bahkan sudah pernah ditulis pada tahun 1890 oleh S. Warren & L. Brandies, pada *Harvard Law Review*. Hak ini didasarkan dan dikembangkan dari hak untuk sendirian (*the right to be let alone*).¹¹⁵ Dan, sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam hak ini adalah individualisme.

Maka melindungi data milik individu adalah hal yang paling utama dalam perlindungan data pribadi. Meskipun juga bisa dikatakan bukan 100 % seperti itu juga. Sebuah perusahaan atau persekutuan terbatas, bisa mengajukan gugatan pada pihak lain, jika data konsumen atau pegawainya dieksploitasi oleh pihak lain.

Seperti pada tahun *CoStar Realty Information, Inc v. Field*, 612 F. Supp. 2d 660, dalam sebuah perjanjian *Field (Alliance)* tidak menyebutkan adanya penggunaan pihak ketiga yang mengakses data yang dimiliki oleh *CoStar*. Namun *Field (Alliance)* membagi informasi ID dan *password* pengguna *CoStar* tanpa persetujuan. Digugatlah *Field*

¹¹⁵ Jonathan Rosenoer. *Cyberlaw. The Law of the Internet*. San Francisco. Springer., p. 129

(Alliance) yang menggunakan data pengguna CoStar tanpa otorisasi darinya.¹¹⁶

Semakin hari, memang semakin kompleks, persoalan data ini. Kesadaran akan data juga masih, boleh dikata, minimalis.

Hukum Perlindungan Data Pribadi

Bagian ini lebih seperti opini hukum (*legal opinion*), ketimbang sebuah tulisan yang bebas. Karena pada bagian tertentu, penting kiranya kita menengok sejauh mana hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Kita akan mencoba menguliti regulasi di Indonesia satu-satu, apa dan bagaimana perlindungan data pribadi itu di Indonesia.

Data pribadi baru mulai didiskusikan di Indonesia secara masif pada tahun 2008-an. Tepat setelah UU ITE diluncurkan ke publik. Orang mulai terbangun kesadarannya untuk memberikan perhatian pada sistem elektronik. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan definisi sistem elektronik yang patut dicermati.

Pasal 1 Ayat 5 UU ITE ini, mendefinisikan sistem elektronik sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik. Data pribadi adalah bagian dari informasi dan/ atau dokumen elektronik yang sudah diuraikan desas-desusnya.

Prinsip pemrosesan data pribadi juga disebutkan dalam UU ITE ini. Prinsipnya adalah ‘persetujuan.’ Disebutkan

¹¹⁶ Brian Craig. *Cyberlaw: The Law of the Internet and Information Technology*. Bosnton, Columbes, New York, etc: Pearson. 2013., p. 10.

pada Pasal 26,¹¹⁷ UU ITE ini, bahwa setiap informasi yang berhubungan dengan data pribadi harus mendapatkan persetujuan dari sang pemilik data tersebut. Bahkan pelanggaran terhadap prinsip ini, terancam dapat digugat.

Komponen fundamental dalam sebuah euphoria pertumbuhan ekonomi adalah, salah satunya, perlindungan data pribadi.¹¹⁸ Semua aktor, seharusnya, mulai dari pemerintah, ekosistem bisnis sampai warga seharusnya punya kesadaran untuk perlindungan data pribadi.¹¹⁹ Pun seharusnya, jika seorang warga yang sadar akan haknya, maka ia pun dipersilahkan mengajukan gugatan, jika ia mendapati masalah dipergunakan datanya tanpa sepersetujuannya.

Perlindungan data pribadi adalah hal yang esensial di dunia industri digital. Dan, termasuk bagian hak asasi manusia yang penting di era siber ini.¹²⁰ Dengan kata, seperti yang diungkapkan di atas, aset sebuah industri diukur. Sejauh mana jumlah trafik dan pengguna yang beraktivitas di sebuah aplikasi, adalah target pengembangan bisnis.¹²¹ Untuk itulah regulasi terhadap perlindungan data pribadi sangatlah penting.

¹¹⁷ Pasal 26

1. Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan;
2. Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

¹¹⁸ NCE. Ismail. *Beyond Data Protection*. New York & London, Springer. 2013.,

¹¹⁹ D. Hill, *Data Protection: Governance, Risk Management and Compliance*. Taylor&Francis, 2010.

¹²⁰ Serge Gutwirth, Yves Pouillet, & De Hert. *Reloading Data Protection*. London&New York. Springer. 2014.

¹²¹ Serge Gutwirth, Yves Pouillet, & De Hert. *European Data Protection*. London&New York. Springer. 2013.

Hari ini kita hanya mempunyai regulasi berupa UU ITE, setingkat produk hukum buatan parlemen dan eksekutif. Namun produk hukum yang setingkat, yang secara khusus mengatur akan hal ini, perlu diriwayatkan tersendiri.

Berbagai ketentuan tercecer di berbagai peraturan perundang-undangan. Seperti: UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam regulasi ini, disebutkan rahasia bank, yang juga adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya.

Sementara itu, regulasi yang lahir terlebih dahulu, sebelum adanya UU ITE adalah UU Telekomunikasi. Disebutkan pada Pasal 22, bahwa terdapat larangan untuk mengakses tanpa hak, tidak sah atau memanipulasi jaringan/ jasa telekomunikasi (khusus). Pasal 42 di UU ini juga menyebutkan penyelenggara jasa telekomunikasi diwajibkan untuk merahasiakan informasi yang dikirim/ diterima oleh pelanggannya.

Dalam regulasi yang lain, juga semangat perlindungan data pribadi tersirat. Misalnya kita sering dapat promosi melalui pesan pendek di telepon genggam. UU Perlindungan Konsumen, sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memberikan proteksi pada promosi yang sifatnya memaksa, hanya saja Pasal 9 UU ini, terbatas mengatur larangan barang palsu/ rusak.

Selanjutnya, sebagai bagian dari hak asasi manusia, tentu saja perlindungan data pribadi sejalan dengan semangat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM 1999). Perlindungan data pribadi sering kali diasosiasikan, disebut senafas dengan hak privasi (*the right to privacy*). Jika dilihat dari regulasi hak asasi manusia yang ada di Indonesia, banyak variasi hak yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi ini.

Mulai dari Pasal 29 Ayat (1), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal ini menyebutkan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya. Ketentuan pasal ini rasa-rasanya paling kuat memberikan payung hukum pada perlindungan data pribadi di Indonesia. Yakni, hak yang diperuntukkan untuk semua orang yang menginjakkan kaki di bumi pertiwi ini. Hak tersebut adalah sebuah penghormatan pada dirinya secara pribadi, segala informasi dan keutuhan keberadaan hak miliknya, keluarganya dan reputasinya.

Berkaitan dengan perlindungan data pribadi, UU HAM ini juga, paling tidak menyebutkan dua hal semangat perlindungan hukum. Pertama, ‘setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karenanya tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuannya,’ sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 21. Prinsip persetujuan seperti yang dikemukakan oleh UU ITE 2008, sudah disebutkan pada tahun 1999 di UU HAM.

Kedua, ‘setiap orang yang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu,’ sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 30. Banyak orang menyebutkan, pasangan dari rezim perlindungan data pribadi adalah rezim keamanan siber. Di saat sebuah sistem itu ‘aman,’ maka akan sangat sulit dibayangkan data pribadi di dalam sistem tersebut bisa dieksploitasi.

Lebih lanjut, perlindungan data pribadi juga tersebar di berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang lain. Seperti: UU No. 29 Tahun 1999 yang berkaitan dengan ratifikasi the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD); UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; UU No. 12

Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik; UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan masih banyak hal yang lain. Peraturan yang berkaitan dengan HAM, memang sejalan dengan prinsip perlindungan data pribadi.

Selain Undang-Undang HAM, banyak juga UU lain yang berkaitan erat dengan aspek perlindungan data pribadi. Kalau kita kategorikan, paling tidak tiga cara pandang dalam melihat perlindungan data pribadi.

Yakni: pertama, hukum atau aturan yang secara khusus menyebutkan data perlindungan pribadi; kedua, hukum atau aturan yang berkaitan erat dengan perlindungan data pribadi; terakhir, hukum atau aturan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan hukum perlindungan data pribadi, namun ia tetap harus mengarus-utamakan perlindungan data pribadi.

Peraturan yang punya kaitannya cukup erat dengan perlindungan data pribadi selevel Undang-Undang, antara lain adalah UU Administrasi Kependudukan, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Kesehatan¹²² UU Pelayanan Publik, UU Administrasi Pemerintahan, dan masih banyak lagi. Sementara peraturan lain, di bawah Undang-Undang, setidaknya perlu dua dokumen yang perlu disebutkan di sini.

Dua dokumen itu adalah Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

¹²² Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur sebuah norma tentang perlindungan data terhadap riwayat kesehatan pasien, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 Ayat (1), yang mengakui hak setiap orang atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Sementara itu, pada Ayat 2-nya Pasal ini, ditentukan pengecualian atas rahasia kondisi kesehatan pribadi yang tidak berlaku dalam hal perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan masyarakat atau kepentingan orang tersebut.

Elektronik, yang diganti oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019. Ini satu dokumen yang penting untuk di-rujuk dalam rezim perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. Peraturan berikutnya adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Pada PP No. 71 Tahun 2019 ini, disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi, sebagaimana disebutkan pada Pasal 14.¹²³ Bahkan dalam PP ini disebutkan juga kewajiban penyelenggara untuk menghapus informasi/ dokumen elektronik yang tidak relevan. Di dalam penghapusan ini disediakan dua mekanisme, yakni: penghapusan (*the right to erasure*) dan pengeluaran dari daftar mesin pencari (*the right to delisting*).¹²⁴

Sementara Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016, setidaknya mencakup perlindungan data pribadi terhadap proses perolehan, pengolahan, pengumpulan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan. Jika terjadi kegagalan atas perlindungan data pribadi, penyelenggara sistem elektronik wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi sebagai wujud iktikad baiknya.

¹²³ Dalam Pasal ini juga diatur mulai dari perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaharuan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan dan/ atau penghapusan atau pemusnahan sebuah data pribadi.

¹²⁴ Disebutkan selanjutnya, pada Pasal 16, bahwa Informasi dan/ atau dokumen elektronik yang tidak relevan ini dilakukan penghapusan karena beberapa hal, antara lain: diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik Data Pribadi; diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum; sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan ditampilkan oleh penyelenggara sistem elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik Data Pribadi.

Di Indonesia sudah terjadi beberapa kali kebocoran data pribadi. Bahkan data e-KTP warga juga sudah dibagikan kepada belasan ribu instansi pemerintah maupun swasta. Kita berharap regulasi setingkat Undang-Undang, bisa menelurkan sebuah sistem hukum perlindungan data pribadi, tentu akan jauh lebih baik. Namun regulasi ini sudah dimimpikan sejak lama, tapi tak kunjung berbuah manis.

GDPR: Perlindungan Data di Eropa

Tradisi privasi di dunia barat sangat kuat. Bertanya status pernikahan, agama, apalagi orientasi seksual adalah hal yang tabu saat memulai percakapan. Tak seperti warga +62, yang tanya-tanya, seperti investigasi tindak pidana.

Sampai ada sebuah lirik lagu milik band musik yang pernah moncer. ‘Kamu di mana? dengan siapa? semalam berbuat apa?’ Selain itu juga terkenal adagium paling sakral ‘Tak kenal maka tak sayang.’ Privasi bukanlah hal yang serius di nusantara ini. Berbeda di Eropa Daratan, yang mengurati nadi sampai ke institusi, regulasi dan hingga budaya hukumnya.

Mula-mula, di Eropa melalui Dewan Eropa (the Council of Europe) mengadopsi dua resolusi pada tahun 1973 dan 1974. Resolusi ini diperuntukkan bagi institusi publik dan institusi privat, yang di dalamnya sudah mulai mendefinisikan informasi personal. Dalam resolusi ini, informasi personal hanya sebatas informasi berkenaan dengan individu-individu (orang secara fisik).¹²⁵

Dalam perkembangannya, peraturan umum perlindungan data pribadi mulai dirumuskan. Namun kritik terhadap

¹²⁵ Bart van der Sloot. *Do data protection rules protect the individual and should they? An assessment of the proposed General Data Protection Regulation*. International Data Privacy Law, 2014, Vo. 4, No. 4.

regulasi ini pun juga banyak. Salah satu peneliti bahkan menyebutnya ilusi dan mitologi jika GDPR ini akan menaikkan level perlindungan dari yang semula dibayangkan.¹²⁶

Sebuah laporan Komisioner Uni Eropa, Viviane Reding, mengatakan bahwa untuk melakukan pemenuhan standar di institusi pelayanan publik, Eropa membutuhkan sekitar 2.3 milyar Euro per tahun. Jelas bukanlah angka yang sedikit.¹²⁷ Sejak tahun 1995, Komisi Eropa mengeluarkan sebuah Direktif Perlindungan Data Pribadi Nomor 95/ 46/ EC.

Melalui direktif ini, setiap sistem pemrosesan data yang melibatkan seseorang individu (*natural person*), yang menghormati hak-hak fundamentalnya dan kebebasannya, serta utamanya hak atas privasinya. Melalui direktif ini juga disebutkan bahwa negara anggota Uni Eropa, mempunyai tanggung jawab atas segala pemrosesan dan kontrol data personal di wilayahnya.

Hingga akhirnya regulasi, yang sekarang disebut Peraturan Umum Perlindungan Data (GDPR), Regulasi Uni Eropa 2016/ 679 dirilis. Pada tanggal 25 Mei 2018, peraturan ini sudah diikuti oleh semua anggota negara Uni Eropa. Peraturan ini memiliki konsep kunci antara lain persetujuan (*consent*), petugas perlindungan data (*data protection officer*), enkripsi, sanksi denda, pemrosesan data, hak akses informasi, hak untuk dilupakan, dan hak untuk diinformasikan.

Prinsip-prinsip yang diatur dalam GDPR ini antara lain adalah pemrosesan data yang berbasis kepastian hu-

¹²⁶ Peter Blume. *The Myths Pertaining to the Proposed General Data Protection Regulation*. International Data Privacy Law, 2014, Vol. 4, No. 4.

¹²⁷ He Zhile, Huang Daoli, Lei Yunting. *The background and the international and domestic impact of general data protection regulation*. 2014, Applied Mechanics and Materials, Vol. 599-601 (2014), pp. 2173-2177.

kum, berkeadilan dan transparan terhadap pemilik data. Pengumpulan, pemrosesan dan penggunaan data perlu secara spesifik dan eksplisit memberikan tujuannya pada pemilik data, serta dilarang digunakan untuk kepentingan lain. Prinsip yang lain adalah kewajiban, tidak melakukan pengumpulan dan pemrosesan data secara berlebihan. Selanjutnya adalah prinsip akurasi dan keutuhan dari data. Serta, yang paling penting adalah persetujuan dari sang pemilik data.

Privasi adalah hal yang cukup sensitif di masyarakat Eropa. Pada tahun 2011, CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertes) di Prancis menyidangkan sebuah perkara litigasi berkenaan dengan asosiasi bernama LEXEEK, yang membuat dokumen yudisial terlihat untuk publik tanpa menghilangkan nama-nama dan data privasi yang lain.¹²⁸

Memang privasi dan perlindungan data pribadi adalah hal penting dalam kehidupan masyarakat Eropa. Sebanyak 72 % masyarakat Eropa berpikir kalau perlindungan data pribadi adalah bagian terpenting dalam kehidupan modern dan serba digital. Sehingga di era data besar (big data) dan teknologi penambangan data, dibutuhkan kematangan tradisi untuk melindungi warga dari target peretas hitam atau teroris.¹²⁹

Saat ini, entah organisasi publik maupun privat, yang beroperasi di wilayah Eropa, memegang 5000-an rekaman data atau lebih. Jika mereka tidak memenuhi standar sesuai

¹²⁸ Alessandro Mantelero. *The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the Roots of the 'Right to Be Forgotten'* Computer Law & Security Review 29 (2013) 229-235.

¹²⁹ He Zhile, Huang Daoli, Lei Yunting. *The background and the international and domestic impact of general data protection regulation*. 2014, Applied Mechanics and Materials, Vol. 599-601 (2014), pp. 2173-2177.

dengan GDPR, maka mereka pun siap dijatuhi sanksi sampai 5 (lima persen) dari penghasilannya atau 100 juta Euro.¹³⁰

GDPR tidaklah sendirian, sebagai regulasi penopang perlindungan data pribadi, juga terdapat Bab Hak Fundamental Uni Eropa (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) yang diterbitkan tahun 2000-an. Di dalam protokol ini juga disebutkan hak untuk perlindungan data pribadi (Pasal 8) dan hak atas privasi (Pasal 7). Maka sistem hukum Eropa memang sangat kental dan kuat aroma perlindungan data pribadinya.¹³¹

Kasus Facebook Fan Pages di Jerman

Sebuah peristiwa terjadi. Lembaga Independen yang mengawasi perlindungan data di daerah Schleswig-Holstein, Jerman. Lembaga ini mengirim peringatan kepada Wirtschaftsakademie, sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pendidikan. Tuduhannya adalah lembaga ini menggunakan halaman Facebook Fans untuk mengoleksi data privasi tertentu kepada para pengunjungnya.

Ceritanya bermula dari tanggal 3 November 2011, the ULD singkatan dari Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (*Independent Data Protection Centre for the Land of Schleswig-Holstein*), sebagai institusi yang mengawasi pelaksanaan Pasal 28 Direktif 95/ 46, sebagai otoritas pengawasan perlindungan data.

Institusi ini memerintahkan kepada Wirtschaftsakademie, untuk melakukan deaktivasi terhadap akunnya di Facebook

¹³⁰ Ardi Kolah & Bryan Foss. *Unlocking the Power of Data under the new EU General Data Protection Regulation*. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, Vol 16. No. 40. Pp. 270-274.

¹³¹ Bart van der Sloot. *Do data protection rules protect the individual and should they? An assessment of the proposed General Data Protection Regulation*. International Data Privacy Law, 2014, Vo. 4, No. 4.

Fan. Karena pada saat yang sama, Wirtschafsakademie, yang juga dituduhkan ke Facebook, melengkapi Facebook Fan Pages tersebut dengan sistem pembayaran, penggunaan sistem cookies, pengumpulan data personal dan memproses data tersebut.

Tidak terima terhadap putusan yang dilakukan oleh the ULD, Wirtschaftakademie membawa kasus ini di pengadilan administrasi negara di Jerman (*Verwaltungsgericht*). Putusan dari pengadilan administrasi negara, menyatakan bahwa Wirtschaftakademie dan juga perusahaan Facebook Irlandia tidak bersalah. Keputusan yang sama juga dijumpai pada saat level banding di Pengadilan Tinggi di Jerman (*Oberverwaltungsgericht*).

Sebagai otoritas yang menaungi persoalan perlindungan data pribadi, the ULD mengajukan kasasi di Pengadilan Administrasi Federal (*Bundesverwaltungsgericht*). Alhasil, pengadilan memutuskan ketidak-pantasan tindakan yang dilakukan oleh Wirtschaftakademie dan Facebook dalam pengumpulan dan pemrosesan data pengunjungnya.

ULD mengajukan banding tuntutan ke Mahkamah Agung Administrasi Federal Jerman, the Bundesverwaltungsgericht, mendasarkan pada pelanggaran terhadap Pasal 38 (5) dari BDSG dan sejumlah kesalahan prosedural yang melemahkan keputusan pengadilan di tingkat pertama dan banding. Ia menganggap bahwa pelanggaran telah dilakukan oleh Wirtschaftakademie yang melakukan ketidak-pantasan dalam mematuhi hukum perlindungan data pribadi, termasuk Facebook Irlandia yang membuat dan menjadi tuan rumah dan memperlihatkan situs web tersebut. Perintah kepada Wirtschaftsakademie, untuk menon-aktifkan halaman penggemarnya, dan memaksakan (para penggemarnya) membuat keputusan tertentu, yang untuk itulah diperlukan untuk memperbaiki penyalahgunaan data pribadi sejak pelanggaran

tersebut masih tetap terus menggunakan instruktur Facebook sebagai dasar teknis situs websitenya.¹³²

Uraian di atas adalah sepenggal paragraf yang dituliskan dalam putusan pengadilan. Pada akhirnya, Pengadilan Administrasi Federal Jerman memutuskan Wirtschaftsakademie sebagai administrator dan Facebook Irlandia yang selaku kontroler dan prosesor bersalah telah melakukan pengumpulan data dan pemrosesan data privasi. Peradilan dan institusi pengawas perlindungan data pribadi di Eropa, cukup ketat mengawasi praktik perlindungan data pribadi. Pengumpulan dan pemrosesan data pribadi harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan data pribadinya.

Dari kasus ini, dilihat bahwa kontrak yang secara khusus diperlukan untuk melakukan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh Facebook Irlandia. Termasuk dalam membuat kebijakan cookies, yang sudah seharusnya diberlakukan sejak dari awal dalam mekanisme perlindungan data pribadi pengguna/ pengunjung.

Dalam membuat sebuah halaman, seorang administrator memberikan Facebook kesempatan untuk meletakkan *cookies* pada perangkat elektronik pengunjungnya, tanpa pemberitahuan. Adalah sesuatu yang bertentangan dengan kebijakan privasi Eropa. Apalagi sampai informasi statistik yang berkenaan dengan data demografi, seperti usia, orientasi seksual, pekerjaan, gaya hidup dan peminatan.

Dalam kasus ini, terlihat ada pertanggung-jawaban korporasi bersamaan antara Facebook dan Wirtschaftsakademie, yang bertindak sebagai kontroler dan administrator.

¹³² The ULD appealed on a point of law to the Bundesverwaltungsgericht (Federal Administrative Court, Germany), relying inter alia on an infringement of Paragraph 38(5) of the BDSG and on a number of procedural errors vitiating the appellate

Meskipun masing-masing pihak mempunyai peran pada level yang berbeda. Namun pada kasus yang khusus, peran satu sama yang lain saling berhubungan.¹³³

Kasus Google di Prancis

Pada tanggal 24 September 2019, Pengadilan Eropa memutuskan sebuah kasus antara Google Inc dengan Commission nationale de l'informatique et des libertes (CNIL). Sebagai otoritas yang bertindak di bidang perlindungan data pribadi, CNIL memberikan sanksi sebesar 100.000 Euro, kepada Google karena penolakannya terhadap permintaan Lembaga tersebut untuk melakukan de-referencing, yang sudah diberlakukan dalam sistem mesin pencari Google.

Referencing dikenal di dunia digital sebagai mekanisme yang mengakses nilai atau objek dalam lokasi memori dan tersimpan dalam gudang penyimpanan (*storage*). Sistem pencari Google, menarik akses dari alamat IP (Internet Protocol), yang berlokasi di teritori negara anggota Uni Eropa, termasuk di Prancis.

Ceritanya bermula pada sebuah keputusan yang dibuat oleh Presiden CNIL yang memberikan pemberitahuan resmi kepada Google. Pada saat itu, Google memberikan layanan untuk bisa mengakses data personal orang perorangan dari

court's decision. It considers that the infringement committed by Wirtschaftsakademie consisted in commissioning an inappropriate supplier — inappropriate because it did not comply with the applicable data protection law — namely Facebook Ireland, to create, host and maintain a website. The order to Wirtschaftsakademie to deactivate its fan page, imposed by the contested decision, was thus intended to remedy that breach, since it prohibited it from continuing to make use of Facebook infrastructure as the technical basis of its website. Putusan Pengadilan Kasus C-210/ 16

¹³³<https://medium.com/golden-data/facebook-fan-pages-liability-of-co-controllers-2a23e7ecd3a9>, diakses pada tanggal 21 Mei 2020.

link yang berada di halaman-halaman web. CNIL meminta Google untuk menghapus nama seseorang yang tersebar di jejaring sistem mesin pencariannya. Jejak histori seseorang masih tersimpan dalam mesin pencari dan terlihat nama domain yang dikunjungi oleh orang tersebut.

Google menolak permintaan yang dilayangkan oleh otoritas perlindungan data pribadi Prancis, dengan mengatakan bahwa mereka tidak menyimpan data dan memanfaatkannya untuk menarik data personal, karena link yang dipertanyakan oleh CNIL secara otomatis terhapus.

Alasan berikutnya adalah CNIL menilai, bahwa Google juga tidak menerapkan ‘geo-blocking’ pada sistem pencariannya. Geo-blocking adalah konsep dalam regulasi EU 2018/ 302, yang bertujuan memberikan konsumen Uni Eropa mempunyai akses perdagangan barang dan jasa secara leluasa. Tanpa harus diketahui ia berasal dari wilayah mana, seorang berhak untuk mendapatkan akses tanpa diskriminasi kewarganegaraan, kependudukan dan status.

CNIL juga menyatakan bahwa tidak ada pengumuman formal yang dilakukan oleh Google, kepada para pengguna, untuk mencegah tertangkapnya alamat IP pengguna, yang kemudian memungkinkan melacak lokasi di wilayah negara anggota Uni Eropa. Lokasi serta nama pengguna telah masuk dalam mesin pencari Google, yang dikawatirkan akan berdampak pada ketidak-adilan akses terhadap perdagangan barang dan jasa padanya.

Untuk menyanggah sanksi yang diberikan oleh CNIL, Google Prancis mengajukan banding kepada the Conseil d’Etat (Peradilan Tata Usaha Negara, Prancis). Lembaga ini juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa permasalahan data pribadi. Akhirnya peradilan ini berpendapat seperti di bawah ini.

Conseil d'Etat mencatat bahwa mesin pencari yang dioperasikan oleh Google telah membawa sesuatu ke dalam nama-nama domain dengan pelacakan pada geografi, untuk membuat penyediaan spesifikasi, khususnya spesifikasi bahasa, dalam berbagai negara anggota Uni Eropa dan ia (perusahaan Google) merawat aktivitas-aktivitas di dalamnya. Di mana saat kita melakukan pencarian pada 'google.com', Google, secara prinsip akan dibawa secara langsung pada menu pencarian nama domain yang dikoresponden-sikan di berbagai negara dengan mengidentifikasi alamat IP pengguna internet. Meskipun, tanpa memperhatikan lokasi pada pengguna internet ini, masih dapat memungkinkan mengakses nama domain lain yang diinginkan. Namun demikian, hasil-hasil mungkin saja berbeda tergantung pada nama domain di mana pencarian itu dilakukan pada mesin pencari, sudah menjadi kebiasaan umum kalau tautan-tautan ditayangkan sebagai respons dari mesin pencari yang berada di databases dan indeks.¹³⁴

¹³⁴ The Conseil d'État also notes that the search engine operated by Google is broken down into different domain names by geographical extensions, in order to tailor the results displayed to the specificities, particularly the linguistic specificities, of the various States in which that company carries on its activities. Where the search is conducted from 'google.com', Google, in principle, automatically redirects that search to the domain name corresponding to the State from which that search is deemed to have been made, as identified by the internet user's IP address. However, regardless of his or her location, the internet user remains free to conduct his or her searches using the search engine's other domain names. Moreover, although the results may differ depending on the domain name from which the search is conducted on the search engine, it is common ground that the links displayed in response to a search derive from common databases and common indexing. Putusan Pengadilan Kasus C-507/ 17. Kasus lain yang lumayan besar adalah ketika Otoritas Pelindungan Data Pribadi Prancis (CNIL), memberikan denda kepada Google sebesar 50 juta Euro, dengan tuduhan melanggar prinsip transparansi dan hak untuk diinformasikan. Lihat, <https://medium.com/golden-data/case-study-googles-50-million-gdpr-fine-5e43946793c2>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020.

Putusan akhir dari Pengadilan Eropa, menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Google adalah hal yang biasa dilakukan oleh sebuah mesin sistem pencari. Dan menyarankan supaya pengguna internet bisa melakukan pengaturan sendiri pada mesin pencari mereka sesuai dengan lokasi dan teritori negara anggota. Namun pada saat yang sama, tidak menyarankan pengaksesan data berlebihan dan berpotensi merugikan pengguna internet.

Pada putusan ini dinilai pengadilan memberikan sebuah fatwa yang mengambang. Tidak secara tegas menyalahkan Google, begitu pula tidak mendukung secara blak-blakan pada otoritas perlindungan data pribadi Prancis, CNIL. Pada akhirnya, hukum Eropa tidak mewajibkan perusahaan dan sistem elektroniknya melakukan de-referencing, tapi pada saat yang sama juga tidak melarang secara praktis. Sehingga kondisi ini menjadi abu-abu.¹³⁵

Kisah-Kisah Menyeramkan Soal Data

Ambil hutang online cukup dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) saja. Namun pada saat yang sama, banyak orang mudah sekali memberikan, menyalin, dan menyebarkan NIKnya di sembarang tempat. Bahkan jika kita Googling, NIK pada menu gambar, maka akan terlihat banyak sekali NIK warga +62 yang beredar di dunia maya. Entah yang bersangkutan yang menyebarkan dan meng-*upload*-nya sendiri, atau diunggah orang lain.

Apa jadinya jika merasa tidak pernah meminjam, ternyata tiba-tiba ditagih. Apalagi jika sang penagih sudah mulai kasar, meneror kita. Memanfaatkan kontak dan lokasi yang kita sampaikan aksesnya melalui android atau iOS aplikasi tersebut.

¹³⁵<https://medium.com/golden-data/google-global-de-linking-aea8b5d61026>, diakses pada tanggal 22 Mei 2020

Data personal, memungkinkan orang melakukan profiling, targeting, dan eksploitasi.

Pada tanggal 2 Mei 2020, publik digemparkan dengan persoalan kebocoran data pada platform e-commerce terbesar di Indonesia. Sebanyak 91 juta akun diperjualbelikan di dark website. Adalah Shiny Hunters, adalah seorang peretas atau kumpulan peretas yang sangat penting di dunia gelap dengan reputasi pembobolan kelas kakap. Peretas atau grup peretas inilah yang memperjual-belikan data pengguna Tokopedia di website gelap.

Konon, data yang bocor terdiri dari username, alamat email, nama user, tanggal lahir, nomor telepon dan data privasi yang lain. Passwords konon telah dienkripsi atau diberi *hash*. Namun pada awalnya, Shiny Hunters, memosting ke publik data 5 (lima) juta, sekaligus meminta bantuan peretas lain untuk membuka enkripsi atau algoritma pada SHA2-384, yang digunakan oleh Tokopedia. Setelah berhasil mendapatkan pemecahkan kode rahasia tersebut, sang peretas ini pun mengunggah jutaan data pengguna yang lain.

Dengan bocornya data ini, teror bisa mudah dilakukan kepada para pengguna untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*), penipuan, *phishing*, *telemarketing*, dan ancaman siber yang lain.¹³⁶

Target operasi Shiny Hunters, ternyata tidak membobol tiga belas juta data pengguna Bukalapak pada sekitar tahun 2017. Bersamaan dengan Tokopedia, pada Mei 2020, Shiny Hunters juga telah membobol data pengguna pada platform Bhineka, dan mendapatkan data sebanyak 1,2 juta akun pengguna.

¹³⁶<https://bisnis.tempo.co/read/1338133/data-tokopedia-diduga-bocor-ini-risikonya-bagi-pengguna>, diakses pada tanggal 22 Mei 2020.

Shiny Hunters tidak hanya beroperasi di Indonesia, sekian banyak platform juga sudah dijebol olehnya. Misalnya aplikasi kencan Zoosk sebanyak 30 juta data pengguna, layanan *printing chatbooks* sebanyak 15 juta data pengguna, platform fashion Korea Selatan, sebanyak 6 juta akun, delivery makanan Home Chief sebanyak 8 juta akun.

Pada Mei 2020, Shiny Hunters juga mengklaim telah membobok platform GitHub Microsoft, dan telah melakukan pencurian data pada 500 GB data penting dari Microsoft.¹³⁷

Data privasi sudah diperjual belikan di website gelap. Teror eksploitasi dan ancaman menghantui kita. Belum selesai kekuatiran kita berbelanja dan beraktivitas di dunia maya. Beredar berita yang makin mengkwatirkan.

Data e-KTP kita sudah dibagikan ke lebih dari 1.200 lembaga pemerintah dan swasta oleh Kementerian Dalam Negeri, khusus Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Tak ada aturan dan prosedur yang ketat, bagaimana pembagian itu dilakukan. Apakah semua Lembaga pemerintah dan swasta tersebut mendapatkan data biometrik kita saat melakukan perekaman e-KTP? Penjelasananya tak pernah lengkap soal ini.¹³⁸

Lebih mengejutkan lagi adalah akun twitter Under the Breach, yang juga mengungkapkan data 2.3 juta e-KTP warga Indonesia, yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Akun Twitter ini juga mengaku akan memposting sisa data sebanyak 200 juta e-KTP dalam waktu dekat. Mengkonfirmasi ini, KPU malah mengatakan bahwa data e-KTP adalah data publik. Padahal disana terdapat nama,

¹³⁷<https://threatpost.com/report-microsofts-github-account-gets-hacked/155587/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2020

¹³⁸<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49103924>, diakses pada tanggal 23 Mei 2020

alamat nomor ID, tanggal lahir dan seterusnya.¹³⁹

Data yang hanya dilindungi dengan sistem yang rentan, akan makin rapuh dan makin gampang dieksploitasi. Begitu pentingnya data. Saking pentingnya, banyak juga praktik peretasan dan modus yang digunakan di ruang siber untuk mendapatkan data.

Perangkat lunak untuk memata-matai seseorang juga dikembangkan untuk menarik data dari target yang dituju. Pada tanggal 28 Mei 2019, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyusun sebuah laporan khusus tentang penyadapan dan hak asasi manusia. Sebuah perangkat lunak dikembangkan oleh perusahaan swasta digunakan untuk meretas secara langsung pada perangkat telepon pintar.

Dikenal dengan produknya NSO Group dengan nama Pegasus spyware adalah perangkat yang digunakan dan dituduh beroperasi di Meksiko. Pada awal 2015, sejumlah aktivis melaporkan kasus korupsi dan penyelundupan narkoba menerima pesan singkat dan tautan di perangkat telpon genggamnya.

Tidak hanya aktivis yang ditargetkan, melainkan juga politisi oposisi dan jurnalis juga mendapatkan hal yang sama. Sampai pesan yang sama juga didapati oleh pejabat PBB. Setelah dilakukan pengecekan pada Laboratorium pada sebuah Lembaga riset dan advokasi di Kanada, perangkat-perangkat ini telah terinfeksi dengan Pegasus *spyware*. Yang memungkinkan orang mengendalikan telpon genggam melalui jarak jauh tanpa diketahui.

Setelah dicek lebih jauh, ternyata Pegasus spyware ini juga telah digunakan sebagai perangkat penyadapan di empat puluh lima negara, termasuk Bahrain, Saudi Arabia,

¹³⁹<https://tekno.kompas.com/read/2020/05/22/10093057/data-diduga-bocor-kpu-sebut-informasi-yang-disebar-hacker-bersifat-terbuka>, diakses pada tanggal 23 Mei 2020

Togo, the United Kingdom of Great Britain, Amerika Serikat dan Irlandia Utara. Demikian tulis laporan khusus Dewan HAM PBB Nomor A/ HRC/ 41/ 35 pada tahun 2019 ini.

Kembali lagi, bahwa data adalah hal yang vital. Orang bisa melakukan segala cara supaya data itu bisa ia raih.

Cerita lain soal skandal penggunaan data, paling terkenal adalah kasus Cambridge Analytica pada Pemilihan Presiden Amerika pada tahun 2016 lalu. Pada saat itu Donald Trump memenangkan pertarungan berkat kerja dari Cambridge Analytica yang melakukan penargetan mikro pada pengguna Facebook di Amerika.

Facebook mempunyai data sebanyak 220 juta warga Amerika yang secara publik dikumpulkan oleh perusahaan broker data Acxiom dan Nielsen. Dari salah satu Cambridge Analytica menyusun materi kampanye dari penyusunan data sebanyak 1.4 milyar konten untuk mendukung Trump. Cambridge Analytica mengerjakan pengumpulan data besar-besaran, memanfaatkan model dan menyusun metode untuk mempengaruhi perilaku dan mengintervensi keputusan rasional pencoblosan.¹⁴⁰

Kalau dilacak dari belakang, sebenarnya pada tahun 2010 Facebook sudah mengumumkan membagi datanya melalui API untuk kepentingan pengembangan teknologi digital. Setahun setelah, Facebook menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk pengembangan teknologinya tersebut. Pada tahun 2013, Cambridge Analytica mendapatkan akses data melalui SCL Group. Di tahun yang sama, seorang professor dari Cambridge membuat kuis yang bertujuan untuk menggali karakter dan personalitas seseorang.

¹⁴⁰ Ken Ward. *Social Network, the 2016 US Presidential Election, and Kantian Ethics: Applying the Categorical Imperative to Cambridge Analytica's Behavioral Microtargeting*. Journal of Media Ethic. 2018

Data yang digunakan, diambil, dikoleksi, dan dianalisis terdiri dari nama, jenis kelamin, lokasi, tingkat Pendidikan, halaman kesukaan di Facebook, dan merek baju yang mereka kenakan. Dari data ini, terlahirlah 250.000 karegori karakter, perilaku atau personalitas. Mulai di tahun 2014, Cambridge Analytica menggunakan data ini, untuk menyusun kampanye politik.¹⁴¹

Tak pernah menyangka sebelumnya, dengan data seperti ini, cita-rasa kita bisa dimanipulasi, termasuk di dunia politik seperti kemenangan Trump.

¹⁴¹ Hashil Kanakia, Giridhar Shenoy & Jimit Shah. *Cambridge Analytica: A Case Study*. Indian Journal of Science and Technology, Vo. 12 (29), 2019.

Menelisik Kejahatan Siber

SUDAH sekian banyak film yang menayangkan tentang kejahatan siber. Mulai dari *The Hot Millions* (1968), *the Computer Wore Tennis Shoes* (1969),¹⁴² *Live Free or Die Hard* (2007), *Underground* (2012), *Untraceable* (2008), *Mr. Robot* (2015-2019) dan masih banyak lagi.

Di Indonesia, kejahatan siber juga mulai dipikirkan sejak terbitnya UU Telekomunikasi pada tahun 1999. Pada tanggal 17 April 2004, DF yang bekerja di salah satu perusahaan swasta menjebol server KPU, ia mengganti nama-nama partai.

Sebagaimana yang diketahui oleh khalayak ramai, ia mengganti nama Partai dari Partai Golkar menjadi Partai Jambu, Partai Demokrat menjadi Partai Mbah Jambon, dan PKS menjadi Partai Kolor Ijo. Ia dikenakan pidana selama 6 bulan dan 21 hari penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta

¹⁴²<https://cybersecurityventures.com/movies-about-cybersecurity-and-hacking/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2020

Pusat.¹⁴³

Ia dikenai Pasal 20 jo Pasal 50 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.¹⁴⁴

Ini adalah peristiwa yang menggemparkan. Sorotan media besar-besaran tertuju pada kasus ini. Sebelumnya, kejahatan siber tak begitu mendapatkan perhatian. Meskipun makin hari, jumlah dan modus kejahatan siber juga makin banyak dan beragam. Utamanya sejak lahirnya UU ITE pada tahun 2008, kejahatan siber bisa tertangani satu per satu.

Data Kejahatan Siber 2015-2018 berdasarkan laporan/pengaduan kepolisian

No	Jenis Kejahatan	2015	2016	2017	2018
1.	Berita Bohong/ Palsu	0	0	15	52
2.	Pornografi	135	155	180	272
3.	Perjudian	16	26	24	35
4.	Pencemaran Nama Baik	588	848	886	1271
5.	Pemerasan	18	17	22	36
6.	Penipuan	1494	1570	1430	1835
7.	Ijaran Kebencian/ SARA	37	91	124	225
8.	Pengancaman	90	108	132	176
9.	Akses Ilegal	107	147	153	181
10.	Pencurian Data	49	20	47	77
11.	Peretasan Sistem Elektronik	0	0	55	210
12.	Intersepsi Ilegal	7	15	10	20

¹⁴³<https://nasional.tempo.co/read/53570/penjebol-situs-kpu-divonis-6-bulan-penjara>, diakses pada tanggal 24 Mei 2020

¹⁴⁴<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11541/ihackeri-kpu-dituntut-membayar-denda-10-juta?page=all>, diakses pada tanggal 24 Mei 2020.

13.	Pengubahan Tampilan	27	42	5	6
14.	Gangguan Sistem/ DDoS	41	71	13	1
15.	Manipulasi Dara	0	0	33	86
Total		2609	3110	3109	4513

Dilihat dari tabel di atas, terlukiskan betapa kejahatan siber dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatannya. Meski sempat menurun tipis pada tahun 2017, total jumlah kasusnya, berdasarkan laporan dan pengaduan kepolisian, namun jumlah totalnya naik cukup signifikan pada tahun 2018.

Jika dilihat, tabel di atas, kejahatan siber juga sudah mulai beragam. Pada tahun 2015, belum ada laporan berkenaan dengan manipulasi data, peretasan sistem elektronik, dan berita bohong, namun pada tahun-tahun berikutnya mulai nampak angkanya.

Diamati lebih saksama, berbagai kejahatan siber, dalam praktik di Indonesia cukup beragam. Mulai dari *carding*, *cracking*, *hacking*, *trojan horse*, *data leakage*, *illegal content*, dan masih banyak lagi.¹⁴⁵ Jenis kejahatan siber dengan kemajuan teknologi makin pesat, diiringi dengan penyempurnaan variasi kejahatan tersebut yang makin meluas.

Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal APTIKA Kementerian Komunikasi dan Informatika mengklaim kalau serangan dalam bentuk perubahan tampilan meningkat dari 42 % sampai 95 % tiap tahunnya. Jika dilihat jumlah kerugian di seluruh dunia, juga bisa mencapai 600 milyar USD tiap tahunnya, atau setara dengan 0.8 % dari GDP

¹⁴⁵ Henry Kristian Siburian. *Emerging Issue in Cyber Crime: Case Study Cyber Crime in Indonesia*. International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 5 Issue 11, November 2016.

Global.¹⁴⁶

Apalagi di Indonesia hari ini juga mengalami demam siber. Setiap bisnis menjadi bisnis digital (*e-business*). Kejahatan penipuan sebagaimana yang diungkap di tabel makin ramai. Bahkan tak dihindari lagi juga penipuan/ penggelapan yang ditengarai oleh pegawai sendiri atau manajemen internal dari sebuah perusahaan itu sendiri.¹⁴⁷ Kejahatan model penipuan dimungkinkan dengan dua motif dan saluran.

Pertama, karena sistem keamanan dan organisasi sebuah perusahaan rentan, termasuk sistem elektroniknya. Kedua, kurangnya kewaspadaan pengguna dalam menyimpan kode rahasia, misalnya. Maka banyak platform hari ini yang menggunakan kode verifikasi berlapis untuk melindungi keamanan sistem yang mereka miliki.

Memang membahas kejahatan siber sebagai sebuah patologi. Mestinya dibahas bersamaan dengan keamanan siber. Sebab strategi mujarab menghadapi kejahatan siber, tiada lain adalah penguatan keamanan siber.

Pencemaran Nama Baik

Mulutmu adalah harimaumu. Di dunia digital seperti ini, bergeser menjadi jarimu adalah harimaumu. Pencemaran nama baik dan fitnah sudah diatur dalam KUHP, Pasal 310 dan 311. Di ruang siber, Pasal 27 ayat 3 UU ITE juga menelan banyak ‘korban.’

Dalam kosakata bahasa Inggris, ‘*defamation*’ yang diartikan dalam sejarah *common law*, sebagai reputasi jahat yang disematkan secara kejam pada seseorang dalam

¹⁴⁶ Angkasa. *Legal Protection for Cyber Crime Victims on Victimological Perspective*. SHS Web of Conference 58, 2018.

¹⁴⁷ Muhammad Fahlevi, Mohammad Saparudin, Sari Maemunah, Dasih Irma, Muhammad Ekhsan. *Cybercrime Business Digital in Indonesia*. E3S Web of Conference, 2019.

menghadapi persidangan.¹⁴⁸ Secara umum, defamation atau pencemaran nama baik berbasis pernyataan bohong, fitnah, tertulis maupun oral, yang mengekspresikan kebencian, tuduhan, pelaknatan yang tendensius, merugikan seseorang.

Di bagian tulisan sebelumnya pencemaran nama baik juga sudah diulas dengan kasus pertama yang cukup terkenal yakni, Kasus Prita, yang juga dielaborasi tentang pengujian material di hadapan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pasal 27 ayat 3 UU ITE ini. Yang konon, Pasal ini dinilai sebagai Pasal Karet.

Di negeri Paman Sam, Amerika. Pencemaran nama baik kebanyakan berujung pada gugatan perdata. Pada Agustus 2010, Sarah Jones, seorang guru cheerleader SMA untuk the Cincinnati Bengals tim sepak bola profesional. Ia digugat pencemaran nama baik oleh the Dirty World Entertainment Recordings, LLC, yang mengoperasikan website *www.thedirty.com*, karena pernyataan Jones yang merugikannya. Jones dituntut membayar ganti rugi sebesar \$ 11.3 juta.¹⁴⁹

Di Indonesia, tradisi gugatan perdata atas sebuah kerugian pencemaran nama baik belum terlihat. Beberapa resolusi dan laporan khusus Dewan HAM dan Majelis Umum PDD malah menyebutkan persekusi terhadap pencemaran nama baik acapkali bertentangan dengan hak atas kebebasan berekspresi.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Jonathan Rosenoer. *Cyberlaw. The Law of the Internet*. 1997. Springer., p. 109

¹⁴⁹ Brian Craig. *Cyberlaw. The Law of the Internet and Information Technology*. 2013. Pearson Education, Inc., p. 159

¹⁵⁰ Beberapa laporan dan resolusi yang bisa dirujuk antara lain adalah: 1. The Report of Special Rapporteur to General Assembly on Online Hate Speech Number A/ 74/ 486 of 2019; 2. Report of the Special Rapporteur to Human Rights Council on Surveillance and Human Rights Number A/ HRC/ 41/ 35 of 2019; 3. Report of the Special Rapporteur to the General Assembly on Artificial Intelligence Technologies and Implications for the Information Environment Number

Di bawah ini akan dielaborasi dua perkara yang mungkin bisa mendeskripsikan kasus pencemaran nama baik di ruang siber pada praktiknya. Dalam bagian kali ini, akan diulas dua topik pencemaran nama baik di ruang siber. Kasus Prita yang terkenal itu sudah dibahas di bagian sebelumnya. Kali ini kita akan membahas masalah yang menimpa Dr. Saiful Mahdi seorang akademisi yang kritis dan idealis, serta kriminalisasi jurnalis.

Kasus Dr. Saiful Mahdi: Pelapor Tak Bisa Membedakan Kritik dan Mana Pencemaran

Kasus dosen Fakultas MIPA Saiful Mahdi yang dilaporkan Dekan Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala, Aceh terus berlanjut. Satu kasus ini menambah deretan bagaimana UU ITE dijeratkan pada orang-orang tak berdosa.

Sementara pada kasus Saiful Mahdi ini, berkas sedang proses dilimpahkan ke Kejaksaan. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto cukup arif menyarankan cara damai dan kekeluargaan. Namun nampaknya hal ini tak begitu antusias direspons oleh pengadu.

Kuncinya ada di pengadu, melihat kasus ini *genus delicti*-nya mensyarakatkan adanya pengaduan (*klacht*). Polisi sebagai pejabat penyidik tidak bisa berbuat apa-apa jika pengadu ingin ‘terus.’

Saiful dilaporkan atas pesannya dalam grup WhatsApp bernama ‘Unsyiah Kita.’ Grup yang dibikin di luar kampus

A/ 73/ 348/ 2018; 4. Report of the Special Rapporteur to the Human Rights Council on online content regulation Number A/ HRC/38/35 in 2018; 5. Report of the Special Rapporteur to the General Assembly on access to information in international organizations Number A/72/350 in 2017; 6. Report of the Special Rapporteur to the Human Rights Council on the use of encryption and anonymity to exercise the rights to freedom of opinion and expression in the digital age Number A/ HRC/29/32 in 2015, and many other special rapporteurs.

oleh dosen-dosen lintas disiplin kampus itu. Pada grup itu, Saiful mengkritik rekrutmen PNS yang menurutnya kurang baik. Ia pun menulis seperti ini.

“Innalillahi wainnailaihirajun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup? *Gong Xi Fat Cai!!!* Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen hanya pada medioker atau yang terjerat “hutang” yang takut meritokrasi.” Tulis Saiful.

Singkat cerita, setelah pesan tersebut diunggahnya. Salah satu peserta grup WA tersebut dipanggil oleh Pimpinan Fakultas Teknik. Yang pada akhir, Saiful pun dilaporkan oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala atas dasar pelanggaran Pasal 27 ayat 3 UU ITE soal penghinaan. Saiful pun terpaksa menjalankan proses hukum.

Pada tanggal 16 April 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan Hakim Ketua Eti Astuti, SH, MH, dan Hakim Anggota Nendi Rusnendi, SH dan Roni Susanta, SH, menyatakan Saiful bersalah. Dalam pertimbangan dan putusan hakim disebutkan sebagai berikut ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merugikan unsur pimpinan Fakultas Teknik Unsyiah;

Keadaan yang meringankan

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa merupakan tulang punggung serta mempunyai tanggungan atas keluarganya.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan serta Perundang-Undangan lain yang Bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan terdakwa Dr. Saiful Mahdi, S.Si., M.Sc, bin (alm) Abdullah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik’ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan);

Dst.....¹⁵¹

Dilihat dari pertimbangan hakim dan putusannya di atas, tergambar bahwa hakim sebenarnya sudah menyakini bahwa apa yang dilakukan Saiful itu adalah pencemaran nama baik. Meskipun bisa dilihat bahwa hakim juga

¹⁵¹ Putusan Pengadilan Banda Aceh Nomor 432/ Pid. Sus/ 2019/ PN BNA.

gagal membedakan mana kritik, dan mana pencemaran nama baik. Hakim juga gagal melihat aspek objek korban yang khususnya bagi orang-perorangan (*natural person*), bukan badan hukum (*recht person*) ([pimpinan] Fakultas Teknik)].

Seperti yang dilihat dalam pesan yang dikirim oleh Saiful, tak ada satu pun nama disebut. Namun siapa sangka, Pimpinan Fakultas Teknik merasa dirinya yang disebutkan dalam teks tersebut, khususnya Dekan: Dr. Ir. Taufiq Saidi, M. Eng. Kalau seandainya Saiful menyebutkan Taufiq dalam pesannya, jelas terang benderang ada hidung yang ditunjuk, seorang yang namanya dicemarkan. Namun ini tidak ada satu nama pun.

Berikutnya, klausul Pasal 27 ayat 3, disebutkan norma hukum ‘tanpa hak.’ Kalau diamati, Saiful bukanlah orang yang tanpa hak. Ia mempunyai hak sebagai seorang akademisi, yakni kebebasan akademik (*academic freedom*). Jadi ucapan Saiful bukanlah kata-kata jalanan yang senonoh, melainkan kritik terhadap integritas dan meritokrasi.

Putusan hakim ini sungguh diluar dugaan. Pada saat proses sidang, segenap akademisi dan aktivis sebanyak 7 lembaga dan 63 individu yang menyusun sebuah *amicus curiae* (sahabat pengadilan) untuk memberikan masukan pada hakim. Dalam *amicus* tersebut, disebutkan bahwa kasus Saiful masih masuk dalam ranah kebebasan akademik. Karena kritiknya juga bagian dari kontrol sosial dan bermanfaat pada kepentingan publik.¹⁵²

¹⁵² Ketujuh Lembaga tersebut antara lain adalah Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI); Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia Indonesia (SEPAHAM Indonesia); Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KKAI); Pusat Studi Hukum dan HAM (Center of Human Rights Law Studies, HRLS); Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya; Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta; Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan (PUSHAM UNIMED), Medan; Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Kriminalisasi Jurnalis

Dalam sebuah komentar Dewan HAM PBB pada tahun 2011, menilai bahwa kebebasan press adalah bagian dari sebuah prinsip demokrasi. Peran media adalah mewartakan dan berkomentar tentang isu publik tanpa penyensoran yang berlebihan dan halangan. Di era yang serba digital seperti ini, kebebasan press juga, seharusnya makin terlindungi, papar dari Dewan HAM PBB di Jenewa pada tanggal 11-29 Juli 2011.¹⁵³

Akan tetapi, perlu kita catat juga, bahwa kebebasan berekspresi dan kebebasan press, bukanlah kebebasan yang absolute. Artinya ia juga terbatas sepanjang tidak merugikan dan menyakiti kebebasan orang lain.

Meskipun kita sadar. Kebebasan pers, kebebasan akademik, dan kebebasan berekspresi adalah seragkaian dari tulang punggung demokrasi. Tak jarang, insan-insan pers ini juga mendapatkan upaya ‘kriminalisasi’ atas kerja-kerja media yang dilakukannya. Mewartakan sebuah kebenaran kadang pahit, justru mereka -para jurnalis itu- adalah sesungguhnya profesi pemberani.

Beberapa jurnalis pun juga diancam dengan pidana pencemaran nama baik. Seperti yang terjadi pada Djeri Lihawa, yang pada tanggal 28 September 2016 mewartakan tentang kasus korupsi dana aspal pada media Sultra Satu News. Oleh jaksa ia dituntut pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda sebanyak 2 (dua) juta rupiah. Hakim pengadilan kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara.¹⁵⁴

Kejadian yang hampir sama menimpa pada Tri Herianto, pada tanggal 21 April 2018, ia dituduh melakukan

Naskah disusun pada tanggal 12 Februari 2020

¹⁵³ General Comment. No. 40 Human Rights Committee. 102md session in Geneva on 11-29 July 2011.

¹⁵⁴ Pengadilan Negeri Baubau Nomor 158/Pid.B/2017/PN Bau.

pencemaran nama baik. Tri Herianto yang juga berprofesi sebagai wartawan *online* memberitakan seseorang yang tertangkap Narkoba di sebuah Hotel di Pekanbaru. Hakim Pengadilan Negeri Indragiri Hulu, Provinsi Riau, memutuskan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,-.¹⁵⁵

Saya mencoba memberikan satu lagi contoh putusan pengadilan yang berkenaan dengan kerja wartawan yang dikriminalisasi. Kadang, ditengah media *online* yang sudah dihegemoni oleh media sosial dan situs pencari google, porsi belanja iklan tergerus drastis. Media online yang tak kuat bersaing dengan Facebook dan Google, maka mereka pun harus kejar trafik.

Salah satu caranya adalah memasang tautan di akun sosial media yang mereka miliki. Seperti halnya Mara Salem Harahap. Seorang jurnalis yang mengunggah tautan berita yang ditulisnya di Facebook. Tautan beritanya adalah tentang korupsi dana proyek RSUD yang melibatkan Bupati Simalungun Dr. JR Saragih, SH, MM dan anggota DPRD Elias Barus.

Media *online Lasser News Today.com*, tempat Mara bertugas pun dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh sang Bupati. Hukuman yang diterima olehnya Mara diputuskan oleh hakim selama 1 (satu) tahun pidana penjara. Mara pun banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, hukumannya tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang mengajukan pidana penjara 6 (enam) tahun.¹⁵⁶

Tiga putusan di atas sebenarnya sedikit bisa melukiskan bahwa kerja-kerja media massa juga rentan risiko dipidana-siberkan. Jurnalis jelas tidak bisa bebas mewartakan

¹⁵⁵ Pengadilan Negeri Indragiri Hulu Nomor 345/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Rgt.

¹⁵⁶ Pengadilan Tinggi Medan Nomor 8/ Pid.Sus/ 2019/ PT.MDN.

apa yang menjadi kebenaran faktual dalam perspektifnya. Salah sedikit, maka karyanya bisa dijadikan ‘alat balas dendam’ oleh orang yang disenggalnya.

Kendatipun demikian, di dunia jurnalis, ternyata banyak juga media yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Sebanyak 47 ribu media *online* beredaran di dunia siber. Hanya 2.700 media yang mengajukan pendaftaran dan terverifikasi di Dewan Pers.¹⁵⁷

Masalahnya begini, prinsip-prinsip etika jurnanisme juga perlu dijunjung tinggi. Klarifikasi, konfirmasi dan pengecekan validitas data juga perlu dikejar oleh seorang jurnalis. Dewan Pers adalah salah satu institusi yang berwenang melakukan mediasi dan adjudikasi saat terdapat persoalan pers. Akan sangat kesulitan jika persoalan yang dihadapi, sementara perusahaan medianya tidak terverifikasi olehnya.

Akan cukup kesulitan juga mengukur sejauh mana prinsip-prinsip kode etik jurnanisme ditegakkan dengan banyaknya media online yang tidak terdata.

Selain perkara di pengadilan, pengaduan di Dewan Pers juga bisa dipandang sebuah perlindungan terhadap kerja jurnalistik dan sarana seleksi atas kerja pers. Artinya, ada kerja-kerja jurnalistik yang ‘keblablasan’ malah merugikan bagi orang lain, menyalahi etika jurnalistik dan perlu mendapatkan koreksi.

Namun pengaduan yang ditujukan kepada Dewan Pers, juga adalah ‘benteng’ bagi pekerja pers supaya tidak mudah dibawa ke ranah pidana. Kita semua sepakat, bahwa pidana adalah langkah paling akhir. Pidana bukan langkah favorit.

Seperti suatu hari, pada Kamis tanggal 21 Juli 2016, Asosiasi Pilot Lion Group mengadukan *Kompas.com* ke

¹⁵⁷<https://www.amsi.or.id/dari-47-ribu-baru-2-700-media-online-terverifikasi-dewan-pers/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2020

Dewan Pers. Asosiasi Pilot Lion Group (APLG) melalui LBH Jakarta, mengadukan media ini karena berita berjudul *'Ratusan Pilot Lion Air Mogok Terbang Karena Uang Transport Tidak Dibayar,'* pada tanggal 10 Mei 2016. Berita yang hampir sama dimuat keesokan harinya, berjudul *'Pilot Lion Air Akan Mogok Kerja Lagi Bila Perusahaan Mengabaikan Hak Mereka'* yang diunggah pada tanggal 11 Mei 2016.

Hasil kajian dan klarifikasi yang digelar oleh Dewan Pers, bahwa *Kompas.com* sebenarnya melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, karena informasinya tidak diuji. Meskipun demikian, Dewan Pers tidak menemukan itikad buruk dari jurnalis *Kompas* tersebut.

Dalam sebuah risalah oleh Dewan Pers tersebut, disepakati beberapa langkah. Seperti *Kompas* bersedia memberikan pelayanan untuk memuat hak jawab para pilot tersebut. Asosiasi Pilot Lion Group juga menyiapkan hak jawabnya. Mereka bersepakat tidak membawa masalah ini ke jalur hukum.¹⁵⁸

Selain *Kompas*, sebagai media siber besar, kita bisa juga mempelajari kasus lain. Kali ini dari *Detik.com*, yang pada tanggal 2 Februari 2016, misalnya, menggelar pertemuan dengan Dewan Pers. Media ini memuat berita bertajuk *'Ini Kronologi Pencabulan Murid SD di Sidoarjo Versi Wali Murid,'* pada tanggal 11 Juli 2015.

Menurut Dewan Pers, *Detik.com* telah melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, karena mencantumkan informasi yang dapat memudahkan orang lain untuk melacak identitas korban kejahatan asusila.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Risalah Dewan Pers antara Kompas.com vs Asosiasi Pilot Lion Group pada tanggal 21 Juli 2016.

¹⁵⁹ Risalah Dewan Pers atas Detik.com pada Surabaya 2 Februari 2016.

Melihat hal yang di atas, Dewan Pers mempunyai posisi yang sangat fundamental. Untuk melindungi pers, dari proses pemidanaan karena kerja-kerja yang ‘menyalahi’ etika. Namun juga meluruskan kerangka etis kerja jurnalistik. Seperti yang diketahui di atas, Dewan Pers bisa menilai terhadap sebuah pemberitaan yang tidak diuji terlebih dahulu informasinya, mencantumkan informasi sensitif, maupun berita yang mengandung opini yang menghakimi, tidak berimbang, serta memuat hasil plagiasi dari media lain.¹⁶⁰

Jika ditarik ke belakang. Memang dalam perjalanannya, kebebasan pers juga dibayang-bayangi oleh kriminalisasi. Mulai dari seringnya disematkannya *Haatzaai Artikelen*, yakni pasal-pasal hukum pidana warisan hukum Hindia Belanda terkait ujaran kebencian, permusuhan, penghinaan dst, acapkali dilekatkan dengan kerja wartawan. Saat awal diberlakukannya UU ITE, kasus Iwan Pilian vs. Alvin Lie juga menjadi buah bibir sentral kala itu.¹⁶¹ Bagaimana dilema antara kebebasan pers yang juga rawan atas pelaporan penghinaan.

SARA dan Rasisme di Ruang Siber

Rasisme itu sudah bagian dari perbincangan sejarah yang panjang. Korbannya adalah minoritas. Mereka ini dituduh sebagai ‘orang lain,’¹⁶² aneh, kriminal dan banyak

¹⁶⁰ Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers tentang Pengaduan Marnalom terhadap Media Siber *Tribunsatu.com*, putusan dirumuskan pada tanggal 17 Januari 2019, terhadap sebuah sengketa antara TZL wartawan *Tribunsatu.com*, yang diadukan oleh AM selaku Bupati Bengkalis, yang dilaporkan atas berita ‘Kuasa Hukum dan Terdakwa Kasus Pidana Pers di PN Pekanbaru Diduga Dibungkam Hakim (diunggah Senin 09 Oktober 2018)’, lihat Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers No: 01/ PPR-DP/ II/ 2019.

¹⁶¹ Herlambang Perdana Wiratraman. *Press Freedom, Law, and Politics in Indonesia: A Socio-Legal Study*. 2014, Universiteit Leiden., p. 147-158

¹⁶² Seyla Benhabib, *The Rights of Others, Aliens, Residents and Citizens*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 21.

istilah negatif lainnya.¹⁶³ Seorang filsuf dan sosiolog Prancis, Loïc Wacquant, sampai menasbihkan mayoritas sebagai ‘Leviathan,’ yang siap kapan saja menerkam minoritas.¹⁶⁴

Meski bumi ini telah berikrar sejak tahun 1960an, tercesutusnya the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD), namun dokumen ini hanya seperti macan kertas. Galak dan mengaum di atas kertas, ompong di lapangan. Minoritas selalu ditempatkan di kelas paling bawah tanpa perlindungan hukum.¹⁶⁵ Mereka adalah kaum yang paling rentan jadi objek diskriminasi.¹⁶⁶

Mereka inilah yang acapkali diasingkan karena perbedaan warna kulit, kebudayaan, lingkungan sosial dan gaya hidup.¹⁶⁷ Lebih-lebih lagi, merekalah objek kebencian dan angkara murka serta tuduhan kesialan.¹⁶⁸

Di Indonesia, sejak zaman penjajahan Hindia-Belanda, kasta telah dirumuskan. Pasal 163 Indische Staatsregeling

¹⁶³ Francois Bonnet and Clotilde Caillault, *The Invader, the Enemy Within and They-who-must-not-be-named: how police talk about minorities in Italy, the Netherlands and France*, Ethnic and Racial Studies, Vol. 38, No. 7, 2015, p. 1185-1201

¹⁶⁴ Loïc Wacquant, *Marginality, Ethnicity and Penalty in the Neo-Liberal City: An Analytic Cartography*. Ethnic and Racial Studies, Vol. 37, No. 10, 2014, p. 1687-1711.

¹⁶⁵ Cecilia Menjivar & Cynthia L. Bejarano, *Latino Immigrants' Perceptions of Crime and Police Authorities in the United States*. Ethnic and Racial Studies. Vol. 27. No. 1., 2004, p. 120-148.

¹⁶⁶ Eduardo Moncada, *Counting Bodies: Crime Mapping, Policing, and Race in Colombia*. Ethnic and Racial Studies. Vol. 33. No. 4., 2010, p. 696-716.

¹⁶⁷ Vivian Louie, *Ethnicity Everywhere and Nowhere: A Critical Approach Towards Parsing Ethnic and Non-Ethnic Processes*. Ethnic and Racial Studies, 2014. Vol. 37. No. 5, p. 820-828.

¹⁶⁸ Elizabeth A. Stanko, *Reviewing the Evidence of Hate Lessons from a Project Under the Home Office Crime Reduction Programme*, 2004, Sage Publications, Vol 4 (3), p. 277-286.

membagi stratifikasi hukum untuk golongan Eropa, Timur Asing dan Pribumi.¹⁶⁹ Masa kolonial, seperti yang digambarkan dalam novel tretalogi pulau buru Pram, begitu bedanya perlakuan antara kawula Eropa, Tionghoa dan Pribumi.

Kemudian perlakuan diskriminasi pun berlanjut, di masa Orde Lama, dan menjadi-jadi pada Masa Orde Baru.¹⁷⁰ Kaum minoritas, masyarakat adat, penyandang cacat, menganut aliran kepercayaan kian termarjinalkan. Indonesia kini telah lengkap mengadopsi CERD, mempunyai UU sendiri No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi dan Ras, serta Pasal 28 UU ITE tentang larangan SARA di ruang siber.

Dari sejak diterbitkannya UU ITE, beberapa kasus menyita sorotan publik. Salah satu diantaranya adalah kasus dengan tersangka Jonru dan Ahmad Dhani. Mari kita ulas di bawah ini.

Jonru

‘Allahuakbar, allahuakar, allahuakbar!’, teriak Jonru. Saat Hakim menjatuhkan putusan padanya selama 1 (satu) tahun 6 bulan penjara.

‘Jadi sejak awal, saya percaya bahwa pengadilan yang paling adil adalah pengadilan di akhirat kelak oleh Allah yang Maha Adil. Jadi apa pun keputusannya di sini (Pengadilan Negeri Jakarta Timur). Keputusan selain saya bebas adalah keputusan yang tidak adil.’ Lanjut Jonru saat diwawancarai.

¹⁶⁹ Soepomo. *The Provisional Constitution of the Republic of Indonesia With Annotations and Explanations on Each Article*. Ithaca, Cornell University, 1964. Saat Soepomo merumuskan UUD Sementara tahun 1950, tiga kasta tersebut mulai dihapus.

¹⁷⁰ Awaludin Marwan. *Good Governance and Ethnic Minorities in Indonesia: A Comparative Law Perspective*. 2018. Utrecht University.

‘Kalau pun misalnya. Misalnya ya. Saya tidak ikhlas menerimanya. Dan, saya yakin orang yang mendzolimi saya akan mendapatkan balasan dari Allah. Itu jawaban saya.’ Tutup Jonru.

Jonru Ginting, alias Jon Riah Ukur, didakwa dengan menggunakan dua pasal, yakni Pasal 28 ayat 2 UU ITE dan Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasa dan Etnis. Dakwaan itu didasarkan atas status dan pernyataan Jonru di media sosial.

Ia sendiri membuat halaman fan, atas nama M Syafiq Ibrahim Ginting atau Abu Syafiq, yang memiliki sekitar 1.493.136 (satu juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu serratus tiga puluh enam) orang/ akun yang mengikuti dan like pada halaman tersebut.

Beberapa pernyataan yang dibuat oleh Jonru terbukti oleh pengadilan, telah melakukan penyebaran kebencian rasial dan golongan. Beberapa pernyataannya antara lain sebagai berikut. Pada tanggal 30 Juni 2017, ia mengunggah status seperti ini.

‘Quraish Shihab menjadi Khatib Salat ID di Masjid Istiqlal. Shalat Idul Fitri Tahun ini. Mari Lupakan Istiqlal. Masih banyak Masjid lain. Carilah masjid yang Khatib Shalat id-nya berahlaq lurus, ahlissunah wal jamaah. Masa kita harus mendengar ceramah dari orang yang tidak mewajibkan Jilbab bagi muslimah, berpendapat bahwa Rasulillah tidak dijamin masuk surge dan pembela Karbala?’¹⁷¹

Pernyataan ini dipost oleh Jonru, di Fan Page-nya, secara publik dan bisa dilihat oleh siapa saja. Dari postingan tersebut, pernyataan tersebut mendapatkan like (suka) sebanyak 25.796 orang, dan di bagikan oleh 14.252 orang, dan

¹⁷¹ Putusan Nomor : 142/ Pid.Sus/ 2018/ PT. DKI.

telah dikomentari oleh sebanyak 7.300 orang. Dari jumlah respon yang terdapat dalam pernyataan itu, terlihat begitu banyaknya reaksi yang diperoleh. Hal yang hampir sama pada beberapa pernyataannya yang lain.

‘Skakmat untuk orang2 syiah dan munafik. Ingat ya, syiah bukan islam. Mereka Cuma ngaku-ngaku Islam. Jika syiah emang baik dan termasuk islam, kenapa mereka ga pernah ngaku sebagai orang syiah? Jika syiah itu baik dan benar harusnya mereka bangga dong sebagai orang syiah, ga perlu taqiyah betul ?. Orang2 syiah dan munafik berkata, “dulu FPI bikin aksi bela ulama. Tapi ketika ulama seperti Quraish Shihab dihina oleh Jonru, kok FPI tidak membelanya? Hehe gue mau balik nanya nih, bong. Waktu ahok menista Al Quran, pak Quraish Shihab ada dimana ya? Apa dia ikut bersama barisan para ulama dalam membela islam? Kalo dia kagak ikut, berarti dia bukan bagian dari barisan pembela islam. Jadi buat apa kami membelanya? Btw ane Cuma ngasih info, tapi ente sebut itu menghina. ente sebut itu fitnah. Ente masih punya otak ?’

Unggahan ini dibuat oleh Jonru pada tanggal 15 Agustus 2017, dari rumahnya. Dari statusnya ini, ia mendapatkan like (suka) sebanyak 12.885 orang, dibagikan oleh 2.037 orang, dan diberi komentar oleh 556 orang. Tak berhenti disana, dua hari setelahnya, pada tanggal 17 Agustus 2017, tepat pada hari kemerdekaan, ia menulis: ‘1945 kita merdeka dari jajahan Belanda dan Jepang. 2017 kita belum merdeka dari jajahan mafia china, ayo selamatkan Indonesia,’ tulis Jonru.

Kalimat ini nampaknya yang paling bersinggungan terhadap rasisme. Kata ‘Mafia China’ nampaknya memberikan stigma pada etnisitas tertentu, utamanya Tionghoa. Meskipun juga bisa dikatakan, ia tidak secara langsung menghina sebuah kaum. Tapi nada kalimat tersebut terasa menyudutkan dan mengandung kebencian rasial.

Kemudian unggahan berikutnya yang dipermasalahkan di persidangan adalah pernyataan Jonru tertanggal 18 Agustus 2017. Yang bunyinya kira-kira seperti ini.

‘Yang menjajah Indonesia semuanya Non Muslim. Yang melawan penjajah mayoritas Muslim. Kok ente bencinya sama Muslim? Jangan-jangan ente emang antek-antek penjajah. Sebab penjajah dulu hobi banget menuduh umat Islam sebagai ekstrimis. Sama seperti ente sekarang yang menuduh umat Islam sebagai teroris radikal dan anti NKRI. Kok bisa ya, antek-antek penjajah menuduh anti NKRI kepada para pejuang Indonesia?’

Setiap tulisan dan pernyataan Jonru, memang mendapatkan respons yang cukup besar. Pada tulisannya kali ini, ia mendapatkan like (suka) sebanyak 32.058 orang, telah dibagikan oleh 12.763 orang dan diberi komentar oleh 2.100 orang.

Selanjutnya, masih di bulan Agustus, tepatnya tanggal 29 Agustus 2017, dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) yang mengangkat tema ‘Halal Haram Saracen.’ Jonru menulis di Facebooknya ‘NU (Nahdatul Ulama) telah menerima uang 1,5 triliun yang dikaitkan dengan pembubaran HTI.’

Dalam sebuah banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, permohonan Jonru diterima. Namun hukuman yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dikuatkan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Sudirman, SH, MH. Jonru pun masih dikenai pasal 28 ayat 2 UU ITE dan Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Di media, diwartakan kalau Jonru terbukti bersalah sebarikan ujaran kebencian rasial dan permusuhan.¹⁷² Ada

¹⁷²<https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43252349>, diakses pada tanggal 28 Juni 2020

juga yang memberitakan kalau tudingn terhadap Jokowi lah yang berujung pidana. Karena dalam salah satu percakapan, Jonru sempat terlibat dalam pembicaraan soal asal-usul orang tua Jokowi.¹⁷³

Yang jelas, adalah kasus Jonru merupakan satu di antara sekian banyak peristiwa hukum yang bisa menggambarkan bagaimana hukum ujaran kebencian rasial ditafsirkan oleh penegak hukum.

Ahmad Dhani

Siapa yang tidak kenal Ahmad Dhani. Seorang pendiri grup music ternama, Dewa 19. Ia mendirikan nya sejak tahun 1986 di Surabaya. Sejak satu dekade terakhir, Dhani, lebih menyukai berkecimpung di dunia politik. Istrinya saat ini, Raden Wulandari, atau lebih dikenal sebagai Wulan Jameela, melalui Partai Gerindra menjadi anggota DPR RI 2019-2024 dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI.

Namun sangat disayangkan pada tahun 2019, ia mendapatkan laporan polisi dan kasus pidana bertubi-tubi. Mulai dari Dugaan Makar, ia sempat ditangkap pada tanggal 2 Desember 2016. Ujaran kebencian yang dilaporkan pendiri Basuki Tjahja Purnama (BTP) Network Jack Lopian ke Polda Metro pada tanggal 9 Maret 2017. Dan, ia pun dilaporkan oleh Koalisi Bela NKRI ke Polda Jawa Timur terkait ‘kata idiot’ pada tanggal 26 Agustus 2018. Ia melontarkan kata-kata tersebut saat ia dan rombongannya dikepung massa penolak Deklarasi 2019 Ganti Presiden di Hotel Majapahit Surabaya.¹⁷⁴

¹⁷³<https://tirto.id/tudingan-jonru-terhadap-jokowi-berujung-pidana-cvJC>, diakses pada tanggal 28 Juni 2020

¹⁷⁴<https://www.suara.com/entertainment/2019/12/30/125625/deretan-kasus-ahmad-dhani-hingga-berujung-bui>, diakses pada tanggal 4 Juli 2020

Pada bagian ini, akan membahas tentang kasus ujaran kebencian yang menimpa Ahmad Dhani, utamanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ceritanya bermula seperti ini. Pada Februari 2017 sampai Maret 2017, Ahmad Dhani, yang mempunyai nama lengkap Dhani Ahmad Prasetyo, bersama-sama Suryoprato Bimo T, dituduh melakukan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan (SARA).

Lalu, kenapa Suryoprato Bimo T alias Bimo juga dituduh terlibat dalam kasus tersebut? Pada tahun 2010 sampai 2014, Ahmad Dhani mengoperasikan akun Twitternya sendiri, yang beralamat di *@ahmaddhaniprast*, dengan menggunakan komputer di rumahnya.

Selanjutnya, pada tahun 2014, Dhani menggunakan telepon pintar iPhone 6, dan untuk mengunggah status di akunnya, ia mengirim ke Bimo. Bimo sendiri menjadi admin sosial media Dhani dengan bayaran tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Beberapa pernyataan Twitter yang dipermasalahkan di muka pengadilan terdapat tiga status. Pertama, pada tanggal 7 Februari 2017, Bimo atas perintah Dhani mengunggah status di akun Twitternya, seperti ini: ‘Yang menista Agama si Ahok... Yang diadili KH. Ma’ruf Amin...ADP?’

Kedua, pada tanggal 6 Maret 2017, kembali Bimo atas perintah Dhani, mengunggah kalimat yang berbunyi ‘Siapa saja yang mendukung Penista Agama adalah Bajingan yang Perlu diludahi mukanya – ADP.’ Unggahan inilah yang namanya paling banyak diperdebatkan di ruang persidangan.

Ketiga, pada tanggal 7 Maret 2017, Bimo mengunggah kalimat yang berkaitan ungkapan-ungkapannya sebelumnya. Dhani membuat pernyataan seperti ini: ‘Sila Pertama, KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur... Kalian WARAS? – ADP.’ Di dalam putusan juga disertakan

beberapa screenshot dari pernyataan-pernyataan Dhani yang dimuat di akunnya tersebut.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaannya kepada Dhani dengan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun atas dasar pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penasihat hukum Dhani, yang terdiri dari Hendarsam Marantoko dan rekan, membuat pembelaan, bahwa apa yang dikatakan oleh Dhani itu bukanlah ujaran kebencian. Melainkan ujaran perlawanan. Mereka menganggap kasus ini adalah urusan politik. Dan, mereka juga mengajukan beberapa pertanyaan, seperti: suku mana yang dihina? Agama mana yang dinista? Ras mana yang dilecehkan? Golongan apa yang dibenci? Tidak ada, jawab para penasihat hukum.

Lalu, bagaimana dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melihat hal ini. Majelis ternyata bersepakat dengan penuntut umum dengan mengkualifikasikan Dhani pada jenis tindak pidana SARA sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Majelis pun meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Dhani telah memenuhi Pasal tersebut, seperti: (1) setiap orang; (2) dengan sengaja dan tanpa hak (3) menyebar informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Saat menilai unsur setiap orang, majelis merujuk pada Yurisprudensi MARI Nomor 1398/ K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, yang sama dengan terminologi kata barang siapa. Jadi yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum. Adalah Dhani yang dinyatakan sehat secara jasmani maupun rohani.

Kedua, unsur sengaja dan tanpa hak, majelis memberikan komentar yang agak kritis pada formulasi pasal ini. Majelis mengatakan bahwa pasal ini ‘telah menimbulkan multitafsir bagi yang menggunakannya.’

Lebih lanjut, majelis mengatakan bahwa konsep sengaja dan tanpa hak sangat erat kaitannya dengan suasana batin seseorang. Tidak mudah mengungkapkan niat seseorang. Majelis hakim menilai juga Dhani sebagai tokoh publik, kata ‘halo’ saja sudah memberikan pengaruh dan dampak.

Sementara unsur yang terakhir, yang menyatakan penyebaran informasi ujaran kebencian ini adalah pembahasan cukup fundamental. Mulai dari jenis informasi yang dipermasalahkan. Apakah UU ITE mencakup informasi yang diperbincangkan dan dikenakan pada kasus Dhani. Majelis berpandangan UU ITE membicarakan data elektronik, yang termasuk pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol perforasi dan lain sebagai macamnya.

Lebih lanjut, kata-kata ‘siapa saja yang dukung Penista Agama adalah Bajingan yang perlu di ludahi mukanya, ADP’ menurut majelis adalah aktivitas yang menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau golongan penduduk Negara Indonesia dan dengan sengaja di muka umum mengeluarkan pernyataan yang provokatif.

Oleh karenanya, majelis hakim menjatuhkan pidana, meskipun lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.

Pornografi

Seorang tokoh feminisme Amerika terkenal, Catherine MacKinnon pernah berkata. Hukum melihat dan memper-

lakukan perempuan, seperti cara lelaki melihat dan memperlakukan perempuan.

Pada kasus pornografi, juga demikian. Perempuan sering kali selain menjadi objek pornografi, ia juga sering kali dijadikan korban. Eksploitasi terhadap perempuan semakin berat ditambah hukum yang membebaninya. Pada umumnya para pegiat dan studi gender menolak pornografi.

Dalam kasus pornografi di ruang digital, pun demikian. Perempuan juga sering kali dijadikan tersangka terlebih dahulu. Ia juga rentan diperas dalam sebuah hubungan percintaan yang kandas, lalu sang lelaki mengancam bahkan sebagian kasus telah disebar di dunia maya. Studi yang dilakukan oleh Bruce Curtis, dari University of Auckland, dulu, pornografi dan perjudian dijadikan objek dalam lingkup pengaturan dan lokalisasi.

Dengan teknologi, praktik pornografi, prostitusi dan perjudian online makin sulit dipecahkan.¹⁷⁵ Sekarang lokalisasi sudah tidak lagi menjawab persoalan pengurangan pornografi, prostitusi dan perjudian.

Pasalnya, di hampir sebagian besar negara barat melarang pornografi anak. Banyak di antara negara-negara di barat malah melegalkan pornografi dan menarik pajak dari prostitusi dan pornografi. Indonesia masih melarang Pornografi, melalui UU No. 44 Tahun 2008.

Pada bagian kali ini, akan di bahas, satu kasus yang pernah menjadi sorotan publik. Alih-alih larangan pornografi online digunakan untuk melindungi perempuan, ini malah memojokkan posisi perempuan. Adalah kasus Baiq Nuril yang dulu sempat dijatuhi hukuman atas putusan pengadilan yang ‘tidak adil.’ Sementara kasus lain yang dibahas

¹⁷⁵ Bruce Curtis. *Domestication and Regulation of Online Gambling and Pornography*. New Zealand Journal of Social Sciences Online, 2008, Vol. 3: pp, 85-86

di sini, setelah kita membahas kasus Nuril adalah peristiwa pemerasan ‘sang mantan,’ karena putus cinta dan kecewa dari kisah percintaan.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini adalah norma hukum pidana untuk tindakan asusila di ruang siber.

Baiq Nuril: Hukum Kacamata Kuda

Seorang perempuan yang sehari-harinya bekerja sebagai guru honorer. Karena status pekerjaannya yang tidak tetap, posisinya tidaklah kuat betul. Beda mereka yang sudah PNS dan guru tetap. Kalau saja, ia punya status guru tetap. Paling tidak ia punya kedudukan hukum yang kuat dan setidaknya gaji yang lumayan.

Sementara, ia hanyalah lulusan SMA. Tak lantas mengurungkan niatnya untuk terus mengajar. Baiq Nuril Maknun, nama lengkap guru itu. Ia mengajar di SMAN 7 Mataram. Hingga suatu hari terjadi hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya.

Seorang perempuan, yang juga adalah guru honorer, lalu ditelpon seorang kepala sekolah. Pasti sang guru honorer ini tak punya kuasa menolaknya. Statusnya hukum ketenagakerjaannya yang ringkih. Kepala sekolah punya kuasa besar memutus kontraknya kapan saja. Taka da pilihan lain, selain hikmat dan mendengarkannya. Hingga suatu hari, bahasan pembicaraannya sudah kelewatan. Sang Kepala Sekolah berbicara seperti ini.

‘Kemarin kamu datang cepat sekali, setan... Saya hanya dikasih sekali, meskipun begitu hanya sekali, tapi sampai satu jam. Ee saya goyang tidak keluar-keluar, kenapa tidak keluar-keluar barang ini. Ee kuat sekali kuda Sumbawa ini negar, negar terus. Ya Allah saya suruh nungging dia nungging. Ee gak keluar juga airnya. Berdiri berbagai gaya. Kurang ajar kamu,

kata saya. Dia bilang ‘suami saya hanya satu gaya.’
 Ooo suamimu,..kalau begitu kami sama suamimu
 saja, terus terang gaya apa yang belum ayo, sudah
 pakai tempel penis di payudara, tapi tidak bisa bisa.
 Payudaranya yang keras saya gosok-gosok gak bisa
 juga, jadah! Saya bilang sundel semuanya ini, putingnya
 saya gitukan, tidak bisa bisa, ayo nungging sudah.
 Ee pantatnya yang besar montok itu belum keluar
 juga. Ya mungkin bisa keluar dengan cara dikulum, ee
 dia kulum ndak bisa bisa, seperti Ariel dan Luna Maya
 itu, ndak keluar keluar juga.’¹⁷⁶

Mendengar kata tak pantas tersebut, Nuril risih. Ia pun merekamnya, dan berencana akan melaporkan ke DPRD Kota Mataram. Belum sampai dilaporkan bukti rekaman tersebut, Nuril sudah dilaporkan ke kepolisian terlebih dahulu oleh Haji Muslim, sang Kepala Sekolah yang menelepon Nuril dan direkam pembicaraannya itu.

Nuril yang merekam pembicaraan tak pantas itu, karena asalnya akan digunakan bahan laporan pejabat, malah dituduh melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Yakni, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dapat diaksesnya informasi yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Haji Muslim, sendiri dalam persidangan memberikan kesaksian dan membenarkan isi percakapan tersebut adalah suaranya. Ia yang juga adalah Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram, mengaku bahwa sering memikirkan dan membayangkan khayalan dan fantasi seksual, yaitu selalu ingat ketika belajar di negara Australia. Ia sering melihat video porno artis film porno (*blue film*) di Australia bernama Megan Leigh.

¹⁷⁶ Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/ Pid.Sus/ 2017/ PN.MTR pada tanggal 26 Juli 2017.

Apabila tidak berkhayal atau berfantasi seksual tersebut pada malam harinya, ia mengaku sering mengalami susah tidur. Pada saat itulah ia melakukan percakapan melalui telepon dengan Nuril tentang khayalannya itu seolah-olah berhubungan badan dengan artis film porno Megan Leigh.¹⁷⁷

Tapi anehnya, Haji Muslim inilah yang melapor ke kepolisian dan dia juga yang sebenarnya mempersoalkan suaranya sendiri. Nuril yang hanya merekam itu, justru tidak melakukan perbuatan yang asusila.

Dalam sebuah persidangan, ahli didatangkan, adalah Teguh Arifiyadi. Lulusan Fakultas Hukum UNDIP pada tahun 2000-an yang menulis soal kejahatan siber, yang pada saat itu masih langka diperbincangkan. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, ia juga kini menguasai persoalan teknis IT, dengan sertifikasi seperti Certified Ethical Hacker (CEH) dan Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI).

Teguh saat itu menjabat sebagai Kepala Subdit Penyidikan dan Penindakan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, waktu itu. Ia menyatakan bahwa unsur ‘dengan sengaja’ dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah sebuah berbentuk perbuatan aktif. Dalam perkara Nuril, ia tidak menghubungkan langsung dengan kabel data ke perangkat elektronik lain. Jadi Nuril, sebenarnya tidaklah bersalah.¹⁷⁸

Selain itu, ahli yang lain, seperti Sri Nurherwati yang juga adalah seorang Komisioner dari Komisi Nasional Perempuan 2015-2019, berpandangan bahwa Nuril adalah korban kekerasan seksual di tempat kerja. Jenis kekerasan,

¹⁷⁷ Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/ Pid.Sus/ 2017/ PN.MTR pada tanggal 26 Juli 2017.

¹⁷⁸ Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/ Pid.Sus/ 2017/ PN.MTR pada tanggal 26 Juli 2017.

menurut Sri, terdiri dari kekerasan fisik dan non fisik. Yang dialami oleh Nuril adalah kekerasan seksual dan verbal yang sangat menyakitkan, sebenarnya.

Kalau pada level ini dikaitkan dengan refleksi hukum progresif, maka akan diajukan beberapa pertanyaan. Siapa yang bersalah? Dan siapa yang sebenarnya korbannya? Prof Tjip juga salah satu pendorong mata kuliah kajian hukum dan perempuan pada tahun 1980an.

Maka pandangan dari Sri Nurherwati dalam konteks ini sangat perlu dipertimbangkan. Yang sesungguhnya menjadi korban itu justru adalah Nuril. Baik sebagai perempuan dan status struktural yang dimilikinya, ia adalah pihak yang rentan. Tuduhan melakukan atau terkait dengan pornografi itu adalah sesuatu tuduhan yang salah alamat.

Sebenarnya siapa yang melakukan fantasi seksual dan dari mana asal-usul suara yang bermuatan pornografi itu? Jelas sumbernya bukan berasal dari Nuril.

Hukum progresif akan melihat dengan cara biasa melihat hal ini. Terkait dengan rasa keadilan dan sisi kemanusiaannya. Nuril adalah seorang perempuan biasa. Ia berprofesi sebagai guru honorer sekolah. Ia menangis berkali-kali saat di depan pengadilan. Ia juga mengenakan hijab dan berpakaian sopan sehari-harinya.

Akankah ia mengumbar tindakan asusila? Memang tidak ada yang tidak ada, yang tidak mungkin di dunia ini. Tapi kecil kemungkinan Nuril, di lihat dari fakta-fakta persidangan melakukan hal ini.

Hakim tingkat pertama, yang diketuai oleh Albertus Usaha dan dua anggotanya Ranto Indra Karta dan Ferdinand M Leander, meskipun adalah hakim yang berkomposisi laki-laki semuanya. Sensitivitas mereka cukup tinggi. Mereka membebaskan Nuril dari segala tuntutan hukum. Sialnya, penuntut umum banding dan hakim-hakim

berikutnya menghukum Nuril, sampai keluar amnesti dari Presiden Jokowi.

Hati-Hati Saat Pacaran

Dalam tulisan ini akan diulas dua kasus. Yang pada akhir ceritanya melukiskan narasi yang hampir sama. Yakni, hubungan yang kandas, sang lelaki tak terima putus cinta, dan mengamuk. Cara yang dilakukannya tak senonoh. Ialah menyebarkan video dan foto telanjang sang mantan pacar. Tak ada belas kasihan dan amarah yang membuta, bahkan beberapa kasus disebarkannya melalui media sosial.

Bagian ini akan mengupas bagaimana kasus pornografi online terjadi pada kasus-kasus putus cinta dan bagaimana hakim menafsirkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE sebagai basis hukum.

Kasus pertama, hal ini menimpa pada NK, seorang remaja berumur 24 tahun. Terpidananya adalah mantan pacarnya sendiri yang tinggal di Banjarmasin dan bekerja sebagai karyawan swasta. Terpidana berinisial RA. Mereka dulunya pacaran dan hubungan kandas.

NK-lah yang memutuskan kisah cinta itu. Tapi RA tak terima. Sebelum semuanya berakhir, RA mengajak NK untuk rujuk pada tanggal 29 Januari 2017 di sebuah Hotel. Di sanalah mereka berhubungan badan layaknya suami istri. Tanpa sepengetahuan NK, RA mengambil gambar NK dalam keadaan telanjang.

RA pun mengancam NK, jika tidak berlanjut hubungan mereka, maka ia akan menyebarkan fotonya dalam keadaan bugil tersebut. Namun foto tersebut sudah disebarkan oleh RA ke mana-mana.

NK sudah menjalin hubungan dengan pemuda yang lain, LYYS, inisialnya. RA pun mengirim foto NK ke RA dengan kata-kata seperti ini.

‘Halooo’

‘Pengen lihat foto pacar kamu lagi bugilkah?’

‘Pengen gak?’

‘Kalau pengen, nih aku kirim.’

RA mengirimnya pada tanggal 27 Maret 2018 melalui pesan telepon genggam. Tak hanya itu, RA juga mengirim via email di tanggal sama dengan judul ‘Masih naksirkah sama ceweknya?’

Akibat tersebarnya foto tersebut NK mengalami depresi berat dan rasa malu. Ia juga sangat takut dan kuatir jika masalah ini sampai mengganggu pekerjaannya. Bersama keluarganya, ia dirundung kesedihan yang mendalam.

Namun ternyata ceritanya tak semudah yang kita bayangkan. Dalam pengakuan terpidana, sebenarnya NK-lah yang menyebarkan foto bugilnya terlebih dahulu. Dan, RA juga mendapat teror, serta makian serta ancaman penyebaran foto bugilnya. NK sudah menyebarkan foto RA melalui akun sosial media palsu. NK juga mencela RA dengan kata-kata ‘dasar cowok bangsa, bencong, tidak berani tanggung-jawab.’

Majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan, perbuatan RA mengakibatkan NK depresi berat dan menanggung rasa malu. Sementara yang meringankan, RA belum pernah dihukum, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan mengakui perbuatannya.

Hakim memutuskan bahwa RA terbukti sah melakukan tindak pidana ‘dengan sengaja dan tanpa hak mentranmisikan dokumen/ informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan’ sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Ia juga dianjar dengan hukuman pidana se-

lama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).¹⁷⁹

Kasus kedua, seorang pemuda berinisial RAP menjalin kisah cinta dengan seorang gadis. Sebut saja namanya GA. Pada Agustus 2016, di sebuah kamar hotel di Kawasan BSD Tangerang Selatan bercinta layaknya suami istri. RAP yang ingin mengabadikan adegan mesranya itu pun merekam video berdurasi 7 sampai 8 menit. Ia pun memotret tubuh GA yang telanjang dan ia simpan di telepon genggamnya.

Setahun kemudian, tepatnya pada bulan Oktober 2017, RAP mendapatkan kabar kalau GA ternyata tak hanya memadu kasih dengannya saja. GA juga menjalin hubungan alias selingkuh dengan kakak iparnya. RAP merasa dikhianati dan kecewa. Ia bermaksud menyebarkan rekaman video berikut foto-fotonya itu.

RAP yang kalap juga mengancam GA dengan kata kata ‘Oiya, nanti video itu mau aku jual, mayan lah 5/6 juta ha ha haa.’ Hingga akhirnya, pada 6 November 2017, dengan menggunakan akun Instragram palsu, bernama Indonesian Sexy Bae, ia memposting video dan foto-foto yang bermuatan asusila tersebut.

Tak berhenti sampai di situ saja, ia pada tanggal 11 November 2017, ia kembali mengancam sang mantan pacarnya, dengan berkata *‘Sebentar lagi elo yang akan hancur. Gw bakal hancurin elo sampai titik darah penghabisan. Ingat gw dendam kesumat dengan lo!. Adek lo yang idiot itu bakal yang akan tanggung jawab atas kelakuan lo. Kita liat! Tenang tinggal gw share ke teman-teman lo itu video lagi ig2nya.’*

Pada tanggal 12 November 2017, sehari setelah mengirim pesan. RAP mengedit video dengan menutup bagian

¹⁷⁹ Putusan Pengadilan Banjarmasin Nomor 990/ Pid.Sus/2018/ PN. Bjm.

wajahnya. Ia bermaksud mengirimken ke beberapa orang GA sering melakukan hubungan intim dengan Om-Om demi mendapatkan bayaran.

Disebabkan video dan foto yang sudah tersebar itu, GA merasa takut dan kuatir terhadap sanksi sosial menyebar di lingkungan kerja, kampus dan masyarakat. GA pun mengalami tekanan psikis dan emosi yang tidak terkontrol.

Dampak psikologi yang di alami oleh GA menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan. Bahkan hakim juga menekankan penegakan hukum kejahatan perlu dikuatkan untuk menghukum penjahat. Sehingga dapat memberikan efek jera. Jangan sampai kejadian serupa terhenti sesaat kemudian muncul kembali. Lebih lanjut, hakim juga menekankan akan arti pentingnya pemenuhan rasa keadilan di ruang siber melalui UU ITE. Rasa keadilan masyarakat dan korban GA, ini.

Pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada RAP selama 4 (empat) tahun pidana penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah.¹⁸⁰ Pasal 27 ayat (1) yang diterjemahkan dan dipakai oleh hakim, terang sudah di kasus ini. Tak seperti kasusnya Nuril, siapa korban, siapa pelaku, sampai mana pendistribusian materi yang bermuatan asusila. Di kasus gagal menjalin cinta sang mantan ini, sangat terang benderang. Foto asusila diproduksi dan disebar, Pasal 27 ayat (1) akan menghukum tindakan asusila tersebut. Jangan main-main menggunakan kamera! Dan, hati-hati saat pacaran.

Akses Ilegal

Akses ilegal merupakan salah satu tindak pidana ITE yang berbasis pendekatan teknologi. Bukan berarti bahwa tindak pidana yang lain, seperti penghinaan, perjudian, por-

¹⁸⁰ Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Nomor 350/Pid.Sus/ 2018/ PT.DKI.

nografi, SARA, dst itu tidak lantas absen aspek teknologinya. Dalam kasus ‘KUHP yang di-ITekan’ itu, masih diperlukan bukti elektronik dalam sistem acaranya. Bantuan teknologi juga diperlukan dalam pembuktian semua aspek kejahatan siber.

Namun akses ilegal ini adalah tindak pidana yang sedari awal membutuhkan kemampuan khusus. Setidaknya, sang pelaku seharusnya menguasai teknik peretasan dan sudah masih memainkan komputer.

Pelaku akses ilegal ini sering kali dikenakan Pasal 30 dan Pasal 32 UU ITE.¹⁸¹ Setiap orang yang dengan sengaja dan

181 Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun, bertujuan memperoleh informasi, dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Ketentuan ini ada pada pasal 30. Sementara Pasal 32 adalah norma hukum yang melarang mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, dan menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain.

Pada awalnya, pasal ini terlihat sederhana. Namun pada aspek teknis, interpretasinya juga sangat licin.

Pengertian mengakses informasi atau sistem elektronik milik orang lain, misalnya. Apakah dengan saya mengunjungi halaman dan melihat profil Facebook atau Instagram milik teman saya, akan disebut akses ilegal? Apakah kunjungan saya ke website tanpa memberitahu pemilik website adalah akses ilegal juga? Bukannya pada situs e-commerce, justru sang pemilik sistem elektronik malah senang jika banyak pengunjung.

Kemungkinan masalah yang lain, adalah saat para pemburu celah (*bug hunter*) yang memang berniat baik ingin membantu. Mereka yang masuk ‘golongan peretas etis (*ethical hacker*)’, mencari celah dan melaporkan secara etis. Saat mereka melakukan penelitian dan melakukan pemindaian (*scanning*).

Saat mereka menggunakan peralatan peretasan (*hacking tools*), misalnya NMAP, Acunetix, Webcruiser, Nikto, Dirsearch, Burpsuite, ImmuniWeb, Vega, Owasps, Arachni, Sqlmap, Dirb, Nessus, Netsparker, Wpscan, dan masih banyak lagi, permintaan (*request*) yang dikirimkan begitu banyak, bisa saja mengganggu sistem elektronik.

Mereka ini yang tidak menggunakan VPN, dan memang memperlihatkan IP address mereka, tak tahunya me-

reka malah ditangkap atas dasar dugaan ilegal akses. Hal ini memang sangat memilukan. Mengingat sebenarnya tidak ada niat jahat (*mens rea*) yang terdapat dalam alam persepsi para peretas etis ini.

Kendatipun demikian, tak jarang, banyak juga para peretas itu yang berpaham ‘hitam’ (*black hat hacker*). Mereka ini yang memburu pengrusakan dan ‘tuyul’ yang suka membobol kartu kredit orang, yang sebagian bisa ‘disembuhkan’ dan sebagian sudah kronis.

Untuk mempersingkat pembahasan soal legal akses ini. Mari kita tengok bagaimana interpretasi penggunaan Pasal 30 dan Pasal 32 dalam praktik, kasus hukum. Jikalau ilegal akses itu adalah sebuah norma hukum, yakni orang tidak bisa masuk sembarangan tanpa izin ke rumah elektronik milik orang lain.

Hal ini sama seperti norma hukum soal larangan memasuki pekarangan tanpa izin, pasal 167 KUHP. Pasal ini melarang setiap orang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan orang lain dengan melawan hukum. Jika ruang siber itu diandaikan sebagai sebuah pekarangan, maka sebuah hak dan izin adalah sebuah hal penting. Masuk tanpa hak dan izin adalah sebuah pelanggaran hukum

Berikut ini akan dibahas dua kasus berkenaan dengan akses ilegal. Sebagai perwujudan dari bagaimana norma larangan akses ilegal. Dalam tulisan ini akan diuraikan satu kasus pembelian pulsa ilegal dan perubahan tampilan pada sebuah website.

Pertama, kasus pembelian pulsa ilegal Telkomsel. Awalnya pada 2007, terdakwa adalah LBK, yang tinggal di Purwakarta dan bekerja sebagai karyawan swasta, yang bergabung dalam sebuah forum *hacking underground* yang bernama ‘Cyberperphreaking.’ Dalam forum itu, mereka memba-

has tentang pengetahuan di bidang teknologi informasi dari para anggotanya. Mulai dari keterampilan mengoperasikan dan mengembangkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, bahasa pemrograman, metode tunnelling, dan teknik-teknik hacking.

Pada bulan Juli 2011, kelompok ini berhasil menjebol server F5 Viprion milik Telkomsel dengan menggunakan aplikasi 'TeamSpeak.' Selain itu, sekawanan ini menanamkan aplikasi permainan online 'dota' dan 'counter strike' di Virtual Server yang ditempatkannya secara legal di server Telkomsel. Hingga mereka juga bisa melakukan illegal recharge atau pengisian ulang secara ilegal Telkomsel, karena mereka memegang akses URP (*Universal Recharge Platform*).

Mereka, yang dituntut secara terpisah ini juga menjual pulsa Telkomsel ini melalui forum online Kaskus. Mereka menjual pulsa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah). Kerugian yang diderita oleh Telkomsel akibat dari kebocoran ini adalah senilai Rp. 11.770.835.000 (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Karena perbuatannya ini, LBK, oleh hakim dipertimbangkan telah melanggar Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat (2) UU ITE. Memenuhi dua unsur penting, yakni dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem elektronik milik orang lain dan unsur mengakibatkan kerugian bagi orang lain. LBK, pada akhirnya dipidana selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).¹⁸²

Kedua, kasus perubahan tampilan sebuah website. Seorang pemuda, berumur 28 Tahun yang tinggal di Surakarta. Emailnya saja sudah unik: *pemulungeletronik@*

¹⁸² Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta. Nomor: 132/ PID/ B/ 2012/ PN. PWK.

gmail.com. Ia melakukan perubahan tampilan di situs Dewan Pers.

Awalnya pada tanggal 7 April 2017, ia membuka situs *www.dewanpers.or.id*, untuk membaca konten anti-hoax yang dimuat di Facebook. Entah kenapa, timbul keinginan untuk mencari celah atau bug dari website tersebut. Operasinya bermula dari kunjungannya dilanjutkan ke menu pengaduan, di alamat *http://dewanpers.or.id/form_pengaduan*.

Setelah ditelusuri, orang tidak hanya bisa mengupload file dalam bentuk pdf, doc, jpeg, gif, png, etc, tetapi juga bisa mengunggah file .phtml, yang merupakan file backdoor di mana file tersebut berfungsi sebagai akses atau pintu lain untuk masuk ke website tersebut. Setelah itu, ia mengundur file index.html dan melakukan perubahan pada user interface situs.

Ia pun mengunggah bait, seperti ini.

‘Ketika garuda kembali terluka karena provokasi makhluk durjana...’ dan terus sebagai macamnya. Karena perbuatannya itu, hakim menjeratnya dengan Pasal 32 UU ITE dan menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Kajian Hukum Keamanan dan Ketahanan Siber

MEMBICARAKAN keamanan dan ketahanan siber tentu adalah aspek yang sangat luas sekali. Mulai dari pengamanan sebuah sistem aplikasi sampai sumber daya manusia hingga penggabungan antara pemutakhiran teknologi dilihat dari aspek keamanannya, semuanya ada disini. Dalam tulisan ini, akan dibahas beberapa persoalan keamanan dan ketahanan siber. Mulai dari format kelembagaan, sertifikasi, perizinan, pengawasan, dan aspek hukum normatif keamanan dan ketahanan siber Indonesia.

Peran Kelembagaan Soal Penguatan Keamanan Siber

Hukum dunia ruang siber, keamanan adalah aspek yang paling vital.¹⁸³ Kemajuan teknologi dan sains, alasan keaman-

¹⁸³ Lawrence Lessig. *Code. Version 2.0*. 2006. Basic Books, New York., p. 53

an ialah faktor yang selalu diperhitungkan.¹⁸⁴ Maka pengaturan keamanan siber adalah sistem yang selalu dikedepankan untuk diperbincangkan. RUU Ketahanan dan Keamanan Siber pada pertengahan 2019 sempat dibahas. Namun dibatalkan karena dianggap belum memenuhi kaidah dan prosedur perumusan legislasi. Satu sisi lain, RUU Ketahanan dan Keamanan Siber ini juga mendapat banyak masukan, utamanya pemangku kepentingan yang perlu melibatkan banyak pihak. Keterlibatan dan pembagian kewenangan di antara beberapa pemangku kepentingan perlu mendapatkan kajian yang komprehensif dan holistik tersendiri.

Dikotomi antara Badan Koordinasi (BSSN) (Perpres No. 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara yang diperbaharui dengan Perpres No. 133 Tahun 2017), satu sisi, dengan, di sisi yang lain adalah pembagian Fungsi Kelembagaan, seperti: Siber pada Tentara Nasional Indonesia (UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia), Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002), Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004), Badan Intelijen Negara (UU 17 Tahun 2011), Kementerian Komunikasi dan Informatika (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2008), selanjutnya, beberapa pihak menginginkan aktor dari asosiasi industri, perguruan tinggi, aktivis, jurnalis, dan seterusnya perlu gotong royong untuk mengerjakan sistem penguatan keamanan siber.

Pertama, kewenangan BSSN dapat dilihat dalam ketentuan yang termuat dalam Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2017 jo Peraturan Presiden No. 133 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa BSSN mempunyai fungsi penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan,

¹⁸⁴ Manuel Castells. *End of Millennium*. 2010. Wiley-Blackwell., p. 29

pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis, siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/ atau serangan siber; pengoordinasian kegiatan fungsional, pembinaan, dan kerjasama nasional regional, dan internasional (Lihat Pasal 3 Perpres No. 53 Tahun 2017). Pada sebuah acara diskusi publik, Kepala BSSN memberikan sambutan yang sangat atas akan dibahasnya RUU Keamanan dan Ketahanan Siber pada Agustus 2019 yang silam. Ia mengatakan bahwa BSSN adalah lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk menjaga keamanan siber, berkepentingan RUU tersebut dilahirkan.

‘...Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber memiliki kepentingan agar RUU tersebut dapat segera disahkan sebagai landasan hukum pengelolaan keamanan pemanfaatan ranah siber Indonesia.’¹⁸⁵

Dilihat dari fungsinya, BSSN mempunyai tugas yang cukup luas di wilayah keamanan siber. Beberapa tugas, fungsi dan kewenangan terlihat memiliki kemiripan dengan lembaga-lembaga yang lain. Dalam fungsi deteksi, proteksi, dan sentra informasi siber, mempunyai dimensi yang menyerupai fungsi intelijen negara. Badan intelijen mempunyai fungsi dasar pengumpulan dan analisis informasi untuk mendukung kegiatan kontra intelijen dan masukan pada

¹⁸⁵ Sambutan Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian pada tanggal 12 Agustus 2019 pada Acara Diskusi Publik dan Simposium Nasional RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Tahun 2019.

pemerintah.¹⁸⁶

Intelijen Negara, seperti Badan Intelijen Negara, Intelijen TNI, Intelijen Kepolisian, Intelijen Kejaksaan, dan Intelijen Kementerian/ Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Penyelenggaraan intelijen, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional. Pada titik inilah, intelijen negara mewaspadaikan adanya ‘ancaman’ yang berupa upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dalam negeri maupun luar negeri, yang membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Apalagi ke depan, ancaman hibrida yang bercampurnya antara ancaman konvensional, asimetrik, teroris dan perang siber semakin dinamis. Penggunaan senjata kimia, biologi, nuklir, dan bahan peledak, lambat laun akan beralih ke serangan siber dan perang informasi.¹⁸⁷ Konflik di ruang siber semakin terbuka di level politik global. Semua negara dan pemerintah mempersiapkan diri dan mempersenjatai dengan kecanggihan teknologi keamanan sibernya masing-masing.¹⁸⁸

Di bidang intelijen, BIN saat ini juga dilengkapi dengan

¹⁸⁶ Aleksius Jemadu, eds. *Praktik-Praktik dan Pengawasan Demokratis Pandangan Praktisi. Kelompok Kerja Intelijen DCAF*. Jakarta, 2007, p. 22-23

¹⁸⁷ Lihat, Muhammad Ridho Budiman. *Optimalisasi Peran Badan Intelijen Negara (BIN) dalam Mengawal Keamanan Negara*. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016., p. 6. Ulasan komplit juga dapat disimak pada Jason Andreass & Steve Winterfeld. *Cyber Warfare. Technique, Tactics and Tools for Security Practitioners*. 2011, Elsevier. Baca juga, Joseph Migga Kizza. *Computer Network Security and Cyber Ethics*. 2014. McFarland & Company, Inc, Publishers.

¹⁸⁸ Athina Karatzogianni. *Cyber Conflict and Global Politics*. 2009. Routledge., p. 4-8

Deputi Intelijen Siber (Deputi VI). Yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan kegiatan operasi intelijen siber, sesuai dengan ketentuan Pasal 25B Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2017 tentang Badan Intelijen Negara.

Pada level kementerian, fungsi deteksi, proteksi, dan sentra informasi siber juga terdapat di Kementerian/ Lembaga, khususnya Kementerian Pertahanan. Pusat Pertahanan Siber Kementerian Pertahanan (Pushansiber) adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kementerian Pertahanan yang bertugas melaksanakan tata kelola, kerja sama, operasi dan jaminan keamanan siber sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1163 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017. Lebih lanjut, lembaga ini juga diberikan kewenangan untuk membentuk CERT (*Computer Emergency Response Team*) yang berfungsi untuk merespons serangan siber, pemantauan dan evaluasi keamanan siber.

Pada 17 Oktober 2014, Menteri Pertahanan juga menerbitkan buku tentang ‘Pedoman Pertahanan Siber,’ yang paling tidak memuat beberapa hal. Seperti: pencegahan serangan, pemantauan pengamanan informasi, analisis serangan, sampai pada level serangan balik. Buku ini disusun sebagai lampiran atas Peraturan menteri Pertahanan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pertahanan Siber.¹⁸⁹

Di lingkungan TNI, juga telah dibentuk Satuan Siber TNI (Satsiber TNI) yang bertugas menyelenggarakan kegiatan dan operasi siber dilingkungan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI (Pasal 46A Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia).

Sementara itu, fungsi intelijen yang berada di Kejaksaan,

¹⁸⁹ Pedoman Pertahanan Siber, 2014. Kementerian Pertahanan.

juga mempunyai kewenangan di bidang operasi dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan, yang disebut sebagai Direktorat A. Pasal 163 Peraturan Jaksa Agung No. 006/A/JA/07/2017, menyebutkan bahwa Direktorat A juga menangani isu gerakan teroris dan radikal, serta kejahatan siber.

Soal kelembagaan penegak hukum, institusi kepolisian memiliki divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan yang lebih khusus adalah Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) yang berada dalam naungan Badan Reserse Kriminal Polri sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 huruf o Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2017. Dittipidsiber ini mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber serta melakukan patroli siber.

Jaksa dan Kepolisian merupakan institusi penegakan hukum soal siber. Pada RUU Ketahanan dan Keamanan Siber, periode yang lalu, BSSN juga bertindak sebagai institusi penegakan hukum, yang melakukan penapisan konten dan aplikasi elektronik, penindakan pelanggaran keamanan dan ketahanan siber, juga melakukan proses upaya perdata maupun pidana (Lihat Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40).

Sementara itu, pihak masyarakat sipil, industri, universitas, media, dan berbagai kalangan juga sangat diperlukan kontribusinya menyusun RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ini. Di samping dari lembaga negara yang berperan dalam tata kelola keamanan siber. Pengetahuan, keterampilan dan kewaspadaan masyarakat juga ramai diperbincangkan. Dalam institusi negara saja, menurut Edmon Makarim, tidak hanya intelijen negara saja yang berkepentingan, melainkan juga Pemerintahan Daerah, seluruh instansi yang mempunyai fungsi pelayanan publik, arsip, sampai perdagangan.¹⁹⁰

¹⁹⁰ Dr. Edmon Makarim. *Kedaulatan Negara dalam Keamanan*

Banyaknya pihak yang berperan dari perumusan regulasi keamanan siber cukup diperlukan. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua DPR pada 12 Agustus 2019 yang lalu. Adalah Bambang Susatyo, MBA, yang menyampaikan arti pentingnya berbagai pihak untuk berkolaborasi.

‘Mengingat luasnya pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pemeliharaan Keamanan dan Ketahanan Siber, maka segala upaya pemeliharaan Keamanan dan Ketahanan Siber, maka segala upaya pemeliharaan Keamanan dan Ketahanan Siber perlu berbasiskan pada kolaborasi yang efektif di antara seluruh komponen siber nasional. Segenap komponen siber nasional, baik yang berada di sektor pemerintahan maupun yang berada di sektor swasta, perlu disinergikan dan diberikan peran yang proporsional agar menjadi satu kesatuan komponen keamanan nasional yang padu dan senantiasa siap siaga.’¹⁹¹

Melihat konteks ini, kerja sama dan kolaborasi berbagai pihak, dalam bahasa Bambang Susatyo, disebutkan sebagai ‘komponen siber nasional,’ baik institusi pemerintah maupun swasta sifatnya *fadhlu ain* dilaksanakannya. Kalau dilihat lebih jauh, komponen siber cukup luas. Dalam sebuah diskusi tentang RUU Keamanan Siber pada tanggal 7 Agustus 2019, Ardi Sutedja Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) menyampaikan urgensi peran pemangku kebijakan yang banyak.

Pemangku kebijakan yang beragam (*multistakeholders*) sangat penting dilibatkan. Mulai dari Pemerintah, Universitas,

dan Ketahanan Siber, disampaikan pada tanggal 12 Agustus 2019 pada Acara Diskusi Publik dan Simposium Nasional RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Tahun 2019.

¹⁹¹ H. Bambang Susatyo, SE, MBA. *Peran Legislatif Dalam Mendukung Keamanan dan Ketahanan Siber*, disampaikan pada tanggal 12 Agustus 2019 pada Acara Diskusi Publik dan Simposium Nasional RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Tahun 2019.

Masyarakat Sipil, Organisasi Internasional, Komunitas Ahli, dan Sektor Swasta. Ardi juga merinci beberapa aktor yang disebutkan tadi. Umpamanya Pemerintah melibatkan beberapa kementerian yang relevan, seperti Komunikasi dan Informatika serta Keuangan, instansi perumus regulasi (DPR), peradilan dan penegak hukum, pertahanan dan layanan keamanan.

Sementara Universitas antara lain adalah perguruan tinggi, peneliti maupun institusi penelitian di kampus, kelompok intelektual (*think tanks*), peneliti independen dan para ahli. Sementara, masyarakat sipil terdiri dari kelompok-kelompok gerakan hak asasi manusia, komunitas perlindungan hak anak, kelompok identitas mulai dari perbedaan agama, etnis, minoritas, perempuan, dst. Organisasi internasional disebutkan Ardi, seperti organisasi kawasan regional, seperti European Union, ASEAN, African Union, dst; pun organisasi internasional seperti ITU, World Bank, dst.

Komunitas ahli, di antaranya adalah komunitas IT pendamping pemerintah seperti CSIRTs/ CERTs, organisasi yang fokus di bidang standardisasi, organisasi yang mengelola nama domain, dst. Sementara sektor swasta yang terlibat, paling tidak, adalah perusahaan teknologi dan jaringan, perusahaan keamanan siber, dan asosiasi bisnis. Lebih lanjut, Ardi juga menjelaskan pendekatan multi pengambil kebijakan, juga perlu dilakukan.

Karakteristik pendekatan ini adalah terbuka dan mudah diakses, berorientasi pada pemufakatan, transparansi dan akuntabel. Dengan adanya peran multi pemangku kebijakan ini, diharapkan regulasi keamanan siber lebih mendorong adanya ‘tanggung-jawab’ bersama.¹⁹²

Selain pemerintah yang akan terkena dampaknya dari regulasi ini. Sektor swasta dan warga-lah yang banyak terke-

¹⁹² Ardi Sutedja K. *Peran ‘Multi-stakeholders’ di dalam mendukung*

na efek dari implementasi regulasi keamanan dan ketahanan siber. Jika akan dilakukannya pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan keamanan siber, maka ketentuan apa saja yang diprasyaratkan kepada mereka, para perusahaan ini perlu diajak dialog.¹⁹³ Tanpa dialog, kita akan kesulitan mengukur bagaimana implementasi regulasi ini, serta kemauan para perusahaan mengikuti persyaratan yang diminta.

Selanjutnya, asosiasi pelaku bisnis juga perlu diajak dialog, untuk menambah data dan informasi kebutuhan keamanan siber di sektor industri. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) adalah himpunan yang cukup solid dan tua, sejak didirikan pada 15 Mei 1996, asosiasi ini merupakan perserikatan yang paling aktif dalam sistem regulasi teknologi digital di Indonesia. Di bidang perdagangan elektronik, ada Indonesian E-Commerce Association (idEA), dan teknologi finansial, ada Asosiasi Fintech Indonesia. Dan, masih banyak lagi asosiasi di bidang bisnis teknologi dan media digital.

Di antara pihak-pihak yang terkena dampak, pemerintah, sektor industri dan warga, di tengah-tengahnya terdapat NGO dan pakar yang berfungsi sebagai penengah. NGO,

Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional. Di sampaikan dalam sebuah acara diskusi publik pada 7 Agustus 2019

¹⁹³ Di level internasional, banyak perusahaan keamanan siber yang mau dan sudah masuk ke Indonesia, cukup potensial diajak berdialog, mulai dari Absolute (ABT.TO), BlackBerry Artificial Intelligence and Predictive Security, Centrif, CloudFlare, CrowdStrike, Hunters.AI, Kount, MobileIron, dan Sumo Logic, perusahaan ini di tulis oleh Louis Counlubus, di dalam majalah Forbes, bisa dilihat melalui: <https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2019/06/16/top-10-cybersecurity-companies-to-watch-in-2019/#7038a80e6022>, dikunjungi pada 1 Januari 2019.

Disamping itu, banyak juga perusahaan keamanan siber yang lain, seperti RisiQ, Switchfast, FRSecure, TechMD, UnderDefense, Praetorian, Houstontech, InfiNet Services, Rapid7, Ridge Global, Fifosys Ltd, dan Palo Alto Networks.

yang cukup aktif mengawal kebijakan digital, salah satunya adalah ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat). Lembaga penelitian lain yang cukup mendalami isu ini adalah CSIS (Centre for Strategic and Internasional Studies).

ELSAM lebih menekankan tentang penghormatan pada hak asasi manusia di wilayah regulasi keamanan siber ini. Dalam resolusi 73/266 (2018) PBB, penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan perlu dijamin, seperti yang tertuang dalam resolusi yang lain: resolusi 73/27 (2018) dan resolusi 20/8 (2012). Sementara resolusi 68/ 167 (2013) dan 69/ 166 (2014) mendorong perlindungan pada data pribadi dan penghormatan privasi.¹⁹⁴ Sementara CSIS, menyoroti urgensi diplomasi siber.¹⁹⁵

Tidak ada ungkapan lain, bahwa regulasi keamanan dan ketahanan siber hanya bisa dibuat, mendekati kesempurnaan, dengan upaya ‘gotong royong.’

Sertifikasi, Perizinan dan Pengawasan Keamanan Siber

Ruang lingkup sertifikasi, perizinan dan pengawasan bisa disimulasikan dalam beberapa tipologi. Pertama, pemerintah menunjuk salah satu instansi pemerintah yang berfungsi dan bertugas memberikan penilaian (*assessment*) kepada seluruh instansi pemerintah. Mulai dari Kementerian dan/ atau Lembaga dari pusat, daerah hingga level desa yang mempunyai sistem elektronik.

Kedua, pemerintah melalui lembaga yang ditunjuk khusus, memberikan sertifikat, izin, dan pengawasan, kepada

¹⁹⁴ Wahyudi Djafar. Dilema Keamanan dan Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Keamanan Siber. Di sampaikan dalam sebuah acara diskusi publik pada 7 Agustus 2019.

¹⁹⁵ Fritriani. Diplomasi Siber. Di sampaikan dalam sebuah acara diskusi publik pada 7 Agustus 2019.

perusahaan-perusahaan keamanan siber yang mengerjakan sistem elektronik pemerintah, BUMN, BUMD, sampai BUMDes. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa penguatan keamanan siber ini, sebelum beroperasi perlu mendapatkan izin, pekerja hingga perangkatnya tersertifikasi, dan diawasi kinerjanya oleh instansi pemerintah yang ditunjuk secara khusus.

Ketiga, instansi pemerintah yang ditunjuk khusus ini, juga memberikan sertifikat, izin, dan pengawasan pada perusahaan-perusahaan keamanan Siber yang tidak hanya mengerjakan proyek pemerintah, melainkan yang juga menggarap sektor swasta di Indonesia. Jika jangkauannya terlalu luas, maka instansi pemerintah ini bisa menunjuk rekanan dari asosiasi profesi dan industri untuk melakukan penilaian (*assessment*).

Keempat, instansi pemerintah yang ditunjuk khusus dalam sebuah regulasi keamanan siber ini, memberikan sertifikasi, perizinan dan pengawasan keamanan siber kepada pemerintah, perusahaan keamanan siber, dan sektor industri. Ruang lingkup ini sangat luas sekali. Instansi pemerintah ini bisa melakukan kerja prioritas, umpamanya fokus pada infrastruktur kritis, sampai bekerja sama dengan asosiasi, perguruan tinggi dan industri.

Masih banyak bentuk simulasi yang lain, yang bisa dikategorikan untuk ruang lingkup sertifikasi, perizinan dan pengawasan. Tinggal bagaimana skema ini didiskusikan dan dikembangkan bersama berbagai instansi pemerintah, industri, para akademisi, dan pakar di bidang keamanan siber. Mengukur kelemahan, kelebihan, tantangan dan peluang skema ruang lingkup sertifikasi, perizinan, dan pengawasan keamanan siber.

Sederhananya, jika pengawasan difokuskan pada keamanan siber instansi pemerintahan, area pengawasan bisa

lebih efektif dan terjangkau. Namun disisi lain, keamanan siber di pihak swasta, akan menjadi rentan kurang diurus dan berpotensi menjadi bulan-bulanan jika terjadi insiden siber. Sebaliknya, jika swasta selain juga pemerintah yang dikerjakan maka jaminan keamanan siber yang menyeluruh lebih terjamin. Tapi, area yang luas -pemerintah dan swasta ini- membutuhkan energi yang cukup besar serta koordinasi yang solid di antara berbagai aktor.

Selanjutnya, ruang lingkup objek keamanan siber sangat luas. Mulai berkaitan dengan dokumen kebijakan keamanan siber, sistem organisasi dan manajemen pengamanan informasi, sumber daya manusia bidang sekuriti siber, infrastruktur, kontrol akses, sampai pada level standar kepatuhan (*compliance system*).¹⁹⁶ Banyaknya objek keamanan siber ini, perlu diperhatikan secara detail, setidaknya untuk mencegah insiden siber dan kejahatan siber, yang lebih berdampak kerusakan dan kerugian yang meluas.¹⁹⁷ Upaya administrasi di bidang keamanan siber perlu mendapatkan perhatian besar, sebisa mungkin supaya sertifikasi, perizinan dan pengawasan sesuai dengan kepentingan pencegahan, deteksi dan mitigasi insiden siber.¹⁹⁸ Selain hal teknis, aspek penguatan administrasi di bidang keamanan siber, taruhlah contoh seperti sertifikasi, perizinan dan pengawasan, bisa melahirkan legitimasi.¹⁹⁹ Dan, legitimasi ini jelas diperlukan untuk memupuk kepercayaan publik terhadap kekuatan keamanan siber suatu negara.

¹⁹⁶ Lizzie Coles-Kemp&Marianthi Theoharidou. *Insider Threat and Information Security Management*, dalam buku editan, Christian W. Probst, et al. *Insider Threats in Cyber Security*. Springer, 2010., p. 58

¹⁹⁷ Ananda Mitra. *Digital Security: Cyber Terror and CYber Security*. Chelsea House Publishers, 2010., p. 92

¹⁹⁸ Robert F. Mills, Gilbert L. Peterson, Michael R. Grimaila. *Insider Threat Prevention Detection and Mitigation*. Dalam buku, Kenneth J. Knapp. *Cyber Security and Global Information Assurance: Threat Analysis and Response Solutions*. 2009, p. 48

¹⁹⁹ Andrea Hoskins and Ben O'Loudghlin. *The internet as a*

Dalam perspektif perbandingan, keamanan siber di berbagai negara juga sudah lama menjadi perhatian penting. Di Singapore, peraturan tentang perlindungan keamanan pada informasi infrastruktur kritis diatur sedemikian rupa, mulai dari desain, konfigurasi sampai keamanan informasinya itu sendiri. Setiap jaringan yang terhubung dengan komponen dan interkoneksi dengan informasi infrastruktur kritis baik yang terhubung dengan koneksi eksternal maupun sistem di dalamnya diawasi secara ketat (Singapore Cyber Security -Critical Information Infrastructure- Regulations 2018).

Di Singapore, perizinan jasa keamanan siber sangat ketat. Bagian 5 dari Cyber Security Act 2018, disebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyediakan jasa keamanan siber tanpa perizinan. Seseorang maupun perusahaan yang terbukti menyediakan jasa keamanan siber akan didenda sebesar \$ 50.000,- atau penjara paling lama 2 (dua) tahun (Pasal 24 Singapore Cyber Security Act 2018). Seseorang maupun perusahaan yang mengajukan perizinan mengisi informasi yang tidak sesuai dengan fakta, juga dapat didenda dengan membayar \$ 10.000 dan penjara selama 12 (dua belas bulan). Lisensi keamanan siber diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, untuk kemudian bisa diperpanjang lagi (Pasal 28 Singapore Cyber Security Act 2018).

Sementara itu, di Australia, jasa penyedia keamanan siber masuk dalam kategori hukum keamanan (*security act*). Seluruh individu maupun korporasi yang menyediakan jasa keamanan, termasuk keamanan siber wajib mengikuti ketentuan Security Providers Regulation 2008. Yang menarik

weapon of war? Radicalisation, publics and legitimacy., p. 31-35. Athina Karatzogianni. Cyber Conflict and Global Politics. Routledge, 2009. Andrea dan Ben juga berbicara tentang keamanan siber untuk maksud mencegah meluaskan aksi terorisme siber, penyebaran ideologi dan teror. Dengan kuatnya keamanan siber, radikalisasi bisa dicegah secara dini.

dari regulasi ini adalah adanya pengaturan tentang kode etik (*code of conduct*) penyedia jasa keamanan. Sehingga selain aspek administrasi, perhatian terhadap norma hukum yang tidak tertulis seperti profesionalisme, kejujuran, integritas, dan sejenisnya masih tetap diperhatikan.

Mengukur Persyaratan

Secara umum, mazhab pengaturan persyaratan perizinan terdiri dari dua kategori badan hukum. Pertama, perizinan berbasis badan hukum murni dalam negeri, dengan batasan kepemilikan saham dari asing sekian persen. Contohnya adalah penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah perseroan terbatas dan/ atau koperasi (Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi). Sedangkan kepemilikan saham penyelenggara oleh warga asing dan/ atau badan hukum asing paling tinggi sebanyak 85 % (delapan puluh lima persen) (Pasal 3).

Kedua, jika dilihat banyaknya perusahaan keamanan siber adalah perusahaan asing, maka skema izin usaha perwakilan perdagangan asing, bisa dimasukkan disini. Perwakilan perdagangan asing, dapat mengikuti skema seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 10 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Perdagangan Asing. Seperti yang tertuang pada Pasal 14, persyaratan permohonan perusahaan perdagangan asing, antara lain: (a) surat permohonan dari kantor pusat atau kantor cabang; (b) mengisi daftar isian permohonan dengan benar diberi materi secukupnya; (c) Asli surat persetujuan sementara penunjukan perwakilan perusahaan perdagangan asing; (d) surat penunjukan (*letter of appointment*); (e) copy izin mempekerjakan tenaga asing (IMPTA) untuk tenaga kerja asing (TKA); (f) surat keterangan domisili dari kelurahan setempat; (g) pas

foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar (berwarna); (h) copy bukti pembayaran uang jaminan untuk tenaga kerja.

Sektor perizinan, yang paling dominan adalah hukum perdagangan, jika itu berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa. Dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mengamanatkan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri (Pasal 24).

Jika dirangkai dalam satu tarik nafas. Beberapa perhatian yang sering diberikan indikator persyaratan, paling tidak terdapat beberapa hal.

1. Administrasi badan hukum;
2. Permodalan;
3. Kecakapan tenaga kerja;
4. Komitmen perlindungan data pribadi;
5. Keamanan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak;

Pada tahun 2016 yang lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, sudah mengawali untuk melakukan sistem pengawasan, penilaian dan pengendalian keamanan siber. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa standar sistem manajemen pengamanan informasi menerapkan SNI ISO/IEC 27001.

ISO 27001 memang cukup digemari dan diakui dalam level keamanan siber internasional. Masalahnya adalah indikator keamanan siber nasional yang berdaulat dan keterjangkauan UMKM yang mempunyai permodalan yang minim. Indikator ISO 27001 dipandang terlalu berkiblat kebarat-baratan. Tapi memang belum ada standar nasional yang memadai untuk dipakai sebagai acuan.

Persyaratan yang dibutuhkan dalam sebuah pengurusan perizinan sangat penting dirumuskan. Sebagai norma

hukum yang mempunyai dimensi kepastian hukum dan perlindungan sosial-ekonomi. Dalam peraturan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pelaku usaha non perorangan, melalui OSS, perlu mengisi, antara lain: jenis penanaman modal, lokasi penanaman modal, penggunaan tenaga kerja, fasilitas perpajakan, kepastian dan/ atau fasilitas lainnya, dst (Pasal 22).

Merekonstruksi Standardisasi

Menentukan standar adalah hal yang paling urgen, sekaligus yang paling sulit dirumuskan. Standar yang ketat, mengakibatkan ruang sosial, bisnis dan administrasi cenderung kaku. Sementara standar yang longgar, akan menyisakan banyak celah yang berpotensi tereksploitasi.

Penetapan standarisasi biasanya mengandung unsur perlindungan dan kemudahan penilaian atas sebuah bentuk produk barang dan jasa. Dengan standar yang terjaga dengan baik, dokumen dan data elektronik dapat terlindungi keutuhan, akurasi, dan validitasnya. Internet terdiri dari jutaan komputer yang saling menukar informasi. Proses digitalisasi ini memungkinkan banyaknya informasi terdistorsi, tereduksi dan rusak. Mulai dari suara, gambar dan teks adalah sekian banyak informasi yang sering bertukar dalam jaringan komputer.²⁰⁰

Standar juga bisa menyebutkan salah satu spesifik penggunaan sistem. Untuk peringatan dan kategorisasi informasi, terdapat dokumen standar yang sering disebut 'Intrusion Detection Message Exchange format (IDMEF). Dari sini, analisis waktu, sumber IP, port(s), username, attack class dan

²⁰⁰ Ananda Mitra. *Digital Security: Cyber Terror and CYber Security*. Chelsea House Publishers, 2010., p. 29-31

lain sebagai macamnya bisa diidentifikasi.²⁰¹ Sementara itu, perumusan standar juga bisa ditujukan untuk memperjuangkan suatu nilai tertentu. Misalnya adalah larangan untuk menampilkan konten tertentu (pornografi),²⁰² penghargaan pada hak atas kekayaan intelektual, dst.²⁰³

Pada urusan teknis, umumnya yang dipakai sebagai standar dalam dunia keamanan siber adalah keluarga ISO 27000. Biasanya ISO 27001 untuk menguji Information Security Management System (ISMS) dan ISO 27002 untuk pengaturan kontrol pada ISMS ini.²⁰⁴ Dari titik inilah sebenarnya dimensi keamanan informasi diaudit dan terlihat gambaran mitigasi risiko jika terjadi serangan.

Standar tenaga kerja di bidang keamanan siber bisa didasarkan beberapa hal. Mulai dari standar pendidikan formal maupun informal. Pada saat ini sertifikasi di level internasional masih menjadi landasan pertimbangan mengukur kualitas dari kapasitas (*skill*) sumber daya manusia di bidang keamanan siber. Dalam tulisan Louis Columbus, di majalah Forbes, bertajuk ‘Top Most Popular Cybersecurity in 2019.’

Mulai dari CISSP (Certified Information Systems Security Professional), CISM (Certified Information Security Manager), EC-Council: CEH (Certified Ethical Hacker), ISACA: CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control), CCSP (Certified Cloud Security Professional), CISA (Certified Information Systems Auditor), CISSP-ISSMP (Information Systems Security Management Professional);

²⁰¹ Anoop Singhal. *Data Warehousing and Data Mining Techniques for Cyber Security*. Springer. 2007., p. 112-113

²⁰² Ananda Mitra. *Digital Security*., p. 82

²⁰³ Ananda Mitra. *Digital Security*., p. 100

²⁰⁴ Christian W. Probst, et al. *Insider Threats in Cyber Security*, Springer. 2010., p. 56-57

ISSAP (Information Systems Security Architecture Professional), CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT), EC-Council: CHFI-(Computer Hacking Forensic Investigator) dan masih banyak lagi.²⁰⁵

Sementara untuk standar yang bersifat nasional, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), juga mengeluarkan peta okupasi keamanan siber, yang sempat viral dan menjadi buah bibir. Pada titik ini, disebutkan standar kebutuhan sumber daya manusia di bidang keamanan siber dimasukkan dalam kerangka kualifikasi nasional. BSSN mengategorikan level 5 sampai 6 yang bergulat di bidang teknis dan analisis, hingga level 7 sampai 9 yang kategorinya ahli.

Prosedur

Hukum perizinan di Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pasal 20 PP No. 24 Tahun 2018, menyebutkan pelaksanaan perizinan meliputi: a) pendaftaran; b) penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen; c) pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional; d) pembayaran biaya; e) fasilitasi; f) masa berlaku; dan g) pengawasan.

Dalam perizinan ini, utamanya di sektor keamanan siber, juga hendaknya diberlakukan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS), yang merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati/ walikota kepada

²⁰⁵<https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2019/08/28/top-10-most-popular-cybersecurity-certifications-in-2019/#7094166f360e>, diakses pada tanggal 8 Februari 2020

pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Secara teknis, aplikasi OSS ini dioperasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kenapa perizinan didorong melalui OSS? Pemerintah hari ini memacu kemudahan berusaha dengan banyaknya reformasi sistem perizinan. Dengan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS) diharapkan memudahkan banyak pelaku usaha mengurus perizinan. Termasuk di bidang keamanan siber, pemanfaatan OSS ini, perizinan berusahanya lebih mudah, cepat, terintegrasi dan transparan. Kalau seandainya, bidang keamanan siber mempunyai perizinan sendiri tanpa masuk dalam sistem OSS, dikhawatirkan akan membebani birokrasi dan membingungkan pelaku usaha.

Setidaknya, memulai perizinan melalui OSS, pelaku usaha tidak harus mengisi formulir perizinan yang berulang kali di berbagai instansi pemerintahan. Cukup dengan melakukan registrasi pembuatan akun OSS dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP untuk WNI atau Paspor untuk WNA, kemudian melakukan pendaftaran legalitas badan hukum, sampai proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Landasan Yuridis

Setiap regulasi, dalam studi ilmu hukum, selalu didasarkan oleh alas yuridis yang kuat. Begitu halnya juga dengan isu keamanan siber. Pembicaraan tentang uraian dasar yuridisnya juga perlu diperdalam. Untuk itulah, dalam bab ini, disebutkan deskripsi tentang gambaran konstitusional dan yuridis yang berkaitan dengan keamanan siber. Akan dibahas, bagaimana urgensi keamanan siber dalam pendekatan konstitusi, hukum internasional dan sistem hukum nasional.

Konstitusi Dasar

Dimulai dari Pasal-Pasal yang tertuang dalam Konstitusi Dasar. Membahas sebuah regulasi bisa menunjuk pasal yang menyebutkan kewenangan Presiden dan Parlemen dalam menyusun sebuah undang-undang, yakni Pasal 4 ayat 1 (Presiden) dan Pasal 21 serta Pasal 21 (DPR RI). Jika Undang-Undang Keamanan Siber dikerjakan, maka pasal-pasal tersebut dapat menjadi landasan yuridis kewenangan pembahasan antara Presiden dan DPR RI. Ketentuan berikutnya yang relevan dengan rancangan regulasi keamanan siber adalah bagian tentang klausul hak asasi manusia.

Keamanan siber juga berkaitan dengan keamanan individual atau warga (*demos*). Pengarus-utamaan pendekatan hak asasi manusia adalah suatu keniscayaan pada sistem regulasi.²⁰⁶ Dalam konstitusi dasar Indonesia, terdapat hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya (baca: Pasal 28C). Jika kemajuan sains dan teknologi punya celah keamanan, maka bukan kemanfaatan melainkan kerugian yang di dapat oleh warga. Dengan kata lain, keamanan siber adalah sebuah keharusan.

Sementara itu, konstitusi dasar juga terdapat hak untuk berkomunikasi dan akses informasi disediakan melalui Pasal 28F. Dalam konteks ini, warga tidak hanya dihormati dan

²⁰⁶ Lihat, Addink, G.H, Gordon Anthony, Antoine Buyse and Cees Flinterman (eds.). 2010. *Sourcebook Human Rights and Good Governance*, SIM Special No. 34, Utrecht; lihat juga, Brysk, Alison & Shafir, Gershon. 2004. *People out of Place: Globalization, Human Rights and the Citizenship Gap*, Oxford & New York, Routledge; lihat juga, Allen Buchanan. 2010. *Human Rights, Legitimacy, & the Use of Force*, Oxford, Oxford University Press; Allen Buchanan. 2013. *The Heart of Human Rights*, Oxford, Oxford University Press; lihat juga, de Sousa Santos, Boaventura. 2009. "If God Were a Human Rights Activist: Human Rights and the Challenge of Political Theologies," Law, Social Justice & Global Development, accessed on 14 March 2018.

harus dipenuhinya hak untuk berkomunikasi dan akses informasi untuk mengembangkan diri maupun komunitasnya, tetapi juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui berbagai jalur. Negara perlu memastikan, bahwa jalur yang tersedia, itu aman. Keamanan informasi yang diperoleh dan disebarkan oleh warga terjamin sekuritinya oleh negara.

Pada titik inilah, amandemen UUD 1945 tentang masalah HAM dulu, mendorong filosofi bahwa manusia dianugerahi hak asasi dan kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan, termasuk, penghormatan terhadap hak mengembangkan diri, hak berkomunikasi dan hak keamanan.²⁰⁷ Sementara itu, selain pasal 28F, pasal lain pun tersedia mendukung penguatan isu perlindungan dan keamanan siber. Pasal 28G ayat 1, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

Sementara untuk keharmonisan dan keseimbangan antara penghormatan pada HAM dan ketertiban serta kewajiban warga, rujukan pada Pasal 28J dapat menjadi kanal pembatasan. Bahwa penghormatan pada HAM, hendaknya selalu harmonis dengan penghargaan HAM orang lain dan tidak berlawanan dengan tertib masyarakat, bangsa dan negara. Serta kesesuaian dengan norma moral, agama, keamanan dan ketertiban umum.

Dengan kata lain, keamanan siber, dilihat dari dua sisi perspektif. Pertama, ia sebagai sebuah hak. Sebab ia melindungi diri pribadi, keluarga, harta benda serta hak

²⁰⁷ Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002: Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010, p. 58

berkomunikasi dan akses informasi. Kedua, ia juga berupa pembatasan. Penghormatan terhadap HAM yang dibatasi oleh pertimbangan keamanan.

Paska amandemen, Konstitusi Dasar cukup progresif memberikan ruang pada rezim HAM. Sebelumnya, Konstitusi Dasar lebih mengedepankan semangat paternalistik dan integralistik.²⁰⁸ Dari sinilah, aspek keamanan di awal lebih bercorak negara sentris. Meskipun dalam perkembangannya, metamorfosis konstitusi seperti UUD RIS, UUDS 1950 dan rumusan Dewan Konstituante mulai memperkenalkan perlindungan pada urgensi pembentukan bagian soal HAM di dalam konstitusi.²⁰⁹

Selain ketentuan berkaitan dengan aspek kewenangan kelembagaan dan hak asasi manusia, konstitusi dasar juga menyediakan BAB tersendiri tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Dalam konstitusi, disebutkan bahwa setiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (baca: Pasal 30 ayat 1). Dalam konteks ini, di bidang keamanan siber, multi peran kelembagaan disertai dengan peran aktif warga, adalah kunci utama dalam penguatan sistem dan budaya keamanan siber. Singkatnya, pertahanan dan keamanan negara, tidak bisa serta merta tanggung jawabnya dilimpahkan kepada negara saja, begitu mudah. Banyaknya penipuan online dan tindak pidana peretasan, juga dikarenakan kurangnya literasi digital soal keamanan siber. Orang begitu mudahnya menyampaikan PIN, kode OTP, atau password dan username yang rentan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya.

²⁰⁸ A.B. Kusuma & R.E. Elson, *A Note on the sources for the 1945 constitutional debates in Indonesia*. Brijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. Vol. 167, No. 2-3, 2011, pp. 196-209.

²⁰⁹ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Penerbit Djambatan, 1951, p. 111.

Meskipun demikian, dalam aspek pertahanan dan keamanan siber, konstitusi dasar menunjuk dua institusi negara, yakni Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian sebagai kekuatan utama, sementara rakyat sebagai kekuatan pendukung (baca: Pasal 30 ayat 2). Dengan kata lain, bahwa pertahanan dan keamanan siber, peran dua instansi negara ini juga sangat penting. Di instansi Kepolisian sudah terdapat peran Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Sementara di TNI, sudah terbentuk juga Satuan Siber Tentara Nasional Indonesia (Satsiber TNI). Sementara di dalam tubuh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), gabungan antara Kepolisian dan TNI, serta Lembaga Sandi Negara membentuk sistem pertahanan dan keamanan siber. Dengan komponen institusi negara yang kokoh, didukung oleh kekuatan rakyat, maka Indonesia siap menyongsong era kejayaan digital Indonesia.

Bab konstitusi tentang pertahanan dan keamanan ini penting. Sebagaimana doktrin pertahanan keamanan negara (HAMAMNEG), yang berbunyi Catur Darma Eka Karna. Yang disebut-sebut sebagai ajaran Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang mengatakan bahwa TNI (dan Polri) itu berasal dari rakyat, tidak boleh berdiri di atas rakyat dan berhadapan dengan rakyat. Sehingga meningkatkan profesionalisme TNI sebagai institusi pertahanan negara, yang pada saat sama, meningkatkan kapasitas kinerja Polri sebagai pemelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban adalah sebuah keniscayaan terus menerus dilakukan.²¹⁰ Dalam kaitannya dengan keamanan siber, tinggal bagaimana peningkatan kemampuan TNI, Polri dan masyarakat terus diupayakan dari waktu ke waktu.

²¹⁰ Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002: Kekuasaan Pemerintahan Negara

Melihat uraian di atas, sudah seharusnya aras yuridis dalam konstitusi dasar telah memberikan inspirasi dan legitimasi yuridis, tentang sokongan penyusunan keamanan siber. Ketentuan soal kewenangan kelembagaan Presiden dan DPR sebagai penyusun Undang-Undang, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan asas pertahanan keamanan dalam konstitusi telah mencukupi untuk digunakan sebagai konsideran yuridis penyusunan regulasi keamanan siber.

Hukum Internasional

Isu keamanan siber dibicarakan cukup intens di dunia internasional. Dokumen Konvensi Kejahatan Siber (Convention on Cybercrime) yang dirilis oleh Dewan Eropa (Council of Europe) pada 23 November 2001 di Budapest adalah satu dokumen kunci. Sampai pada tanggal 29 Juni 2019, konvensi ini telah diratifikasi oleh 63 (enam puluh tiga) negara. Mulai dari negara yang keamanan sibernya mapan seperti Israel, Amerika, Belanda, Belgia, Prancis, Denmark, Jerman, sampai Azerbaijan, Cabo Verde, Ghana, Nigeria, Senegal, Tonga, dst.²¹¹

Selain dokumen konvensi kejahatan siber, dunia hukum internasional mengenal akrab buku ‘Tallinn Manual.2.0’ sebagai buku yang paling berpengaruh. Menggambarkan norma-norma perang siber dan panduan berbagai negara saat melakukan operasi siber dalam perspektif hukum. Dalam dokumen ini, dituliskan diskursus tentang kedaulatan, pertanggung-jawaban negara, hak asasi manusia, hukum udara, laut dan angkasa. Dipimpin oleh Prof Michael N. Schmitt, kepala Stockton Center for the Study of International Law

(jilid 2). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010., p. 1433

²¹¹ Chart of signature and ratification of treaty 185 Council of Europe.

pada University of Exeter dan senior staf pada the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence.

Hukum Nasional

Membicarakan sistem hukum nasional untuk sektor keamanan siber, tentu referensi cukuplah banyak. Utamanya regulasi dalam bentuk undang-undang yang sudah banyak ditelorkan oleh negara. Mulai dari Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hingga berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan sektor keamanan dan pelayanan publik. Memang hukum keamanan siber ini berkaitan dengan hampir semua aspek kehidupan.²¹² Di Indonesia, beberapa rujukan regulasi nasional dalam bentuk undang-undang dapat didaftar sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

²¹² Danrivanto Budhijanto. *Teori Hukum dan Revolusi Industri 4.0*. LoGoZ Publishing., p. 109-115

9. Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
10. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
14. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Kendatipun beberapa regulasi disebutkan di atas, seharusnya semua regulasi bisa saja disebutkan sebagai bagian yang selalu berhubungan dengan keamanan siber. Pendidikan, kesehatan, energi, properti, dan segala macam sektor, selalu mempunyai dimensi keamanan sibernya. Posisi pemerintah dan regulasi di bidang keamanan siber, oleh sebagian kalangan memandangnya cukup vital.²¹³

Undang-Undang yang berkaitan dengan ruang siber pertama paskareformasi adalah UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Beberapa pasal menyebutkan soal keamanan. Seperti Pasal 2, yang memandatkan bahwa telekomunikasi hendaknya diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil, merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri. Berikutnya adalah Pasal

²¹³ Meskipun peran pemerintah cukup penting, namun Lawrence Lessig juga melukiskan gambaran orang-orang libertarian yang memandang peran pemerintah tak berarti sama sekali. Pasar di dunia ruang siber ini dijalankan secara alamiah oleh aktor-aktor yang bermain. Lawrence Lessig. *Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy*. 2008. Bloomsbury Academic., p. 281.

7 ayat 2 yang membicarakan soal hal-hal yang diperhatikan saat menyelenggarakan telekomunikasi adalah ‘melindungi kepentingan dan keamanan negara.’ Kemudian Pasal 9, juga menyebutkan penyelenggara telekomunikasi khusus, bisa digunakan untuk keperluan pertahanan keamanan negara. Serta masih banyak pasal-pasal yang berkenaan dengan aspek keamanan di bidang telekomunikasi yang menyuplai landasan yuridis undang-undang keamanan dan ketahanan siber.

Membicarakan E-Commerce

BANYAK yang merujuk, bahwa sejarah e-commerce di Indonesia awalnya adalah kaskus. Sebuah portal yang didirikan pada tahun 1999 oleh mahasiswa Indonesia. Ya, Andrew Darwis, Ronald Stephanus dan Budi Dharmawan di Seattle, Amerika Serikat membuat kaskus, untuk forum diskusi mahasiswa Indonesia di luar negeri.

Kaskus, singkatan dari ‘kasak-kusuk.’ Adalah forum terbesar internet di Indonesia, yang dulu terkenal dengan adanya BB17 dan Fight Club. BB 17 yang artinya buka-bukaan 17 Tahun adalah sebuah fitur khusus dewasa tempat orang bertukar gambar dan foto dewasa. Sementara Fight Club berisikan perdebatan yang cenderung sarkas dan kasar. Bahkan tak jarang berbau SARA.

Namun dari portal inilah, jual beli mulai dari alat-alat musik, perkakas dapur, alat elektronik, handphone, kamera dan aksesorisnya, dan segala macamnya dimulai di sini. Setelah Kaskus, barulah muncul, Bhinneka.com,

Tokobagus.com, Berniaga (yang akhirnya Tokobagus dan Berniaga melebur menjadi OLX).

Setelahnya, pada 6 Februari 2009, William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison mendirikan Tokopedia. Pada awalnya perusahaan ini mendapatkan pendanaan dari PT. Indonusa Dwitama. Hingga akhirnya, ia mendapatkan suntikan pendanaan dari East Ventures (2010), Cyber Agent Ventures (2011), Netprice (2012), dan SoftBank Ventures Korea (2013), dan masih banyak lagi.

Orang kian dimudahkan, dimanjakan dan bahkan menjadi kecanduan berbelanja online. Terlebih saat era ‘bakar uang’, para e-commerce ini memberikan diskon besar-besaran. Saat ini, menjamur pengguna e-commerce di Indonesia. Mulai dari Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, Orami, Bhinneka, dan masih banyak lagi.

Dari perkembangan yang super cepat dan menggairahkan di sektor e-commerce, perangkat hukumnya pun perlu ditengok. Apakah sistem hukum yang sudah ada dirasa cukup? Bagaimana dengan penegakan hukumnya? Bagaimana perlindungan data konsumennya? Dan seterusnya dan seterusnya.

Hukum yang Kebingungan

Dunia bisnis cenderung tidak menyukai regulasi. Semakin banyak regulasi, semakin buruk bagi dunia bisnis. Bisnis jadi tidak berkembang dan terlalu banyak larangan, sehingga inovasi pun buntu. Toh, semuanya terserah kepada konsumen. Merekalah penentu, apakah barang dan jasa itu dipakai atau tidaknya.

Sehingga sekian tahun e-commerce tumbuh dengan pesat, juga dampak dari absennya regulasi yang mengatur e-commerce. Dan, sebenarnya masyarakat pun menerima trend e-commerce ini. Perusahaan e-commerce pun mulai

mempercanggih teknologinya, memudahkan fitur-fiturnya, dan memberikan pelayanan paling efektif dan efisien.

Keinginan memberi payung hukum pada e-commerce, mungkin bermula pada tahun 2014. Saat Indonesia mengeluarkan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam bab 8, peraturan perundang-undangan ini, menyebutkan perdagangan melalui sistem elektronik. Dua pasal mengatur tentang perdagangan melalui sistem elektronik, yakni Pasal 65 dan Pasal 66. Pada intinya, e-commerce harus menyediakan informasi lengkap dan benar. Mulai dari identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi, persyaratan teknis Barang yang ditawarkan, kualifikasi jasa, harga dan cara pembayaran dan cara penyerahan barang.

Dan, jika terdapat sengketa, dapat diselesaikan melalui pengadilan maupun mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Saat terjadi pelanggaran, maka, pelaku usaha bisa dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan izin. Hingga akhirnya, Pasal 66, ketentuan lebih lanjut, diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bertahun-tahun Rancangan Peraturan Pemerintah pelaksanaan Pasal ini digodok. Namun baru disahkan dan diterbitkan enam tahun kemudian, dengan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Sebelum PP ini, pemerintah menuai janjinya memberikan dukungan pada perkembangan e-commerce. Dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map E-Commerce*) Tahun 2017-2019.

Saat menyusun Perpres ini, Pemerintah meyakini, bahwa ekonomi berbasis elektronik mempunyai potensi yang tinggi dan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Seperti yang tertuang dalam konsideran

dari perpres ini. Selanjutnya perpres ini disebut sebagai Peta Jalan SPNBE 2017-2019, yang meliputi perencanaan soal: pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan sumber daya manusia, infrastruktur komunikasi, logistik, keamanan siber (*cyber security*), dan Pembentukan Manajemen Pelaksana Peta Jalan SPNBE 2017-2019.

Tak tanggung-tanggung, Komite Pengarahnya pun dibentuk. Mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai Ketua. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan bertindak sebagai Wakil Ketua. Anggota-anggotanya, antara lain, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan masih banyak lagi.²¹⁴

Setelah dibentuknya Perpres ini, dunia usaha ekonomi digital seperti merayakan dan bersemangat. Pemerintah nampaknya tidak begitu memikirkan soal kontribusi langsung, seperti pajak atau retribusi dari bisnis ini. Justru malah memberikan subsidi dan karpet merah pada bidang ini.

²¹⁴ Dalam peta jalan ini, dirumuskan program, kegiatan luaran, target waktu penyelesaian, serta penanggung jawab. Umpamanya, pendanaan dan skema pembiayaan-pinjaman menjadi salah satu program. Kegiatannya adalah meningkatkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan penilaian risiko kredit yang disesuaikan dengan model bisnis perdagangan berbasis elektronik (e-commerce). Keluaran yang diharapkan adalah tata cara dan pedoman penyaluran KUR yang melingkupi penilaian kredit dokumen persyaratan, penilaian kelayakan usaha yang dijamin oleh perusahaan penjaminan dan ketentuan pinjaman yang disesuaikan dengan model bisnis perdagangan berbasis elektronik (e-commerce) yang ditargetkan selesai pada Oktober 2017. Penanggung jawab yang ditunjuk adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Lihat Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) Tahun 2017-2019.

Ribuan UMKM bergantung pada e-commerce, sementara bisnis ini relatif 'baru' dengan lonjakan valuasi yang mencenggangkan. Banyak orang menaruh optimisme pada bisnis ini. Kapan lagi Indonesia mempunyai sistem elektronik, milik anak bangsa sendiri. Inilah, barangkali saatnya.

Sejak diterbitkan Perpres ini dan UU Perdagangan, peraturan pelaksanaan teknis e-commerce nyaris tak ada. Peraturan Pemerintah yang digadang-gadang, tak kunjung terbit. Hukum kebingungan melihat pesta pora e-commerce di atas pasar warga negara Indonesia.

Dan, akhirnya PP No 80 Tahun 2019 pun terbit dari ufuk mencerahkan. Lingkup pengaturannya, cukup luas. Mulai dari pihak e-commerce, persyaratan, penyelenggaraan e-commerce, kewajiban pelaku usaha, bukti transaksi, iklan elektronik, penawaran, penerimaan dan konfirmasi elektronik, kontrak elektronik, perlindungan data pribadi; pembayaran, pengiriman barang dan jasa, penukaran, penyelesaian sengketa, pembinaan dan pengawasan, dst.

Aura PP 80 ini relatif positif. Selain kewajiban memiliki dan mencantumkan identitas subjek hukum yang jelas (Pasal 9), PP 80 ini juga mewajibkan e-commerce untuk mendapatkan *security clearance* dari instansi yang berwenang (Pasal 10). Selain itu, PP ini juga menentukan kewajiban perlindungan data pribadi untuk e-commerce (Pasal 58-59).

PP ini juga mengatur tentang kontrak elektronik, yang dilarang mencantumkan klausul baku yang merugikan konsumennya. Seperti kata-kata, barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan lagi atau risiko kehilangan ditanggung oleh konsumen, semua ketentuan itu dilarang. PP ini juga merujuk pada UU Perlindungan Konsumen.

Yang cukup penting, adalah kewajiban bagi pelaku usaha untuk menyediakan kontrak elektronik yang dapat diunduh atau disimpan oleh konsumen. Selama ini kontrak

hanyalah kesepakatan yang hilang begitu saja saat disetujui. Namun kali ini, kontrak tersebut seharusnya bisa diunduh oleh penggunaanya.²¹⁵ PP ini relatif cukup komplis mengatur banyak hal.

PP ini juga mengutamakan promosi dan pembelian produk dalam negeri.²¹⁶ Pihak industri pun membutuhkan waktu yang memadai untuk melaksanakan PP ini secara menyeluruh. Seperti yang diungkapkan oleh Presiden Bukalapak Fajrin Rasyid di Kompas pada saat penerbitan PP ini.²¹⁷ Sementara di sektor UMKM, Menteri Teten Masduki berkata PP ini tetap memberikan kemudahan izin usaha bagi industri kecil dan menengah.²¹⁸ Dan, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menjamin, semua pelaku usaha yang mendaftarkan izin usahanya tidak dikenakan pungutan sepeser pun.²¹⁹

Kendatipun demikian, tak semua pihak memandang PP ini adalah produk yang sempurna. Dalam sebuah acara bertajuk ‘Annual International Tax Seminar,’ di Financial

²¹⁵ Sayangnya, ketentuan Pasal 56 ini tertulis berlaku bagi pelaku usaha. Tidak disebutkan apakah itu juga kewajiban bagi Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan Penyelenggara Sarana Perantara (intermediary services) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 11 maupun ayat 12 PP No. 80 Tahun 2019.

²¹⁶<https://money.kompas.com/read/2019/12/04/142234326/jokowi-terbitkan-pp-e-commerce-berikut-rinciannya?page=all>, diakses pada tanggal 14 September 2020

²¹⁷<https://money.kompas.com/read/2019/12/11/105200426/bukalapak--butuh-waktu-2-tahun-implementasikan-peraturan-e-commerce>, diakses pada tanggal 14 September 2020

²¹⁸<https://money.kompas.com/read/2019/12/27/120900726/ada-pp-e-commerce-teten-sebut-umkm-akan-dapat-kemudahan-izin-usaha>, diakses pada tanggal 14 September 2020

²¹⁹<https://money.kompas.com/read/2019/12/09/132417026/mendag-pengajuan-izin-pedagang-e-commerce-tidak-dipungut-biaya-sepeserpun>, diakses pada tanggal 14 September 2020

Hall Graha CIMB Niaga, pada 11 Desember 2019, Joyada dari Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI), menganggap PP ini berlaku tidak adil terhadap pelaku usaha dalam negeri. Sementara pelaku usaha luar negeri, banyak yang belum dikenai pajak.²²⁰

Hukum Mengejar?

Sejak tahun 2017, aduan konsumen ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sudah menduduki peringkat pertama. Rata-rata aduan tersebut berasal dari beberapa sebab. Mulai dari konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat atau menyentuh barang yang dipesan, ketidak-kejelasan informasi barang dan jasa, ketidak-jelasan status subjek hukum, tidak ada jaminan keamanan transaksi dan privasi, pembebanan risiko yang tidak berimbang, transaksi yang lintas daerah/ negara bermasalah soal yurisdiksi, dan masih banyak yang lain.²²¹

Dalam perspektif hukum, terdapat beberapa skema perlindungan hukum dalam bisnis e-commerce. Baik itu perlindungan hukum untuk penyelenggara e-commerce, pedagang, maupun konsumen. Setidaknya, dua jalur mekanisme yang tersedia, yakni: perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Dalam sebuah perjanjian, biasanya diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Baik penyelenggara e-commerce, pedagang online maupun konsumen. Biasanya perjanjian termuat dalam syarat dan ketentuan sebuah platform. Di situlah menjadi aturan main yang melindungi

²²⁰<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5df7411a41e44/ketika-significant-economic-presence-tidak-sesuai-dengan-pp-80-2019?page=2>, diakses pada tanggal 14 September 2020

²²¹ Sulasi Rongiyati. *Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang melalui Sistem Elektronik*. Negara Hukum Vol. 10, No. 1, Juni 2019.

masing-masing pihak. Di dalam syarat dan ketentuan itu juga terdapat perlindungan data pribadi.

Di luar perjanjian, peraturan perundang-undang bisa menjadi payung hukum di dunia e-commerce. Umpamanya soal perlindungan hak eksklusif pada rejim hak kekayaan intelektual (HAKI). Dan, juga perlindungan konsumen sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²²²

Memang hingga saat ini, ada beberapa isu dalam pelaksanaan perdagangan elektronik. Mulai dari standar kualitas barang dan jasa; sistem pembayaran yang efektif; soal lemahnya penghormatan pada HAKI; keamanan siber; dan perpajakan.²²³ Meskipun persoalan hukum kian lama, tentu semakin banyak.

Persoalan lain, masalah penyelesaian sengketa. Kasus di e-commerce biasanya nilainya kecil, meskipun volumenya yang banyak. Sehingga dengan nilai yang kecil ini, sulit bagi konsumen untuk mengajukan upaya hukum yang terbilang cukup mahal. Mengajukan gugatan dan/ atau membuat laporan polisi jika berkaitan dengan kasus pidana. Belum lagi berkaitan dengan mekanisme ganti rugi yang belum diatur, tanggung-jawab korporasi terhadap barang dan juga lagi-lagi perjanjian yang kurang begitu valid.²²⁴

Aspek hukum e-commerce memang cukup banyak. Perjanjian satu sisi. Apakah perjanjian tersebut perlu

²²² Lathifah Hanim. *Dugaan Hukum Bagi Para Pihak dalam E-commerce sebagai Akibat dari Globalisasi Ekonomi*. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 1 No. 2 Mei – Agustus 2014

²²³ Losina Purnastuti. *Perdagangan Elektronik: Suatu Bentuk Pasar Baru yang Menjanjikan?* Jurnal Ekonomi&Pendidikan, Volume 1, Nomor 1, Februari 2014.

²²⁴ Margartha Rosa Anjani & Budi Santoso. *Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Indonesia*. Jurnal Law Reform, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018.

mendapatkan tanda-tangan elektronik? Ini adalah perdebatan tersendiri soal keabsahan sebuah perjanjian di atas platform.

Selain hukum perjanjian. Dan, tentu saja UU ITE, ada beberapa rejim hukum lain yang mengatur soal e-commerce. Misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Sehat; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Bidang Penanaman Modal;²²⁵

UMKM dan E-Commerce

Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memproduksi barang dan jasa memang perlu diperhatikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Apalagi setelah muncul banyaknya istilah revolusi 4.0 dan masyarakat 5.0 yang banyak mempengaruhi revolusi paradigma politik ekonomi hari ini. Regulasi dan sistem kebijakan soal UMKM perlu diperhatikan supaya sejalan dengan arus perubahan dan bisa meningkatkan kualitas daya saingnya.

Sementara itu, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sudah mengamatkan bahwa pemberdayaan UMKM perlu diseleng-

²²⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 26 PBI Tahun 2016 tentang Kegiatan Usaha Pengiriman Uang; Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 2/ PBI/ 2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu; Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 23/PBI/ 2012 tentang Transfer Dana, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/ PBI/ 2014/ tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 12/ PBI/ 2009 tentang Uang Elektronik; dan Peraturan OJK Nomor 1/ POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Lihat, pada Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 7 No. 2 Agustus 2019.

garakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya. Sebelum adanya UU ini, juga upaya pemberdayaan UMKM sudah dinisbahkan dari TAP MPR No. XVI/ MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dari aspek aset, memang terdapat perbedaan yuridis mengategorikan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Dalam Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008, disebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 500.000.000,-. Sementara usaha menengah jumlah kekayaan di antara Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunannya.

Selanjutnya, usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 10.000.000.000,- atau punya hasil penjualan tahunan di antara 2,5 milyar sampai 50 milyar. Dalam tiga usaha ini, pemerintah maupun pemerintah daerah, sesuai dengan Pasal 7 UU yang sama, menumbuhkan iklim usaha mencakup aspek: pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. Pada saat yang sama, pemerintah juga perlu memfasilitasi pengembangan usaha dari mulai produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan desain teknologi.

Banyak yang mengira bahwa sulitnya UMKM tumbuh kembang, lantaran aspek pembiayaan yang cukup sulit dijangkau oleh mereka. Sementara UU No. 20 Tahun 2008 ini, sebenarnya menyediakan angin segar bagi UMKM

ini. Dalam Pasal 21 UU ini, disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi UMKM.

Tak hanya Pemerintah dan Pemerintah Daerah saja yang disebutkan, melainkan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga dalam menyediakan pembiayaan dan penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan untuk UMKM. Ditambah dengan peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah yang disediakan peluang pemberian hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat UMKM ini.

Jelas kita bersepakat bahwa tidak hanya persoalan pembiayaan saja. Perihal standardisasi juga menyumbang problem tersendiri. Standardisasi disebutkan dalam nomenklatur UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai proses esensial yang merumuskan, menetapkan, menerapkan dan memelihara, memberlakukan dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.

Meskipun Pasal 3 huruf f UU ini pengaturan perdagangan bertujuan meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta Pemerintah dan swasta. Namun pada Pasal 3 huruf k, pengaturan ini juga bertujuan peningkatan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI). Bahkan pemberlakuan SNI sudah wajib untuk perdagangan sektor barang (Pasal 57) dan jasa (Pasal 60).

Kendatipun demikian, pemberdayaan UMKM yang juga pada saat bersamaan koperasi, disebutkan dalam Pasal 73 UU perdagangan ini. Bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan koperasi

dan UMKM dengan dapat memberikan fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses, bantuan modal, promosi dan pemasaran. Selanjutnya, UU ini juga mengamanatkan supaya disusun Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan koperasi dan UMKM ini (Pasal 73 ayat 4). Bahkan UMKM juga dilibatkan dalam promosi dagang, memperkenalkan barang dan jasa dalam pameran dagang internasional, pertemuan bisnis internasional untuk memperluas peluang peningkatan ekspor.

Satu sisi lain, UMKM juga bisa memanfaatkan perkembangan teknologi yang sekarang sedang marak diperbincangkan. Umpamanya berkaitan dengan perdagangan elektronik, kripto aset, teknologi finansial, dan lain sebagai macamnya. Perdagangan elektronik sudah disebut dalam Pasal 66 UU Perdagangan untuk segera bisa diberi payung hukum dalam bentuk peraturan pemerintah. Namun pada saat yang bersamaan, para start-up sudah menjelma menjadi unicorn, seperti Gojek, Traveloka, Tokopedia dan Bukalapak, bisa dimanfaatkan untuk menaikkan pamor UMKM ini.

Belum juga Peraturan Pemerintahnya terbit soal perdagangan elektronik, Peraturan Menteri Keuangan PMK turun terlebih dahulu untuk soal pajak, PMK Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-commerce*).²²⁶ Dari keluarnya PMK ini, lalu Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdeA) mengeluarkan siaran pers keberatan. Argumentasi yang digunakan dalam keberatan ini adalah keberadaan UMKM yang perlu ditopang. IdeA menyatakan dalam risetnya terhadap 1765 pelaku usaha di 18 kota, 80 persen masih level mikro yang perlu ditolong. Alih-alih Pemerintah memberikan insentif, malah perpajakan terlebih dahulu

²²⁶ Peraturan ini akhirnya dibatalkan, yang bertahan cukup beberapa bulan sejak diterbitkannya.

ditekankan pada sektor UMKM ini yang banyak terlibat dalam bagian perdagangan elektronik ini. Di bidang penerimaan bukan pajak juga demikian. Alih-alih pemerintah menyebutkan UMKM dalam, misalnya, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM, namun tidak disebutkan satu pasal pun yang memberikan sinyal soal insentif terhadap UMKM ini.

Ke depan, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia UMKM melalui sertifikasi. Kemudian meningkatkan teknologi dan manajemen bisnis UMKM sehingga bisa naik kelas, melalui salah satunya kerja sama dengan e-commerce, tentu akan sangat dinanti.

Memang kita masih menuai persoalan hukum yang cukup pelik, soal posisi UMKM ini di ruang lingkup e-commerce. Mulai dari soal standar dan kualitas produk, misalnya di produk makanan dan kosmetik. Problem berkenaan dengan perlindungan HAKI. Penjiplakan besar-besaran terjadi, bahkan hukum rimba dan persaingan harga yang mengerikan diantara para pedagang. Soal perizinan, seperti pendirian badan hukum untuk usaha juga masih jauh dikatakan sempurna.

Sepakat Tanpa Membaca

Fenomena sepakat tanpa membaca ini berlangsung besar-besaran di era-e-commerce. Pengguna hampir jarang membaca syarat dan ketentuan. Tapi langsung saja tekan tombol, setuju! Begitu tulis disertasi seorang doktor hukum ahli kontrak Do Giang Nam. Dalam disertasinya berjudul ‘Control of Standard Terms in Consumer Contracts in Vietnamese Law: Lessons Learnt from European Experiences,’ ia mengatakan sering terjadinya ‘kesepakatan yang tidak bermakna.’

Eropa sudah memberikan pelajaran tentang beberapa konsep transparansi sejak GDPR diterapkan. Namun standar kontrak GDPR juga tidak serta merta menjamin hak ekonomi, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa yang efektif dari sebuah rumusan kontrak.

Kita sedang dihadapkan dengan kebingungan besar. Kontrak klasik terjadi di antara dua atau beberapa pihak. Kontrak modern, yang berupa ‘term&condition’ digunakan kerangkanya oleh jutaan orang bahkan milyaran. Tak mungkin membuat kontrak khusus berdasarkan keinginan personal tiap pengguna, kecuali ke depan memang akan dikembangkan kecerdasan buatan untuk melakukan personifikasi pada kontrak.

Jika dilihat dengan cukup jeli pada 1320 KUH Perdata. Menyebutkan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yakni: adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu dan suatu sebab (causa) yang halal.

Dari sebuah kesepakatan. Konon, tanda tangan elektronik masih diragukan keabsahannya. Orang masih percaya dan melakukan mistifikasi pada tanda tangan basah. Sementara, tanda-tangan elektronik, jelas sudah otoritatif, sejak diberlakukannya UU ITE. Namun, tidaklah mudah mengatakan segala jenis kesepakatan di dalam platform itu adalah sebuah tanda tangan elektronik.

Tanda tangan elektronik, jelas mempunyai kualifikasi dan mekanisme tersendiri. Jadi menekan tombol setuju, tentu bukanlah tanda tangan elektronik. Sebab tanda tangan elektronik harusnya disediakan oleh perusahaan atau badan yang mendapatkan izin, serta sistem dan teknologinya sudah dinyatakan layak.²²⁷

²²⁷ Pasal 11 (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan

Dalam teknologinya perlu mempunyai sistem kriptografi/ enkripsi yang kuat, sehingga tak mudah diretas suatu tanda tangan elektronik milik seseorang.

Syarat berikutnya, soal kecakapan. Sebuah ketentuan dan persyaratan di dalam sebuah platform, tentu sulit bisa mengenali lebih detail, seseorang apakah mereka cukup umur atau dalam keadaan sehat mental. Suka-suka pengguna memakai anonim, *pseudonym*, menulis semua identitasnya yang kurang otentik.

Selanjutnya, suatu hal tertentu. Indikator yang sangat mudah menentukan barang ini. Yang jelas barang dan jasa yang bisa diperjual belikan bisa ditaruh di e-commerce. Makanan yang cepat basi, biasanya digunakan aplikasi Gojek atau Grab, untuk memudahkannya. Dan seterusnya dan seterusnya.

Terakhir ini yang paling sulit. Soal sebab yang halal. Sebab kita harus mengidentifikasi, barang dan perbuatan transaksi elektronik tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mulai dari ketidak-bolehan menjual produk yang dilarang. Seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Korporasi/ Platform (*Safe Harbour*). Dan, masih banyak lagi.

sebagai berikut: a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Progresivitas Hukum, Ekonomi dan Pasar Digital

Jarang sekali prof Tjip menguraikan gagasan tentang ekonomi. Apalagi soal e-commerce. Yang di zamannya dan waktu beliau berkarya, catatan-catatan umum tentang transformasi digital yang terbatas. Kendatipun demikian, ada beberapa tulisan yang barangkali berguna memotret soal hukum dan ekonomi. Menurut Prof Tjip, hukum punya sumbangsih besar terhadap munculnya kemiskinan.

Di dalam e-commerce, UMKM sebagai salah satu aktor terpenting, seharusnya mendapatkan perhatian lebih. Meskipun, perusahaan raksasa e-commerce yang makin berjaya. Memang, mereka sangat diuntungkan dengan adanya e-commerce. Pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM sangat penting. Perhatian pemerintah juga tak boleh lengah. Hukum dan kebijakan hendaknya bisa digunakan sebagai sarana emansipasi. Bukan menambah kemiskinan.

Pada waktu kita menggunakan optik sosiologis, maka tampaklah, antara lain, kaitan antara hukum dan kemiskinan. Hukum memiliki sahamnya terhadap kemiskinan. Kita dapat melacaknya mulai dari pembuatan hukum itu sendiri. Di sini kembali kita melihat, bahwa legislasi itu bukan pekerjaan yang netral, melainkan sarat dengan perjuangan kepentingan. Dalam kerangka yang demikian itu muncul suatu pola di mana golongan yang mempunyai biasa memenangkan kepentingannya. Pola tersebut dapat diamati dari kualitas dan kuantitas perundang-undangan serta penegakan hukumnya (*law enforcement*). Inilah perilaku hukum.

Struktur (pembuatan) hukum yang demokratis pun belum dapat menolong tampilnya kaum miskin di badan-badan legislatif. Apabila dibuat penelitian terhadap DPR RI, dapat diramalkan, bahwa “perwakilan orang miskin” hampir tidak ada. Ini barang tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas produk-produk legislatif.

Masalah hukum dan kemiskinan itu berkaitan dengan hal-hal yang dibicarakan di atas. Kalau kita mengamati massa perundang-undangan yang ada, maka jumlah yang mengatur kepentingan 'the haves' jauh lebih banyak daripada yang mengurus kehidupan orang miskin. Hukum dagang (*wetboek van koophandel*), misalnya, yang sudah tumbuh menjadi suatu kelompok (*cluster*) hukum dan sub-disiplin tersendiri, sebenarnya adalah suatu cabang perundangan-undangan yang mengurus kepentingan orang berpunya, seperti kantor perdagangan, industri, kontrak, hak kekayaan intelektual dan lain-lain.²²⁸

Prof Tjip nampaknya agak pesimis dan sinis terhadap hukum-hukum yang mengatur keperdataan, seperti kontrak, dagang, hak kekayaan intelektual. Dan, juga beliau lumayan kurang yakin dengan kualitas komitmen para anggota parlemen yang kurang memihak pada rakyat miskin. Dari titik ini, sebenarnya kita juga tidak banyak berharap dengan adanya hukum dan kebijakan e-commerce akan memberikan pencerahan. Jika prof Tjip sendiri menulis dengan nada seperti ini.

Nampaknya, prof Tjip juga memberikan peringatan. Bahwa watak ekonomi cenderung bersikap eksploitatif, sehingga di akhir catatan beliau, beliau memperkenalkan dengan konsep ekonomi ketimuran. Yang tidak mengutamakan dimensi materialistis semata, melainkan juga aspek psikologis kemanusiaannya. Lebih lanjut, beliau menulis seperti ini.

Budaya pasca-materialisme yang digagas oleh Steenbergen terdiri dari unsur budaya ketimuran berikut: holisme, suatu sikap yang lebih dialogis saat berhadapan dengan alam, suatu ekonomi yang

²²⁸ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Kemiskinan. Pokok-Pokok Pikiran*. Disampaikan pada Diskusi Komisi Sosial AIPI dengan akademisi UNDIP Semarang, 22 Mei 2008.

didasarkan pada filsafat ketimuran, daya tahan tanpa kekerasan dan penekanan pada dimensi spiritual dan kenuranian (*binnenmenselijke*).²²⁹

²²⁹ Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif Berdamai dengan Alam*. Jurnal Hukum Progresif Vol. 3 No. 2 (2007): Volume 3. Nomor 2. Oktober 2007.

Geliat Teknologi Finansial

BIASA disebut dengan FinTech (*financial technology*). Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Teknologi Finansial, beberapa orang merasa kurang greget. Orang lebih suka menyebutnya *fintech* saja. Bahkan ada yang hanya dipersempit sebatas: pinjol (pinjaman online).

Saat ini, sektor ini sangat tumbuh kembang pesat. Cerita senangnya banyak. Tak sedikit pula cerita sedihnya.

Suatu hari. Berita mengejutkan terwartakan. Seorang supir taksi itu pun tergeletak tak bernyawa. Z nekad bunuh diri karena terlilit hutang dari aplikasi pinjaman online. Ia menulis wasiat, ‘kepada OJK dan pihak berwajib tolong berantas pinjaman online yang telah membuat jebakan setan. Wahai para rentenir online kita bertemu nanti di alam sana.’²³⁰

²³⁰<https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/13/180153926/sopir-taksi-bunuh-diri-karena-pinjaman-online-ini-kata-ojk>, diakses pada tanggal 4 September 2020

Z adalah satu dari sekian ‘korban’ platform pinjaman online ‘ilegal.’ Yang menetapkan bunga menyiksa, menyedot data pribadi hingga ke akar-akarnya, dan melakukan teror yang mengerikan.

Tapi tak jarang juga, teknologi finansial menolong UKM yang nyaris dilanda kebangkrutan. Hutang ke perbankan tak diterima. Justru fintech-lah yang yang mengulurkan kebaikannya dengan super cepat, super praktis dan super anti ribet.

Atau bahkan, karyawan toko retail yang terselamatkan bayar uang kos, lantaran gajinya baru di dapat beberapa hari kemudian. Fintechlah, solusinya.

Ya, setidaknya, kita bisa menyaksikan. Kehidupan dimudahkan sedemikian rupa dengan teknologi finansial. Namun, di saat yang bersamaan, tantangan dan problem pun terbesit di sana sini.

Teknologi finansial, di sisi lain, juga meminimalisir komunikasi serta interaksi, yang memungkinkan penyelesaian sengketa berlangsung secara sulit. Di tengah perilaku kreditur dan debitur yang literasi keuangan digitalnya kurang mumpuni.²³¹

Dan, sebenarnya, ada budaya konsumerisme yang terwadahi oleh aplikasi, sekaligus investor yang tergiur dengan skema bisnis fintech ini. Sementara transaksi yang sekian lama bertambah hebat, semua orang berharap konsumen tidak jatuh dalam jurang kebangkrutan.²³²

²³¹ Joseph Feller, Fob Gleasure, Stephen Treacy. *Information Sharing and User Behaviour in Internet-Enabled Peer-to-Peer Lending Systems: an empirical study*. *Journal of Information Technology* (2016). Pp. 1-20.

²³² Adrian Fong. *Regulation of peer-to-peer lending in Hong Kong: state of play*. Law and Financial Markets Review (2015)

Meskipun pada faktanya, kadang pengguna layanan pinjaman online itu, kecewa berat dengan platform. Lantaran layanan yang diakses ternyata tak seindah yang diiklankan.²³³ Sisi lain, ternyata juga banyak pengguna yang menaruh kepercayaan tinggi pada aplikasi layanan. Mereka ini yang melakukan transaksi berkali-kali.

Penggunaan teknologi di bidang keuangan memang sudah sangat lama. Sejak internet pertama kali ditemukan. Sejak ratusan tahun silam perbankan juga sudah mulai beroperasi. Namun layanan pinjaman online berbasis aplikasi kurang lebih populer pada tahun 2005.

Awalnya pinjaman online tenar di Inggris dan Amerika. Di Inggris, Zopa.com mengklaim sebagai pasar pertama pinjaman online. Pada saat itu pinjaman melalui aplikasi digital berkisar \$ 1.000 sampai \$ 25.000, untuk proses pengembalian selama 36 bulan.

Lama-lama, aplikasi ini lebih meluas di Amerika, dengan aplikasi yang dominan, bernama Prosper. Dari sinilah, kebiasaan peminjaman yang kurang lebih sekitar \$ 50 paling banyak terjadi di aplikasi Prosper. Tentunya dengan akses yang super cepat mendapatkan pendanaan, yang didukung model *credit scoring* yang terasa tak lama dan membebani.²³⁴

²³³ Laura Larrimore, et al. *Peer to peer lending: the relationship between language features, trustworthiness & persuasion success*. Journal of Applied Communication Research, Vol. 39, No. 1, February 2011, pp. 19-37. Sebuah penelitian dengan menggunakan Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) software, menemukan fakta bahwa nasabah mempunyai kecenderungan untuk menggunakan layanan yang sesuai dengan karakteristik linguistik yang dipakai dalam periklanan. Namun sayangnya, espektasi nasabah tak sesuai dengan tulisan yang telah mempersuasi mereka untuk mengakses layanan.

²³⁴ Efraim Berkovich. *Search and Herding Effects in Peer-to-Peer Lending: Evidence from Prosper.com*. Ann Finance (2011), pp: 389-405

Orang menjadi tidak banyak mengisi formulir dan dokumen yang bertumpuk-tumpuk. Orang juga tidak munggu sampai berbulan-bulan untuk mendapatkan akses pendanaan. Aplikasi memudahkan manusia mengejar hasratnya.

Di Indonesia, demam fintech pun berlangsung dengan sangat hebat. Fintech sistem pembayaran terdaftar di Bank Indonesia, mulai dari tahun 2016 perputaran uang hanya 600 juta, menjadi milyaran rupiah sejak tahun 2018.²³⁵ Sementara Fintech Lending yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), April 2020, jumlah nasabah mencapai 59 juta orang, dengan transaksi peminjaman sebanyak 105 juta kali, dan total penyaluran pinjaman sebesar 106 triliun.²³⁶

Deretan angka yang sangat fantastis. Namun kita perlu menyimak lumayan detail, bagaimana, apa saja, dan seperti apakah rejim hukum fintech di Indonesia? Apakah kebijakan yang sudah ada saat ini sudah mendukung pertumbuhan bisnis ini? Bagaimana perlindungan konsumen di bisnis ini?

Di sektor fintech, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah kemudian menerbitkan 3 (tiga) peraturan tentang pinjaman online, urun dana, dan inovasi keuangan digital.²³⁷ Sementara di bidang sistem pembayaran, uang elektronik

²³⁵<https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/contents/transaksi.aspx>, diakses pada tanggal 4 September 2020

²³⁶<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Bulan-April-2020.aspx>, diakses pada tanggal 4 September 2020

²³⁷ (1) Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK No. 77/2016”); (2) POJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) (“POJK No. 37/2018”); dan (3) Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (“POJK No. 13/2018”).

dan sektor fintech yang lain, juga diatur oleh Bank Indonesia (BI).²³⁸ Masing-masing rejim hukum ini merumuskan aturan main fintech.

Memudahkan dan Memanjakan

Butuh dana cepat? Tanpa persyaratan macam-macam? Langsung cair dalam waktu singkat. Iklan ini menghiasi menu pencari Google saat kita mengetik kata kunci ‘pinjaman online.’ Ternyata, menyelesaikan masalah keuangan, susahny akses pada jasa keuangan, kian mudah dengan aplikasi fintech yang bertebaran di Playstore maupun Appstore.

Fintech, menjembatani orang-orang yang kesulitan menjangkau akses keuangan. Sehingga slogan pengusaha fintech adalah inklusi keuangan. Mendemokratisasikan layanan keuangan.

Saat orang susah mendapatkan akses pinjaman. Ia butuh dalam kondisi cepat dan mendesak. Ia tinggal mengunduh aplikasi seperti investree, amarnya, uangteman, finmas, akseleran, kredit pintar, kredivo, dst.

Begitu pula, pada saat orang sulit mendapatkan modal usaha, dua perusahaan dengan merek platform sudah berizin. Platform Equity Crowdfunding, sudah teregistrasi dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adalah Santara yang dikelola oleh PT. Santara Daya

²³⁸ Saat ini, BI mempunyai beberapa regulasi, antara lain: (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/ 12/ PBI/ 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial; (PBI No. 19/12/ 2017); (2) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/ 15/ PADG/ 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyampaian Informasi dan Penyelenggara Teknologi Finansial; (3) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/ 14/ PADG/ 2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial; (4) dan terakhir Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/ 6/ PBI/ 2018 tentang Uang Elektronik.

Inspiratama dan Bizhare yang diciptakan oleh PT. Investasi Digital Nusantara.

Platform Equity Corwdfunding, atau dikenal dengan urun dana via teknologi, mungkin akan jadi solusi bagi Usaha Kecil Mikro untuk mengakses layanan permodalan. Seperti halnya pasar modal, mekanisme bekerjanya hampir sama. Yakni menghimpun ekuitas.

Pada titik inilah, OJK menerbitkan peraturannya, POJK No. 37 Tahun 2018. Isinya, sebuah mekanisme, yang pada pokoknya melibatkan penyelenggara layanan/ platform. Platform ini sebagai perantara maupun teknologinya, yang menjembatani antara penerbit, yang menawarkan saham dan pemodal yang bertindak sebagai pembeli saham.

Total dana yang dihimpun pada platform ini, sampai mencapai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Angka ini terasa relatif. Bagi UKM, angka ini terbilang cukup besar. Meskipun di sektor bisnis menengah ke atas, angka tersebut terbilang cukup kecil.

Tak seperti pasal modal yang sekali menebus bursa, bisa menargetkan modal tak terhingga. Barangkali batas maksimal pengumpulan permodalan inilah, yang membedakan antara layanan urun dana via teknologi dan sistem pasar modal.

Bagi UKM, permodalan adalah kunci, supaya bisnis mereka berkembang. Apalagi, di tengah Pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini, UKM harus pandai-pandai mencari ‘nafas keuangan’ untuk bisa bertahan. Salah fintech layanan urun dana, Santara, bahkan sudah salurkan 84,5 milyar dana, berhasil menggaet banyak investor di masa pandemi.²³⁹

²³⁹<https://finansial.bisnis.com/read/20200818/89/1280493/salurkan-rp845-miliar-ini-jurus-fintech-santara-gaet-investor-di-masa-pandemi>, diakses pada tanggal 5 Desember 2020

Kendatipun demikian, memang tidak mudah, membangun bisnis layanan urun dana ini. Sebuah penyelenggara, wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp. 2.500.000.000, (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan perizinan. Angka yang sebenarnya tidak cukup mudah ditahluukkan bagi pelaku bisnis kecil atau pegiat start-up yang tidak disokong permodalan yang cukup.

Meskipun OJK juga memberikan angin segar pada bentuk badan hukum penyelenggara. Tak hanya perseroan terbatas saja yang bisa mendirikan layanan ini. Koperasi pun diberikan kesempatan untuk menjadi pihak penyelenggara layanan.

Berbeda dengan layanan urun dana, yang banyak menysasar UKM dan pelaku bisnis. Satu sektor fintech yang paling populer adalah layanan pinjam meminjam uang via teknologi (*peer to peer lending*), yang lebih banyak menysasar inklusi keuangan perorangan.

Dari sudut pandang sejarah perkembangan fintech, sistem pinjam meminjam uang via teknologi (sebut saja pinjaman online), tergolong paling tua. Setelah urun dana dan inovasi keuangan digital diterbitkan di tahun 2018. Regulasi pinjaman online diterbitkan pada tahun 2016 oleh OJK. Adalah Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK No. 77/2016”), yang menjadi aturan main bisnis ini.

Per 5 Agustus 2020, sejak beberapa bulan OJK melakukan penghentian pendaftaran perusahaan pinjaman online ini, data perusahaan yang terdaftar sebanyak 158 perusahaan. Saat perusahaan ini terdaftar di OJK, mereka sudah melakukan verifikasi yang cukup solid, hingga menanti saatnya diberi izin setelah beberapa saat dimonitor oleh OJK.

Pada tanggal 5 Agustus 2020 juga, tercatat 33 aplikasi pinjaman online dan perusahaan yang bergerak di bidang ini yang mendapatkan izin. Mulai dari Finmas, Akseleran, Ammana, Mekar, Adakami, Danarupiah, Awantunai, dan masih banyak lagi sudah mendapatkan izin dari OJK.

Mereka inilah yang tunduk dengan aturan main dan di bawah pengawasan OJK. Sehingga posisi hukum dan kredibilitas aplikasinya relatif terpantau oleh pemerintah. Mereka juga tergabung dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Asosiasi inilah yang menentukan Pedoman Perilaku layanan pinjaman online. Mereka inilah yang menentukan suku bunga tidak boleh melebihi 0.8 %. Mereka jugalah yang mengatur bahwa total biaya layanan (denda keterlambatan, bunga pinjaman, dst) tidak boleh melebihi dari 100 % dari total pinjaman.

Jadi jika ada layanan yang memberikan pinjaman satu juta rupiah. Dan, peminjam di kemudian hari harus membayar lima juta rupiah, misalnya. Bisa dipastikan, ini adalah perusahaan layanan pinjaman online ‘bodong.’

Sisi lain. Saat belanja di mall, lupa membawa dompet. Anda bisa menggunakan aplikasi membayar belanja Anda. Begitulah kira-kira yang termuat dalam iklan-iklan sebuah produk fintech pembayaran. Begitu juga saat kita membayar jalan bebas hambatan. Tinggal tempel kartu, gerbang tolnya pun terbuka dengan cantik.

Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Uang Elektronik, telah juga diatur oleh Bank Indonesia. Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/ 12/ PBI/ 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/ 6/ PBI/ 2008. Tumbuh kembanglah aplikasi dan teknologi keuangan yang memanjakan dan memudahkan hari ini.

Pada daftar penyelenggara uang elektronik yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia, terdapat perusahaan jasa keuangan perbankan dan non perbankan. Beberapaanya tak asing lagi di telinga kita, seperti: Gopay (PT. Dompot Anak Bangsa), Dana (PT. Espay Debit Indonesia Koe), dan OVO Cash (PT. Visionet Internasional).

Bahkan OVO, salah satu penyelenggara uang elektronik, juga menjelma masuk dalam jajaran Unicorn Indonesia. Disamping Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka, berhasil mencapai valuasi sebesar 1 miliar dolar Amerika.

Memang, dilihat dari *trend*-nya, teknologi finansial punya kualitas masa depan yang menggiurkan, mempermudah kehidupan masyarakat dan menyuntik gairah ekonomi digital. Meskipun, kita musti mawas diri, untuk melihat sisi lain yang masih berbentuk ‘tantangan.’ Umpamanya, aspek keamanan sibernya, perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa dan seterusnya.

Tak Bisa Diprediksi, Didata Saja Dulu

Sudah bukan rahasia lagi, kemajuan teknologi digital tak sejalan dengan regulasi. Hukum (regulasi) berlari tertatih-tatih, mengejar ketertinggalan atas perkembangan teknologi digital. Ahli hukum sedang meneliti apa yang terjadi di sektor teknologi digital, pada saat yang sama tiap detiknya muncul aplikasi baru, teknik baru, inovasi baru, dan seterusnya.

Sebagai penyusun kebijakan (*regulator*), akhirnya pun tak kehabisan akal. Menyiasati perkembangan yang sedemikian deras, OJK dan BI pun mengeluarkan kebijakan *regulatory sandbox*. BI mengeluarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/ 14/ PADG/ 2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial.

Sementara OJK mengeluarkan POJK No. 13/ POJK.2/ 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Dalam POJK ini, dasar filosofis regulasi ini menarik disimak. Kira-kira maksud regulasi ini dibangun tertuang dalam konsideran sebagai berikut:

‘[...] seiring kemajuan teknologi, inovasi keuangan digital tidak dapat diabaikan dan perlu dikelola agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat; [...] inovasi keuangan digital perlu diarahkan agar menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang dikelola dengan baik;’

Ruang lingkup inovasi keuangan digital dalam rejim POJK ini cukup luas. Mulai dari penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan penyaluran dana, perasuransian, pendukung pasar, pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya (Pasal 3 POJK 13 Tahun 2018).

Terbitnya Inovasi Keuangan Digital memberikan angin segar bagi pegiat ekonomi digital, yang sedang merintis usahanya. Saat mereka tidak bisa mengajukan perizinan, yang persyaratannya lebih kompleks, berat dan rumit, untuk pinjaman online dan urun dana, mereka ini bisa lari ke rejim Inovasi Keuangan Digital, untuk menguji ide dan temuannya.

Yang paling banyak hari ini, terdaftar pada Inovasi Keuangan Digital OJK adalah layanan fintech market aggregator. Yaitu, layanan yang menghimpun informasi tentang berbagai jenis jasa keuangan, yang memudahkan penggunaanya untuk membandingkan biaya terbaik. Saat orang kebingungan dengan layanan apa yang akan digunakan, layanan aggregator akan memberikan kemudahan

dan membantunya mencari informasi yang tepat bagi penggunaanya.

Beberapa layanan aggregator, antara lain adalah Alami (PT. Alami Teknologi Sharia); Cekaja.com (PT. PUncak Financial Utama), Cermati (PT. Dwi Cermat Indonesia), Dokter Dana (PT. Digital Dana Technology), Bandingin (PT. Spark Integrated Solutions), dan masih banyak lagi.

Selain aggregator, yang dikualifikasikan ke dalam sektor (Electronic Know-Your-Customer/ eKYC), yang sudah terdaftar antara lain adalah PrivyID (PT. Privy Identitas Digital) dan Vida (PT. Indonesia Digital Identity).

Selanjutnya, layanan yang cukup besar volumenya dan eksistensinya dalam ekosistem bisnis fintech adalah *credit scoring*. *Credit scoring* ini cukup dibutuhkan bagi lembaga pembiayaan untuk menentukan layak tidaknya seseorang untuk menerima pinjaman. Layanan ini akan mengumpulkan data dan menganalisisnya, sehingga luarannya adalah *score* seseorang calon peminjam tinggi atau rendah. Seberapa tinggi kemampuannya untuk mengembalikan hutangnya, dan seterusnya.

Beberapa perusahaan yang terdaftar sebagai *credit scoring*, antara lain adalah Avatec (PT. Avatec Services Indonesia), Acura Labs (PT. Acura Labs Indonesia), TSI (PT. Trusting Social Indonesia), BPS (PT. Bangun Percaya Sosial), Pyxis (PT. Digital Synergy Technology) dan masih banyak yang lain.

Di sektor inovasi keuangan digital, banyak sekali ide dan gagasan teknologi yang menyokong pertumbuhan bisnis jasa keuangan. Selain aggregator, e-KYC, *credit scoring*, masih banyak lagi jenis inovasi di sektor ini. Beberapa diantaranya jenis lain, seperti digital dare, funding agent, financing agent, online gold depository, claim service handling, *credit scoring*, verification non-CDD, finansial planner, blockchain

based, online distress solution, project financing, social network&robo advisor, tax&accounting, dan masih banyak lagi.

Sementara itu, regulatory sandbox, tidak hanya dilakukan oleh OJK saja. Tetapi juga BI mengeluarkan kebijakan yang serupa. Ialah Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/ 14/ PADG/ 2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial, yang memayungi pengembangan teknologi finansial di BI.

Ruang lingkup peraturan ini, dan bisnis yang bisa melakukan pendaftaran di jalur ini meliputi layanan, seperti: sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, dan jasa finansial lainnya (lihat: Pasal 2 PADG BI No. 14/ 14/ 2017).

Sampai saat ini, ruang uji coba terbatas sudah terdapat dua perusahaan yang terdaftar. Pertama, TokoPandai, yang dirintis oleh PT Toko Pandai Nusantara, yang bergerak di sistem pendaftaran. Platform ini terdaftar sejak tanggal 8 Maret 2018. Kedua, PrivyID, yang bergerak di bidang penyelenggara penunjang. Selain juga terdaftar di Inovasi Keuangan Digital OJK, PrivyID juga mendaftar di ruang uji coba terbatas di BI.

Sekian banyak inovasi dan terobasan teknologi di bidang keuangan. Membuat hukum perlu sedikit memberikan fleksibilitasnya untuk menangkap perkembangan-perkembangan. Ruang uji coba terbatas dan inovasi keuangan digital barangkali bergumam. Sulit sekali memprediksi apa yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Sebaiknya kita mencatat setiap perubahan di sektor bisnis keuangan digital ini.

Fintech Ilegal

Begitu berat persyaratan perizinan dan pendaftaran fintech di OJK, sebenarnya juga bisa diartikan adanya ja-

minan pemerintah untuk melakukan pengawasan. Tanpa pendaftaran dan perizinan, dikuatirkan fintech seperti rimba. Konsumen banyak dirugikan. Dan, lebih beratnya jika muncul segala jenis tindak kejahatan.

Pada tanggal 13 Februari, Satgas Waspada Investasi OJK menghentikan dua ratus tiga puluh satu Fintech Peer to Peer Lending Ilegal. Berikut dibawah ini adalah cuplikan dari siaran pers yang dilakukan oleh satgas.

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi kembali menghentikan kegiatan 231 (dua ratus tiga puluh satu) Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer-To-Peer Lending) yang tidak terdaftar atau memiliki izin OJK.

Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing meminta masyarakat untuk tidak melakukan pinjaman terhadap Fintech Peer-To-Peer Lending tanpa terdaftar atau izin OJK tersebut, agar tidak dirugikan oleh Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal tersebut.

Tongam mengatakan saat ini banyak entitas Fintech Peer-To-Peer Lending yang melakukan kegiatan melalui aplikasi yang terdapat di Appstore atau Playstore bahkan juga di sosial media yang tidak terdaftar dan tidak berizin dari OJK sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 sehingga berpotensi merugikan masyarakat.²⁴⁰

Praktik fintech ilegal berdasarkan desas-desus dan kabar burung yang beredar, sangatlah mengerikan. Konon, sekali mengunduh aplikasi, semua data yang kita miliki disedot. Mulai dari kontak nama, galeri, lokasi, rekaman,

²⁴⁰ Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan 231 Fintech Peer to Peer Lending Ilegal, 13 Februari 2019.

sampai seluruh dokumen/ file yang ada di dalam telepon genggam kita.

Bahkan aplikasi ini bisa membaca setiap sms yang masuk ke telepon genggam kita. Untuk memastikan seberapa banyak kata ‘bayar,’ ‘tunggakan,’ ‘lunasi,’ dst, sehingga mereka yang sms-nya banyak dikejar debt collector, credit scoringnya rendah.

Dari data yang mereka sedot itu, mereka bisa melihat gaya dan perilaku harian sang pengguna. Berapa besar konsumsi internetnya, pulsa yang dibelinya, belanja online yang dilakukan, bahkan sampai ke ‘menyadap’ aktivitas keseharian. Aplikasi ini juga akan secara otomatis membandingkan kebiasaan pengguna pada sosial media.

Di sosial media, kehidupan pengguna terlalu glamour, maka peringkatnya makin menurun untuk mendapatkan kredit.

Yang lebih sadis, adalah perilaku penagihan. Semua kontak yang disedotnya tadi, digunakan untuk membombardir seluruh pertemanan pengguna. Mulai dari bos, mertua, tetangga, teman kantor, dan semua pun kena teror oleh debt collector dari fintech illegal.

Tujuan sang debt collector ini antara lain adalah memermalukan pengguna, sehingga segera menyelesaikan tunggakannya. Bahkan tak segan-segan, sang debt collector memeras bos atau orang tua pengguna untuk meminta melakukan pembayaran, dengan berbagai ancaman. Mulai dari akan di datangi rumahnya, ditarik asetnya, hingga dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Yang lebih tragis lagi, saat beberapa kasus yang muncul, tentang permintaan bugil kepada pengguna perempuan. Sang debt collector meminta sang pengguna untuk mengirimkan foto telanjangnya supaya hutangnya bisa ditunda pembayarannya. Sialnya, hal ini tak terjadi sekali dua kali,

tapi masih ada saja kasus pelecehan semacam ini.²⁴¹

OJK terus menghimbau supaya masyarakat menggunakan aplikasi yang terdaftar dan mendapatkan izin dari pemerintah. Namun juga, tak henti-hentinya aplikasi fintech ilegal ini berjamuran satu sisi lain dan masyarakat yang tetap mengakses layanan ini. Padahal hingga tahun 2020, sudah sebanyak 2.591 fintech ilegal telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berdasarkan permintaan OJK.

Edukasi kepada masyarakat dan penegakan hukum yang efektif, memang perlu dilakukan secara simultan.

Ada sebuah cerita, dari seorang sahabat yang memang pernah punya pengalaman. Ia berniat meminjam uang 2,5 juta. Sedang memerlukan uang untuk biaya kuliah. Setelah mengunduh sebuah aplikasi, mulailah ia memasukkan datanya. Setelah dimasukkan semua data yang diminta, ia mendapatkan respons bahwa permohonannya ditolak.

Ia merasa sudah ikhlas, mungkin belum rezeki mendapatkan pinjaman. Dan, melupakan sejenak sembari sedikit kecewa dengan hal ini. Jelang beberapa menit, tanpa disadari, rekening di bank-nya berkurang saldonya sebesar 2,5 juta. Panik, ia pun mengecek berkali-kali. Ternyata benar, uangnya telah raib.

Ternyata ini baru awal mula saja. Beberapa hari kemudian, ia mendapatkan tagihan, atas hutang yang tak pernah ia terimanya. Seluruh kolega dan atasan di kantornya dihubungi oleh *debt collector*. Ia mau lapor pihak berwajib, namun takutnya biaya dan waktu serta energinya tak se-

²⁴¹ Lihat, <https://finance.detik.com/fintech/d-4873881/ngerinya-terjerat-pinjol-ilegal-diminta-foto-bugil>, diakses pada tanggal 7 September 2020; lihat, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4748318/parah-masih-ada-debt-collector-pinjol-yang-minta-foto-bugil>, diakses pada tanggal 7 September 2020.

banding dengan jumlah kerugian yang ia alami. Ia tak tahu harus ke mana dan upaya apa yang bisa ditempuh.

Saat Hukum Progresif Melihat *Fintech*

Jelas Prof Tjip, tidak pernah menulis tentang teknologi finansial secara khusus. Namun saya membayangkan jika beliau masih hidup, kira-kira apa yang ingin beliau sampaikan melihat perkembangan-perkembangan di masyarakat saat ini.

Melihat gaya pengaturan fintech, hari ini, dua institusi OJK dan BI membuat ruang uji coba (*regulatory sandbox*). Untuk mengatasi bagaimana hukum bisa menangkap perubahan dan inovasi di dunia teknologi dan bisnis *fintech*. Dengan membuat peraturan ruang uji coba, maka kemungkinan pencatatan, pengembangan, serta jika perlu subsidi pun dipersiapkan untuk mendorong kualitas fintech.

Hal ini, mengingatkan kita pada konsep ‘kepastian,’ yang sering menjadi adagium hukum. Ajaran hukum tak pernah lepas dari gagasan dan kesetiaannya pada konsep kepastian hukum. Seakan-akan, kepastian adalah harga mati. Prof Tjip, sering mengatakan, bahwa hukum itu seperti air yang mengalir. Pun, sama seperti Undang-Undang. Saat disahkan ia pun masih bisa direvisi. Pastinya, konsep kepastian sudah sangat bergeser. Prof Tjip mengutip kata-kata Scholten.

Paul Scholten menolak hal itu dengan mengatakan, “*Van de rustige verzekerdheid van velen in de 19de eeuw, ... is niet zo heel veel overgebleven*” (rasa kepastian di abad ke-sembilan belas, sekarang sudah tidak banyak tersisa lagi) (Scholten, 1954).²⁴²

Konsep kepastian identik dengan keamanan bentuk

²⁴² Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan*. Tanpa Tahun Terbit dan Penerbit.

formal, yang sudah banyak digugat. Makanya, komunitas hukum dianggap sudah berpuas diri dan mengatakan sudah berada di puncak perkembangan hukum. Padahal kehidupan sosial, ekonomi dan teknologi terus berkembang pesat.

Seperti halnya BI dan OJK. Kenapa mereka tidak hanya fokus pada Uang Elektronik, Penyelenggara Teknologi Finansial, Jasa Pinjam Meminjam Melalui Sistem Elektronik, Urun Dana melalui Sistem Elektronik, dan seterusnya saja. Akan tetapi, mereka juga masih membuka ruang uji coba dan inovasi keuangan digital, yang memungkinkan setiap perusahaan dengan teknologi dan model bisnis baru melakukan pendaftaran.

Toh, sebenarnya, dari regulatory sandbox, ini kita lebih mengenal berbagai macam jenis fintech. Seperti Aggregator, Financial Planner, Credit Scoring, Financial Blockchain, dan masih banyak lagi.

Dengan kata lain, regulatory sandbox dalam perspektif hukum progresif, bisa dikatakan valid. Dan, barangkali juga model ini bisa dikembangkan diperbagai sektor pengaturan hukum dan ekonomi digital yang lain.

Parade Hantu

‘EH, KAMU pernah lihat hantu?’ Kata Budi

‘Iya, di toilet sekolah tuh. Bahkan saat siang. Pepohonan beringin yang rimbun itu menutup gelap pengab. Kadang terlihat sosok perempuan.’ Tukas Ani, sambil melirik pergelangan tangannya yang mulai merinding.

Ya, dialog Budi dan Ani di atas adalah percakapan yang sering kita dengar. Tentang Hantu. Hantu, menjadi buah bibir di setiap tempat tongkrongan, pos kampling, arisan, dan angkringan setiap sudut kota maupun desa.

Tak pernah membayangkan sosok hantu, kemudian dijadikan sebuah inovasi di bidang digital. Hantu-hantu yang kita kenal, seperti: pocong, tuyul, genderuwo, kuntilanak, dan masih banyak lagi. Tampil seperti sosok yang menyenangkan dan bermain dalam sebuah *game online*? Tentu akan sangat menarik.

Dari titik inilah, saya mengangkat produk anak bangsa, bernama Ghost Parade. Azizah Assattasari, adalah seorang

senimawati yang membidani serta membikin Ghost Parade ini. Perempuan kelahiran tahun 1988 dari Padang ini, sejak tahun 2016 mendirikan dan menekuni Ghost Parade.

Ia yang juga tergabung dalam beberapa komunitas dan asosiasi seperti Bali Illustration (2015), Asosiasi Game Indonesia (2018), dan Asosiasi Retas Budaya GLAM (Gallery, Library, Archives, & Museum), mempunyai banyak karya. Kalau kita tengok instagramnya, @assattari, akan banyak sekali karya seni grafis atau animasi yang cukup ‘hidup dan berkarakter.’

Azizah, perempuan yang selalu tampil ceria, super *cheerful* dan energik ini, adalah tulang punggung dari Ghost Parade. Salah satu industri kreatif yang tumbuh subur di nusantara di antara talenta seni grafis dan inovasi artistik.

Suri

‘Story of a little girl name Suri who be friend with the Ghost Inside Svaka Forest. The ghost need her help to save their home, the forest, from the huma hand.

Ghost Parade follows the adventures of Suri, a young girl who gets lost in a mysterious forest on her way home from school. What starts out as one girl’s quest to get home on time soon becomes a fight to save the forest and its myriad supernatural in habitants from shortsighted humans trying to level the forest for profit.’

(Terjemahan bebas: cerita seorang gadis bernama Suri yang menjadi teman dengan para hantu di dalam hutan Svaka. Para hantu membutuhkan bantuannya untuk menyelamatkan rumahnya, hutan, dari tangan manusia (jahat).

Parade Hantu adalah sebuah kisah perjalanan Suri, seorang gadis kecil yang tersesat di hutan yang misterius dalam perjalanan pulang ke rumah dari

sekolah. Sesuatu yang dimulai dari sebuah perjalanan gadis untuk pulang tepat waktu, segera menjadi pertarungan untuk menyelamatkan hutan dan bersama kekuatan supernatural yang berada di hutan dari manusia yang picik, yang mencoba meratakan hutan untuk keuntungannya.)'²⁴³

Suri, sang gadis kecil. Menggambarkan alam bawah sadar kita. Sedari kecil yang takut pada hantu. Namun Ghost Parade, menyampaikan pesan yang justru faktual, dengan kondisi hari ini. Yang perlu ditakutkan sebenarnya bukan hantu. Melainkan kerakusan manusialah yang menjadi biang kerok kerusakan alam.

Hantu-hantu sudah hidup tenang di dalam hutan. Namun, manusia melakukan penjarahan, penebangan ilegal, membuka pertambangan, perkebunan, hingga perumahan, semuanya itu tanpa memperdulikan kepentingan alam.

Di sisi lain, sosok yang ditampilkan dalam game ini juga berbasis riset. Dulu, kita hanya mendengar dan menyaksikan, bahwa kuntilanak, tuyul dan genderuwo adalah sosok-sosok yang menyeramkan. Meskipun sesungguhnya, mereka mempunyai cerita asal-usulnya sendiri-sendiri yang menarik dikupas.

Kuntilanak dikisahkan muncul karena stigma seorang wanita yang harus mempunyai seorang anak, sehingga terjadi paksaan yang mengakibatkan seorang wanita itu meninggal bersamaan dengan janin yang ada di rahimnya. Lalu Tuyul, seorang anak kecil atau bayi, yang meninggal karena dibuang atau dibunuh, terakhir Genderuwo, digambarkan hantu ini memiliki tubuh yang besar, buruk rupa serta menyeramkan. Khusus untuk Genderuwo, ada riset yang menyatakan kalau sebenarnya tidak hanya sebatas itu saja. Nama

²⁴³ <https://ghost-parade.com/>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2020

lain dari hantu ini adalah Gandarva yang memiliki kaitan dengan Dewa Siwa dalam pengajaran agama Hindu, dan jika dikaitkan dengan pengajaran agama Kristen, Gandarva dikenal dengan salah satu anggota dari the four horsemen yang diceritakan dalam kita kejadian pada perjanjian lama.²⁴⁴

Selanjutnya yang lumayan menarik, Ghost Parade, ini tidak menggambarkan para hantu itu sebagai sosok yang antagonis dan menyeramkan. Melainkan sebagai figur yang lucu dan bersahabat. Seperti kebanyakan serial film kartun hantu Jepang. Umpamanya Ghost Stories yang dirilis pada sekitar tahun 2000.

Di film Ghost Stories ini juga terdapat sosok Amano-jaku. Adalah sosok iblis dalam cerita rakyat Jepang. Namun dalam film ini, Amano-jaku memang masih digambarkan gelap dan bertaring. Meskipun jika dilihat secara saksama, masih terlihat lucu dan tidak menyeramkan.

Sama halnya Genderuwo dalam Ghost Parade. Ia tidak ditampilkan sebagai sosok yang menyeramkan dan menakutkan. Akan tetapi, ia tampil dengan tubuh lebih seperti pemeran Po, sang Panda dalam Kungfu Panda, namun ia bertubuh kehijauan dengan taring yang mungil.

Ghost Parade, seperti studio, yang berpotensi besar menyapa para penikmat animasi dan seni grafis. *Feeling* saya, dengan kegigihan para pegiat di dalam studio ini, industri ini, bisa tumbuh seperti Illumination Entertainment yang memproduksi film Minions, Blue Sky Studios yang merilis film Ice Age, Sony Pictures Animation yang mempunyai film Hotel Transylvania, atau sampai Sunrise Inc yang memiliki film seperti Cowboy Bebop, dan seterusnya.

Berharap Ghost Parade, kiprahnya bisa bersanding dengan studio-studio ternama yang lain. Dan, begitu pula den-

²⁴⁴ Wawancara dengan Azizah CEO dan Founder Ghost Parade.

gan industri kreatif Indonesia yang lain. Berharap tumbuh kembang dan menyemai nama baik nusantara.

Industri Kreatif dan HAKI

Tak bisa dibayangkan sebelumnya. Kontribusi industri pada pertumbuhan ekonomi sangatlah signifikan. Jika dilihat saksama, PDB ekonomi kreatif mencapai 900an triliun rupiah. Bahkan Indonesia berada di urutan ketiga ekonomi kreatif di dunia setelah Amerika Serikat dan Jepang.²⁴⁵

Di level provinsi, misalnya, di kawasan Sumatera Utama. Terdapat 401.104 PT/ Persero yang bergerak di bidang usaha ekonomi kreatif. Sebanyak 665 CV, kemudian 10.452 mempunyai izin khusus, sementara 366 berbadan usaha lain, sedangkan yang tidak berbadan hukum sebanyak 388.522 usaha ekonomi kreatif.

Mereka ini menyumbangkan pendapatan untuk ekspor di bidang ekonomi kreatif provinsi, sebanyak \$ 56.810.908,00. Sementara serapan tenaga kerja sebanyak 543.179 tenaga kerja pada tahun 2016. Mereka bergerak di bidang kuliner, kriya, fesyen, TV & Radio, penerbitan, music, arsitektur, App & Game, Periklanan, Fotografi, Film, Animasi, Video, Desain Interior, Seni Rupa, dan masih banyak lagi.²⁴⁶

Dan, bisa dibayangkan, ekonomi kreatif itu seperti bekerja layaknya seniman. Seorang seniman, tentunya tidak akan suka administrasi, tata kelola keuangan, pengurusan perizinan dan seterusnya dan seterusnya. Dalam benak seorang seniman. Adalah berkarya, berkarya dan berkarya.

Berkarya itu ibarat bernafas. Seperti filosofi Rene Descartes, *cogito ergo sum*, yang artinya: aku berpikir maka

²⁴⁵ BEKRAF dan BPS. Infografis Ringkasan Data Statistik Ekonomi Kreatif di Indonesia. 2017.

²⁴⁶ BEKRAF dan BPS. Infografis Sebaran Pelaku Ekonomi Kreatif di Indonesia. 2017.

aku ada. Bagi seorang seniman, menjadi aku berkarya maka aku ada. Eksistensi seorang seniman adalah pada karyanya. Jika dia tidak lagi berkarya, ia merasa tidak lagi hidup.

Sehingga hidup itu untuk berkarya. Bukan sebaliknya. Sehingga terjadinya pembajakan, penyerobotan hak cipta, dan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual, hanya membuat sang seniman bersedih sementara. Tapi ia tetap terus berkarya, tak peduli, karyanya mau dibajak atau dimaling orang.

Sementara disinilah peran kolega, pemerintah, pusat konsultasi hak kekayaan intelektual universitas yang bisa menyediakan pendampingan pada karya seniman ini.

Berhadapan dengan urusan hukum, seperti membuat semua urusan makin ribet. Apalagi jika harus mengurus perizinan, pendirian badan hukum, kontrak kerja, perpajakan, dan masih banyak lagi, sangat memusingkan.

Utamanya soal hak kekayaan intelektual. Merek dagang dan hak cipta seorang seniman perlu diabadikan dalam rejim administrasi hak kekayaan intelektual. Untuk menghindari sengketa penggunaan logo, perusahaan rintisan industri kreatif perlu mendapatkan mereknya.

Pun demikian, dengan hak cipta. Meskipun hak cipta itu melekat pada sang penciptanya. Tanpa harus didaftarkan. Namun pencatatannya sangatlah penting, untuk menguatkan hak eksklusif akan karya ciptanya itu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Capra, Fritjof. (1996). *The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems*. New York: Anchor Books.
- Castells, Manuel. (2004). *The Network Society. A Cross-cultural perspective*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.
- Nichols, Thomas M. (2017). *The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters*. Oxford: Oxford University Press.
- Rahardjo, Satjipto. (1979). *Hukum dan Perubahan Sosial. Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Marwan, Awaludin. (2018). *Good Governance and Ethnic Minorities in Indonesia. An Administrative Law Study of the Chinese and Turkish communities with a comparison to the Netherlands*. Utrecht: Utrecht University.
- Sihombing, Uli Parulian, et al. (2014). *Pendidikan Hukum Klinis (Clinical Legal Education) Dalam Implementasi UU Bantuan Hukum*. Jakarta: Indonesian Legal Resource Center (ILRC) dan Open Society Justice Initiative (OSJI).

- Puspito, Nanang T dan Marcella Elwina S. (2016). *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Kompas. Jakarta: Kompas.
- Sidharta, Arief. Buku-buku terjemahan prof Arief Sidharta cukup banyak.
- Rahardjo, Satjipto. (2002). *Membangun Polisi Sipil*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (2003). *Sisi-sisi Lain dari Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Parsons, Talcott. (1951). *The Social System*. Routledge.
- Galanter, Marc. (2005). *Lowering The Bar Lawyer Jokes & Legal Culture*. Wisconsin: the University of Wisconsin Press.
- Bell, John. (2001). *French Legal Culture*. London: Butterworths.
- Schneier, Bruce. (2016). *Data and Goliath. The Hidden Battles to Collect and Control Your World*. New York: W. W. Norton & Company.
- Zuboff, Shoshana. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. New York: PublicAffairs.
- William Gibson. (1986). *Neuromancer (Remembering Tomorrow)*. New York: Ace books.
- Lessig, Lawrence. (2006). *Code, And Other Laws of Cyberspace*. New York: Basic Books.
- Boyle, James. (2005). *Shamans, Software, and Spleens. How the World is Under Attack from a New Form of Crime*. Cambridge: Harvard University Press.
- Kierkegaard, Sylvia. (2007). *Cyberlaw, Security & Privacy: Second Legal, Security and Privacy*. Ankara: International Association of IT Lawyers.

- Rosenoer, Jonathan. (1997). *Cyberlaw. The Law of the internet*. Berlin: Springer Science & Business Media.
- Galloway, Scott. (2017). *The Four. The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook, and Google*. New York: Penguin.
- Kuhn, Thomas S. (1996). *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Clarke, Adele E. (2005). *Situational Analysis. Grunded Theory After the Postmodern Turn*. London: Sage Publications.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Marwan, Awaludin. (2013). *Satjipto Rahardjo: Sebuah Biografi Intelektual*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- Dworkin, Ronald. (2011). *Justice for Hedgehogs*. Harvard: Harvard University Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*. Malang: Bayu Media.
- Castells, Manuel. (2001). *The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business, and Society*. New York: Oxford University Press.
- Mitnick, Kevin & William Simon. (2009). *The Art of Intrusion: the real stories behind the exploits of hacker*. Wiley.
- Rao, Arun & Piero Scaruffi. (2011). *A History of Silicon Valley: The Greatest Creation of Wealth in the History of the Planet*. Redwood: Omniware.
- Craig, Brian. (2013). *Cyberlaw. The Law of the Internet and Information Technology*. Boston, New York, etc: Pearson.
- Rosenoer, Jonathan. (1996). *Cyberlaw. The Law of the Internet*.

- San Francisco: Springer.
- Noriswadi, Ismail. (2013). *Beyond Data Protection*. New York & London: Springer.
- Hill, D. (2010). *Data Protection: Governance, Risk Management and Compliance*. Taylor & Francis.
- Gutwirth, Serge, Yves Poullet, & De Hert. (2014). *Reloading Data Protection*. London & New York: Springer.
- Gutwirth, Serge , Yves Poullet, & De Hert. (2013). *European Data Protection*. London & New York: Springer.
- Wiratraman, Herlambang. (2014). *Press Freedom, Law, and Politics in Indonesia: A Socio-Legal Study*. Universiteit Leiden.
- Benhabib, Seyla. (2004). *The Rights of Others, Aliens, Residents and Citizens*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Soepomo. (1964). *The Provisional Constitution of the Republic of Indonesia With Annotations and Explanations on Each Article*. Ithaca: Cornell University.
- Marwan, Awaludin. (2018). *Good Governance and Ethnic Minorities in Indonesia: A Comparative Law Perspective*. Utrecht: Utrecht University.
- Castells, Manuel. (2010). *End of Millennium*. Hoboken: Wiley-Blackwell.
- Jemadu, Aleksius, eds. (2007). *Praktik-Praktik dan Pengawasan Demokratis Pandangan Praktisi. Kelompok Kerja Intelijen*. Jakarta: DCAF.
- Budiman, Muhammad Ridho. (2016). *Optimalisasi Peran Badan Intelijen Negara (BIN) dalam Mengawal Keamanan Negara*. Sleman: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Andreass, Jason & Steve Winterfeld. (2011). *Cyber Warfare. Technique, Tactics and Tools for Security Practitioners*. Amsterdam: Elsevier.
- Kizza, Joseph Migga. (2014). *Computer Network Security and*

- Cyber Ethics*. Jefferson: McFarland & Company, Inc, Publishers.
- Karatzogianni, Athina. (2009). *Cyber Conflict and Global Politics*. London: Routledge.
- Probst, Christian W, et al. (2010). *Insider Threats in Cyber Security*. Berlin: Springer.
- Mitra, Ananda. (2010). *Digital Security: Cyber Terror and Cyber Security*. New York: Chelsea House Publishers.
- Knapp, Kenneth J. (2009). *Cyber Security and Global Information Assurance: Threat Analysis and Response Solutions*. Information Science Reference.
- Hoskins, Andrea and Ben O'Loughlin. (2008). *The internet as a weapon of war? Radicalisation, publics and legitimacy*. Routledge.
- Singhal, Anoop. (2007). *Data Warehousing and Data Mining Techniques for Cyber Security*. Berlin: Springer.
- Addink, G.H, Gordon Anthony, Antoine Buyse and Cees Flinterman (eds.). (2010). *Sourcebook Human Rights and Good Governance*. Utrecht: Netherlands Institute of Human Rights (SIM).
- Brysk, Alison & Shafir, Gershon. (2004). *People out of Place: Globalization, Human Rights and the Citizenship Gap*. Oxford & New York: Routledge.
- Buchanan, Allen. (2010). *Human Rights, Legitimacy, & the Use of Force*. Oxford: Oxford University Press.
- (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002: Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Yamin, Muhammad. (1951). *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Budhijanto, Danrivanto. (2018). *Teori Hukum dan Revolusi*

- Industri 4.0*. Bandung: LoGoz Publishing.
- Lessig, Lawrence. (2008). *Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy*. London: Bloomsburry Academic.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan*.

Jurnal, Koran, dan Majalah

- (2019, March). *Illuster*. Utrecht University Fund.
- Rahardjo, Satjipto. (4 September 1991). *Hukum Indonesia 1945 dan 1991*. Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (9 Desember 1991). *Mengukur Sendiri Hak Asasi Manusia*. Kompas.
- Rahardjo, Satjipto Rahardjo. (5 Maret 1975). *Mencari Model Sarjana Hukum Pembangunan*. Kompas.
- UNDIP. (23 Juni 1981). *Buka Pendidikan Notariat*. Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (2015). *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Journal Law Reform*, 1(1).
- Rahardjo, Satjipto. (25 Februari 2006). *Meratapi Raju di Balik Jeruji*. Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (06 Juni 1975). *Yang tidak tahu dan Yang tidak punya dalam Hukum*. Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (1994). *Between Two Worlds: Modern State and Traditional Society in Indonesia*. *Law & Society Review*, 28(3).
- Budiman, Arief. (1 November 1991). *Kongres Kebudayaan 1991. Kebudayaan Sulit Di Bicarakan Tanpa Menyinggung Kapitalisme*. Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (8 Maret 1991). *Disiplin Nasional Rendah Karena Budaya Feodalisme dan ‘Tepo Seliro’*. Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (12 November 1991). *Hukum dalam Kongres Kebudayaan*. Kompas.

- Nelken, David. (2006). *Rethinking Legal Culture. Dalam Michael Freeman. Oxford University Press: Law and sociology*, 8, 3.
- Busch, Paul & Pekka J. Lathi. (1996). *The Standard Model of Quantum Measurement Theory: History and Applications. Foundations of Physics*, 26(7).
- Krach, Helge. (1992). *A Sense of History: History of Science and the Teaching of Introductory Quantum Theory. Kluwer Academic Publishers: Science & Education*, 1, 349-363.
- Bohm, D. (1971). *Quantum Theory as an Indication of a New Order in Physics. Part A. The Development of New Orders as Shown Through the History of Physics. Foundations of Physics*, 1(4).
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukuman Mati. Jurnal Legislasi*.
- Rahardjo, Satjipto Rahardjo. (8 Juni 2009). *Berhukum dengan Nurani. Kompas*.
- Lim, Merlyna. (2003). *The Internet, Social Network, and Reform in Indonesia*. 273-288.
- Lim, Merlyna. (2013). *Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia. Journal of Contemporary Asia*, 34, 636-657.
- Lim, Merlyna. (2017). *Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. Routledge Taylor & Francis Group: Critical Asian Studies*, 49(3), 411-427.
- Lim, Merlyna. (2011). *Facebook Nation: The Politics and Culture of Social Media in Indonesia. Usindo Brief A Publication of The United States-Indonesia*.
- Rahardjo, Satjipto. (25 Februari 2006). *Meratapi Raju di Balik Jeruji. Kompas*.
- Sloot, Bart van der. (2014). *Do data protection rules protect the individual and should they? An assessment of the proposed General Data Protection Regulation. International Data Privacy Law*, 4(4).
- Blume, Peter. (2014). *The Myths Pertaining to the Proposed General Data Protection Regulation. International Data Privacy Law*,

4(4), 269–273.

- Zhile, He, Huang Daoli, Lei Yunting. (2014). *The background and the international and domestic impact of general data protection regulation*. *Applied Mechanics and Materials*, 599-601, 2173-2177.
- Mantelero, Alessandro. (2013). *The EU Proposal for a General Data Protection Regulation and the Roots of the 'Right to Be Forgotten'* *Computer Law & Security Review*, 29(3), 229-235.
- Kolah, Ardi & Bryan Foss. (2015). *Unlocking the Power of Data under the new EU General Data Protection Regulation*. *Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice*, 16(40), 270-274.
- Ward, Ken. (2018). *Social Network, the 2016 US Presidential Election, and Kantian Ethics: Applying the Categorical Imperative to Cambridge Analytica's Behavioral Microtargeting*. *Journal of Media Ethics*, 33(3), 133-148.
- Kanakia, Hashil, Giridhar Shenoy & Jimit Shah. (2019). *Cambridge Analytica: A Case Study*. *Indian Journal of Science and Technology*, 12(29), 1-5.
- Siburian, Henry Kristian. (2016). *Emerging Issue in Cyber Crime: Case Study Cyber Crime in Indonesia*. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 5(11).
- Angkasa. (2018). *Legal Protection for Cyber Crime Victims on Victimological Perspective*. *SHS Web of Conference*, 58.
- Fahlevi, Muhammad, Mohammad Saparudin, Sari Maemunah, Dasih Irma, Muhammad Ekhsan. (2019). *Cybercrime Business Digital in Indonesia*. *E3S Web of Conf: Business Intelligence*, 125(21001).
- Bonnet, Francois and Clotilde Caillaault. (2015). *The Invader, the Enemy Within and They-who-must-not-be-named: how police talk about minorities in Italy, the Netherlands and France*, *Ethnic and Racial Studies*, 38(7), 1185-1201.
- Wacquant, Loïc. (2014). *Marginality, Ethnicity and Penalty in the Neo-Liberal City: An Analytic Cartography*. *Ethnic and Racial*

- Studies*, 37(10), 1687-1711.
- Menjivar, Cecilia & Cynthia L. Bejarano. (2004). *Latino Immigrants' Perceptions of Crime and Police Authorities in the United States*. *Ethnic and Racial Studies*, 27(1), 120-148.
- Moncada, Eduardo. (2010). *Counting Bodies: Crime Mapping, Policing, and Race in Colombia*. *Ethnic and Racial Studies*, 33(4), 696-716.
- Louie, Vivian. (2014). *Ethnicity Everywhere and Nowhere: A Critical Approach Towards Parsing Ethnic and Non-Ethnic Processes*. *Ethnic and Racial Studies*, 37(5), 820-828.
- Stanko, Elizabeth A. (2004). *Reviewing the Evidence of Hate Lessons from a Project Under the Home Office Crime Reduction Programme*. *Sage Publications*, 4(3), 277-286.
- Curtis, Bruce. (2008). *Domestication and Regulation of Online Gambling and Pornography*. *New Zealand Journal of Social Sciences Online*, 3(2), 85-86.
- De Sousa Santos, Boaventura. (2009). "If God Were a Human Rights Activist: Human Rights and the Challenge of Political Theologies," *Law, Social Justice & Global Development*, accessed on 14 March 2018.
- Kusuma, A.B & R.E. Elson. (2011). *A Note on the sources for the 1945 constitutional debates in Indonesia*. *Brijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 167(2-3).
- Rongiyati, Sulasi. (2019). *Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang melalui Sistem Elektronik*. *Negara Hukum*, 10(1).
- Hanim, Lathifah. (2014). *Dugaan Hukum Bagi Para Pihak dalam E-commerce sebagai Akibat dari Globalisasi Ekonomi*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2).
- Purnastuti, Losina. (2014). *Perdagangan Elektronik: Suatu Bentuk Pasar Baru yang Menjanjikan?* *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 1(1).
- Anjani, Margartha Rosa dan Budi Santoso. (2018). *Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Indonesia*. *Jurnal Law*

Reform, 14(1).

Meinarni, Ni Putu Suci dan Emmy Febriani Thalib. (2019). *Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(2).

Rahardjo, Satjipto. (2007). *Hukum Progresif Berdamai dengan Alam*. *Jurnal Hukum Progresif*, 3(2).

Feller, Joseph, Fob Gleasure, Stephen Treacy. (2017). *Information Sharing and User Behaviour in Internet-Enabled Peer-to-Peer Lending Systems: an empirical study*. *Journal of Information Technology*, 32(2), 1-20.

Fong, Adrian. (2015). *Regulation of peer-to-peer lending in Hong Kong: state of play*. *Law and Financial Markets Review*, 9(4), 251-259.

Larrimore, Laura, et al. (2011). *Peer to peer lending: the relationship between language features, trustworthiness & persuasion success*. *Journal of Applied Communication Research*, 39(1) 19-37.

Berkovich, Efraim. (2011). *Search and Herding Effects in peer-to-peer Lending: Evidence from Prosper.com*. *Springer Link: Annals Finance*, 7, 389-405.

Produk Hukum

Putusan Mahkamah Agung No. 882 K/ Pid.Sus/ 2010.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1269/ PID.B/ 2009/PN. TNG.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/ PUU-VI/ 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-VII/2009.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1022/ Pid. Sus/ 2018/ PN. JKT. TIM.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Report of Special Rapporteur to General Assembly on
Online Hate Speech Number A/ 74/ 486 of 2019.

Report of the Special Rapporteur to Human Rights Council
on Surveillance and Human Rights Number A/ HRC/
41/ 35 of 2019.

Report of the Special Rapporteur to the General Assembly
on Artificial Intelligence Technologies and Implications
for the Information Environment Number A/ 73/ 348/
2018.

Report of the Special Rapporteur to the Human Rights
Council on online content regulation Number A/
HRC/38/35 in 2018.

Report of the Special Rapporteur to the General Assembly
on access to information in international organizations
Number A/72/350 in 2017.

Report of the Special Rapporteur to the Human Rights
Council on the use of encryption and anonymity to
exercise the rights to freedom of opinion and expression
in the digital age Number A/HRC/29/32 in 2015.

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 432/ Pid. Sus/
2019/ PN BNA.

General Comment. No. 40 Human Rights Committee.
102nd session in Geneva on 11-29 July 2011.

Pengadilan Negeri Baubau No. 158/Pid.B/2017/PN. BAU.

Pengadilan Negeri Indragiri Hulu No. 345/ Pid.Sus/ 2018/
PN. RGT.

Pengadilan Tinggi Medan No. 8/ Pid.Sus/ 2019/ PT. MDN.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 142/ Pid.Sus/
2018/ PT. DKI.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 265/ Pid.Sus/
2017/ PN. MTR

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 990/ Pid.

- Sus/2018/PN. BJM.
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 350/Pid.Sus/2018/ PT. DKI.
- Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 132/ PID/ B/2012/ PN. PWK.
- Perdoman Pertahanan Siber, 2014. Kementerian Pertahanan.
- Chart of signature and ratification of treaty 185 Council of Europe.
- Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce).
- Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding).
- Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyampaian Informasi dan Penyelenggara Teknologi Finansial.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial.
- Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Internet

- Traynor, Ian. (2007). *Russia accused of unleashing cyberwar to disable Estonia*. Diakses pada 8 Juli 2019, dari <https://www.theguardian.com/world/2007/may/17/topstories3.russia>.
- Markoff, John. (2008). *Before the Gunfire, Cyberattacks*. Diakses pada 8 Juli 2019, dari <https://www.nytimes.com/2008/08/13/technology/13cyber.html>.
- Marwan, Awaludin. (2019). *Cyber Security and Cyber Crime in Indonesia*. Diakses dari <http://puskamnas.ubharajaya.ac.id/wp-content/uploads/2019/08/Cyber-Security-converted.pdf>.
- Badan Siber dan Sandi Negara. Diakses pada 28 Maret 2020, dari <https://honeynet.bssn.go.id/>.
- Wei, Wang. (2020). *Beware of ‘Coronavirus Maps’ – It’s a malware infecting PCs to steal passwords*. Diakses pada 27 Maret 2020, dari <https://thehackernews.com/2020/03/coronavirus-maps-covid-19.html?m=1>.
- Badan Siber dan Sandi Negara. Diakses pada 28 Maret 2020, dari <https://bssn.go.id/analisis-apk-android-coronavirus-apps-apk/>.
- Badan Siber dan Sandi Negara. Diakses pada 28 Maret 2020, dari <https://bssn.go.id/sms-worm-corona-safety-mask-apk-aplikasi-malicious-yang-memanfaatkan-momentum-kelangkaan-masker-sebagai-alat-pelindung-diri-terhadap-covid-19/>.
- Badan Siber dan Sandi Negara. Diakses pada 28 Maret 2020, dari <https://bssn.go.id/imbauan-keamanan-data-dan-sistem-elektronik-pendukung-penanganan-covid-19-bagi-penyelenggara-sistem-elektronik/>.
- Badan Siber dan Sandi Negara. Diakses pada tanggal 28 Maret 2020, dari <https://bssn.go.id/coronavirus-ransomware/>.

Diakses pada 10 Mei 2020, dari <https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data>.

Kuneva, Maglena. (2009). *Meglana Kuneva - European Consumer Commissioner - Keynote Speech - Roundtable on Online Data Collection, Targeting and Profiling*. Diakses pada 10 Mei 2020, dari https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_09_156.

Diakses pada 10 Mei 2020, dari <https://energybit.co/>.

As face-recognition technology spreads, so do ideas for subverting it. Diakses pada 11 Mei 2020, dari <https://www.economist.com/science-and-technology/2019/08/15/as-face-recognition-technology-spreads-so-do-ideas-for-subverting-it>.

Golden Data Law. (2019). *Facebook Fan Pages: Liability of co-controllers*. Diakses pada 21 Mei 2020, dari <https://medium.com/golden-data/facebook-fan-pages-liability-of-co-controllers-2a23e7ecd3a9>.

Golden Data Law. (2019). *Case study: Google's €50 million GDPR fine*. Diakses pada 1 Agustus 2020, dari <https://medium.com/golden-data/case-study-googles-50-million-gdpr-fine-5e43946793c2>.

Golden Data Law. (2019). *The "right to be forgotten" and global de-linking*. Diakses pada 22 Mei 2020, dari <https://medium.com/golden-data/google-global-de-linking-aee8b5d61026>.

Akbar, Caesar. (2020). *Data Tokopedia Diduga Bocor, Ini Risikonya Bagi Pengguna*. Diakses pada 22 Mei 2020, dari <https://bisnis.tempo.co/read/1338133/data-tokopedia-diduga-bocor-ini-risikonya-bagi-pengguna>.

Threatpost. Diakses pada 23 Mei 2020, dari <https://threatpost.com/report-microsofts-github-account-gets-hacked/155587/>.

- BBC News Indonesia. (2019). *Data KTP elektronik diserahkan ke lebih 1.200 lembaga pemerintah dan swasta, bagaimana upaya menjamin privasi?*. Diakses pada 23 Mei 2020, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49103924>.
- Stephanie, Conney. (2020). *Data Diduga Bocor, KPU Sebut Informasi yang Disebar Hacker Bersifat Terbuka*. Diakses pada 23 Mei 2020, dari <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/22/10093057/data-diduga-bocor-kpu-sebut-informasi-yang-disebar-hacker-bersifat-terbuka>.
- Cyber Crime Magazine. Diakses pada 24 Mei 2020, dari <https://cybersecurityventures.com/movies-about-cybersecurity-and-hacking/>.
- Tempo.co. (2004). *Penjebol Situs KPU Divonis 6 Bulan Penjara*. Diakses pada 24 Mei 2020, dari <https://nasional.tempo.co/read/53570/penjebol-situs-kpu-divonis-6-bulan-penjara>.
- Mys. (2004). *Hacker KPU Dituntut Membayar Denda 10 Juta*. Diakses pada 24 Mei 2020, dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11541/ihackeri-kpu-dituntut-membayar-denda-10-juta?page=all>.
- Redaksi. (2019). *Dari 47 Ribu, Baru 2.700 Media Online Terverifikasi Dewan Pers*. Diakses pada 15 Juni 2020, dari <https://www.amsi.or.id/dari-47-ribu-baru-2-700-media-online-terverifikasi-dewan-pers/>.
- Zafna, Grandyos. (2018). *Jonru divonis hukuman penjara 1,5 tahun, terbukti sebar kebencian dan permusuhan*. Diakses pada 28 Juni 2020, dari <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43252349>.
- Haryanto, Alexander. (2017). *Tudingan Jonru terhadap Jokowi Berujung Pidana*. Diakses pada 28 Juli 2020, dari <https://tirto.id/tudingan-jonru-terhadap-jokowi-berujung-pidana-cvJC>.
- Farouk, Yazir. (2019). *Deretan Kasus Ahmad Dhani hingga*

- Berujung Bui*. Diakses pada 4 Juli 2020, dari <https://www.suara.com/entertainment/2019/12/30/125625/deretan-kasus-ahmad-dhani-hingga-berujung-bui>.
- Columbus, Louis. (2019). *Top 10 Cybersecurity Companies To Watch In 2019*. Diakses pada 1 Januari 2019, dari <https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2019/06/16/top-10-cybersecurity-companies-to-watch-in-2019/#7038a80e6022>.
- Columbus, Louis. (2019). *Top 10 Most Popular Cybersecurity Certifications In 2019*. Diakses pada 8 Februari 2020, dari <https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2019/08/28/top-10-most-popular-cybersecurity-certifications-in-2019/#7094166f360e>.
- Fauzia, Mutia. (2019). *Jokowi Terbitkan PP E-Commerce, Berikut Rinciannya*. Diakses pada 14 September 2020, dari <https://money.kompas.com/read/2019/12/04/142234326/jokowi-terbitkan-pp-e-commerce-berikut-rinciannya?page=all>.
- Ulya, Fika Nurul. (2019). *Bukalapak: Butuh Waktu 2 Tahun Implementasikan Peraturan E-Commerce*. Diakses pada 14 September 2020, dari <https://money.kompas.com/read/2019/12/11/105200426/bukalapak--butuh-waktu-2-tahun-implementasikan-peraturan-e-commerce>.
- Safitri, Kiki. (2019). *Ada PP E-commerce, Teten Sebut UMKM Akan Dapat Kemudahan Izin Usaha*. Diakses pada 14 September 2020, dari <https://money.kompas.com/read/2019/12/27/120900726/ada-pp-e-commerce-teten-sebut-umkm-akan-dapat-kemudahan-izin-usaha>.
- Ulya, Fika Nurul. (2019). *Mendag: Pengajuan Izin Pedagang E-Commerce Tidak Dipungut Biaya Sepeserpun*. Diakses pada 14 September 2020, dari <https://money.kompas.com/read/2019/12/09/132417026/mendag-pengajuan-izin-pedagang-e-commerce-tidak-dipungut-biaya-sepeserpun>.

- CAT, CT. (2019). *Ketika Significant Economic Presence Tidak Sesuai dengan PP 80/2019*. Diakses pada 14 September 2020, dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5df7411a41e44/ketika-significant-economic-presence-tidak-sesuai-dengan-pp-80-2019?page=2>.
- Fauzia, Mutia. (2019). *Sopir Taksi Bunuh Diri Karena Pinjaman Online, Ini Kata OJK*. Diakses pada 4 September 2020, dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/13/180153926/sopir-taksi-bunuh-diri-karena-pinjaman-online-ini-kata-ojk>.
- Bank Indonesia. Diakses pada 4 September 2020, dari <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/contents/transaksi.aspx>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Statistik Fintech Lending Periode April 2020*. Diakses pada 4 September 2020, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Bulan-April-2020.aspx>.
- Rahardyan, Aziz. (2020). *Salurkan Rp84,5 Miliar, Ini Jurus Fintech Santara Gaet Investor di Masa Pandemi*. Diakses pada 5 Desember 2020, dari <https://finansial.bisnis.com/read/20200818/89/1280493/salurkan-rp845-miliar-ini-jurus-fintech-santara-gaet-investor-di-masa-pandemi>.
- Siaran Pers Satgas Waspada Investasi Hentikan Kegiatan 231 Fintech Peer to Peer Lending Ilegal, 13 Februari 2019.
- Afriyadi, Achmad Dwi. (2020). *Ngerinya Terjerat Pinjol Ilegal: Diminta Foto Bugil!.* Diakses pada 7 September 2020, dari <https://finance.detik.com/fintech/d-4873881/ngerinya-terjerat-pinjol-ilegal-diminta-foto-bugil>.
- Laucereno, Sylke Febrina. (2019). *Parah! Masih Ada Debt Collector Pinjol yang Minta Foto Bugil*. Diakses pada 7 September 2020, dari <https://finance.detik.com/berita->

ekonomi-bisnis/d-4748318/parah-masih-ada-debt-collector-pinjol-yang-minta-foto-bugil.

Ghost Parade. Diakses pada 3 Oktober 2020, dari <https://ghost-parade.com/>.

Materi Kuliah, Seminar, Wawancara, Diskusi, dan lainnya

Rahardjo, Satjipto. (3 Januari 2009). *Berpikir tentang Hukum*. (Bacaan mata kuliah ilmu hukum dan teori hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro No. 32).

Rahardjo, Satjipto. (8 September 2009). *Berpikir non-Linier dalam Hukum*. (Bacaan mata kuliah ilmu hukum dan teori hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro No. 35).

Rahardjo, Satjipto. (8 April 2008). *Berpikir dalam Hukum*. (Bacaan mata kuliah ilmu hukum dan teori hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro No. 32).

Rahardjo, Satjipto. *Sisi Lain Kejahatan*. 19 September 1991. Dalam sebuah seminar pada tanggal 4-5 Maret 1991 di Gedung Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial UI.

Oleh Penulis, 28 Juli 2019, Wawancara dengan I Gede Wiranata.

Rahardjo, Satjipto. (11 Agustus 2003). *Indonesia Tidak Ingin Ambruk*. File kumpulan tulisan dan draft yang pernah ditulis oleh Almarhum Satjipto Rahardjo yang tidak dirilis oleh Kompas.

Rahardjo, Satjipto. (29 April 2003). *Hukum dan Budaya Hukum*. Makalah dalam sebuah kuliah di Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.

Rahardjo, Satjipto. (22 Mei 2007). *Budaya Hukum Sebagai Kekuatan Alternatif*. Artikel yang ditulis oleh Satjipto

- Rahardjo.
- Makarim, Edmon. (2019). *Imperialisme Digital*. Disampaikan dalam sebuah seminar pembaharuan hukum siber pada 12 April 2019.
- Rahadjo, Satjipto. (2007). *Arsenal Hukum Progresif*.
- Rahardjo, Satjipto. *Menguji Batas Kemampuan Hukum*. Artikel yang dikirim oleh Prof Tjip ke Kompas, yang besar kemungkinan tidak terpublikasi.
- Rahardjo, Satjipto. (10 juli 2007). *Sekitar Hakim yang Memutuskan*. Bahan Bacaan untuk Mahasiswa Program Doktor dalam Mata Kuliah Ilmu dan Teori Hukum No. 19.
- Rahardjo, Satjipto. (15 Desember 2000). *Mengajar Keteraturan Menemukan Ketidak-teraturan*. Pidato terakhir jabatannya di UNDIP Tahun 2000.
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-432/TNG/05/2009, pada tanggal 20 Mei 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Pendidikan Hukum Indonesia di Tengah-Tengah Pancaroba*.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Pengetahuan dalam Lanskap Ilmu Pengetahuan. Sebuah Risalah tentang Interaksi Antara Ilmu Hukum dengan Disiplin-Disiplin di Luarnya dan Ilmu Pengetahuan pada Umumnya*.
- The ULD appealed on a point of law to the Bundesverwaltungsgericht (Federal Administrative Court, Germany).
- Risalah Dewan Pers antara Kompas.com vs Asosiasi Pilot Lion Group pada tanggal 21 Juli 2016.
- Risalah Dewan Pers atas Detik.com pada Surabaya 2 Februari 2016.
- Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers No: 01/ PPR-DP/ I/ 2019.

- Siburian, Hinsu. (12 Agustus 2019). Sambutan Kepala BSSN, pada Acara Diskusi Publik dan SIMposium Nasional RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Tahun 2019.
- Makarim, Edmon. (12 Agustus 2019). *Kedaulatan Negara dalam Keamanan dan Ketahanan Siber*. Disampaikan pada Acara Diskusi Publik dan SIMposium Nasional RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Tahun 2019.
- Susaty, Bambang. (12 Agustus 2019). *Peran Legislatif Dalam Mendukung Keamanan dan Ketahanan Siber*. Disampaikan pada Acara Diskusi Publik dan SIMposium Nasional RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Tahun 2019.
- K, Artedi Sutedja. (7 Agustus 2019). *Peran 'Multi-stakeholders' di dalam mendukung Keamanan dan Ketahanan Siber Nasional*. Di sampaikan dalam sebuah acara diskusi publik.
- Djafar, Wahyudi. (7 Agustus 2019). *Dilema Keamanan dan Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Keamanan Siber*. Di sampaikan dalam sebuah acara diskusi publik.
- Fritriani. (7 Agustus 2019). *Diplomasi Siber*. Di sampaikan dalam sebuah acara diskusi publik.
- Rahardjo, Satjipto. (22 Mei 2008). *Hukum dan Kemiskinan. Pokok-Pokok Pikiran*. Disampaikan pada Diskusi Komisi Sosial AIPI dengan akademisi UNDIP Semarang.
- Oleh Penulis, Wawancara dengan Azizah CEO dan Founder Ghost Parade.
- BEKRAF dan BPS. (2017). Infografis Ringkasan Data Statistik Ekonomi Kreatif di Indonesia.
- BEKRAF dan BPS. (2017). Infografis Sebaran Pelaku Ekonomi Kreatif di Indonesia.



PENGURUS CABANG ISTIMEWA

Nahdlatul Ulama

BELANDA

<https://nubelanda.nl>



Heylaw



Dr. Awaludin Marwan adalah dosen Fakultas Bhayangkara Jakarta Raya dan Founder startup teknologi pendidikan hukum, bernama HeyLaw. Ia menamatkan *Master of Art* di bidang sosiologi hukum pada *Instituto International de Sociologia Juridia, the University of the Basque Country*, Spanyol dan mendapatkan gelar PhD (Doktor Hukum) dari *Universiteit Utrecht*, Belanda. Ia juga aktif dalam perkumpulan akademisi pada Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) dan ikut mendirikan Asosiasi Dosen Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (ADHTIK). Tulisannya banyak tersebar di berbagai jurnal, media dan publikasi ilmiah maupun populer lainnya.

“Apresiasi atas terbitnya buku yang dapat memberikan pencerahan bagi pembaca terutama generasi pemikir hukum untuk peradaban negara hukum Indonesia menuju masa depan. Menurut Saudara Awaludin, buku ini terinspirasi dari buku saya tentang *Green and Blue Constitution*. Ia menulis hukum dan teknologi, sebagai aspek teknis dan penjabaran teknis dari pemikiran saya. Saya rasa, ia cukup berhasil dalam buku ini yang dirakitnya dari pemikiran hukum progresif. SELAMAT membaca,” Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. (Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008)

“Berbagai macam teknologi digital pada masa pandemic semakin tumbuh kembang. Kemajuan inovasi dan teknologi seperti kecerdasan artifisial, metaverse, blockchain, Internet of Things, quantum computing dan masih banyak lagi perlu dipersiapkan kebijakan dan pedoman etika yang memadai. Buku ini bisa menjadi alternatif berkontemplasi soal masa depan pengaturan di bidang teknologi digital ini,”

Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D. (Menteri Keuangan (2014-2016), Kepala Bappenas (2016-2019), dan Menteri Ristek (2019-2021)

Thafa Media

Jl. Srandakan Km 8,5 Gunungsaren Kidul
Trimurti, Srandakan, Bantul, Yogyakarta 55762
Phone: 08122775474, 082138313202
Email: thafamedia@yahoo.co.id

